

**Kapitalisme Global:
Kritik Ekonomi Strukturalis dan Islam**

Handi Risza

07.3.00.1.08.08.0072

Promotor:

**Prof. Dr. Sri-Edi Swasono
Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA.**

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2011**

Halaman Judul,	i
Kata Pengantar,	iii
Pernyataan Bebas Plagiasi,	v
Persetujuan Promotor	i, vii
Persetujuan Promotor	ii, ix
Abstrak Indonesia, Inggris, dan Arab,	xi
Pedoman Transliterasi Arab-Latin,	xvii
Daftar Isi,	xix
Daftar Tabel, Gambar dan Grafik,	xxiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Masalah.....	17
1. Identifikasi Masalah.....	17
2. Pembatasan Masalah.....	18
3. Perumusan Masalah.....	19
4. Pertanyaan Penelitian.....	20
5. Hipotesis.....	21
C. Penelitian Terdahulu yang Relevan	21
D. Tujuan Penelitian.....	27
E. Manfaat / Signifikansi Penelitian	27
F. Metodologi Penelitian.....	28
1. Metode Penelitian.....	28
2. Sumber Data.....	29
3. Pendekatan.....	30
4. Teknik Pengolahan Data.....	31
G. Sistematika Penulisan.....	31

BAB II. KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI DI ANTARA TIGA PANDANGAN

A. Cara Pandang Terhadap Paradigma Ekonomi dan Asumsi Dasar Ilmu Ekonomi.....	37
B. Pembangunan Ekonomi dan Dampak yang Ditimbulkannya.	50
C. Menata Kembali Pembangunan Ekonomi.....	55
D. Pendekatan Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi..	60

BAB III. KAPITALISME EKONOMI DALAM GLOBALISASI DAN PENGARUH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI

A. Kapitalisme dan Liberalisasi Ekonomi.....	68
B. Kegagalan Teori Ekonomi Pembangunan Negara Dunia Ketiga.....	79
C. Lemahnya Pembangunan Sumberdaya Manusia	85
D. Eksploitasi Sumber Daya Alam yang Tidak Seimbang.....	88
E. Pola Hubungan Ekonomi dan Sosial yang Tidak Adil.....	91
F. Kemiskinan, Pengangguran dan Distribusi Pendapatan	92
G. Krisis Ekonomi dan Keuangan Internasional.....	96
H. Kegagalan Ekonomi Kapitalis.....	104

BAB IV. KETIMPANGAN STRUKTURAL: PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN

A. Ekonomi Pasar Bebas Menuju Ketimpangan Struktural.....	113
B. Ketimpangan Hubungan Struktural Antara Pelaku Pasar.....	120
C. Kondisi Pasar (Ritel) Secara Umum.....	123
D. Kerangka Penelitian.....	129
1. Komoditas yang Dijual.....	131
2. Pelanggan Pasar Tradisional.....	133
3. Tingkat Persaingan	135
4. Pemasok Barang	136
5. Sumber Modal Usaha.....	136
6. Penyebab kelesuan Usaha	138
7. Volume Penjualan Pedagang Pasar Tradisional	139
8. Keuntungan Bersih Pedagang Pasar Tradisional.....	141
9. Alokasi Anggaran Kebutuhan Hidup.....	143
10. Alokasi Anggaran Untuk Tabungan	145
11. Jumlah Karyawan yang Dimiliki.....	146
12. Pedagang Pasar Tradisional.....	148
13. Keberadaan Koperasi Bagi Pedagang Pasar Tradisional....	148

BAB V MENUJU TRANSFORMASI EKONOMI

A. Membangun Kembali Paradigma Dasar Ilmu Ekonomi.....	152
1. Tujuan Hidup.....	159
2. Rasionalitas Dalam Ekonomi.....	162

3. Tujuan Positif dan Normatif.....	164
4. Cara Pandang Terhadap Dunia	167
5. Manusia Sebagai Dasar dan Tujuan.....	171
6. Ruang Lingkup.....	174
7. Model Pembangunan Dalam Perspektif Islam.....	180
8. Sistem Distribusi Sosial dan Ekonomi.....	188
9. Sistem Keuangan yang Berbasis Kepada Etika Moral.....	197
B. Transformasi Ekonomi dan Sosial.....	206
1. Mempercepat Transformasi Ekonomi dan Sosial.....	211
C. Strategi Penerapan Transformasi Ekonomi-Sosial.....	220
1. Kembali Kepada Demokrasi Ekonomi.....	220
2. Restrukturisasi Ekonomi.....	223
3. Strategi dan Kebijakan Pembangunan.....	228
D. Titik Temu Ekonomi Islam dalam Konstitusi Negara	234
1. Fokus Penerapan Ekonomi Islam dalam Perekonomian	234
2. Konsepsi Ekonomi Pancasila dan UUD 1945	238
3. Titik Temu dan Paradigma Baru Ilmu Ekonomi	242

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	242
B. Saran	247

Daftar Pustaka	250
Glossary	262
Indeks	272

KATA PENGANTAR

Perkembangan Ilmu ekonomi yang berbasis kepada paham ekonomi neoklasikal telah mempengaruhi proses pembangunan ekonomi diseluruh dunia. Hampir semua fakultas ekonomi diseluruh dunia merujuk kepada buku teks yang berbasis kepada paham ekonomi neoklasikal tersebut. Semenjak Adam Smith menulis buku *Wealth of Nation* pada tahun 1776, ilmu ekonomi berkembang untuk mengejar kepuasan individu (maximum satisfaction) dan keuntungan maksimal (maximum profit), dengan menggunakan pendekatan mekanisme pasar dengan institusi pasar bebas. Dampaknya adalah penguasaan harta kekayaan masyarakat dunia hanya berada ditangan negara maju, sementara pemilik kekayaan alam ada di negara berkembang bahkan negara misin sekalipun. Kondisi ini hanya akan memperkaya para kapitalis yang menguasai sumberdaya ekonomi. Kondisi inilah yang kemudian dikenal dengan istilah globalisasi ekonomi.

Kondisi perekonomian tersebut tidak bisa dibiarkan terus-menerus, harus ada terobosan pemikiran dan struktural untuk melakukan transformasi paham ilmu ekonomi dari paham neoklasikal kepada ekonomi yang lebih berkeadilan. Generasi peraih nobel seperti, Josep Stiglitz, Edmund Phelps, Eric Maskin, Loenid Hurwicz, Roger Myerson, Paul Krugman, Elinor Ostrom dan George Akerlof. Dari tanah air ada nama, Bung Hatta, Sritua Arief, Mubyarto dan Sri Edi Swasono, yang terus menyuarakan dan menyampaikan gagasan mengenai perbaikan dan oreksi terhadap paham neoklasikal ekonomi.

Disertasi ini mencoba merekonstruksi paradigma dan asumsi dasar yang dibangun oleh neoklasikal dengan menggunakan pendekatan ilmu ekonomi Islam, yang memiliki kekuatan dalam nilai-nilai moral dan etika kemanusiaan, sedangkan dari sisi kebijakan strukturalnya banyak menggunakan pendekatan ekonomi struktural. Sehingga nantinya negara-negara berkembang mampu menyadari kekeliruan mereka dalam memandang globalisasi ekonomi, sehingga bisa mengantisipasi dan menghadapinya.

Irisan cara pandang terhadap sistem ekonomi antara pandangan Ekonomi strukturalis dan Ekonomi Islam, terdapat dengan sangat elok dalam dasar-dasar kebijakan ekonomi nasional seperti yang tertuang dalam pasal 33, 34 dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, perkembangan ekonomi Islam ditengah-tengah masyarakat hendaknya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemahaman terhadap demokrasi ekonomi yang sudah disusun secara baik oleh para pendiri bangsa.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah berjasa dan mendorong penulisan disertasi ini, sehingga bisa selesai. Kepada Allah SWT mohon ampun atas segala kekhilafan dan kesalahan yang penulis lakukan selama penulisan disertasi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Sri-Edi Swasono dan Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA. atas bimbingan penulisan disertasi ini. Berkat bimbingan tersebut disertasi ini menjadi sangat baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Prof. Dr. Sri-Edi Swasono yang telah bersedia menjadi pembimbing dan memberikan perhatian khusus kepada penulis dalam mematangkan hasil disertasi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Suwito, MA., Dr. Fuad Jabali, MA., dan Dr. Yusuf Rahman, MA. atas kritik dan koreksi dalam work in progress. Kritik dan koreksi tersebut telah meningkatkan kualitas disertasi ini. Penulis juga berterima kasih kepada Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA. Atas perhatian beliau kepada kami untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini. Patut diakui bahwa peran beliau yang sangat aktif dalam memimpin Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta telah berhasil mencetak penulis-penulis disertasi yang bermutu tinggi.

Perhatian khusus mengenai disertasi ini telah diberikan pula oleh Prof. Dr. Soegiharto, beliau tidak sungkan-sungkan memberikan kritik yang membangun terhadap isi disertasi ini. Atas kebaikan beliau tersebut, penulis mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Sukron Kamil atas saran beliau tentang metode dan cara teknik yang lebih baik, serta masukan beliau tentang konsep dan ide-ide tentang kapitalisme. Saran tersebut telah penulis penuhi sebaik mungkin. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Abdul Hamid, MA. Atas berbagai saran dan koreksi beliau. Saran dan koreksi beliau tersebut semakin mematangkan kualitas disertasi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orangtua penulis yakni Ayahanda (Alm) H. Idris Nurdin dan Ibunda Hj. Darmiza atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis. Dukungan dan motivasi tersebut telah memberikan semangat yang luar biasa bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada istri tercinta Drg. Dela Amelia atas kebaikan dan ketulusannya mendampingi penulis. Dua buah hati, bidadari ku Maryam Hafizha Hanun dan Asma Lathifa Hayyan, Kehadirannya di sisi penulis selalu

menciptakan keceriaan yang luar biasa. Rasa hormat dan ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua mertua penulis yakni ayahnda H. Edwar Ujang dan ibunda Hj. Darmayeti, perhatian mereka kepada penulis sangat luar biasa. Penulis juga berterima kasih kepada semua famili tercinta atas dukungan yang telah diberikan. Dukungan mereka tersebut telah membuat hari-hari penulisan disertasi ini semakin berarti.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pimpinan dan semua pegawai Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta yang telah memberikan layanan yang sangat baik. Layanan yang sangat baik tersebut memberikan kenyamanan tersendiri bagi penulis. Kepada teman-teman mahasiswa Program Beasiswa S3 Ekonomi Islam tahun 2007, penulis ucapkan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas berbagai bantuan dan saran. Kebaikan mereka tersebut telah memperkaya catatan-catatan penting disertasi ini.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Departemen Agama RI atas beasiswa yang telah diberikan kepada penulis. Bagi penulis, beasiswa tersebut merupakan berkah yang sangat besar. Penulis berharap semoga program beasiswa seperti ini terus berlanjut sehingga dapat memajukan pendidikan tinggi agama Islam di Indonesia, dan penulis berkomitmen untuk turut serta memajukan perguruan tinggi agama Islam tersebut, khususnya di bidang studi ekonomi Islam.

Semoga kebaikan semua orang yang penulis sebutkan di atas diterima oleh Allah SWT. dan menghadirkan keberkahan bagi mereka. Amin yâ Rabb al- ‘Âlamîn.

Jakarta, 18 Agustus 2012

Handi Risza

ABSTRACT

This dissertation proves that in the Islamic economic thought and structuralist discourse, the idea of economic and social transform is very strong, in the mean time, there is a lot of criticisms and corrections towards neoclassical economic thought. The idea of transformation is needed to re-establish economic credos and thoughts that put forward moral values and humanitarian system of ethics in the quest of economic justice and prosperity. Moreover, it is necessary to rectify the neoclassical economic thought since it has deviated far from moral values and humanitarian system of ethics, and in consequence, creating structural imbalances and socio-economic problems. Indicators that show the soundness of the proposition are: firstly, there are factual extreme socio-economic discrepancies between developed and developing countries; secondly, they are in harmony with structuralists' economic thought; and thirdly, they are also in harmony with the stance of the majority of contemporary Moslem economists.

The conclusion of this dissertation supports the views that have been proposed by Mohammad Hatta, Sritua Arif, Mubyarto, Sri-Edi Swasono, Monzer Kahf, Umer Chapra, Muhammad Anas Zarqa', Josep Stiglitz, Robert Kuttner, Lester Thurow, George Soros, that there is an urgent need of social and economic transformation in order to establish social justice and economic prosperity. The conclusion is also a refutation to the views developed by neoclassical economic thinkers, who based their views on individual interest and free competition to realize prosperity and justice for the society.

The main sources used in this dissertation are general and contemporary Islamic economics books which discuss about the failure of neoclassical economic thought and the urgent need of a reformation in current economic thought, such as, *The End of Laissez-Faire: National Purpose and The Global Economy After The Cold War*, *History of Economic Analysis*, *The History of Money From Ancient time of Present Day*, *Economics Philosophy*, *Globalization and its Discontents*, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, *Ekspose Ekonomika*, *Neoliberalisme dan Krisis Ekonomi*. Those books were written in modern time by structural as well as Islamic economists. All of the analysis and thoughts related to the criticisms towards neoclassical thought and the idea of socio-economic transformation have been written systematically by seeking the similarity among ideas and concepts so that they can be constructed into an economic approach that put forward moral values and humanitarian system of ethics.

BAB I PENDAHULUAN

H. Latar Belakang Masalah

Umer Chapra dalam bukunya *The Future of Economics: an Islamic Perspective* mengungkapkan kegagalan ilmu ekonomi konvensional yang berbasis kepada ekonomi neoklasikal dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Lebih jauh Chapra mengungkapkan bahwa, ekonomi konvensional menjauhi pendekatan yang berdasarkan norma, dan konsentrasinya yang berlebihan pada maksimalisasi kekayaan, pemuasan keinginan serta pemenuhan kebutuhan perorangan¹. Lambat laun kondisi tersebut akan terakumulasi dalam sikap dan kebijakan ekonomi, yang hanya mementingkan kaum pemilik modal semata, sehingga orang berlomba-lomba untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkannya.

Tidak bisa dipungkiri kekayaan hanya berputar pada segelintir orang saja, yang kemudian menimbulkan jurang yang sangat lebar antar individu, antar masyarakat, kemudian menjadi antar negara. Kondisi tersebut kemudian menjadi masalah ekonomi dan sosial. Ekonomi Islam melalui norma dan nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an telah memberikan peringatan, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Hashr ayat:7². Demikian pula disusun agar tidak terjadi

¹ Lihat: Umer Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective* (Leicester UK: Islamic Foundation, 2001), 24.

² Surat Al-Hashr ayat 7

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ قَلِيلًا وَإِلَىٰ رَسُولٍ وَإِلَىٰ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَنْ يَتَّبِعُوا الْحَدِيثَ الَّذِي نَزَّلْنَا بِبَيْنِ الْأَعْيُنِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya berbunyi: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (Al-Hashr: 7)

konsentrasi penguasaan (tidak boleh terjadi pemonopolian) terhadap sumber-sumber kekayaan karena “...kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya...” (Al-Maidah, ayat 120). Dan “...sungguh, orang muslim hanya satu dalam persaudaraan...” (Al-Hujurat, ayat 10). Demikian pula Tuhan tidak menghendaki penguasaan harta secara mutlak, maka Tuhan berfirman “...celakalah yang menimbun harta dan menghitung-hitungnya...” (Al-Humazah, ayat 2).

Khurshid Ahmad dalam bukunya *Studies in Islamic Economics* memaparkan bahwa pengaruh pandangan ekonomi neoklasikal tersebut, ilmu ekonomi telah bergerak jauh dan semakin jauh dari akar filosofi dan etikannya, dan telah menjadi sebuah jaringan hubungan mekanis yang rentan terhadap perangkat kuantifikasi dan prediksi. Efisiensi dan penumpukan kekayaan menjadi konsep utama³. Oleh sebab itu pertimbangan keadilan dan kesejahteraan, tidak lagi menjadi acuan dalam pengambilan keputusan.

Tidak bisa dipungkiri, krisis keuangan yang berujung kepada krisis ekonomi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan ilmu ekonomi yang berbasiskan kepada pandangan ekonomi neoklasikal. Seperti yang disampaikan Joseph Schumpeter dalam bukunya *History of economic Analysis* bahwa ilmu ekonomi yang berbasis kepada pencarian kapital semata telah menciptakan suatu kerangka pikiran rasional, dimana telah menghancurkan otoritas moral dan begitu banyak lembaga, pada akhirnya akan menghancurkan ilmu ekonomi itu sendiri⁴.

Analisa yang pernah disampaikan oleh Schumpeter tersebut, diteruskan oleh Joseph Stiglitz dan Bruce Greenwald dalam bukunya *Towards A New Paradigm in Monetary Economics* sudah memprediksi akan munculnya krisis keuangan yang mengarah kepada krisis ekonomi global, akibat dari tidak terkontrolnya transaksi keuangan dalam bentuk *terms of credit dan quantity of credit*⁵. Terbukti, Krisis

³ Lihat: Khurshid Ahmad, *Studies in Islamic Economics* (Leicester UK: The Islamic Foundation, 1981), 30.

⁴ Joseph Schumpeter, *History of economic Analysis* (New York: Oxford, University Press, 1972), 305.

⁵ Beberapa analisis mengenai *great depression* pada tahun 1929. Keynes menekankan pada faktor permintaan agregat. Fisher menyatakan bahwa esensi depresi adalah jatuhnya uang bank dari \$22 milyar pada 1929 menjadi \$14 milyar pada 1933 dan “esensi pemulihan” antara 1933-1937 adalah ekspansi uang bank

keuangan yang melanda dunia internasional khususnya di AS (Amerika Serikat) dan Eropa kini terus mengguncang perekonomian global. Trauma akan krisis ekonomi AS di tahun 1929 yang sering disebut *great depression* kembali menghantui. Krisis finansial AS yang dengan cepat berubah menjadi krisis global, telah menjadi krisis terburuk sejak Great Depression 1929.

Washington Post dalam artikelnya *Timeline: Crisis on Wall Street* menulis setelah kejatuhan pasar saham pada Oktober 1929, AS membutuhkan waktu lebih dari tiga tahun untuk memulihkan perekonomian yang turun sepertiga outputnya, dengan 25 persen tenaga kerja menjadi pengangguran⁶. Kini, kejadian *Great Depression*, seakan akan terulang kembali, di mana banyak saham-saham yang menjadi maskot Wall Street berguguran. Apalagi perusahaan sekelas Lehman Brothers, AIG dan Washington Mutual menyatakan kebangkrutan.

Efek domino dari krisis ekonomi dan finansial di Amerika Serikat telah merambah ke negara-negara di Eropa dan Asia⁷ Perusahaan-perusahaan raksasa multi nasional banyak jatuh ambruk,

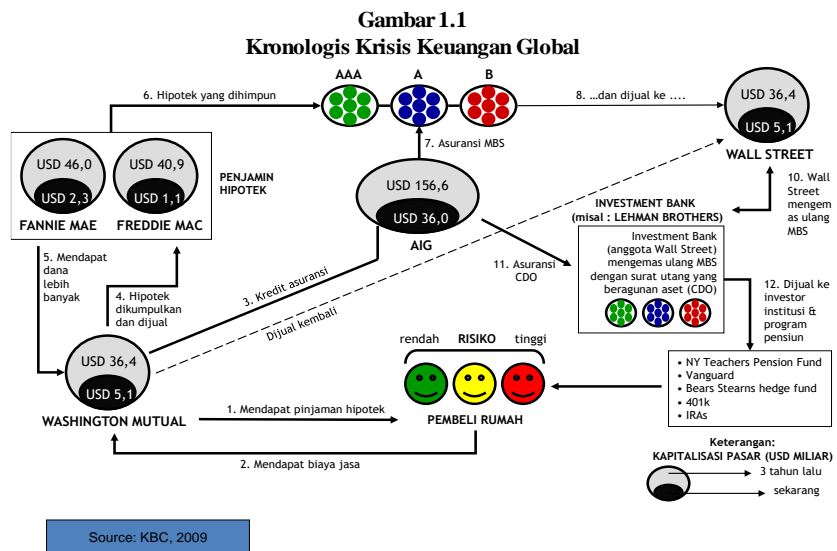
menjadi \$23 milyar. Penjelasan ambruknya perbankan dan jatuhnya uang beredar sebagai penyebab terpenting *great depression* dikuatkan Friedman dan Schwartz. Hampir 70 tahun kemudian, Stiglitz dan Greenwald mempertegas hal ini bahwa yang mempengaruhi aktivitas ekonomi adalah *terms of credit* dan *quantity of credit*, bukan *quantity of money*. Joseph Stiglitz dan Bruce Greenwald, *Towards A New Paradigm in Monetary Economics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 38.

⁶ Sebagian besar media –media besar di Amerika Serikat menuding perilaku para manajer dan pemilik perusahaan –perusahaan besar yang hanya memikirkan kekayaan mereka saja, tidak peduli dengan kondisi perekonomian yang sangat terbebani akibat ulah mereka. Praktek dan perilaku apapun dilakukan untuk tetap menjadikan perusahaan mereka baik. Puncaknya adalah ketika perusahaan sekelas Lehman Brothers, AIG dan Washington Mutual menyatakan kebangkrutan. The Washington Post. *Timeline: Crisis on Wall Street*. (Diakses 10 Januari 2011), <http://www.washingtonpost.com>.

⁷ Salah satu penyebab utama dari krisis mata uang di zona euro adalah bahwa hampir semua negara yang terlibat melanggar peraturan yang telah disepakati dalam zona euro, di mana, berdasarkan kriteria konvergensi yang merupakan bagian dari kesatuan ekonomi dan moneter, utang pemerintah tidak boleh melebihi 60% dari PDB pada akhir tahun fiskal (*debt to GDP ratio*). Demikian pula dengan defisit tahunan pemerintah, disepakati tidak boleh melebihi 3% dari PDB. Bloomberg. *Europe Crisis Timeline: Maastricht to Papandreou*. (Diakses 6 Januari 2011), <http://www.bloomberg.com>.

bank-bank internasional dan pemerintahan di berbagai negara di dunia mengucurkan dana dalam jumlah besar ke pasar uang untuk meredakan guncangan krisis.

Intervensi juga dilakukan berbagai negara yang terkena dampak terbesar krisis *subprime mortgage*⁸. Bradford & Bingle dinasionalisasi oleh pemerintah Inggris, Fortis diambil alih pemerintah Belgia, Belanda dan Luksemburg, dan pengambilalihan Glitnir Bank oleh pemerintah Islandia. Hal ini belum termasuk sejumlah besar intervensi di pasar uang dan injeksi ratusan milyar dollar oleh pemerintah Amerika Serikat, tambahan likuiditas oleh bank sentral Eropa, Jepang, Inggris, Australia, Swiss dan beberapa negara Eropa dan Asia lainnya.



Krisis ini menunjukkan rapuhnya sistem ekonomi kapitalis yang dianut negara-negara besar dan mayoritas negara-negara di dunia. Sistem ekonomi ini telah berevolusi menjadi perekonomian yang didominasi sektor moneter di mana *fiat money*, *fractional reserve requirement*, dan *interest* menjadi pilar utamanya. Ketiganya menciptakan transaksi derivatif di sektor finansial, yakni transaksi

⁸ Lihat: Dwight M. Jaffee, *The U.S. Subprime Mortgage Crisis: Issues Raised and Lessons Learned* (New York: Commission on Growth and Development, 2008), 1.

berbasis portofolio. Faktor inilah yang menciptakan *bubble economy*, penyebab utama krisis keuangan global saat ini (Lihat Gambar 1). Ekonomi dunia hanya dikuasai oleh segelintir negara dan orang kaya saja, tanpa ada distribusi yang jelas⁹.

Roy Davies dan Glyn Davies dalam bukunya *The History of Money From Ancient time of Present Day* mengungkapkan bahwa sepanjang abad 20 telah terjadi lebih 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara. Fakta ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap 5 tahun terjadi krisis keuangan hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat manusia¹⁰. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan masa depan umat manusia. Oleh sebab itu perlu sebuah koreksi mendasar terhadap sistim ekonomi yang dianut oleh sebagian besar negara-negara didunia dewasa ini.

Senada dengan hal tersebut, Sri-Edi Swasono dalam bukunya *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas* dengan tegas menyatakan untuk melakukan koreksi, dekonstruksi, merombak maupun untuk melakukan reformasi terhadap pemikiran-pemikiran ekonomi konservatif-konvensional yang menjerumuskan, terjerat oleh pemikiran-pemikiran ekonomi *mainstream* yang parsial dan makin compang-camping, di mana terdapat dalam teori pasar bebas yang bersubstansi neoklasikal dan neoliberalisme¹¹. Dalam pandangan Sri-Edi Swasono perlu ada sebuah koreksi yang mendasar terhadap pengajaran ilmu ekonomi yang sudah terkooptasi dalam pemikiran ekonomi sempit, yang terdapat dalam teori neoklasikal.

Bahkan Robert Kuttner dalam bukunya *The End of Laissez-Faire: National Purpose and The Global Economy After The Cold War* menyatakan bahwa departemen-departemen ilmu ekonomi diseluruh dunia menghasilkan generasi sarjana –sarjana yang idiot, cemerlang dalam rahasia matematika, namun tidak tahu tentang kehidupan ekonomi yang sebenarnya.¹² Pendapat Kuttner tersebut semakin

⁹ Lihat: Jhon Belammy Foster dan Fred Magdof, *The Great Financial Crisis: Causes and Consequences* (New York: Monthly Review Press, 2009), 2.

¹⁰ Liht: Roy Davies dan Glyn Davies, *The History of Money From Ancient time of Present Day* (London: University of Wales Press, 1996), 102.

¹¹ Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010), 1-2.

¹² Robert Kuttner, *The End of Laissez-Faire: National Purpose and The Global Economy After The Cold War* (New York: Alfred Knopf, 1991), 262

mendorong agar dilakukan perubahan cara pandang terhadap perkembangan ilmu ekonomi yang berkembang saat ini.

Gunar Myrdal dalam karyanya *Economics Theory and Under-developed Regions* mengungkapkan bahwa orientasi ekonomi yang baru demi realisme yang lebih luas terhadap ketimpangan ekonomi akan membawa arti pelikuidasian tuntas terhadap kebiasaan menggandrungi *laissez faire* kuno¹³. Kritik Gunar Myrdal tersebut menjadi titik tolak bagi para ekonom untuk mulai mengakhiri pemahaman terhadap teori neoklasik yang bertumpu kepada pasar bebas tersebut.

Bagi negara –negara dunia ketiga pendekatan neoklasikal yang telah dipraktekkan oleh negara-negara maju seharusnya tidak digunakan begitu saja. Masing-masing negara punya karakteristik dan kondisi masyarakat yang berbeda. Seperti yang diungkapkan oleh Joan Robinson dalam karyanya *Economics Philosophy* mengungkapkan bahwa ilmu ekonomi sebenarnya berakar pada nasionalisme. Para penganut mazhab klasik bersikeras dan memaksakan pemahaman bahwa pasar bebas akan membantu mereka. Padahal sesungguhnya hanya menguntungkan bagi Inggris dan bukan karena manfaat bagi seluruh dunia¹⁴. Sesungguhnya Joan Robinson sudah memberikan peringatan bagi negara yang sedang berkembang untuk tidak terpengaruh oleh teori neoklasikal yang banyak digunakan oleh negara-negara maju.

Kritik yang di tujukan kepada aliran ekonomi Neoklasik secara filosofis sebenarnya cara pandang bertumpu kepada bias yang terlalu memutlakkan kepada paradigma positivisme, yang melihat realitas hanya dari sudut permodelan yang terlalu disederhanakan dengan bertumpu kepada analisis kuantitatif, ditunjang dengan pemakaian asumsi-asumsi yang sering tidak realistis¹⁵. Lebih dalam Umer Chapra dalam karyanya *The Future of Economics: An Islamic Perspective* tujuan dan mekanisme ilmu ekonomi konvensional telah dibangun dari pandangan dunia yang berbeda. Chapra mengungkapkan merupakan

¹³ Gunar Myrdal, *Economics Theory and Under-developed Regions* (London: Dutcworth, 1957), 57

¹⁴ Lihat: Joan Robinson, *Economics Philosophy* (Harmondsworth: Penguin Book, 1962), 67

¹⁵ Lihat: Purbayu Budi Santosa, *Kegagalan Aliran Ekonomi Neoklasik dan Relevansi Ilmu ekonomi Kelembagaan Dalam Ranah Kajian Ilmu Ekonomi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010) , 7.

hal yang mustahil untuk merealisasikan tujuan –tujuan kemanusiaan tanpa dilandasi oleh *humanitarian mechanism* yang sederajat.

Pendapat Chapra tersebut, diperkuat oleh Monzer Kahf dalam *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System* menyatakan bahwa sumber daya alam yang diciptakan harus dimanfaatkan untuk pemenuhan kebahagiaan seluruh umat manusia. Implikasi dari pandangan tersebut adalah pandangan persaudaraan universal, yang kemudian menimbulkan persamaan sosial dan menjadikan sumber daya alam sebagai amanah, karena statusnya sebagai wakil Tuhan yang menciptakan alam semesta. Pandangan ini tidak akan terlaksana secara substansial tanpa dibarengi dengan keadilan sosial-ekonomi. Penegakan keadilan dan penghapusan semua bentuk ketidakadilan telah ditekankan dalam Al-Qur'an sebagai misi utama Rasulullah SAW.¹⁶

Jauh sebelumnya, Mohamad Hatta¹⁷ sudah melakukan koreksi terhadap pemikiran ekonomi Adam Smith, yang menjadi

¹⁶ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnum Husein dari *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 137.

¹⁷ Mohammad Hatta (1934) mengatakan: "...Teori Adam Smith berdasar kepada perumpamaan *homo economicus*, yakni orang ekonomi, yang mengetahui keperluannya yang setinggi tingginya, yang mengetahui kedudukan pasar, yang pandai berhitung secara ekonomi dan rasional, dapat menimbang sendiri apa yang beruntung bagi dia dan apa yang merugikan dan kemudian ia sama kuat dan sama paham dengan lawannya. Akan tetapi orang ekonomi seperti lukisan ini hanya ada dalam dunia pikiran,...sebab itu dalam praktik *laissez-faire stelsel* –persaingan merdeka dll- tidak bersua maksimum kemakmuran yang diucapkan Adam smith. Ia memperbesar mana yang kuat, menghancurkan mana yang lemah..." dan (1966) mengatakan: "...Revolusi Indonesia yang dicetuskan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, yang disemangati Pancasila tidak mengenal jalan kanan atau jalan kiri, tetapi hanya mengenal jalan lurus yang diridhoi oleh Tuhan yang Maha Esa..." dan (1967) mengatakan: "...Tidak ada ilmu ekonomi yang dapat dibangun bebas daripada keyakinan politik dan agama...maka sistem ilmiah daripada ekonomi harus mempunyai dasar sosial yang luas...tidak ada ilmu yang "wertfrei"...Politik perekonomian harus mengemukakan tujuan yang normatif, coraknya itu ditentukan oleh ideologi, politik negara dan paham kemasyarakatan...Lingkungan tempat kita dilahirkan dan hidup sebagai anggota masyarakat, tingkat kecerdasan hidup dan kebudayaan bangsa, undang-undang negeri, organisasi yuridis dan sosial serta adat istiadat yang berlaku, cita-cita kemasyarakatan, perasaan dan pandangan etik, kekuatan moril dan moral bangsa semuanya berpengaruh atas tujuan perkembangan orde ekonomi tidak terlepas dari pandangan hidup...Pada tahun 1926 Keynes sudah dapat mengatakan "the end of laissez-faire"...[ekonomi] berangsur-angsur

peletak dasar-dasar pemikiran ekonomi neoklasikal. Hatta mengkritik secara tajam cara pandang Smith terhadap *homoeconomicus*, tidak akan pernah mencapai tingkat kemakmuran yang dirasakan oleh semua masyarakat. Sebagai *the founding father* Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Hatta telah meletakkan dasar yang sangat substantif dalam mengelola perekonomian nasional bagi generasi penerus.

Sebagai advokator¹⁸ utama lahirnya pasal 27, 33, dan 34 Undang-Undang Dasar Negara 1945 (UUD 1945)¹⁹, Hatta tentu mengenal dengan sangat mendalam karakteristik bangsa Indonesia, dan tantangan yang dihadapinya di kemudian hari. Konteks pemikiran Hatta tersebut tentu sangat relevan dengan kondisi perekonomian dunia dewasa ini, di mana isu globalisasi telah menjadi isu sentral dalam pembangunan ekonomi dunia saat ini.

Dari dalam negeri selain Hatta, Sri-Edi Swasono, Mubyarto dan Sritua Arief menjadi pelopor untuk tidak terlalu tergantung dengan teori yang dibawa oleh neoklasikal. Arief dalam bukunya *Teori dan Kebijakan Pembangunan* bahkan secara tegas menolak untuk memilih antara Barat yang kapitalis dan Timur yang menghamba, bangsa ini tidak perlu memilih salah satu dari keduanya, sebab keduanya harus menjadi masa silam²⁰. Sritua Arief memandang perekonomian nasional seharusnya punya sistem sendiri yang memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki untuk maju dan berkembang.

melangkah ke jurusan “ordering”, ekonomi diatur. Lihat Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire* (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010), 100-102.

¹⁸ Istilah advokator penulis temui dalam tulisan Sri Edi Swasono. Lihat: Sri Edi Swasono, *Menolak Neoliberalisme dan Membangun Ekonomi Nasional* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010), 15.

¹⁹ Pasal 27 (ayat 2) UUD 1945: Tiap – tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 UUD 1945: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 UUD 1945: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Sri Edi Swasono, *Menolak Neoliberalisme dan Membangun Ekonomi Nasional*, 30.

²⁰ Sritua Arief, *Teori dan Kebijakan Pembangunan* (Jakarta: Cides, 1998), 24-25

Mubyarto dalam karyannya *Neoliberalisme dan Krisis Ekonomi* juga melihat ketidaksesuaian teori yang dikembangkan oleh neoklasikal dengan kondisi agama dan budaya nasional. Mubyarto mengungkapkan bahwa asumsi dasar ajaran ekonomi ortodok barat yang kita pelajari selama ini memang bertentangan dengan ajaran agama, tidak saja agama Islam tetapi juga semua agama yang ada dan dikenal dunia²¹. Pandangan Mubyarto ini sekaligus mematahkan asumsi yang dibangun oleh teori neoklasikal bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan terbatas adanya.

Dalam pandangan yang lebih kontemporer seorang peraih nobel ekonomi pada tahun 2001 Joseph Stiglitz dalam karyannya *Globalization and its Discontents* mengungkapkan bahwa kondisi perekonomian dunia hari ini menjadi lebih buruk telah menyebabkan banyak kesempatan kerja menjadi hilang dan kehidupan semakin tidak pasti. Stiglitz menguraikan bahwa pembangunan akan terus menciptakan kemiskinan dan ketidakstabilan. Stiglitz mengusulkan tanpa adanya reformasi maka dampak balik yang ditimbulkannya akan semakin memuncak dan ketidakpuasan atas adanya globalisasi akan terus meningkat, dan globalisasi perlu secara radikal dipikirkan ulang.²²

Disimpulkan oleh Sri-Edi Swasono bahwa sudah lima generasi yang mengusulkan perlunya mengakui *the end of laissez-faire* yang dilakukan oleh para ekonom baik dari Barat maupun yang berasal dari Timur. Pertama kali oleh tokoh besar John Maynard Keynes (1926); kedua oleh Moh. Hatta, Karl Polanyi (1934 dan 1944); ketiga oleh Gunnar Myrdal, John Kenneth Galbraith, Francis Bator, Paul Baran dll (1957- 1960); keempat oleh Robert Kuttner, Lester Thurow, George Soros, Josep Stiglitz, Susan George dll (1990-2002). Intinya adalah bahwa pasar tidaklah **self-regulating**, tidak self-correcting, penuh market failures, terutama dalam mengatasi ketimpangan struktural. Para Nobel laureates 2006 (Edmund Phelps); 2007 (Eric Maskin, Loenid Hurwicz, Roger Myerson); 2008 (Paul Krugman); 2009 (Elinor

²¹ Mubyarto, *Neoliberalisme dan Krisis Ekonomi* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila, 2004), 24

²² Joseph E. Stiglitz, *Globalization and its Discontents* (London: Penguin Books, 2002), 67-68

Ostrom dan George Akerlof) barangkali sebagai penegas kelima yang mendukung the end of laissez-faire.²³

Kritik yang dilontarkan kepada paham neoklasik tidak hanya dilakukan oleh kalangan strukturalis saja, tapi juga dilakukan oleh beberapa ekonom yang memilih pendekatan ekonomi Islam (*Islamic Economic*)²⁴ diantara tokoh terkemukannya antara lain Umer Chapra²⁵, Najetullah Siddiqi, Khursyd Ahmad, dan ekonom Islam muda lainnya²⁶. Walaupun ekonomi Islam baru mengalami kebangkitan selama tiga-empat dekade terakhir, setelah tidur panjang selama berabad-abad. Ekonomi Islam sedang membangun sebuah struktur

²³ Sri-Edi Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire* (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010), 109-110.

²⁴ Ilmu ekonomi Islam telah didefinisikan dengan banyak cara oleh para sarjana. Sebagian definisi, disusun secara kronologis, adalah: M.A. Mannan, "Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi dari orang – orang memiliki nilai-nilai Islam". Lihat Muhammad Abdul Mannan, *Introduction of Islamic Economics* (Dakka: University of Bangladesh, 1986), 18. Adapun Khursid Ahmad melihat sebagai "suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam". Lihat: Khursid Ahmad, *Islamic Economics* (Jeddah: IRTI IDB1992), 19. M. Najetullah Siddiqi, "respon para pemikir muslim terhadap tantangan –tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan As-Sunnah maupun akal dan pengalaman. Muhammad Najetullah Shiddiqi, *Philosophy of Islamic Economic* (Jeddah: IRTI – IDB), 69-70.

²⁵ Umer Chapra adalah sosok seorang ekonom Muslim terkemuka. Tokoh yang memiliki kewarganegaraan Saudi Arabia merupakan keturunan Pakistan, pernah menjadi pensehat ekonomi pemerintah Pakistan, pensehat raja Saudi Arabia bidang moneter, sekarang bekerja sebagai *Research Advisor Islamic Research and Training Institute* (IRTI) pada *Islamic Development Bank* (IDB). Penerima penghargaan Islamic Development Bank Award for Islamic Economic dan King Internasional Award for Islamic studies dan Institute of Overseas Pakistanis Award for Service to Islam adalah alumni University Winconsin dan University of Kentucky, Amerika Serikat. Lihat: Umer Chapra, *Toward of Islamic Economics* (Jeddah: IRTI-IDB, 2006), 120

²⁶ Sebagian besar ekonom Muslim Kontemporer lahir setelah *The First of Islamic Economic and Finance Coference* di Jeddah, Saudi Arabia, pada tahun 1976. Para pakar ekonomi Islam meyakini konferensi tersebut merupakan momentum penting kebangkitan ekonomi Islam, semenjak pertemuan tersebut kajian dan pengajaran ekonomi Islam mulai banyak dilakukan, dan melahirkan banyak tokoh pemikir ekonomi Islam. Umer Chapra, *Toward of Islamic Economics*, 20

baru perekonomian dunia, ditengah merosotnya moral para pelaku ekonomi.

Sebagai ilmu yang muncul dari nilai-nilai dan ajaran Islam, ekonomi memiliki ciri dan karakter yang berbeda dengan paham ekonomi lainnya. Titik tekan Ekonomi Islam bersumber kepada doktrin yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Pendekatan ekonomi Islam selalu mengarah kepada nilai-nilai moral, persaudaraan kemanusiaan, keadilan social – ekonomi, mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan institusi baik yang terdapat dalam keluarga, pasar, masyarakat dan negara, di mana kesemuanya mengarah kepada terciptanya *falah* atau kesejahteraan untuk semua masyarakat²⁷. Ekonomi Islam juga menekankan pentingnya perubahan social melalui perbaikan individu dan masyarakat, tanpa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar dan negara. Pandangan tersebut secara nyata sangat berbeda dari neo klasik²⁸.

Bahkan dalam Islam, sangat jelas diatur bagaimana pengelolaan sumberdaya ekonomi agar menimbulkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Bahwa perekonomian harus disusun, tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar bebas a la competitive economics, maka makin jelas dari sabda Rasulullah SAW (HR Abu Dawud) agar “...Manusia berserikat dalam tiga hal: air, api dan rumput...”²⁹. berserikat adalah wujud paham kebersamaan, berserikat adalah wujud pengaturan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan tujuan agar semua kegiatan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua rakyat Indonesia.³⁰ Keteraturan itu ditata dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai kepada penilaian yang dapat membuahkan kesejahteraan bagi semua masyarakat.

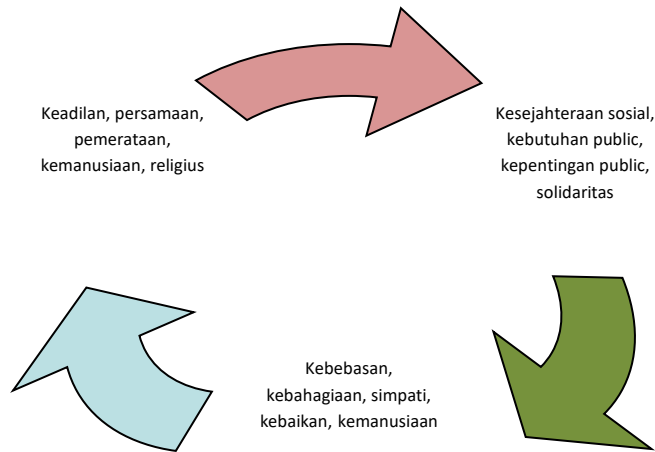
Gambar 1.2 **Siklus Transformasi Ekonomi-Sosial**

²⁷ Lihat: Umer Chapra, *The Fututre of Economics: an Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 61

²⁸ Lihat: Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation and the International Institute of Islamic Thought, 1995), 112

²⁹Sabda Rasulullah yang berkenaan dengan hal ini adalah “Orang muslim berserikat dalam tiga hal: rumput, air, dan api” (HR. Abu Dawud) Lihat Abu>Da>wud, Sunan Abi>Da>wud Juz III (Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, t.t), 295.

³⁰ Sri-Edi Sri-Edi Swasono, “Sistem Jaminan Sosial Nasional UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN,” : 8



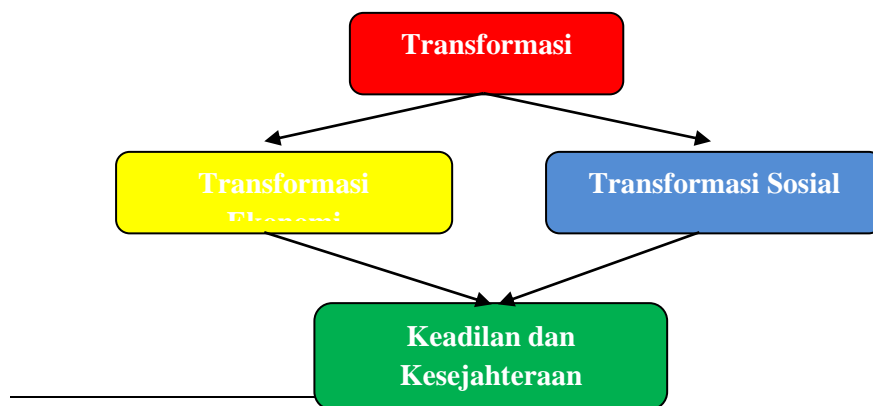
Terdapat kesamaan yang sangat kuat dari pandangan yang telah dikemukakan oleh para ekonom yang beraliran strukturalis dan Islam, tentang kebutuhan terhadap transformasi ekonomi kearah yang lebih adil bagi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Keduanya sepakat transformasi ekonomi harus memiliki dimesi moral yang sangat kuat (Lihat Gambar 1). Ilmu ekonomi secara imperatif haruslah mengenal keadilan (*justice*), peduli dengan persamaan (*equality*), pemerataan (*equity*), kemanusiaan (*humanity*), serta menghormati nilai –nilai agama (*religious values*). Sebagai ilmu sosial yang memiliki dimensi moral maka ilmu ekonomi secara etikal mengenal dan menghormati pula kepentingan bersama seperti; Kesejahteraan sosial (*social welfare*), kebutuhan publik (*public needs*), kepentingan publik (*public interest*), *solidaritas* (*solidarity*), tetapi disisi lain tetap mengakui kepentingan individu dan hak individu seperti; kebebasan (*liberty*), kebahagiaan (*happiness*), compassion (*simpati*), kebaikan (*goodness*), kemanusiaan (*altruism*). Dengan kata lain ilmu ekonomi akan selalu dilandasi kepentingan moral dan etika dalm setiap tingkah laku pelakunya³¹.

³¹ Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar-Bebas* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010), 11

Transformasi ekonomi yang dilakukan haruslah mencakup dua kepentingan yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial³². Transformasi ekonomi yang dimaksud adalah suatu upaya untuk melakukan restrukturisasi ekonomi dalam rangka membentuk sistem ekonomi baru dengan meninggalkan segala bentuk paham yang bersifat individu (*individualisme*) dan menggantikannya dengan paham yang berasas kepada kebersamaan dan kekeluargaan (*mutualism dan brotherhood*)³³.

Sedangkan transformasi sosial yang dimaksud adalah membentuk hubungan social-ekonomi yang partisipatori-emansipatori. Hubungan antar pelaku ekonomi harus saling bersinergi dan menguntungkan satu dengan yang lain. Negara harus kembali kepada fungsi semula³⁴ menyusun perekonomian dengan mengedepankan kepentingan ekonomi rakyat sebagai basis utama ekonomi nasional. Sehingga akan tercipta masyarakat yang berdaya guna dan berdaya saing dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat

Gambar 1.3
Transformasi Ekonomi-Sosial



³² Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar-Bebas* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010), 59.

³³ Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar-Bebas* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010), 60.

³⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 33. Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisme dan Pasar Bebas*, 40.

Disertasi ini sesungguhnya sepakat dengan ide dan gagasan untuk melakukan proses transformasi sistem ekonomi yang didominasi oleh paham ekonomi neoklasikal kepada sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Ide dan gagasan yang sudah disampaikan oleh para ekonom baik yang dikenal sebagai ekonom beraliran strukturalis maupun ekonom yang memiliki cara pandang ekonomi Islam, untuk merombak pemikiran ekonomi neoklasikal, dengan cara melakukan proses transformasi, harus terus dilakukan. Sehingga nantinya akan muncul sebuah konsep baru dalam bentuk arsitektur atau landscape ekonomi dunia baru yang lebih berkeadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh negara, seluruh penduduk bumi tanpa terkecuali.

I. Masalah

6. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, antara lain:

- (1) Paham neo klasikal yang bersumber dari pemikiran Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation* telah memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap perkembangan pengajaran ilmu ekonomi diseluruh dunia. Neo klasikal berkeyakinan bahwa keseimbangan pada pasar bebas akan tercipta dengan sendirinya (*invisible hand*) dengan membentuk *self-regulating* dan *self-correcting*, tanpa campur tangan siapapun. Instrument yang digunakan adalah pasar persaingan bebas (*free market competition*) di mana kekuatan utamanya terletak pada efisiensi dan persaingan bebas (*free competition*). Kondisi inilah yang menyebabkan perilaku kapitalisme muncul, karna adanya hegemoni untuk selalu memenangkan persaingan tanpa mengindahkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan.
- (2) Dalam perkembangannya keseimbangan ekonomi tidak muncul dengan sendirinya, bahkan telah terjadi kegagalan pasar (*market failure*) yang menyebabkan ketimpangan ekonomi yang tidak bisa diselesaikan lewat mekanisme pasar (*invisible hand*). Penguasaan sumber daya ekonomi yang hanya berputar disegelintir orang saja, telah menyebabkan perekonomian terdistorsi kedalam penguasaan sumberdaya ekonomi semata, akibatnya hubungan antar individu, pranata sosial berkurang bahkan menjadi hilang, yang pada

akhirnya menimbulkan masalah ekonomi sosial di masyarakat seperti, kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

- (3) Munculnya isu globalisasi ekonomi yang dihembuskan oleh negara-negara maju, telah menjadi topik utama dinegara berkembang. Gagasan globalisasi ekonomi merupakan manifesto paham neoklasikal dalam bentuk pasar bebas dan persaingan bebas. Dunia di assumsikan dalam bentuk desa kecil tanpa sekat dan batas (*borderless*), semua orang bebas untuk masuk dan keluar tanpa ada kendala atau batas teritorial. Bagi sebagian negara khususnya negara maju dan industri baru, kondisi tersebut sangat menguntungkan karna sumberdaya yang dimiliki oleh negara tersebut sangat siap untuk melakukan penetrasi ekonomi. Akibatnya negara berkembang dan miskin hanya akan menjadi target pasar yang empuk bagi produk dan jasa negara maju. Negara maju akan semakin kaya, sementara disisi lain negara miskin dan berkembang akan semakin miskin dan terkebelakang.

7. Pembatasan Masalah

Gagasan mengenai transformasi ekonomi haruslah dipandang secara lengkap (*comprehensive*), kajian dan penelitian tentang hal ini harus terus dilakukan secara konsisten. Karna sistim ekonomi yang sedang berjalan dan dianut oleh sebagian besar negara didunia adalah sistim yang lahir dari paham neoklasikal yang sangat mapan aspek teori dan metodologi telah diterapkan dalam dua abad terakhir. Dengan kata lain sistim tersebut telah terintegrasi dengan instrument ekonomi lainnya diseluruh dunia. Penelitian ini mencoba menguraikan permasalahan secara sistematis sesuai dengan perkembangan ilmu ekonomi kontemporer. Tentu penelitian ini tidak akan bisa menyelesaikan semua masalah yang ada, tapi diharapkan mampu membuka wacana baru tentang ide dan gagasan mengenai transformasi ekonomi. Adapun masalah yang telah diidentifikasi terdapat dalam identifikasi masalah yang telah disampaikan sebelumnya (1), (2), (3).

Dalam penggunaan bahan bacaan untuk menunjang pembahasan, disertasi ini membagi kedalam tiga sumber literature. Pertama, sumber atau bahan yang membahas tentang konsep dan teori neoklasikal ekonomi dan penerapannya. Kedua, sumber atau bahan yang bersumber dari ekonom yang memiliki paham strukturalis, baik yang berasal dari luar (internasional), maupun ekonom yang berasal dari dalam negeri (lokal). Ketiga, sumber atau bahan yang berasal dari

ekonom muslim kontemporer. Ketiga sumber bacaan tersebut akan dianalisa secara mendalam sehingga memberikan solusi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

8. Perumusan Masalah

Paham neoklasikal yang telah berkembang dan mendominasi pemikiran ilmu ekonomi modern telah memberikan pengaruh yang luar biasa bagi peradaban umat manusia dalam dua abad terakhir. Transformasi paham kapitalisme yang terdapat dalam paradigma neoklasikal telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi yang sangat besar. Pertumbuhan produksi barang dan jasa yang sangat pesat telah merubah gaya hidup dan paradigma masyarakat terhadap harta dan penguasaan terhadap asset dan sumberdaya ekonomi diseluruh dunia. Kemudian berdampak terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Idealnya kemajuan dari sisi teori dan aplikasi yang telah dihasilkan oleh neoklasikal ekonomi dalam dua abad penguasaan pemikiran ilmu ekonomi seharusnya melahirkan kesejahteraan dan kemakmuran yang tergambar dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia, tingkat pekerjaan penuh (*full employment*), tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, stabilitas ekonomi, keseimbangan ekologis dan semua hal yang bisa meningkatkan keharmonisan sosial yang bisa dirasakan oleh seluruh penduduk bumi.

Tentunya peradaban umat manusia yang makmur dan sejahtera akan menghasilkan kualitas kehidupan yang baik antar penduduk bumi, ekonomi telah menciptakan pola hubungan (relasi) antara manusia dan alam penuh dengan keseimbangan. Ekonomi sebuah negara secara imperatif akan penuh dengan keadilan, peduli dengan persamaan, pemerataan, kemanusiaan, serta menghormati nilai-nilai agama.

Tentunya perkembangan ekonomi akan memiliki dimensi moral dan etikal yang berarti mengenal dan menghormati pula kepentingan bersama antar individu dalam masyarakat. Sehingga akan terbentuk kesejahteraan sosial, kebutuhan dan kepentingan public, solidaritas sosial yang tinggi. Tetapi disisi lain tetap mengakui dan menghormati kepentingan individu dan hak individu seperti kebebasan, kebahagiaan, simpati, kebaikan dan kemanusiaan. Dengan kata lain ilmu ekonomi akan selalu dilandasi kepentingan moral dan etika dalam setiap tingkah laku pelakunya.

Tetapi dalam kenyataannya ekonomi dunia tumbuh ditengah ketidakpastian, ekonomi dunia telah mengalami pasang surut krisis yang menghantam perekonomian dunia, *invisible hand* yang dijanjikan oleh Smith seolah-olah tidak muncul untuk menyelamatkan ketimpangan ekonomi yang berdampak terhadap kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan dan permasalahan ekonomi sosial lainnya. Neoklasikal menghadapi ketidakpercayaan dari para ekonom dan tokoh yang hidup dibawah pengaruh paham ekonomi mereka. Semenjak runtuhnya Uni Soviet dan negara pendukungnya, kapitalisme telah mendapatkan tempat tersendiri untuk menjajah pemikiran ekonomi dunia.

Oleh sebab itu munculnya transformasi ekonomi yang digagas oleh ekonom dan tokoh yang beraliran strukturalis dan Islam haruslah diapresiasi secara mendalam, keinginan untuk menciptakan sistim ekonomi yang adil dan memberikan kesejahteraan penuh bagi masyarakat adalah sebuah keinginan dan cita-cita mulia. Transformasi ekonomi yang digagas haruslah memiliki dampak dan pengaruh yang kuat terhadap sistim ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Diperlukan kajian, pemikiran yang mendalam dan konsisten agar keinginan dan cita-cita transformasi tersebut bisa berhasil. Indonesia memiliki peluang untuk menjadi *role model* bagi negara berkembang, karna sudah memiliki dasar negara yang sejalan dengan cita-cita dan keinginan transformasi tersebut.

9. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah yang telah disampaikan pada bagian terdahulu, maka diperlukan sebuah pertanyaan penelitian untuk menyelesaikan masalah dan memberikan solusi terhadap masalah yang telah dirumuskan. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan antara lain:

- (1) Bagaimana pengaruh pandangan neoklasikal ekonomi yang bertumpu pada efisiensi dan kompetisi dalam persaingan pasar bebas terhadap globalisasi ekonomi yang menggunakan pendekatan kapitalisme...?
- (2) Bagaimana cara pandang paham strukturalis dan Islam dalam membangun konsep transformasi ekonomi yang akan berdampak terhadap perubahan ekonomi dan sosial bagi masyarakat...?

- (3) Bagaimana model yang memadukan cara pandang ekonomi Strukturalis dan ekonomi Islam dalam menciptakan transformasi ekonomi yang ideal bagi masyarakat, khususnya di Indonesia...?

10. Hipotesis

Hipotesis awal yang dibangun dalam disertasi ini adalah: telah terjadi permasalahan ekonomi dan sosial dalam bentuk ketimpangan struktural dalam masyarakat yang disebabkan oleh penggunaan sistem ekonomi neoklasikal yang tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik bangsa, sehingga memerlukan sebuah perbaikan dalam bentuk transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi yang paling ideal saat ini membutuhkan sebuah model ekonomi yang bersumber dari pemikiran ekonomi Strukturalis dan Ekonomi Islam.

J. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada tahun 1931 Mohammad Hatta memunculkan istilah “perekonomian rakyat” sebagai lawan dikotomis dari “perekonomian kolonial kapital”³⁵. Dan sebagai titik tolak paham strukturalisnya. Hal itu senada dengan orientasi kerakyatan yang menjawai kemerdekaan Indonesia untuk menggusur Daulat Tuanku dan menggantikannya dengan Daulat Rakyat. Dasar pemikiran Mohammad Hatta menjadi dasar untuk melakukan proses transformasi ekonomi dan sekaligus transformasi sosial apabila Indonesia ingin benar-benar merdeka dan melepaskan diri dari sistem ekonomi penjajah yang subordinatif serta ketergantungan. Tugas transformasi ekonomi dan transformasi sosial, yang membentuk tugas transformasi budaya³⁶

Melakukan koreksi terhadap hubungan ekonomi yang tidak partisipatif-emansipatif merupakan tugas transformasi sosial. Bermula dari kolonialisme dan imperialisme yang menjadi pemicu dan sekaligus menjadi sebab awal hubungan ekonomi yang subordinasi yang eksploitasi – diskriminatif³⁷. Inti dari demokrasi adalah

³⁵ Mohammad Hatta, Daulat Ra'jat, 20 November 1931, Buku I, Reprint (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002)

³⁶ Lihat: Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisme dan Pasar Bebas*, 64.

³⁷ Lihat: Sritua Arief, *Pemikiran Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Riset Pembangunan, 1983) dan Sritua Arief, *Dari Prestasi Pembangunan Sampai ke Ekonomi Politik* (Jakarta: UI-Press, 1990), 46.

partisipasi dan emansipasi, tidak ada partisipasi tulus tanpa adanya emansipasi, tanpa emansipasi maka akan tercipta development as freedom tidak akan terwujud³⁸, unfreedom akan tetap berkelanjutan membelenggu kemajuan. Ketimpangan hubungan ekonomi haruslah dikoreksi dan negara mengambil tanggung jawabnya. Rakyat perlu di empowered untuk mampu menjadi self-empowering. Dalam konsep ini bisa diyakini bahwa transformasi adalah sebuah restrukturisasi.

Untuk generasi setelah Hatta, dengan menggunakan pendekatan klasifikasi berdasarkan generasi yang disusun oleh Sri Edi Swasono membagi kedalam lima dari generasi yang berbeda untuk mengakui berakhirnya pasar bebas (*The End of Laissez-Faire*). Pertama oleh tokoh besar John Maynard Keynes (1926); Kedua oleh Karl Polanyi (1944); Ketiga oleh Gunnar Myrdal, John Kenneth Galbraith, Francis Bator, Paul Baran; keempat oleh Robert Kuttner, Lester Thurow, George Soros, Joseph Stiglitz (1990-2002) dan kelima oleh Eric Maskin, Leonid Hurwicz, Roger Myerson (2007), Paul Krugman (2008), Elinor Ostrom dan George Akerlof (2009)³⁹. Dari dalam negeri sendiri muncul tokoh-tokoh terkemuka yang secara konsisten mengkritik pandangan neoklasikal, antara lain; Sri Edi Swasono, Sritua Arief, Mubyarto.

Kritik yang dilontarkan kepada paham neoklasik tidak hanya dilakukan oleh kalangan strukturalis saja, tapi juga dilakukan oleh beberapa ekonom yang memilih pendekatan ekonomi Islam diantara tokoh terkemukannya antara lain Umer Chapra, Najetulah Siddiqi, Khursyd Ahmad, dan ekonom Islam muda lainnya. Walaupun ekonomi Islam baru mengalami kebangkitan selama tiga-empat dekade terakhir, setelah tidur panjang selama berabad-abad. Ekonomi Islam sedang membangun sebuah struktur baru perekonomian dunia, ditengah merosotnya moral para pelaku ekonomi.

Kritik langsung ekonom Islam terhadap paham neoklasik yang mengusung kapitalisme sangat jelas, sebagian besar mengungkapkan bahwa kapitalisme gagal mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum bagi umat manusia justru sebaliknya yang timbul adalah ketimpangan. Hal tersebut disebabkan karna adanya porsi yang tidak

³⁸ Lihat: Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), 90

³⁹ Lihat: Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspada Globalisme dan Pasar Bebas*, 60.

seimbang dalam memandang perekonomian, di mana kapitalis hanya menekankan kepada tujuan maksimalisasi kekayaan, hanya memuaskan kepentingan pribadi tanpa menghiraukan lingkungan sekitarnya. Pandangan ini merupakan penyimpangan falsafah dasar dari agama. Konsep persaingan bebas yang tidak terkendali akan mampu menjamin kepentingan pribadi dan menjamin kepentingan sosial dan mencegah semua bentuk penyimpangan serta ketidakadilan. Oleh sebab itu diperlukan sebuah transformasi ekonomi yang akan membentuk tatanan baru ekonomi dunia, yang menjunjung prinsip keadilan dalam asas kebersamaan dan kekeluargaan.

K. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian disertasi ini memiliki dua tujuan, antara lain:

- (1) Tujuan umum yang ingin dibangun dalam penelitian disertasi ini adalah untuk membuktikan bahwasanya diperlukan sebuah transformasi ekonomi yang komprehensif untuk memperbaiki paradigma ilmu ekonomi dan aplikasinya.
- (2) Tujuan khusus yang ingin dibangun dalam penelitian disertasi ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, antara lain:
 - a) Mengetahui pengaruh pandangan neoklasikal ekonomi yang bertumpu pada efisiensi dan kompetisi dalam persaingan pasar bebas terhadap globalisasi ekonomi yang menggunakan pendekatan kapitalisme.
 - b) Mengungkapkan bagaimana cara pandang paham strukturalis dan Islam dalam membangun konsep transformasi ekonomi yang akan berdampak terhadap perubahan ekonomi dan sosial bagi masyarakat
 - c) Membangun model yang memadukan cara pandang ekonomi Strukturalis dan ekonomi Islam dalam menciptakan transformasi ekonomi yang ideal bagi masyarakat, khususnya di Indonesia

L. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Disertasi ini akan mengungkapkan secara signifikan kelemahan pandangan neoklasikal terbungkus dalam bingkai globalisasi ekonomi yang telah menguasai pemikiran ekonomi dan aplikasinya kurang lebih

selama dua abad terakhir. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian disertasi ini adalah diperlukan sebuah transformasi ekonomi yang matang dan elegan tanpa harus merusak tatanan yang sudah ada. Keberadaan kajian transformasi ekonomi yang bersumber dari pemikiran ekonomi strukturalis dan ekonomi Islam akan sangat bermanfaat bagi perubahan paradigma berfikir dan aplikasi ilmu ekonomi yang selama ini dikuasai oleh pendekatan kapitalis.

Dengan terus berkembangnya ide dan gagasan mengenai transformasi ekonomi dari beberapa sudut pandang, diharapkan akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi pengambil kebijakan ekonomi sebuah negara. Indonesia diharapkan bisa menjadi *role model* yang paling pas, mengingat faktor sejarah dalam merumuskan konstitusi negara dalam Pancasila dan UUD 1945 terhadap perekonomian, telah menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama pengelola perekonomian yang akan memberikan sepenuhnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

M. Metodologi Penelitian

5. Metode Penelitian

Metode penelitian disertasi ini adalah kualitatif, di mana variabel dan data yang dianalisis bersifat kualitatif, seperti paradigma dan asumsi dasar ekonomi neoklasikal dengan segala perangkat yang ada dalam pendekatannya, model yang dirumuskan oleh para ekonom neoklasikal. Adapun variabel pandangan dan pendekatan ekonomi strukturalis dan ekonomi Islam dalam melakukan transformasi ekonomi dan sosial dalam mencapai keadilan ekonomi. Sedangkan metode observasi yang digunakan adalah metode yang menggunakan data yang telah tersedia (*Research with available data*), yang diadaptasi dari metode penelitian Royce A. Singleton- Bruce C. Straith⁴⁰ dan Earl Babbie.⁴¹

Metode penelitian ini dimanfaatkan untuk menganalisis paradigma dan asumsi dasar yang dibuat oleh para pemikir ekonomi neoklasikal dalam mengembangkan konsep ekonomi. Paradigma dan asumsi dasar ini kemudian akan dianalisa secara mendalam terhadap perkembangan ilmu ekonomi dan permasalahan ketidakadilan ekonomi

⁴⁰ Royce A. Singleton & Bruce C. Straits, *Approach to Social Research* (New York-Oxford: Oxford University Press, 1999), 357-389.

⁴¹ Earl Babbie, *The Practice of Social Research* (Boston: Wadsworth Publishing Company, 1998), 307-332.

yang ditimbulkan. Paham Strukturalis dan Ekonomi Islam akan memberikan koreksi dan struktur ekonomi baru, dalam menjalankan gagasan mengenai transformasi ekonomi dan sosial. Struktur ekonomi yang dihasilkan akan menentukan model keadilan ekonomi, yang kemudian diterapkan pada masa yang akan datang.

Dalam membuktikan kebenaran terjadinya permasalahan struktur yang terdapat dalam mekanisme pasar, penulis melakukan uji statistik terhadap keberadaan pasar tradisional terhadap pasar modern. Dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan pasar modern terhadap pedagang pasar tradisional. Metode yang digunakan dengan menggunakan uji statistik.

2. Sumber Data

Secara umum data yang digunakan dalam penelitian disertasi ini bersifat data umum yang telah dipublikasikan secara luas. Sumber rujukan tersebut berasal dari buku teks, buku sejarah, hasil studi terdahulu dan tulisan yang terdapat dalam jurnal maupun review. Untuk uji statistik menggunakan data primer, yang diperoleh dari pedagang pasar tradisional di Jakarta.

3. Pendekatan

- (1) Pendekatan sosio-historik yaitu memahami pendekatan neo klasikal dengan meneliti karakteristik sistem neoklasikal semenjak Adam Smith dan pengikutnya (*Smithian*), meneliti pendekatan strukturalis semenjak Jhon Maynard Keynes dan tokoh setelahnya dan terakhir mengkaji pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Disini juga akan dilakukan analisis terhadap ide dan gagasan dari tokoh yang melakukan kritik terhadap pandangan ekonomi neoklasikal, untuk mendapatkan konsep transformasi ekonomi yang mendapat dukungan kalangan ekonomi strukturalis dan ekonomi Islam dengan cara meneliti pendekatan yang digunakan, meneliti kelebihan dan kelemahannya, serta memperbandingkannya dengan sistem neoklasikal ekonomi yang sekarang digunakan. Metode penelitian yang dilakukan disini adalah dengan melakukan analisis literatur primer dan sekunder melalui kajian kepustakaan.
- (2) Pendekatan ekonomi-politik yaitu untuk mengevaluasi kinerja dan dampak pandangan neo klasikal yang tergambar dalam pasar bebas dan globalisasi ekonomi terhadap negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Serta untuk melakukan analisis terhadap perekonomian Indonesia dalam melakukan transformasi ekonomi,

dimana sesungguhnya telah terdapat pijakan yang kokoh dalam konstitusi negara.

4. Teknik Pengolahan Data

Content analysis dari studi literatur dan kepustakaan, dengan berpijak pada pendekatan filosofi dan konseptual. Sumber utama yang digunakan dalam disertasi ini adalah literatur yang memuat pemikiran dan gagasan ekonomi dalam pandangan strukturalis dan ekonomi Islam kontemporer. Semua pandangan dan gagasan mengenai transformasi diletakkan secara kronologis. Kemudian dianalisa kesamaan ide dan gagasan antara pandangan strukturalis dan ekonomi Islam. Kemudian direkonstruksi sehingga menjadi sebuah model transformasi ekonomi yang bisa menjawab terhadap permasalahan yang terdapat dalam pandangan ekonomi neoklasikal. Hasil analisis ini akan digunakan untuk memberi kedudukan konsep dan model transformasi ekonomi yang nantinya bisa diterapkan.

N. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian disertasi ini akan ditulis dalam lima bagian yang terdiri dari lima bab. Bab I Menguraikan tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, batasan masalah, pertanyaan penelitian, hipotesis, tujuan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan, dan referensi.

Bab II Menyajikan kajian teoritis dan tinjauan pustaka. Dalam bab ini akan diuraikan secara ringkas tentang perkembangan pendekatan ekonomi neo klasikal mulai dari masa Adam Smith sampai dengan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan oleh banyak negara dewasa ini. Selanjutnya akan disampaikan pemikiran dan kajian yang menulis tentang konsep ekonomi strukturalis dan ekonomi Islam serta gagasan transformasi ekonomi yang ungkapkan oleh para ahli dan pakar baik secara lokal maupun internasional. Serta penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Aspek-aspek yang dibahas dalam penelitian terdahulu adalah permasalahan, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil pengujian dan kesimpulan yang diambil.

Bab III Membahas mengenai penyebab kegagalan neoklasikal dalam menerapkan kebijakan ekonominya dinegara dunia ketiga dan mengangkat gagasan mengenai transformasi ekonomi yang diusulkan oleh kaum strukturalis dan para ekonom muslim kontemporer.

Bab IV Menyajikan analisis dan pembahasan. Bagian ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan karena berisi tentang hasil-hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan. Hasil yang diperoleh dari data lapangan tersebut kemudian diuji dalam uji statistik, dan dianalisa sesuai dengan metode yang digunakan. Hasil-hasil analisis tersebut akan dibahas satu persatu secara ringkas dan mendalam. Hasil penelitian lapangan tersebut untuk membuktikan hipotesis yang telah dibangun pada bab sebelumnya.

Bab V Menyajikan analisis dan pembahasan mengenai tema utama dari penelitian. Bagian ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan karena berisi tentang penelitian kualitatif yang dilakukan dengan merujuk kepada sumber-sumber rujukan utama pada disertasi. Hasil-hasil analisis tersebut akan dibahas satu persatu secara ringkas dan mendalam. Selanjutnya akan dibuat sebuah rekomendasi dan analisa yang menjadi output dari penelitian disertasi ini.

Bab VI adapun bagian terakhir dari penelitian disertasi ini adalah menyajikan kesimpulan dalam rangka menjawab secara eksplisit pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan pada Bab I. Selanjutnya akan disusun saran yang relevan untuk diterapkan berdasarkan kesimpulan dan temuan-temuan penting dari analisis yang telah dilakukan. Bab ini juga akan dilengkapi dengan beberapa saran yang perlu dipertimbangkan oleh pihak –pihak yang relevan.

BAB II

KEGAGALAN EKONOMI NEOKLASIKAL DAN GAGASAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN SOSIAL

Saat ini ilmu ekonomi tengah menghadapi dilema yang sangat besar. Dasar ilmu ekonomi yang selama ini telah diterapkan tengah menghadapi gugatan yang sangat kuat sepanjang sejarah⁴², dari para ahli ekonomi yang menganggap teori dari ilmu ekonomi yang

⁴² Kritik atas prediksi kegagalan neoklasikal telah diutarakan oleh para ekonom sepanjang sejarah ilmu ekonomi konvensional dan telah disampaikan oleh ekonomi yang memiliki reputasi tersendiri dalam ilmu ekonomi. Seperti; Sismondi (1773-1842), Carlyle (1795-1881), Ruskin (1819-1900), Hobson (1858-1940), Tawney (1880-1962), Schumacer (1891-1971) dan Boulding (1910-1993). Para ekonom terdahulu tersebut mempertanyakan kebijakan ilmu ekonomi neoklasikal. Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Menolak Neoliberalisme dan Membangun Ekonomi Nasional* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010), 36

diajarkan selama ini bersumber dari neoklasikal, tidak mampu dalam menyelesaikan tugasnya dalam memberikan kontribusi terhadap usaha perwujudan tugas-tugas kemanusiaan dan telah kehilangan momentum dalam membuat kehidupan masyarakat dunia lebih adil dan sejahtera. Memperhatikan banyaknya pihak yang prihatin terhadap kegagalan dan kebangkrutan aliran ekonomi Neoklasik, maka sudah selayaknya dilakukan peninjauan ulang terhadap keberadaan aliran ekonomi ini. Argumentasi yang menyatakan terdapat kegagalan dalam pemikiran dan penerapan aliran Neoklasik perlu dikemukakan, baik tinjauan secara filosofis maupun dari aspek sosial-ekonomi. Berbagai kritik yang diajukan kepada aliran Neoklasik selama ini, semakin memperkuat adanya relevansi terhadap gagasan mengenai transformasi ekonomi secara menyeluruh. Gagasan transformasi ekonomi yang ungkapkan para ekonom strukturalis sudah mulai ditulis semenjak Mohammad Hatta (1931) hingga generasi terbaru pemikir strukturalis seperti George Akerlof (2009). Gagasan transformasi ekonomi semakin diperkuat dengan lahirnya pandangan dan kajian yang dilakukan oleh para ekonom muslim yang mengembangkan konsep dan teori ekonomi Islam. Para penggagasnya antara lain Umer Chapra, Najetullah Siddiqi, Mohammad Abdul Mannan, Monzher Khaf dan Khursid Ahmaad.

E. Kegagalan Neoklasikal Ekonomi Dalam Membangun Paradigma dan Asumsi Dasar

Kedudukan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang berbasiskan kepada moralitas sesungguhnya telah dimulai oleh Adam Smith. Sebelum menerbitkan bukunya yang sangat terkenal *An Inquiry Into The Nature and Cause of The Wealth of Nation* pada tahun 1776, Smith telah menerbitkan *The Theory of Moral Sentiments*, pada tahun 1759⁴³. Dimana Smith menggambarkan tentang empati dan kecenderungan cinta kasih kepada masyarakatnya. Dalam perjalanannya terjadi perubahan pemikiran yang dilakukan oleh Smith, melalui *The Wealth of Nation* terlihat inkonsistensi Smith yang dikenal

⁴³ Adam Smith pertama kali menerbitkan buku *The Theory of Moral Sentiments*. 17 (Tujuh belas tahun) kemudian barulah terbit buku *An Inquiry Into The Nature and Cause of The Wealth of Nation*. Lihat: Amitai Etzioni, *The Moral Dimension: Toward a New Economics* (New York: The Free Press, 1988), 88

sebagai *das Smith Problem (the problem of Smith)* dalam pandangannya terhadap etika individu dalam aktifitas ekonomi⁴⁴.

Perubahan pandangan Smith tersebut disikapi berbeda oleh para pengikutnya yang kemudian dikenal dengan istilah kaum neoklasikal, mereka mengabaikan pemikiran Smith yang tertuang dalam buku yang awal (*The Theory of Moral Sentiments, 1759*) dan mengedepankan serta merujuk pandangan Smith pada buku yang hadir belakangan (*An Inquiry Into The Nature and Cause of The Wealth of Nation 1776*). Dalam perkembangannya pemikiran kaum neoklasikal cenderung mengabaikan implikasi asumsi monoutilitas, dengan demikian mengabaikan kenyataan bi-utilitas yang menjadi pokok pikiran dalam buku *The Theory of Moral Sentiments*⁴⁵. Artinya kaum Neoklasikal hanya merujuk kepada satu pemikiran Smith semata, sementara sisi lain dari pemikiran Smith cenderung diabaikan.

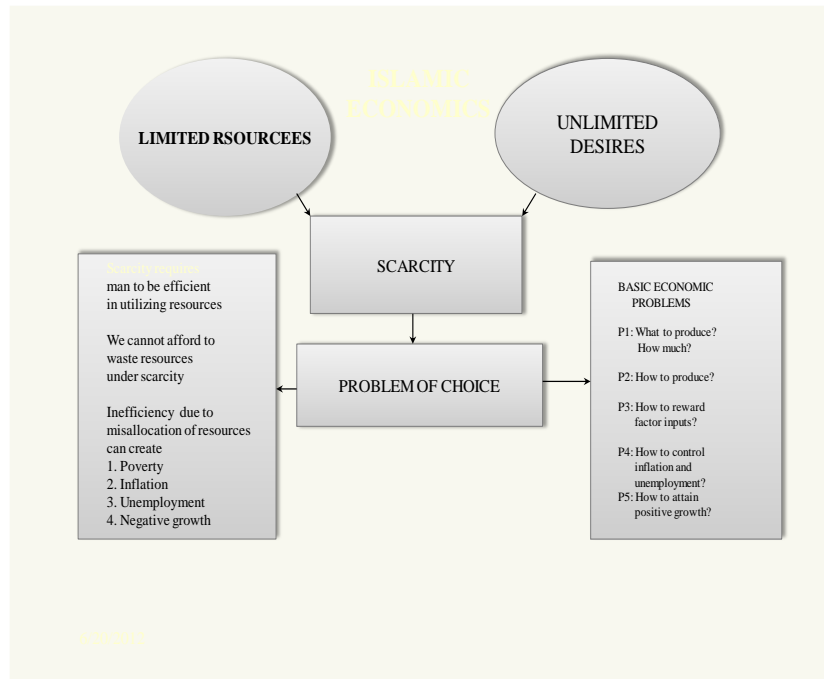
Dalam perkembangannya gagasan Smith dalam *The Wealth of Nation* diperbaharui oleh Paul Samuelson dalam bukunya *Economics An Introductory Analysis* (MIT, 1946)⁴⁶. Semenjak itu, lebih tepatnya semenjak perang dunia II ilmu ekonomi yang diajarkan dan diterapkan di seluruh dunia dirintis oleh buku Samuelson tersebut. Inti ajaran yang dikemukakan oleh Samuelson, kemudian dikenal sebagai teori ekonomi Neoklasikal.

Gambar 2.1 **Paradigma Ekonomi Neoklasikal**

⁴⁴ Smith banyak mendapat wacana baru dalam pemikirannya, sehingga terjadi perubahan yang sangat drastic. Lihat: Amitai Etzioni, *The Moral Dimension: Toward a New Economics*, 88.

⁴⁵ Para pengikut Smith, hanya melihat pemikiran Smith hanya dari satu sisi saja, tanpa melihat sisi lainnya. Lihat: Amitai Etzioni, *The Moral Dimension: Toward a New Economics*, 142

⁴⁶ Banyak kalangan menilai, yang meletakkan dasar-dasar pemikiran neoklasikal modern, lebih sistematis dan terstruktur dengan baik, yang kemudian dipelajari seluruh fakultas ekonomi di hampir seluruh dunia. Lihat: Mubyarto, "Meninjau Kembali Ekonomika Neoklasikal," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 17 (2002): 119-129.



Dengan sangat cepat paham neoklasikal telah mempengaruhi pengajaran ilmu ekonomi hampir diseluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Neoklasikal membangun konsep dan pengajaran ilmu ekonominya dengan mengedepankan asumsi-asumsi dasar yang bersumber dari pemikiran Smith dan secara modern diperbaharui oleh Samuelson, yaitu bahwa; (1) keinginan manusia yang bersifat tidak terbatas (*unlimited wants*) (2) Sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk memenuhi keinginan manusia yang terbatas (*limited wants*) dan (3) Pengejaran akan pemenuhan maksimal kebutuhan individual (*utility maximization of self interest*) yang relatif tidak terbatas (Lihat Gambar 2.1). Dampak dan konsekuensi dari ketiga asumsi dasar itu berkelanjutan dengan suatu anggapan bahwa akhlak dasar manusia adalah bertarung dan saling berebut untuk dirinya sendiri⁴⁷.

Pemikiran ilmu ekonomi Neoklasikal kemudian berkembang dengan pesat, dengan fokus kajian yang semakin luas yang menyangkut pembentukan pasar dan manusianya (*homo ekonomikus*

⁴⁷ Asumsi dasar yang dikenalkan oleh ekonomi neoklasikal kemudian telah merubah paradigma kemanusiaan sebagai makhluk sosial, kemudian berubah sebagai makhluk yang sangat individualis. Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisme dan Pasar-Bebas*, 3.

dan *invisible hand*), dengan pendekatan *marginal utility* (MU) serta keseimbangan umum (*general equilibrium*). Tekanan ajaran ekonomi neoklasikal adalah bahwa mekanisme pasar persaingan bebas, dengan asumsi-asumsi tertentu, selalu menuju keseimbangan dan efisiensi optimal yang baik bagi semua orang, tanpa melibatkan regulator dalam hal ini adalah pemerintah⁴⁸. Artinya jika pasar dibiarkan bebas, tidak diganggu oleh aturan-aturan pemerintah yang bertujuan baik sekali pun, masyarakat secara keseluruhan akan mencapai kesejahteraan bersama yang optimal (*Pareto Optimal*), dimana semua orang akan menjadi sejahtera tanpa harus mengorbankan orang lain atau pihak lain.

Konsep pareto ini pertama kali diungkap oleh seorang ekonom asal Italia yang bernama Vilfredo Pareto⁴⁹. Dimana dia menyatakan bahwa efisiensi adalah situasi di mana tidak ada cara untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi kegunaan orang lain. Dalam pandangan Pareto efisiensi alokatif akan terjadi bila tidak mungkin lagi dilakukan re-organisasi produksi sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak (yang terlibat dalam kegiatan ekonomi: produsen–konsumen) merasa lebih sejahtera (*better off*). Oleh karena itu, pada keadaan efisiensi alokatif ini utility (kepuasan) seseorang dapat ditingkatkan hanya dengan menurunkan utility orang lain⁵⁰.

⁴⁸ Dalam banyak buku teks ekonomi disebutkan bahwa keberadaan pemerintah dalam sebuah negara hanya untuk melakukan tugas-tugas tertentu, dan tidak terlibat terlalu banyak dalam perekonomian. Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi: (1) Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. (2) Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan. (3) Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan. Lihat: Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

⁴⁹Vilfredo Pareto adalah seorang ekonom Italia (1848-1923) yang berpandangan bahwa persoalan efisiensi erat kaitannya dengan masalah optimasi. Pada perilaku konsumen tunggal, efisiensi dicapai dengan mengalokasikan anggaran tertentu pada kombinasi barang dan jasa yang memaksimalkan kegunaan konsumen. Pada kasus produsen tunggal, optimasi bisa dicapai melalui dua jalur: penggunaan kombinasi input yang memaksimalkan laba, atau penggunaan input yang meminimumkan biaya untuk mencapai tingkat produksi tertentu. Lihat Hal R. Varian, *Intermediate Microeconomics a Modern Approach* (New York: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2003), 3.

⁵⁰ Teori ini dalam ilmu ekonomi sering disebut dengan efisien Pareto (Pareto efficient). Lihat Robert H. Frank and Ben S. Bernanke, *Principles of Micro Economics*, 168.

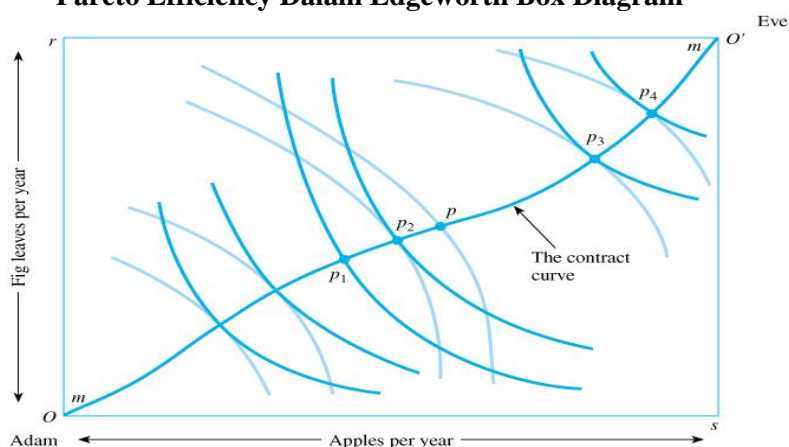
Dengan demikian tanpa ada campur tangan siapapun termasuk pemerintah didalamnya akan terjadi proses produksi yang melibatkan seluruh komponen barang dan jasa dalam sebuah keharmonisan yang maksimum terhadap keinginan konsumen dan produsen. Interaksi yang melibatkan seluruh proses produksi tersebut dikenal dengan istilah *pareto efficiency*⁵¹, disebut dengan istilah *efficiency* karena tidak mungkin meraih sesuatu tanpa merugikan pihak lain. Dalam mendukung padangan teorinya, neoklasikal membuat suatu kondisi untuk mencapai tujuannya. Perekonomian disusun sebagai sebuah persaingan untuk mencapai kondisi yang memuaskan adalah efisien pareto, dan yang kedua adalah mengimplikasikan setiap alokasi efisiensi pareto dapat dicapai oleh mekanisme pasar yang desentralisasi.

Kondisi ini dikenal dengan istilah *efficient allocation of goods* yaitu alokasi barang-barang dikatakan efisien apabila tidak seorang pun dapat meningkatkan utilitasnya tanpa mengunrangi utilitas orang lain. Peningkatan utilitas seseorang ditentukan oleh *Marginal Rate of Substitution (MRS)*. Apabila *MRS* seseorang dengan yang lainnya berbeda maka mereka akan terus melakukan pertukaran, karena keduanya dapat terus meningkatkan utilitasnya. Dan apabila *MRS* seseorang dengan yang lainnya sama, mereka tidak akan meningkatkan utilitasnya karena alokasi barang sudah mencapai tingkat efisien. Terlihat pada pada gambar 2.2, dimana *MRS* Eva sama dengan *MRS* Adam.⁵²

⁵¹ Secara teoritis, dalam penjelasan tentang *Pareto Efficiency* terdapat tiga aspek yang dikemukakan dari *Pareto Efficiency*. Pertama, efisien dalam pertukaran. Kedua, efisien dalam produksi. Ketiga, efisiensi dalam keseluruhan (*overall/mix efficiency*). Penjelasan adalah sebagai berikut, efisiensi dalam pertukaran adalah suatu pengalokasian sejumlah barang yang tertentu jumlahnya dalam suatu ekonomi pertukaran disebut (pareto) efisien jika, melalui realokasi barang-barang, tidak seorang individupun dapat memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan individu lainnya. Efisiensi dalam produksi terjadi apabila dalam suatu masyarakat dengan dalam mengalokasikan sumber-sumber produksi jika tidak ada suatu barang yang dapat diproduksi tanpa keharusan mengu-rangi produksi barang lainnya. Efisiensi keseluruhan dalam suatu ekonomi adalah jika tidak seorangpun yang dapat ditingkatkan kesejahteraannya dengan tanpa membuat kesejahteraan yang lainnya berkurang. Lihat: Lihat Robert H. Frank and Ben S. Bernanke, *Principles of Micro Economics*, 59-60. Lihat juga Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, *Economics* (New York: McGraw-Hill, 2005), 27.

⁵² Homer and Richard Sylla, *A History of Interest Rates* (London: Rutgers University Press 1998), 28-29.

Gambar 2.2
Pareto Efficiency Dalam Edgeworth Box Diagram



Samuelson dalam karyanya *Economics* menyatakan bahwa pemanfaatan batas kemungkinan produksi akan mengarah kepada tercapainya tingkat efisiensi yang dapat mempertahankan kepuasan (utility) seseorang. Cara lain untuk memahami konsep efisiensi ini menurut Samuelson adalah dengan cara mengaitkannya dengan perdagangan. Misalnya orang membawa barang hasil produksinya ke pasar untuk ditukarkan dengan barang orang lain. Setiap kali terjadi pertukaran (perdagangan), maka utilitas kedua pihak akan naik. Jika semua kemungkinan pertukaran yang menguntungkan telah habis sehingga tidak ada lagi kenaikan utilitas, maka dapat dikatakan bahwa keadaan telah mencapai efisien.⁵³

Kenneth Boulding menyatakan bahwa the subject matter of welfare economics, berbeda dengan bentuk welfare lainnya, yang menggunakan pendekatan harta atau “riches”. Dengan pendekatannya ini ia lebih lanjut memperkukuhkan konsepsi yang telah dikenal sebagai “social optimum”, yaitu Paretian optimality (optimalitas ala Pareto dan Edgeworth), di mana economic efficiency mencapai social optimum bila tidak seorangpun bisa lagi menjadi lebih beruntung (better-off) tanpa membuat orang lain merugi (worse-off). Dalam pada itu, pemborosan (dalam konsepsi social optimum ini) masih terjadi bila seseorang masih bisa menolong orang tanpa merugi. Apa yang dikemukakan Boulding ini serta kaitannya dengan Vilfredo Pareto dan

⁵³ Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, *Economics*, 382–383.

Francis Edgeworth, Alfred Marshall dan A.C. Pigou, pada dasarnya adalah “old utilitarian” yang tidak terlepas dari mekanisme Perfect competition dalam pasar.⁵⁴

Sri-Edi Sri-Edi Swasono dalam karyanya *Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisme dan Pasar Bebas* menyatakan bahwa efisiensi yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto adalah efisiensi ekonomi dalam tataran mikro dan dalam konteks pelaku ekonomi individual, yaitu efisiensi yang terkait dengan upaya individu mencapai kepuasan maksimal (ekuilibrium pada fungsi preferensi) ataupun upaya badan usaha komersial mencapai laba maksimal (ekuilibrium pada kongruensi fungsi biaya dan fungsi penerimaan)⁵⁵. Paham ekonomi neoklasikal berdasar self-interest berorientasi pada efisiensi ekonomi dalam pengertian ini.

Kriteria efisiensi pareto ini juga tidak dapat secara sederhana di terima oleh mayoritas ekonom muslim. Mannan misalnya menyikapi hati-hati konsep pareto optimum yang ditawarkan oleh V. Pareto, karena Mannan lebih menekankan pentingnya motif altruisme

⁵⁴ Sri-Edi Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire* (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010), 7.

⁵⁵ Di samping efisiensi ekonomi seperti yang dikemukakan di atas, kita mengenal pula berbagai pengertian mengenai efisiensi. Efisiensi dapat ditinjau secara teknis-ekonomis semata-mata dan kita sebut dengan efisiensi teknis, yaitu berdasar pada prinsip tehnikal “dengan biaya tertentu diperoleh hasil maksimal”. Kondisi teknis-ekonomis sebagai hasil rekayasa (engineering) demikian ini merupakan kondisi optimal, yang kita sebut efisiensi optimal. Dalam konteks pembangunan nasional (kepentingan masyarakat keseluruhan pada tataran makro) dimensi efisiensi ekonomi meliputi (1) efisiensi statis (mampu memproduksi produk nasional sesuai preferensi sosial secara optimal); (2) efisiensi distribusional (mampu melayani struktur permintaan efektif yang mencerminkan distribusi pendapatan yang ada dan adil; (3) efisiensi dinamis (efisiensi yang dikaitkan dengan ekspansi optimal untuk memenuhi tuntutan transformasi ekonomi dan kemajuan ekonomi masa depan). Ketiganya membentuk ‘efisiensi sosial’ melalui penentuan social indifference curve yang rumit. Bahaya besar yang sering nampak dalam wacana ekonomi akhir-akhir ini adalah secara absurd menganggap wajar dapat dilakukan transformasi analogis terhadap efisiensi ekonomi dari tataran mikro ke tataran makro, yang tentu akan menjerumuskan ke dalam an invisible hand fallacy trap. Dengan demikian jelas bahwa efisiensi ekonomi pada tataran mikro tidak otomatis rukun dengan efisiensi ekonomi pada tataran makro, efisiensi ekonomi memiliki dimensi berbeda dengan efisiensi sosial yang lebih kompleks dan dinamis. Lihat Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila, 2005), 17-19.

(altruism) yang lebih menjunjung tinggi pemerataan distribusi kekayaan dan pendapatan di kalangan masyarakat⁵⁶. Berbeda dengan Mannan, Siddiqi lebih menfokuskan pada nilai keadilan dan masalah bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang pelaku ekonomi bertindak adil dan memperhatikan aspek masalah maka ia telah mencapai efisiensi alokatif.⁵⁷ Kahf menyatakan bahwa efisiensi dan keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan akan tercapai ketika terpenuhi kebutuhan dasar primer (*daruriyyah*) dengan tidak mengabaikan kebutuhan sekunder (*hajjiyyah*) dan kebutuhan tertier (*tahsiniyyah*).⁵⁸

Efisiensi ekonomi yang berkembang dalam paham neo klasik memiliki pencapaian untuk tujuan tertentu baik secara mikro maupun secara makro ekonomi. Dalam konteks ekonomi mikro, efisiensi akan tercermin dalam perilaku individu dalam mencapai tingkat kepuasan maksimum (*maximum satisfied*), di mana pencapaian ini terjadi ketika *budget constrain* bertemu dengan *indifferent curve* (pada titik B3) dengan kata lain kepuasan terjadi ketika equilibrium pada fungsi preferensi⁵⁹.

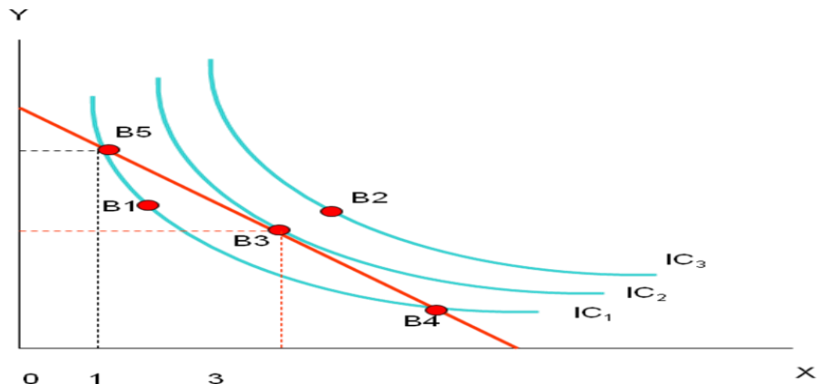
Gambar 2.2 **Kurva Kepuasan Maksimum**

⁵⁶ ‘Abd al-Manna>n, Muhammad. “*The Behaviour of Firm and Its Objectives in an Islamic Framework.*” dalam Syyed Taher, *Readings in Microeconomics: anIslamic Perspective*. Malaysia: Longman, 1992.

⁵⁷ Lihat Muhammad Najetullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester UK: Islamic Foundation, 2010), 56-57

⁵⁸ Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analitical Study of the Foundationing of Islamic System* (Indiana: MSA of USA and Canada, 1978), 34-35

⁵⁹ Kurva *Indifferent Curve* dan *Budget Line* menggambarkan tingkat kepuasan maksimum yang diraih seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa dalam tingkat pendapatan tertentu. Lihat: Mankiw, N. Gregory, *Macroeconomics* (New York: Worth Publisher, 2003), 34

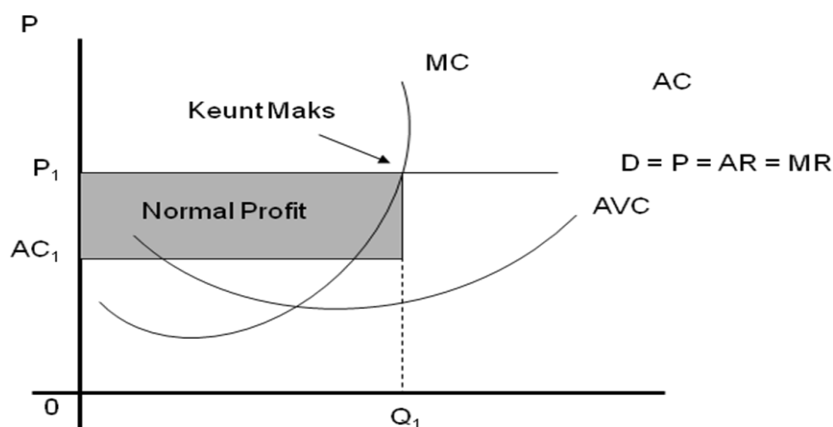


Sedangkan untuk korporasi atau perusahaan tujuan efisiensinya adalah menciptakan laba maksimum (*maximum profit*) di mana terbentuk keseimbangan (*equilibrium*) pada kongruensi fungsi biaya dan fungsi penerimaan (Terdapat pada gambar 2.2), dimana $D=P=AR=MR$ ⁶⁰. Perilaku secara individu (mikro) akan mempengaruhi pengelolaan ekonomi secara makro yang mengedepankan perilaku kompetisi (kompetitivisme) dalam mencapai tujuan ekonomi. Kedua perilaku (*behavior*) yang berorientasi kepada kepentingan individu (*self interest*) semata tersebut telah menjadi ciri khas ekonomi neo klasik selama ini⁶¹.

Gambar 2.3
Kurva Laba Maksimum
Pada Pasar Persaingan Sempurna

⁶⁰ Dalam pasar persaingan sempurna, keuntungan maksimum akan diraih oleh produsen ketika persamaan $D=P=AR=MR$ terpenuhi. Lihat: Mankiw, N. Gregory, *Macroeconomics* (New York: Worth Publisher, 2003), 65

⁶¹ Dalam matakuliah pengantar Ekonomi Mikro yang diajarkan di seluruh fakultas ekonomi di Indonesia, salah satu materi yang diajarkan adalah tentang teori tingkah laku konsumen (*consumer behavior theory*), dengan tujuannya mencapai kepuasan maksimum (*maximum satisfied*). Sedangkan dalam materi teori tingkah laku konsumen (*produser behavior*), memiliki tujuan memaksimalkan keuntungan (*maximum profit*). Doktrin ini diajarkan kepada mahasiswa tanpa pernah memberikan alternatif konsep yang lebih pas untuk kondisi sosial ekonomi bangsa Indonesia. Akibatnya fakultas ekonomi di Indonesia melahirkan sarjana yang menjadi cikal bakal para kapitalisme yang hanya memikirkan diri sendiri (*self interest*). Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisme dan Pasar Bebas*, 36.



Dalam konteks makroekonomi perilaku kompetisi (*competitivisme*) akan menjadi cara untuk mendapatkan nilai tambah (*value added*) ekonomi. Paham neoklasik membangun teorinya berdasarkan asumsi tentang keinginan manusia yang tidak terbatas (*unlimited wants*), tapi disisi lain sumber-sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi keinginan ekonomi sifatnya terbatas (*limited resources*). Asumsi inilah yang menyebabkan individu harus mengelola sumberdaya dengan seefisien mungkin dalam melakukan pilihan terbaik (*best choice*) dan alternative terbaik (*best alternative*) dengan penggunaan sumberdaya yang tepat dan efisien, untuk menghindari terjadinya kelangkaan (*scarcity*).

Asumsi yang dibangun telah memposisikan manusia dengan sangat sederhana (*simplistic*), dimana manusia hanya dilihat sebagai makhluk rasional yang berdasar inisiatif individunya mengejar utilitas ekonomi optimal yang berdampak kepada kepuasan maksimum (*maximum satisfaction*), kemudian mencari keuntungan yang sebesar-besarnya (*maximum profit*) atau (*maximum gain*) dengan pengorbanan yang kecil kecilnya (*minimum sacrifice*)⁶².

Sifat dasar itulah yang dibangun dalam pandangan *neoklasikal* sehingga mengakibatkan manusia akan selalu merasa bersaing dalam mendapatkan atau pencapaian pemenuhan keinginannya, sehingga persaingan bebas (*free competition*) berwujud

⁶² Paham ekonomi neoklasikal telah mengkerdilkan peran dan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, memiliki kepekaan sosial yang tinggi kepada sesamanya. Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisme dan Pasar-Bebas*, 4.

sebagai perfect competition dengan perfect information dalam sebuah mekanisme yang disebut sebagai mekanisme pasar (*market mechanism*) yang berpedoman kepada mekanisme pasar bebas (*lasser-faire laissez-passer*), yang menguatkan doktrin *non-interference* berdasarkan kebebasan individu (*individual freedom of action*) atau oleh banyak ahli ilmu ekonomi seringkali dikenal dengan istilah makhluk ekonomi (*homo economicus*)⁶³.

Dalam konteks negara perilaku ekonomi neoklasik mengharuskan sebuah negara memiliki instrument yang dipergunakan untuk mencapai tujuan ekonominya yaitu memiliki sebuah fundamentalisme pasar (*market fundamentalism*). Fundamentalisme pasar akan melahirkan mekanisme persaingan bebas (*free perfect competition*) yaitu cara yang digunakan dalam persaingan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Adapun sarana yang dipergunakan dalam menjalankan persaingan bebas tersebut adalah persaingan pasar bebas sempurna (*free perfect market competition*). Dalam siklus ekonomi, ekonomi mikro akan bertransformasi menjadi ekonomi makro. Alur inilah yang kemudian melahirkan konsepsi dan orientasi pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Paham inilah yang kemudian membentuk mainstream ekonomi yaitu kapitalisme global dan globalisasi ekonomi⁶⁴.

Asumsi yang dibangun hanya melihat sisi manusia yang penuh dengan nafsu untuk memenuhi keinginannya dengan mengabaikan faktor lainnya. Dari sinilah lahirnya gagasan tentang berlakunya *perfect individual liberty* dalam wujud semangat individual untuk bersaing dan membentuk *mekanisme free competition* dalam

⁶³ Lihat: Theresa Lunati, "Ethical Issues in Economics: From Altruism to Cooperation to Equity," dalam Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika Mewaspada Globalisme dan Pasar-Bebas*, 4.

⁶⁴ Pemikiran seperti itulah yang diajarkan oleh seluruh universitas yang memiliki fakultas ekonomi tidak hanya di Indonesia tapi juga diseluruh dunia selama bertahun – tahun. Tidak aneh rasanya kemudian paham neoklasik tersebut kemudian tercermin dalam perilaku ekonomi masyarakat dan juga melembaga dalam institusi ekonomi negara secara sistematis, akhirnya menyebabkan perekonomian global menjadi terintegrasi dalam pola kapitalisme, factor inilah yang kemudian melahirkan paham globalisasi ekonomi dengan segala perangkatnya diseluruh dunia. Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspada Globalisme dan Pasar Bebas*, 45.

kehidupan berekonomi⁶⁵. Pandangan yang terbentuk dari asumsi dasar tersebut telah terinternalisasi dalam pengajaran dan pendidikan ilmu ekonomi yang dipelajari diseluruh dunia, sehingga tanpa disadari telah menjelma menjadi sebuah paradigm sosial yang sangat kuat disebagian masyarakat.

Tidak lengkapnya dalam mengambil pandangan Smith tersebut, telah berdampak kepada tidak utuhnya kaum neoklasi dalam memberikan informasi dan pengajaran ilmu ekonomi (*parsialistik neoklasikal*), tetapi disisi lain proses internalisasi paham ekonomi neoklasikal telah sangat kuat, sehingga bisa dirasakan dalam perkembangan ekonomi global nantinya. Faktor inilah yang dirasakan sebagai penyebab utama, tercerabutnya ilmu ekonomi dari etika moral yang melekat pada aktivitasnya. Sehingga pendekatan yang dibangun oleh kaum neoklasikal telah berubah menjadi positivistic dan sangat pragmatis.

Asumsi manusia sebagai individu rasional dengan tuntutan untuk mencari maksimum utilitas merupakan asumsi umum dari ilmu sosial abad ke 19, tetapi dalam perkembangannya kemudian hanya ilmu ekonomi saja yang terus menggunakannya hingga saat ini. Sementara itu nilai-nilai efektif yang melekat pada manusia rasional dabaikan. Terciptanya pengkotakan atau isolasi diri ekonomi neoklasikal terbentuk tidak saja karena faktor pengaruh ideologi liberalisme yang sejak awal telah menjadi pakem utama dari perkembangan paham neoklasikal, tetapi juga lebih disebabkan karena telah mengabaikan kedudukan ilmu ekonomi sebagai suatu ilmu moral.

Kritik yang bertumpu kepada aliran ekonomi Neoklasikal secara filosofis sebenarnya bertumpu kepada bias yang terlalu memutlakkan kepada paradigma positivisme, yang melihat realitas hanya dari sudut permodelan yang terlalu disederhanakan dengan bertumpu kepada analisis kuantitatif, ditunjang dengan pemakaian asumsi-asumsi yang sering tidak realistis. Realitas empiris yang terjadi merupakan refleksi dari kondisi deterministik serta hanyalah sebuah materi belaka dan bagaikan sebuah mesin, sehingga perbaikannya hanyalah bertumpu kepada unsur-unsur yang ada dalam mesin

⁶⁵ Lihat Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspada Globalisme dan Pasar-Bebas*, 3.

tersebut. Analisis yang terlalu sederhana dan steril ini pada kenyataannya bisa berlainan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi⁶⁶.

Dengan melihat pengaruh yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang ini, ilmu ekonomi telah bergerak semakin jauh dari akar filosofi dan etikanya, dan telah menjadi sebuah jaringan hubungan yang bersifat mekanis dan rentan terhadap perangkat kuantifikasi dan prediksi. Efisiensi dan penumpukan kekayaan telah menjadi tujuan utama dari pencapaian ilmu ekonomi. Sehingga konsep tentang keadilan dan kesejahteraan menjadi sangat asing dan terpinggirkan dalam perkembangan ilmu ekonomi⁶⁷.

Banyak koreksi yang telah dilakukan oleh para pakar ekonomi⁶⁸ terhadap kelemahan – kelemahan neoklasikal, baik dari sisi landasan (1) filosofis dan paradigma berfikir maupun dari (2) aplikasi dalam kebijakan ekonomi. Bahkan sejumlah ekonom telah menekankan perlunya paradigma baru dalam menyusun ilmu ekonomi kedepan. Sebagian besar memandang menyanggah validitas dan relevansi asumsi-asumsi dasar (*axiom dan paradigms*) yang mendasari pemikiran dan pengembangan neoklasikal.

Dari sisi aplikasi kebijakan ekonomi, neoklasikal telah membiarkan bahkan makin menghasilkan ketimpangan ketimpangan ekonomi yang memiliki dampak sosial yang luas dalam bentuk pengangguran yang semakin besar, jurang kemiskinan yang semakin

⁶⁶ Pendekatan ekonomi neoklasikal dalam membentuk paradigma dasar dan asumsi, sudah sangat tidak relevan dengan perkembangan keilmuan. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, 60.

⁶⁷ Konsep ekonomi neoklasikal, yang dipelajari oleh mahasiswa fakultas ekonomi, telah membuat perubahan yang sangat mendalam dalam cara pandang terhadap aktifitas ekonomi. Lihat: Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, 62.

⁶⁸ Para pakar dan ilmuwan yang mengemukakan kritiknya terhadap *neoclassical mainstream economic*, antara lain; Polanyi, Baran, Galbraith, J. Robinson, Kaldor, Myrdal, Singer, Seers, Haq, Sen, Streeten, Kuttner, Giddens, Etzioni, Chapra, Soros, Stiglitz, JW Smith. Sementara itu para pakar dan ilmuwan dari Indonesia antara lain; Hatta, SumitroDjojohadikusumo, Sarbini, Sritrua Arief, Mubyarto, Bintoro Tjokroamdjojo, Sri Edi Sri-Edi Swasono, Kwik Kian Gie, Hidayat Nataatmaja, Hermawan Soewardi, Yuyun Wirasasmita, Ginanjar Kartasasmita, Dawam Raharjo, Rizal ramli, Kurtubi, Hendri Saparini, Ichsanuddin Noorsy, Revirsond Baswir dll. Lihat: Sri-Edi Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspada Globalisme dan Pasar-Bebas*, 38.

lebar, dan eksploitasi terhadap sumber daya alam khususnya yang terdapat di negara-negara sedang berkembang. Eksploitasi tersebut telah berlangsung bertahun – tahun tanpa ada yang bisa menghentikan⁶⁹. Tetapi yang tidak bisa ditutupi adalah krisis multidimensi yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi dan keuangan yang berlangsung secara rutin terus menerus dialami oleh hampir seluruh negara di dunia.

Memperhatikan banyaknya pihak yang prihatin terhadap kegagalan dan kebangkrutan aliran ekonomi Neoklasikal, maka sudah seyakinya dilakukan peninjauan ulang terhadap keberadaan aliran ekonomi ini. Argumentasi yang menyatakan terdapat kegagalan dalam pemikiran dan pemakaian aliran neoklasikal perlu dikemukakan⁷⁰, baik dari sudut pandang paradigma ilmu ekonomi dan aspek filosofisnya maupun dari sisi tatanan yang lebih aplikasi yaitu dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkannya.

F. Kegagalan Ekonomi Neo-klasikal dalam Tataran Aplikasi Sosial dan Ekonomi

Dilema utama yang dihadapi oleh sebagian besar negara-negara berkembang adalah, ternyata pembangunan ekonomi yang mereka lakukan selama ini justru menimbulkan persoalan baru yang sangat pelik. Kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan telah menjadi masalah besar disebagian besar negara berkembang. Berbagai kegagalan struktural dari perekonomian global ini telah

⁶⁹ Mengenai eksploitasi kekayaan alam yang dilakukan negara maju terhadap negara berkembang diungkap oleh seorang mantan pejabat di Amerika Serikat dalam bukunya. Jhon Perkins, *Confession of an Economic Hitman*, Barret-Kohler Publisher, San Fransisco, 20004. Economic Hit Men adalah professional berpenghasilan sangat tinggi yang telah melakukan aksinya dengan menipu negara-negara sedang berkembang diseluruh dunia. Mereka menyalurkan uang dari Bank Dunia, USAID, dan organisasi bantuan luar negeri lainnya menjadi dana korporasi – korporasi raksasa dan pendapatan beberapa keluarga kaya yang mengendalikan sumber-sumber daya alam yang ada planet ini. Lihat: Jhon Perkins, *Confession of an Economic Hitman* (San Fransisco: Barret-Kohler Publisher, 2004), 45.

⁷⁰ Banyak seruan yang telah dilakukan oleh banyak pihak khususnya para pakar ekonomi, untuk segera mengakhiri pasar bebas (*the end of laissez-faire*). Pertama kali disuarakan oleh John Maynard Keynes (1926); kedua oleh Karl Polanyi (1944), ketiga oleh Gunnar Myrdal, Jhon Kenneth Gilbraith, Francis bator, paul Baran dll (1957-1960); keempat oleh Robert Kuttner, Lester Thurow, George Soros, Joseph Stiglitz dll (1990-2002). Lihat: Sri-Edi Sri-Edi Swasono, *Neoliberalisme dan Membangun Ekonomi Nasional* (Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2010), 49.

menciptakan bencana ekonomi (*economic disaster*) yang luar biasa di tengah-tengah keajaiban ekonomi (*economic miracle*) dunia. Kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran telah melahirkan berbagai tragedi kemanusiaan yang luas dan dalam

Sistim ekonomi yang digunakan oleh sebagian besar negara berkembang saat ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman neoklasikal ekonomi, ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang timbul akibat pembangunan ekonomi. Perlu sebuah pendekatan baru dalam mengelola perekonomian dinegara berkembang.

Dengan sangat tepat, Gunnar Myrdal yang memperoleh hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1974 menyatakan dalam bukunya *Asian Drama. An Inquiry in to the Poverty of Nations* bahwa teori ekonomi yang sekarang diajarkan dan diaplikasikan di seluruh dunia adalah berbasis kepada aliran Neoklasik yang cocok untuk negara maju. Menurutnya teori ekonomi tersebut tidak dikembangkan untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi negara-negara sedang berkembang, oleh karenanya bagi negara sedang berkembang diperlukan teori yang lain dengan negara maju karena perbedaan masalah sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya⁷¹.

Chapra dalam bukunya *The Future of Economics: An Islamic Perspective* menyatakan ekonomi neoklasik memang telah memperoleh wibawa intelektual yang besar, akan tetapi bukanlah kecanggihan suatu disiplin ilmu yang menarik perhatian orang, melainkan kontribusi apa yang ditawarkan oleh disiplin ilmu tersebut pada kemanusiaan dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan umat manusia, yang pada puncaknya orang akan meletakkan keadilan dan kesejahteraan umum di atasnya⁷².

Dalam hal ini menurut Chapra ekonomi neoklasik telah gagal, karena ketidaksukaan ekonomi ini pada penilaian berdasarkan norma, dan konsentrasinya yang berlebihan pada maksimalisasi kekayaan,

⁷¹ Banyak ahli dan pakar yang lebih realistis melihat persoalan pembangunan dinegara berkembang, khususnya di Asia. Dimana banyak sekali perbedaan dengan negara-negara maju. Lihat: Gunnar Myrdal, *Asian Drama. An Inquiry in to the Poverty of Nations* (New York: Penguin Books, 1974)

⁷² Kelemahan ekonomi neoklasikal, telah membuat banyak ahli untuk mencoba memberikan jalan keluar bagi permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi. Lihat: Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester UK: Islamic Foundation, 2001), 47

pemuasan keinginan serta pemenuhan kebutuhan perorangan⁷³. Sejauh mencakup kepentingan sosial, para ekonom neoklasik secara umum telah mengasumsikan bahwa persaingan akan membatasi kepentingan pribadi, dan karena itu mendorong terpenuhinya kepentingan sosial. Sekiranya bahasan ilmu ekonomi orientasinya pada kesejahteraan manusia, maka cakupannya tidak hanya terbatas pada variabel-variabel ekonomi saja, melainkan perlu memperhatikan masalah moral, psikologi, sosial, politik, demografi, dan sejarah.

Dengan sangat teliti seorang pakar ekonomi pembangunan Everett E. Hagen dalam karyannya *On the theory of social change: how economic growth begins* tentang perbandingan pembangunan di Asia, menyatakan Indonesia seharusnya merupakan negara industri termaju di Asia diikuti oleh India dan Cina, sedangkan Jepang menjadi negara yang paling tidak berkembang⁷⁴. Hagen menilai bahwa Indonesia telah memiliki kontak dan keterbukaan terlama dengan institut-institut dan gagasan-gagasan Barat, sementara Jepang adalah yang tersingkat⁷⁵. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, di mana Jepang menjadi negara industri termaju di Asia, bahkan menjadi salah satu negara terdepan di dunia dalam perindustrian, sebaliknya Indonesia tetap menduduki ranking bawah di Asia. Menurut Hagen dari kenyataan yang terjadi tersebut membawa hikmah, bahwa faktor-faktor non ekonomi seperti keyakinan-keyakinan religius, sikap kerja dan kesenangan, serta kriteria status sosial harus sepenuhnya di masukkan ke dalam sistem teoritis sebagai variabel-variabel yang turut mempengaruhi variabel tergantungnya.

Dalam penelitian yang lain seorang peraih nobel ekonomi pada tahun 1998 Amartya Sen dalam karyannya mengungkapkan ketidakadilan terhadap suasana dan kondisi sosio ekonomi masyarakatnya, tetapi lebih kepada kemauan pemimpin politik dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang tidak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat tersebut. Hasil penelitian Sen membuktikan bahwa bencana kelaparan bukan

⁷³ Persoalan mendasar yang kemudian menjadi pemicu kegagalan ekonomi neoklasikal dalam memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, 48

⁷⁴ Lihat: Everett E. Hagen, *On the theory of social change: how economic growth begins* (Massachusetts :Center for International Studies MIT, 1962)

⁷⁵ Lihat: Everett E. Hagen, *On the theory of social change: how economic growth begins*, 110.

cuma malapetaka alam, tetapi lebih merupakan hasil keruntuhan ekonomi dan politik⁷⁶.

Kegagalan konsep neoklasikal tersebut semakin terkuak ketika Muhammad Yunus peraih hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006 dalam karyannya telah mengkritik teori ekonomi dengan corak sistem pasar bebas seperti berlaku di negara AS sangat tidak cocok untuk mengatasi kemiskinan di negara sedang berkembang⁷⁷. Yunus mengembangkan konsep untuk mengatasi kemiskinan yang disebut kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*), yang berhasil membawa perubahan multidimensional pada masyarakat miskin khususnya kaum perempuan

Setiap perekonomian akan mencapai keberhasilan atau dengan kata lain telah mencapai tingkat efisiensi yang optimal apabila telah menggunakan seluruh potensi sumber daya manusia dan materi yang terbatas sedemikian rupa, sehingga kuantitas barang dan jasa maksimum yang dapat memuaskan kebutuhan telah dihasilkan dengan tingkat stabilitas ekonomi yang baik dan tingkat pertumbuhan berkesinambungan dimasa yang akan datang. Pengujian efisiensi tersebut terletak pada kemampuannya untuk mencapai hasil yang dapat diterima secara sosial tanpa menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi dan sosial, atau merusak tatanan ekonomi, sosial dan moral dimasyarakat⁷⁸.

Suatu perekonomian mungkin dikatakan telah mencapai keadilan yang optimal apabila barang dan jasa yang dihasilkan didistribusikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan semua individu tanpa terkecuali bisa terpenuhi. Tanpa meimbulkan pengaruh buruk terhadap motivasi untuk bekerja, menabung, berinvestasi dan melakukan usaha. Apabila kondisi tersebut tidak tercapai, maka besar

⁷⁶ Sen, Amartya, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation* (New York: Oxford University Press, 1981),

⁷⁷ Mohammed Yunus, *Creating a world without poverty: social business and the future of capitalism* (New York: Public Affair, 2007), 35.

⁷⁸ Chapra memberikan perspektif baru dalam mendefinisikan efisiensi dalam perekonomian, dimana tidak hanya sekedar menilai dari instrument ekonomi belaka, tetapi juga melihat instrument sosial-ekonomi. Lihat: Umer Chapra, *The Future of Economics; An Islamic Perspective*, 68.

kemungkinan telah terjadi distorsi sehingga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan tersebut⁷⁹.

Dalam perkembangan pemikiran ekonomi untuk memajukan kemakmuran dan kesejahteraan sosial secara lebih adil dan bermartabat, jajaran kaum strukturalis yang menolak pasar bebas dalam skala global ataupun nasional dan lebih mengutamakan politik ekonomi dengan kebijakan-kebijakan ekonomi restrukturisasi untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural. Sedangkan kaum reformis pasar lebih ke arah sekadar menyarankan kebijaksanaan ekonomi pasar yang bersifat mengoreksi kelemahan-kelemahan pasar - terkadang tambal- sulam. Pandangan kaum reformis pasar ini membentuk orde ekonomi populer, yang dalam wujud solid dan komprehensifnya disebut sebagai “ekonomi pasar sosial” (Social market economy), “jalan tengah”, ataupun yang barang kali disebut “orde ekonomi pasar terkendali” sebagaimana pernah digagas ISEI dengan implementasi tambal-sulamnya yang kurang jelas. Ketiganya terbentang di dalam spektrum (istilah Sri-Edi) antara “rakyat ramah terhadap pasar” pada satu sisi dan “pasar ramah terhadap rakyat” pada sisi lain dengan peran pragmatis negara yang memainkan pendulum.⁸⁰

Dengan menguraikan fakta dan juga argumentasi yang akurat telah dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya paham ekonomi neoklasikal telah gagal dalam mencapai kedua tujuan tersebut, yaitu pencapaian efisiensi tanpa merusak tatanan ekonomi, sosial dan moral masyarakat. Serta gagal dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya segala kebutuhan yang diperlukan masyarakat⁸¹. Fakta inilah yang kemudian oleh

⁷⁹ Chapra juga menilai bahwa selain efisiensi, perlu juga dilihat faktor keadilan dalam ekonomi, sehingga akan mendorong terciptanya pencapaian tujuan – tujuan ekonomi yang lebih merata. Lihat: Umer Chapra, *The Future of Economics; An Islamic Perspective*, 72.

⁸⁰ Menurut pengamatan Sri-Edi memang pandangan kalangan ISEI selama ini kelihatan tambal-sulam, ibarat ambil “jalan tengah” yang aman-aman dari kapitalisme dan sosialisme komunistik, tanpa eksplisitas dalam ideologi, moral-etika ataupun nilai-nilai agama, sebagaimana nampak dalam rumusan-rumusan kebijaksanaan. Sri-Edi Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire*, 41.

⁸¹ Faktor utama kegagalan neoklasikal adalah tidak tercapainya tujuan normatif dan positif dalam masyarakat, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat. Lihat: Umer Chapra, *The Future of Economics; An Islamic Perspective*, 74.

sebagian kalangan menyatakan bahwa paham neoklasikal ekonomi telah berakhir atau harus segera dihentikan, agar tidak membawa pengaruh yang terlalu buruk buat kehidupan masyarakat dimasa yang akan datang.

G. Menata Kembali Sistem Ekonomi Dalam Transformasi Ekonomi

Sudah lebih dari dua ratus tahun semenjak Adam Smith menulis buku *An Inquiry Into The Nature and Cause of The Wealth of Nation* pada tahun 1776, ilmu ekonomi telah memasuki fase baru dalam perkembangannya. Paradigma yang dibangun dari pemikiran Smith tersebut telah mewarnai perkembangan ilmu ekonomi diseluruh dunia. Paham Neoklasikal telah membawa ilmu ekonomi menjadi ilmu yang sarat dengan kepentingan individu dalam mencapai tujuan hidupnya. Sikap inilah yang lambat laun menjadi sebuah perilaku dan tujuan bersama terutama dalam mencapai kepemilikan dan penguasaan terhadap sumber daya ekonomi, cara pandang ini kemudian berkembang menjadi sikap hidup yang kemudian dikenal dengan istilah kapitalis atau pahamnya dikenal dengan istilah kapitalisme.

Perkembangan ilmu ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh sistem yang kapitalis telah memberikan perubahan yang sangat ekstrem bagi peradaban dunia. Selama kurang lebih dua ratus tahun ilmu ekonomi telah berkembang sangat inovatif, memiliki metodologi yang sangat kuat, penggunaan alat analisis matematika dan model ekonometri telah semakin meluas dalam membuat evaluasi dan prediksi dalam membuat analisa ekonomi. Selain itu perubahan kondisi perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat cepat terjadi. Telah mengakibatkan terjadi perubahan gaya hidup penduduk dan lingkungan yang terjadi secara missal, ditingkat makro telah menjadikan sebagian negara menjadi negara kekuatan ekonomi dan tumbuh menjadi negara industry besar dengan kapasitas ekonomi yang sangat besar. Sehingga lambat laun telah terjadi hegemoni sejagat terhadap penguasaan sumber daya ekonomi hampir diseluruh dunia.

Tetapi, kondisi tersebut tidak sepenuhnya membawa kebaikan bagi terciptanya tatanan ekonomi yang lebih adil dan sejahtera. Pandangan ekonomi neoklasikal yang telah menciptakan mekanisme pasar bebas terbukti tidak mampu mengatasi ketimpangan – ketimpangan struktural. Oleh sebab itu perlu penyelesaian

ketimpangan struktural tersebut dengan pendekatan strukturalis dengan memperbaiki hubungan antar instrument ekonomi.

Paham neoklasikal yang telah berwujud sistem kapitalisme telah menjadi kekuatan yang sangat dominan dalam perkembangan ilmu ekonomi dan perekonomian dunia, mulai kehilangan keseimbangannya. Banyaknya persoalan ekonomi yang timbul akibat dari ketimpangan ekonomi telah menjadi pertanyaan besar bagi sebagian kalangan akan kemampuan menyelesaikan persoalan ekonomi melalui premium mobile dari mekanisme pasar mulai dipertanyakan. Beberapa pemikiran kritis telah bermunculan untuk mewaspadaikan kerapuhan sistem ekonomi yang telah dipergunakan lebih dari dua ratus tahun ini⁸². Sebagian kalangan yang menginginkan perubahan secara structural terus merumuskan gagasan dan landasan teorinya semakin solid⁸³, yang kemudian lebih dikenal dengan paham strukturalis⁸⁴.

⁸² Paul Samuelson (MIT): "...tidak ada tanda-tanda bahwa kita mengalami konvergensi menuju suatu keajaiban yang menyebabkan segala sesuatunya akan tersusun rapi...". Pakar ekonomi mulai menyadari bahwa mereka telah membangun suatu bangunan yang canggih diatas landasan yang sempit dan rapuh. Lihat: Robert Heibronner and Lester C. Thurow, *Economics Explained* (New York: Simon Schuster, 1994)

⁸³ Sebenarnya sudah lebih dari tiga dekade para pemikir strukturalis dibidang pembangunan ekonomi telah menyampaikan pemikirannya tentang kondisi ilmu ekonomi yang semakin timpang, hubungan structural antara penguasa dan rakyatnya menjadi tidak tertata dengan baik, sehingga menyebabkan rakyat yang tidak memiliki sumberdaya ekonomi menjadi tidak berdaya. Berbagai ketimpangan structural yang terjadi dalam proses pembangunan berdasarkan pemikiran neoklasikal diungkapkan oleh tokoh utama strukturalis barat, antara lain: Hans Singer (1952), Paul Baran (1952, 1961, dan 1970), Paul M. Sweezy (1968), Joan Robinson (1959, 1962, 1979), Gunnar Myrdal (1957), Nicholas Kaldor (1975), Dudley Seers (1972) dan Jan Tinbergen (1968, 1976, 1992-Nobel Laureate), kemudian tergabung juga didalamnya; Irma Adelman (1967, 1976, 1986, 2001), Michael Lipton (1977), Paul Streeten (1976, 1986), Amartya Sen (1987, 1992, 1999-Nobel Laureate), Michael Poole (1989), Douglas North (1990, 2001, - Nobel Laureate), Robert Kuttner (1991), Lester Thurow (1983, 1994, 1996), Joseph Stiglitz (1994, 2001-Nobel Laureate), Gustav Ranis (1992,2001), Susan George (1992, 1995), Frank Ackerman (1998), Andrew Hurrell dan Ngaire Woods (1999), J.W. Smith (2000) dan Kaushik Basu (1999, 2003). Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaikan Globalisasi dan Pasar Bebas*, 25.

⁸⁴ Pandangan strukturalis merupakan teori yang menggunakan pendekatan structural. Pendekatan ini menekankan lingkungan material manusia, yaitu organisasi kemasyarakatan beserta sistem imbalan-imbalan material yang diberikannya, perubahan-perubahan pada lingkungan material manusia termasuk perubahan -

Munculnya pandangan strukturalis yang melakukan koreksi terhadap kebijakan ekonomi yang dipengaruhi oleh paham neoklasikal, telah memberikan pencerahan terhadap kebuntuan ekonomi selama ini. Terutama pada kondisi terjadinya ketimpangan struktural sebagai sumber ketidakadilan sosial-ekonomi. Para ekonom strukturalis mencoba menguraikan bagaimana ketimpangan yang telah menimbulkan permasalahan ekonomi tersebut, terutama yang berkaitan dengan pemusatan penguasaan dan kepemilikan asset ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, produktivitas dan kesempatan ekonomi. Selain itu juga terdapat ketimpangan dalam kelembagaan, ekonomi partisipasi, dan emansipasi sosial-ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan masalah ketergantungan serta subordinasi sosial-ekonomi.

Pandangan strukturalis mencoba mengembalikan ilmu ekonomi pada peran normatifnya, menjelajahi komposisi dan interrelasi antara para actor, sektor-sektor dan variable –variabel ekonomi dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan sosial-ekonomi. Untuk mewujudkan gagasan tersebut kaum strukturalis mengusulkan perlunya dilakukan transformasi ekonomi dan transformasi sosial dalam kebijakan ekonomi sebuah negara. Tentu tuntutan strukturalis ini tidak mudah, karna akan langsung berhadapan dengan kepentingan ekonomi global yang hari ini telah menguasai sumberdaya ekonomi dibanyak negara.

Pandangan strukturalis mencoba melakukan koreksi terhadap kelemahan mendasar dari mekanisme pasar dan persaingan bebas, yang tidak mampu mengatasi ketimpangan –ketimpangan struktural yang semakin mengemuka, baik antar kaum pemilik modal dan buruhnya, maupun antar negara maju dengan negara miskin⁸⁵. Oleh

perubahan teknologi. Lingkungan material ini dianggap sebagai faktor yang lebih penting daripada keadaan psikologi dan nilai-nilai kemasyarakatan yang ada dalam mempengaruhi tingkah laku manusia. Lihat: Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995).

⁸⁵ Banyak istilah –istilah yang sangat keras digunakan oleh kaum strukturalis untuk menunjukkan kegagalan “*mindset neoklasikal, seperti; “global capitalism”, “turbo capitalism”, “new imperialism”, “cowboy capitalism”, “old west capitalism”, “The dangerous currents”, the winner-take all market”, “the zero-sum society”, “the winner-take all society, “republic pasar bebas”*”. Ungkapan – ungkapan tersebut diatas merupakan bentuk dari “protest” atas paham neoklasikal yang tidak hanya telah melemahkan ilmu ekonomi sendiri, tetapi juga telah merusak tatanan kemasyarakatan di sebuah negara. Tetapi istilah-istilah tersebut belum menyadarkan para pengambil kebijakan dibanyak negara untuk mulai merubah

sebab itu strukturalisme berorientasi kepada strukturisasi dan restrukturisasi ekonomi yang disertai dengan intervensi mengatur dan mengontrol mekanisme pasar.

Ide dan gagasan tentang transformasi yang dilakukan untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi oleh para pemikir strukturalis telah menjelma sebagai gagasan alternative yang siap untuk dijalankan. Kajian mengenai konsep transformasi ini, akan lebih mengutamakan pendekatan yang humanitarian, dimana pembangunan manusia dengan segala perangkatnya yang akan diutamakan. Di Indonesia gagasan transformasi ini sesungguhnya bukanlah gagasan yang baru, jauh hari Bung Hatta selaku konseptor dasar ekonomi Indonesia sudah mengingatkan akan hal tersebut. Gagasan pemikiran bung Hatta adalah perlunya perekonomian nasional melakukan transformasi ekonomi dan transformasi sosial, apabila bangsa dan negara benar-benar ingin melepaskan diri dari sistim ekonomi penjajah yang subordinatif dan serba ketergantungan⁸⁶.

Transformasi ekonomi⁸⁷ dan transformasi sosial yang digagas merupakan sesuatu yang harus dijalankan beriringan, karena keduanya akan saling melengkapi baik pada tataran ide, gagasan maupun

mindset kebijakannya, salah satunya dengan merevisi kurikulum pelajaran ilmu ekonomi di perguruan tinggi. Selain itu belum adanya upaya untuk melakukan proses transformasi ekonomi dan sosial. Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Gobalisasi dan Pasar Bebas*, 152.

⁸⁶ Pada tahun 1931 Mohammad Hatta memunculkan istilah “perekonomian rakyat” sebagai lawan dikotomis dari “perekonomian kolonial – kapital” dan sebagai titik tolak paham strukturalismenya. Hal tersebut senada dengan orientasi kerakyatan yang menjiwai kemerdekaan Indonesia untuk menggusur Daulat Tuanku dan menggusur Daulat Rakyat. Perekonomian kolonial-kapital ini, yang bermula dengan kolonialisme VOC dan Hindia Belanda berikut culturstelsel serta pelaksanaan UU Agraria 1870, boleh dibilang masih berlanjut (dalam wujud ekonomi kapitalistik neoliberalistik dan konglomerasi ekonomi) hingga saat ini. Hal itulah yang membuat Bung Hatta perlunya menggagas transformasi ekonomi dan sosial bagi perekonomian nasional, dan dirasakan masih sangat relevan dengan kondisi perekonomian nasional hari ini. Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, “Sistim Ekonomi Nasional: Komitmen Birokrasi Kita,” Artikel Diklatpim (April 200), 2-3.

⁸⁷ Gagasan mengenai transformasi ekonomi dan sosial juga telah digagas secara mendalam dan sangat actual oleh Sri Edi Sri-Edi Swasono, boleh dikatakan beliau adalah tokoh terdepan yang mengusung gagasan tranformasi ekonomi nasional. Lihat Sri-Edi Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire* (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010), 100-102.

implementasinya. Transformasi ekonomi yang dimaksudkan itu adalah suatu upaya restrukturisasi membentuk sistem ekonomi baru yang meninggalkan asas perorangan (individualism) dan menggantikannya dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan (mutualism dan brotherhood) berdasarkan demokrasi ekonomi.

Sedangkan transformasi sosial yang dimaksud adalah membentuk hubungan sosial-ekonomi yang partisipatori dan emansipatori. Karena selama ini hubungan yang terbentuk selalu menimbulkan jarak yang sangat lebar yang kemudian menimbulkan jurang pemisah yang sangat lebar antar pelaku ekonomi. Hubungan ekonomi semacam ini menjadi sumber dari terjadinya ketimpangan dalam pembagian pendapatan, dimana yang kuat akan mengakumulasi surplus ekonomi dari bawah, sementara yang lemah mengalami eksploitasi dari atas. Oleh sebab itu tugas utama transformasi sosial adalah melakukan koreksi terhadap pola hubungan tersebut, sehingga ekonomi akan berpihak pada rakyat banyak. Dalam konteks ini bisa dikatakan bahwa transformasi adalah restrukturisasi⁸⁸.

H. Pendekatan Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Perkembangan ekonomi Islam dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan wacana baru dalam perkembangan ilmu ekonomi kontemporer. Islam sebagai pandangan hidup (*way of life*) tidak hanya berperan sebagai sebuah agama tetapi sebuah jalan hidup yang diyakini oleh pemeluknya untuk diikuti dan ditaati⁸⁹. Oleh sebab itu pendekatan

⁸⁸ Penegasan transformasi merupakan wujud dari restrukturisasi dari pandangan atau paham ekonomi neoklasikal telah diungkapkan oleh Sri Edi Sri-Edi Swasono dalam berbagai buku dan ceramah beliau di beberapa kampus, baik didalam maupun diluar negeri. Beliau selalu berpedoman dalam melakukan restrukturisasi kepada UUD 1945, karena merupakan ruh dari sistem ekonomi nasional. Beliau juga mengungkapkan, dalam sistem ekonomi Indonesia tidak mengenal jalan kanan atau jalan kiri, tetapi berpedoman kepada jalan hidup dalam pancasila dan UUD 1945. Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire*, 100-102.

⁸⁹ Menurut Al – Ghazali (505/1111): Tujuan dari Syariah Islam (Maqashid Syariah) adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh umat manusia, yang terletak kepada perlindungan keimanan (dien), jiwa manusia (nafs), akal manusia (aqal), keturunan (nasl) dan kekayaan (maal). Apapun yang menjamin perlindungan kelima ini menjamin kepentingan public. Asy Syatibi (790/1388): memperkuat pandangan Al-Ghazali tersebut, dengan menyatakan itulah yang terbaik, jika dilihat

yang ditawarkan dalam ekonomi Islam akan sangat berbeda sekali dengan pendekatan yang selama ini dipelajari dalam ekonomi umum atau yang lebih dikenal dengan istilah ekonomi konvensional, sebagaimana yang kita ketahui bersama sangat dipengaruhi oleh paham neoklasikal ekonomi.

Ajaran Islam telah memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan tuhan (*hablullminallah*), atau manusia dengan sesama makhluk tuhan lainnya (*hablullminannas*). Faktor inilah yang membuat ajaran Islam sangat komprehensif dan menyeluruh (*kaffah*), tidak ada pemisahan antara urusan duniawi dengan akhirat yang selama ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran kapitalisme ekonomi. Implementasi Islam secara kaffah mencakupi kepatuhan dan ketundukan dalam menjalankan ajaran Islam secara keseluruhan, termasuk juga ketika dalam melaksanakan aktifitas ekonomi.

Pandangan Islam telah memposisikan kegiatan mu'amalah dimana didalamnya terdapat aktifitas ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*), oleh sebab itu semua kegiatan ekonomi perlu tuntunan dan control yang kuat agar berjalan sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam secara keseluruhan. *Falah* hanya dapat diperoleh jika ajaran Islam dilaksanakan secara kaffah.

Munculnya ekonomi Islam sebagai sebuah pandangan baru dalam ekonomi tidak lepas dari para sarjana-sarjana ekonomi yang berbasis di Timur tengah, Pakistan, Banglades dan Malaysia, yang sebagian besar dari mereka telah mengenyam pendidikan tinggi di universitas-universitas ternama di Amerika dan Eropa. Timbulnya kesadaran untuk terus memperdalam Islam sebagai ideologi dalam ilmu ekonomi, tidak lepas dari keresahan mereka terhadap perkembangan ilmu ekonomi konvensional (*kapitalis*) yang semakin menggiring ilmu ekonomi kearah yang sangat hedonis, mengabaikan nilai-nilai moral dan kemanusiaan, sehingga yang tinggal hanya kerakusan (*greedy*) semata.

Momentum terbesar dalam sejarah perkembangan ilmu ekonomi Islam adalah diselenggarakannya seminar internasional

dari sisi kesesuaiannya dengan esensi Syariah. Lihat: Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, 35.

pertama yang bertemakan tentang perkembangan ekonomi Islam di Mekkah, Saudi Arabia⁹⁰. Pada kesempatan tersebut mulai bermunculan pakar dan ekonom Islam yang kelak akan mempengaruhi pemikiran ekonomi Islam⁹¹. Perlahan namun pasti pemikiran ekonomi Islam mulai dipelajari diberbagai perguruan tinggi dunia, mulai dari sebagai mata kuliah, hingga memiliki program tersendiri sampai pada level doktoral⁹².

Ekonomi Islam yang bersumber dari value Islam, telah membalikkan paradigma ekonomi yang berpaham neoklasikal yang selama ini telah menjadi *mainstream* dikalangan fakultas ekonomi hampir diseluruh dunia. Ekonomi Islam telah dibangun dengan dasar yang sangat kokoh, yaitu bersumber dari sumber utama (*primary resources*) Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan sumber rujukan utama dari ajaran Islam. Bisa dipastikan kekuatan moral dan value akan menjadi karakteristik yang tidak bisa dipisahkan dalam ilmu ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam sesungguhnya tidak terdapat pemisahan yang ekstrim antara tujuan positif dengan tujuan normative, semuanya saling melengkapi dan saling mempengaruhi⁹³. Manusia dituntun dengan ketentuan yang sudah baku, sehingga setiap individu akan memiliki orientasi yang jelas dalam melakukan setiap aktivitas ekonominya, seperti yang tergambar dalam table dibawah ini.

Tabel 1

⁹⁰ The First *International Conference on Islamic Economics, Makkah, Saudi Arabia*. 1976. Lihat: Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, 20

⁹¹ Pada moment tersebut mulai muncul ekonom Islam yang rata-rata memiliki pendidikan dari Amerika Serikat dan beberapa negara eropa lainnya, seperti; Umer Chapra (US), Najetullah Siddiqi (US), M.A. Mannan (US), Monzher Khaf (US), Fahim Khan (US), Akram Khan (US) dll. Lihat: Adi Warman Karim, *Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

⁹² Banyak Universitas di dunia telah membuka program sarjana hingga Doktoral dalam bidang ekonomi Islam, antara lain; *International Islamic University Malaysia (IIUM)*, *International Islamic University Islamabad (Pakistan)*, *King Abdul Aziz University (Saudi Arabia)*, *Al-Azhar University (Mesir)*, *Loughborough University (UK)*, *Durham University (UK)*, dan beberapa Universitas di Indonesia. Lihat: Mustafa Edwin Nasution, "Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia", *Surat Kabar Harian Republika*, 12 Oktober, 2008 , 4.

⁹³ Lihat: Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics* (Islamabad : IIIT, 1994), 56

Aspek Ekonomi dalam Kehidupan Manusia

Unsur Falah	Aspek Mikro	Aspek Makro
Kelangsungan Hidup	Kelangsungan hidup biologis: Kesehatan, kebebasan keturunan dan sebagainya.	Keseimbangan ekologi dan lingkungan.
	Kelangsungan hidup ekonomi: Kepemilikan faktor produksi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan SDA ▪ Kesempatan berusaha untuk semua penduduk
	Kelangsungan hidup sosial: persaudaraan dan harmoni hubungan sosial.	Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antar kelompok.
	Kelangsungan hidup politik: kebebasan dalam partisipasi politik.	Jati diri dan kemandirian.
Kebebasan Berkeinginan	Terbebas dari kemiskinan.	Penyediaan sumberdaya untuk seluruh penduduk.
	Kemandirian hidup.	Penyediaan sumberdaya untuk generasi yang akan datang.
Kekuatan dan Harga Diri	Harga Diri	Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari utang.
	Kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan.	Kekuatan militer

Sumber: Akram Khan

Ekonomi Islam telah mengembalikan peran moral dalam pencapaian setiap tujuan ekonominya, hal tersebut telah dijamin dalam *Maqashid Syariah*⁹⁴. Dengan semakin memperkuat diri dari segi metodologinya, perkembangan ekonomi Islam juga bisa tergambar dari perkembangan sistim keuangan Islam yang sangat dinamis. Pertumbuhan lembaga keuangan Islam dibanyak negara telah mampu mengalahkan pertumbuhan lembaga keuangan umum (konvensional)

⁹⁴ Tujuan ekonomi Islam diturunkan dari tujuan syariah Islam (maqashid syariah) itu sendiri yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, yang terletak pada perlindungan lima unsur pokok kehidupan manusia: keimanan (dien), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan kekayaan (maal). Lihat antara lain QS 4: 58, 135; QS 5: 8, 42; QS 6: 152; QS 7: 58; QS 10: 47; QS 11: 58; QS 16: 90; QS 38: 22, 26; QS 42: 15; QS 49: 9; QS 55: 7, 9; QS 57: 25; QS 60: 8. Lihat: Syed Tahir, *Macroeconomics in Islamic Perspective* (Jeddah: IRTI-IDB, 2009), 78.

dimana dari sisi usia dan pengalaman sudah melebihi dari lembaga keuangan Islam.

Selain mempengaruhi paradigma terhadap ilmu ekonomi yang sekarang dipahami oleh masyarakat, ilmu ekonomi Islam telah menawarkan tugas penting yang bisa dilakukan untuk membuka ruang melakukan perbaikan, atau proses transformasi ekonomi dan sosial yang memiliki implikasi terhadap kehidupan masyarakat kelak. Gagasan ekonomi Islam dalam memperbaiki kondisi tersebut antara lain:

1. Pertama, memperbaiki dan membenahi perilaku individu, kelompok, pasar dan pemerintah yang selama ini tidak terlalu peduli dengan pendekatan moral. Sebagain besar ajaran Islam memaparkan tentang konsep perilaku (behavior) mulai dari individu hingga negara. Sehingga ekonomi Islam telah memiliki modal awal yang sangat berharga dalam membenahi perilaku masyarakat.
2. Kedua, mengimplementasikan dalam bentuk formulasi yang bisa langsung diakses oleh masyarakat mengenai tujuan dan sasaran setiap perilaku dan tingkah laku individu dan masyarakat. Sehingga setiap adanya perubahan, akan langsung bisa dideteksi. Dengan demikian pencapaian tujuan dalam ekonomi Islam harus selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungannya.
3. Ketiga, melakukan perubahan terhadap hubungan baik yang bersifat personal maupun kelembagaan yang ada ditengah masyarakat, sehingga hubungan antar setiap komponen akan menciptakan pranata sosial baru yang berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka mencapai tingkat keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
4. Keempat, menyiapkan strategi dan kebijakan yang praktis untuk melakukan transformasi ekonomi dan sosial ditengah –tengah masyarakat. Proses transformasi ekonomi dan sosial yang dibangun harus tetap berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan yang sangat kental dalam Islam. Sehingga pengalokasian dan pendistribusian setiap sumber daya ekonomi akan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Oleh sebab itu peran ekonomi Islam dalam mendorong transformasi ekonomi harus terus dilakukan, kekayaan nilai-nilai moral

dan spiritual harus menjadi modal dasar untuk mengilhami lahirnya kekuatan ekonomi yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan sejati. Ekonomi Islam harus mampu menawarkan sesuatu yang komprehensif untuk menjawab kelemahan sistim ekonomi yang selama ini berkembang⁹⁵.

Tabel 2
Perbandingan Sistim Ekonomi⁹⁶

Paham Ekonomi	Insentif	Kepemilikan	Mekanisme Informasi dan Koordinasi	Pengambilan keputusan
Kapitalisme	Material	Individual	Mekanisme Pasar	Desentralistik
Sosialisme	Norma Sosial	Negara	Negara	Sentralistik
Strukturalis	Material dan Norma Sosial	Individu diawasi negara	Mekanisme pasar dengan campur tangan negara	Sentralistik dan Desentralistik
Islam	Mashlahah (dunia dan Akhirat)	Individual, sosial dan negara atas dasar mashlahah	Mekanisme Pasar yang Adil	Musyawahar Berbasis Mashlahah

Sumber: Paul R. Gregory dan Robert C. Stuar. Diolah kembali oleh penulis

Tawaran dan gagasan ekonomi Islam dalam mewujudkan perubahan pandangan ilmu ekonomi dalam bentuk transformasi ekonomi dan sosial memiliki banyak kesamaan dan irisan dengan cara pandang kaum strukturalis (lihat tabel 2). Secara garis besar terdapat dua isu pokok yang menjadi perhatian utaman antara pandangan ekonomi Islam dengan kaum strukturalis tersebut. Antara lain: Pertama, mengembalikan paradigma ilmu ekonomi kedalam tatanan

⁹⁵ Sebagaimana ditulis dengan tajam oleh Khursid Ahmad (2001) bahwa paradigma ekonomi konvensional yang muncul saat ini bercirikan pada paradigma yang berupaya melepaskan ilmu ekonomi dari semua kaitan transedental dan kepedulian etika, agama, dan nilai-nilai moral. Pendekatan yang sangat sekuler dan berorientasi duniawi, positivistik dan pragmatis. Lihat: Khursid Ahmad, *Economic Development in an Islamic Framework* (Saudi Arabia: King Abdul Azis University, 2000), 34.

⁹⁶ Lihat: Paul R. Gregory dan Robert C. Stuar, *Comparative Economics System* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1981), 81.

moral yang sangat kuat, sehingga ilmu ekonomi akan kembali muncul dalam wajah yang sangat humanis, semua pendekatan yang bersifat individualistic dan materialistic harus dirubah kedalam pendekatan yang manusiawi. Kedua, merubah pola hubungan ekonomi dan sosial yang lebih mengedepankan pendekatan antara “tuan dan hamba” kepada pola hubungan yang lebih partisipatif dan emansipatif⁹⁷. Irisan yang terdapat dalam dua pandangan inilah yang akan diperdalam sehingga akan menimbulkan sebuah gagasan yang sangat kuat.

Selain kedua hal tersebut, irisan pandangan antara ekonomi Islam dengan strukturalis juga tercermin dari beberapa hal penting, seperti yang telah diterangkan pada table diatas. Terlihat bahwa sesungguhnya terdapat banyak kesamaan antara ide ekonomi Islam dengan gagasan ekonomi strukturalis, terutama dalam hal memperbaiki paham ilmu ekonomi yang sudah terkoptasi kedalam satu paham semata.

⁹⁷ Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The end of Laissez – Faire* (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010), 70.

BAB III

KAPITALISME EKONOMI DALAM GLOBALISASI DAN DAMPAK YANG DITIMBULKANNYA

Paham neoklasikal ekonomi yang kemudian menjadi dasar sistem ekonomi yang digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia telah memainkan peran yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi dunia saat ini. Tidak bisa dipungkiri paradigma dan asumsi dasar yang dibangun oleh neoklasikal menjadi dasar berkembangnya penguasaan terhadap sumberdaya ekonomi untuk kepentingan individu, yang kemudian dikenal dengan istilah kapitalisme ekonomi dan hubungan antar pelakunya membentuk konsepsi globalisasi ekonomi. Akibatnya pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar negara didunia hanya berpihak kepada negara-negara kaya semata. Sedangkan negara-negara berkembang menghadapi dilema dan permasalahan baru dalam pembangunan ekonominya baik dalam bentuk masalah ekonomi maupun sosial dalam bentuk, kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

Bahkan Joseph E. Stiglitz dalam karyanya *Globalization and Its Discontents* mencium akan adanya bahaya dari globalisasi, yang tidak lain adalah penggunaan teori ekonomi Neoklasik dan diperkuat paham Neoliberalisme⁹⁸. Menurutnya, resep-resep yang dipakai oleh IMF dan Bank Dunia semuanya pro pasar yang tercermin pada tujuan terciptanya perdagangan bebas dan globalisasi, hanya menguntungkan sekelompok kecil negara maju dan banyak merugikan negara berkembang. Sebagai contoh, bagaimana pernyataan Stiglitz yang

⁹⁸ Stiglitz adalah salah satu nobelis yang concern terhadap perkembangan globalisasi yang banyak merugikan kepentingan negara-negara sedang berkembang. Lihat: Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents* (London: Penguin, 2002), 34.

mengecam kebijakan yang diambil oleh lembaga internasional, banyak merugikan kaum kecil dan negara sedang berkembang.

I. Kapitalisme Dan Liberalisasi Ekonomi

Perkembangan paham ekonomi neoklasikal sudah banyak dibahas pada bab sebelumnya (Bab II), perkembangan paham keilmuannya telah masuk dan terintegrasi dengan pengajaran ilmu ekonomi diseluruh fakultas ekonomi di seluruh dunia. Sampai saat ini belum ada usaha dari pengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan atau koreksi terhadap paham ekonomi tersebut, sehingga mengakibatkan perilaku atau cara pandang para pelaku ekonomi dan pengambil kebijakan terdistorsi ke dalam paham neoklasikal tersebut⁹⁹.

Ide dasar neoklasikal yang menjadikan efisiensi sebagai ukuran dari keberhasilan ekonomi telah menciptakan sebuah kondisi ekonomi yang penuh dengan persaingan, sehingga pola interaksi antar pelaku ekonomi akan terbentuk menjadi tatanan baku, hanya pelaku ekonomi yang mampu bersaing adalah para pelaku yang memiliki efisiensi yang paling kuat. Dengan demikian, bagi para pelaku ekonomi yang tidak mampu menciptakan efisiensi dikategorikan tidak akan mampu bersaing atau bahkan akan tersingkir. Tetapi tidak semua pakar sepakat dengan pemahaman efisiensi hanya dilihat dari faktor ekonomi semata¹⁰⁰.

Pemahaman tentang efisiensi ekonomi dalam konteks pemahaman ekonomi mikro adalah efisiensi yang terkait dengan upaya individual dalam mencapai kepuasan maksimal (*maximum satisfaction*)

⁹⁹ Telah melakukan observasi, selama menjadi dosen tamu diberbagai fakultas ekonomi di Indonesia. Telah terjadi hegemoni akademis, terdikte oleh *mainstream economics* dan tunduk pada paham neoklasikal, bukanlah mengada-ada. Bahkan pengajaran ilmu ekonomi di hampir seluruh fakultas ekonomi di seluruh Indonesia pada dasarnya adalah *neoclassical – based economics*, bahkan bisa jadi sepenuhnya *neoclassical*. Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945: Menolak Liberalisme* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010), 2.

¹⁰⁰ Efisiensi telah menjadi kata kunci (*keyword*) dalam mewujudkan gagasan pemikiran *neoklasikal*, walaupun sesungguhnya memiliki pemahaman yang bersifat multitafsir (*multi-interpretable*), yang masing-masing memiliki perbedaan makna dan substansinya, baik secara teoritikal maupun kontekstual. Selaian efisiensi ekonomi, efisiensi dapat pula ditinjau dari sisi efisiensi teknis, di mana efisiensi dengan pendekatan teknikal, yaitu dengan penggunaan biaya yang terbatas akan mendapatkan hasil maksimal, atau dengan kata lain dengan hasil tertentu diperoleh biaya minimal. Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspada Globalisasi dan Pasar-Bebas* (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila, 2010), 16.

atau dalam kondisi *equilibrium* pada fungsi preferensi. Dalam bentuk badan usaha atau perusahaan adalah mencapai keuntungan maksimum (*maximum profit*) atau dalam kondisi *equilibrium* pada kongruensi fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Dalam konteks inilah paham neoklasikal menempatkan dirinya dalam mencapai efisiensi ekonomi yang berdasarkan kepada kepentingan pribadi¹⁰¹.

Gambar 3.1
Siklus Perilaku Ekonomi Neoklasikal



¹⁰¹ Dalam konteks ini Sri Edi Sri-Edi Swasono, telah mengungkapkan dengan sangat baik mengenai pemahaman tentang adanya trap dalam efisiensi ekonomi yang dikemukakan oleh pandangan neoklasikal tersebut. Beliau mengungkapkan bahwasannya "...dalam kehidupan ekonomi masyarakat preferensi sosial (makro) interdependensi dengan, tetapi bukan merupakan gabungan dari preferensi-preferensi individual (mikro), karena adanya pola interaksi sosial antar individu berlandaskan pada kaidah-kaidah nonekonomi yang kompleks, lebih lanjut beliau mengungkapkan efisiensi ekonomi pada tataran mikro tidak otomatis rukun dan sejalan dengan efisiensi ekonomi pada tataran makro." Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Demokrasi Ekonomi: Komitmen dan Pembangunan Indonesia* (Jakarta: UI-Press 1988), 35

Dari pemahaman terhadap efisiensi yang kemudian melahirkan pandangan terhadap kompetitivisme telah berperan dalam menghasilkan fundamentalisme pasar (*market fundamental*), yang merupakan mekanisme persaingan bebas sempurna (*free perfect competition*) dengan pasar bebas sempurna (*free perfect market*) sebagai konsekuensi logis yang ditimbulkan (lihat gambar 3.1). Setiap tindakan ekonomi arahnya selalu mencapai nilai tambah ekonomi belaka.

Proses perkembangan nilai-nilai ekonomi mikro telah melahirkan gagasan mengenai ekonomi makro. Dari sinilah awal munculnya gagasan mengenai pertumbuhan ekonomi baik secara konsepsi maupun orientasi yang berlaku dalam ekonom makro, sehingga menjadikan pencapaian-pencapaian dalam ekonomi makro seperti; pertumbuhan ekonomi (*growth*), pendapatan domestik bruto (PDB), pendapatan per kapita. Sebagai indikator keberhasilan kebijakan ekonomi suatu negara.

Alur dari rentetan konsepsi inilah yang kemudian melahirkan paham mengenai penguasaan terhadap sumberdaya ekonomi untuk kepentingan individu, yang kemudian dikenal dengan istilah kapitalisme ekonomi dan hubungan antar pelakunya membentuk konsepsi globalisasi ekonomi¹⁰². Perkembangan pemahaman tentang globalisasi telah membuat banyak kekhawatiran, khususnya yang terkait dengan gagasan tentang persaingan pasar dan pasar bebas sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, karena dianggap banyak

¹⁰² Cukup banyak literature yang membahas mengenai globalisasi, mulai dari kemunculannya istilahnya hingga proses dan dampak yang ditimbulkannya, antara lain: Kenichi Omae, *The Borderless world: Power and Strategy in the Interlinked World Economy* (New York: Harper Business, 1990); David Korten, *getting in the 21st Century: Voluntary Action and The Global Agenda* (West Hardford: Kumairan Press, 1990); Keith Griffin dan Rahman Khan, *Globalization and the Developing World* (Geneva: UNRISD, 1992); Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilization and the Remarking of World Order* (New York: Simon & Schuster, 1996); George Soros, *The Crisis of Global Capitalism* (New York: Public Affairs, 1998), Anthony Giddens, *Jalan Ketiga/Third Way* (Jakarta: Gramedia, 1999); Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Prakarsa, 2005); Joseph E. Strglizt, *Making Globalization Work* (New York: Allen Lane, 2006); Thomas L. Friedman, *The world is Flat: The Globalized World in the Twenty First Century* (New York: Anchor Book, 2006), 89.

memiliki agenda terselubung (*hidden agenda*), untuk kepentingan ekonomi negara-negara maju¹⁰³.

Indikasi kegagalan agenda kapitalis dalam globalisasi juga telah memancing pendapat para tokoh, sebagaimana diungkapkan oleh Soros bahwa " *we have a global economy without a global society...*" ini merupakan indikasi bahwa agenda global hanya mengusung isu ekonomi belaka tanpa memperhatikan aspek masyarakat (*society*) dunia yang masih memiliki gap yang sangat lebar dalam hal kesejahteraan¹⁰⁴. Lebih jauh Soros menyorot "...*a global society does not mean a global state, to abolish the existence of state neither feasible nor desirable...*"¹⁰⁵

Kekhawatiran terhadap kondisi tersebut telah membuat para pakar pesimis akan terbentuk sebuah kondisi yang lebih baik, bahkan dengan lebih tajam diungkapkan oleh Thurow "...*the world is going to have a global economy without a global government...*"¹⁰⁶ dengan memperhatikan pandangan para pakar tersebut akan sangat sulit rasanya bagi kapitalis dengan mekanisme pasar (*market mechanism*) yang telah mereka rintis untuk mampu mengisi kekosongan peran yang dimainkan oleh *global government*, ini kekhawatiran akan semakin dominannya satu kekuatan negara tertentu.

¹⁰³ Globalisasi telah menumbuhkan inequality yang semakin parah, telah melahirkan istilah the Winner Take All Society, disempowerment dan Improverishment terhadap si lemah, sehingga diungkapkan secara populer dan luas bahwa gap between the haves and the have-nots makin melebar dan ini diindikasikan merupakan awal krisis dan bahkan tidak tertutup kemungkinan kegagalan bagi global capitalism. Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspada Globalisasi dan Pasar Bebas*, 155.

¹⁰⁴ Dunia berkembang menjadi sebuah masyarakat global, tanpa ada aturan main yang mengikat masing-masing masyarakat dunia, sehingga globalisasi hanya dikendalikan oleh segelintir negara maju. Lihat George Soros, *The Crisis of Global Capitalism* (New York: Public Affairs, 1998). 68.

¹⁰⁵ Soros menjadi salah satu tokoh yang sangat concern dalam mengamati perkembangan globalisasi, yang banyak merugikan kepentingan negara berkembang. Lihat George Soros, *The Crisis of Global Capitalism*, 68.

¹⁰⁶ Lihat Lester C. Thurow, *Creating Wealth: the New Rules for Individual, Companies and Countries in a Knowledge-Base Economy* (London: Nicholas Brealy, 2000), 78.

Bahkan tokoh sekaliber Henry Kissinger¹⁰⁷ sekalipun mengungkapkan kekhawatiran akan hegemoni kekuatan satu negara artinya akan menjadi dominasi negara maju terhadap negara berkembang dan miskin atau dengan kata lain globalisasi merupakan jargon negara maju untuk kembali menguasai perekonomian negara berkembang. Sementara itu Friedmen menyampaikan bahwa, “*culturally speaking, globalization has tended to involve the spread (for better or worse) of Americazation...*”¹⁰⁸ di mana ide besar yang mendorong hal tersebut adalah kapitalisme pasar bebas (*free-market capitalism*).

Jadi sangat jelas bahwasannya gagasan globalisasi telah menuai banyak kecaman dari banyak pakar bahkan menimbulkan kekecewaan¹⁰⁹, yang mungkin sebelumnya tidak terbayangkan oleh para penggagasnya. Banyak persoalan yang akan menghadang dan perlu diselesaikan terlebih dahulu, seperti; kemiskinan, pengangguran, kepastian hidup, ketidakstabilan, kerusakan budaya, jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, dan permasalahan sosial lainnya. Oleh sebab itu perlu kiranya dicari sebuah terobosan baru, memperbaiki tata ekonomi dengan melibatkan secara bersama-sama pelaku ekonomi, mulai dari individu, komunitas, perusahaan, dan negara, sehingga perekonomian akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.

Berkembangnya paham liberalismeisme¹¹⁰ tentu tidak bisa dilepaskan dari para pemikiran tokoh yang sejalan atau pendukung

¹⁰⁷ Lihat: Henry Kissinger, *Globalization*. Dalam Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas*, 56.

¹⁰⁸ Lihat: Thomas L. Friedman, *The World is Flat: The Globalized World in The Twenty-First Century* (New York: Anchor Books, 2006), 89

¹⁰⁹ Khusus untuk mengungkap kekecewaan ini, Josph E. Stiglitz seorang nobelist mengungkapkan “...many have actually been made worse off...jobs destroyed and their lives become more insecure...development will continue to create poverty and stability,...culture eroded...without reform the back-lash that has already started will mount and discontent with globalization will grow...the way globalization has been managed...need to be radically rethought...”. Lihat: Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents* (London: Allen/Penguin, 2002), 88.

¹¹⁰ Istilah liberalismeismeismeisme ekonomi memang belum banyak digunakan dalam buku teks ekonomi, tapi istilah ini muncul sebagai akibat dari berkelanjutannya fundamentalisme pasar dalam pemikiran ekonomin. Pengaruh dari paham individualme yang sangat kental inilah yang melahirkan sikap liberalismeismeismeisme dan doktrin *laissez-faire*, yang berujung kepada

gagasan liberalismeisme ekonomi tersebut. Pasca terjadinya resesi besar yang terjadi di Eropa dan Amerika sekitar tahun 1929-1930, yang kemudian melahirkan pandangan baru yang dikemukakan oleh Jhon Maynard Keynes. Keynes dalam bukunya yang berjudul *The General Theory of Employment* mendiagnosa bahwa kapitalisme pada dasarnya tidak stabil dan tidak berkecenderungan ke arah *full employment*¹¹¹. Tanpa harus mengadopsi model komunisme, ia menawarkan formula negara kesejahteraan (*welfare state*) yang diterima oleh banyak negara maju Eropa saat itu. Formula ini menghendaki adanya intervensi pemerintah terhadap pasar ketika regulasi pasar sudah tidak mampu lagi mengatur dirinya sendiri¹¹².

Gagasan Keynes tentang Welfare State disambut baik oleh beberapa negara eropa. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Resesi ekonomi, pengangguran, dan inflasi yang kembali terjadi pada paruh akhir tahun 1970-an membuat Keynesian kehilangan legitimasi teoritiknya dan akhirnya masuk dalam catatan kaki sejarah¹¹³. Runtuhnya Keynesian memaksa para ekonom berpikir keras mencari rumusan ekonomi baru. Munculah gelombang baru yang dikenal dengan istilah neoliberalisme yang menggantikan dominasi *welfare state* melalui ekonom asal Chicago, Milton Friedman dan ekonom asal

keterpaksaan (*economische noodzakelijkheid*). Globalisasi merupakan tempat berlindungnya fundamentalisme pasar yang cenderung memberikan peluang dan kesempatan kepada kaum pemodal besar terhadap negara-negara berkembang. Secara kelembagaan terlihat dari berlakunya *Wasingthon Concensus* yang mengatur proses deregulasi, liberalismeismeismeisasi dan privatisasi dinegara-negara sedang berkembang. Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*, 4-5.

¹¹¹ Posisi Keynes berada diantara pandangan ekonomi neoklasikal dan strukturalis. Pandangan Keunes lebih dekat pada paham strukturalis. Lihat: Jhon Maynard Keynes, *The General Theory of Employment* (Delhi: Atlantic Publisher, 2006), 4.

¹¹² Ketika terjadi kegagalan pasar (market failed), pemerintah harus mengambil alih untuk melakukan intervensi kedalam pasar, sehingga perekonomian kembali bekerja seperti semula. Lihat: Jhon Maynard Keynes, *The General Theory of Employment* , 4.

¹¹³ Pendapat tersebut dikemukakan oleh Heertz. Lihat: Igantius Wibowo dan Wahono, *Neoliberalisme* (Yogyakarta: Cindelarar Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), 20.

Inggris kelahiran Austria, Friedrich A. Hayek. Keduanya merupakan tokoh peraih nobel ekonomi 1976 dan 1974¹¹⁴.

Neoliberalisme merupakan wujud baru dari liberalisme sebagaimana neokapitalisme adalah wujud baru dari kapitalisme. Dengan memanfaatkan isu globalisasi mereka terus bergerak untuk mengkampanyekan ide dan gagasan tentang liberalisasi ekonomi dalam pasar bebas dan persaingan bebas, jadi bisa dikatakan globalisasi merupakan persemaian baru dari gagasan liberalisme dan kapitalisme ekonomi dengan kata lain menemukan kembali mantelnya yang baru yang lebih radikal¹¹⁵.

Lebih jauh Wibowo merangkum setidaknya empat faktor yang mempengaruhi dan mengiringi kemunculan neoliberalisme. Pertama, munculnya perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational corporations-MNC*) dengan aset lebih besar dari kekayaan negara-negara kecil di dunia. Perusahaan-perusahaan ini mampu menembus batas teritori negara-negara sekaligus memanfaatkan infrastruktur negara itu. Kedua, munculnya rezim-rezim internasional sebagai *surveillance system* untuk menjamin negara-negara patuh dan tunduk pada hukum pasar bebas. Rezim-rezim itu adalah World Trade Organization (WTO), World Bank, dan International Monetary Fund (IMF). Ketiga, revolusi teknologi komunikasi dan transportasi yang dahsyat. Dan keempat, dari perspektif realis bahwa negara-negara kuat (maju) memakai kekuatannya untuk menaklukkan negara-negara lemah (umumnya negara berkembang)¹¹⁶.

Mereka berkeyakinan bahwa masyarakat di seluruh dunia akan mendapatkan kemakmuran kalau semua negara di dunia ini mau saling membuka perbatasannya, dalam hal ini menciptakan pasar bebas (*free trade*). Barang-barang dapat keluar dan masuk dengan bebas, begitu

¹¹⁴ Munculnya kembali gagasan neoklasikal tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Milton Friedman dan Friedrich A. Hayek. Keduanya kembali mengusulkan tentang mekanisme pasar. Lihat: Igantius Wibowo dan Wahono, *Neoliberalisme*, 21.

¹¹⁵ Sudah banyak para ekonom yang mulai menyadari bahwa, neoliberalisme dan neokapitalisme sedang melakukan penetrasi kedalam bentuk globalisasi. Lihat: Igantius Wibowo dan Wahono, *Neoliberalisme*, 22.

¹¹⁶ Sangat jelas bagaimana neoliberalisme dan neokapitalisme menguasai perekonomian dunia, mendominasi perekonomian negara berkembang, melalui perangkat dan alat ekonomi yang dimilikinya. Lihat: Igantius Wibowo dan Wahono, *Neoliberalisme*, 3-5.

juga investasi, dalam konteks ini adalah terciptanya persaingan bebas (*free competition*) antar sesama pelaku ekonomi¹¹⁷.

Basis utama para pendukung neoliberalisme ini adalah teori atau pandangan liberalisme terhadap ekonomi. Teori neoliberalisme bisa dikatakan sebagai teori yang paling optimistis dan meyakini akan terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dunia. Mereka berpendapat bahwa struktur pasar internasional saat ini akan dapat membawa kemakmuran yang dicita-citakan.

Dunia memang terbagi antara “negara-negara maju” dan “negara sedang berkembang”. Meski demikian, di antara keduanya tidak perlu terjadi antagonisme. Keduanya dapat bekerja sama untuk menciptakan kemakmuran dunia¹¹⁸. Oleh sebab itu globalisasi akan mendapat tempat yang sangat pas dalam isu liberalisme ekonomi, karena akan bertujuan untuk mempersempit ruang antar negara, sehingga memungkinkan antar negara akan saling berhubungan tanpa ada hambatan yang berarti dari sisi teritori¹¹⁹.

Tetapi disisi lain para pakar yang mengusung paham ini, mengakui terdapat sejumlah kelemahan yang akan menjadi hambatan dalam menjalankan konsep ini. Lebih jauh Wibowo mengungkapkan permasalahan yang bisa ditimbulkan menurut pendukung teori liberalisme adalah kelemahan yang terkandung dalam berbagai faktor produksi, terutama modal (*capital*) dan tenaga kerja (*labour*), di mana keduanya merupakan unsur faktor produksi yang sangat penting dalam menciptakan *output*. Teori liberalisme meyakini ada cara untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh faktor produksi tersebut terutama mengenai modal (*capital*) dan tenaga kerja (*labour*). Terdapat tiga pendekatan yang digunakan, antara lain adalah: (1) perdagangan, (2) investasi asing, dan (3) hutang luar negeri. Pertama, perdagangan.

¹¹⁷ Neoliberalisme membuka kembali gagasan mengenai pasar bebas, yang dilakukan oleh negara baik bersifat bilateral maupun multilateral. Lihat: Ignatius wibowo, *Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010), 22.

¹¹⁸ Isu globalisasi akan mendapat tempat yang sangat pas dalam isu liberalisme. Lihat: Ignatius Wibowo, *Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi*, 22.

¹¹⁹ Gagasan globalisasi adalah menghapus garis batas antar negara, sehingga akan berdampak terhadap percepatan perdagangan antar negara. Lihat: Ignatius Wibowo, *Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi*, 23

Para pemikir teori liberalisme berkeyakinan bahwa perdagangan akan mampu bertindak sebagai penggerak ekonomi dan sekaligus sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.

Teori liberalisme berharap perdagangan akan mampu mendorong negara-negara didunia untuk menciptakan spesialisasi dan kemampuan yang khusus yang tidak dimiliki oleh negara lain yang sesuai dengan konsep *comparative advantage*¹²⁰. Keuntungan dari terbentuknya spesialisasi dan perdagangan yang sesuai dengan sumberdaya dan kekayaan sebuah negara akan menjadikan negara tersebut mampu melakukan perdagangan internasional dan bersaing dengan negara lain. Dengan demikian dengan sendirinya akan terbentuk apa yang disebut dengan alokasi sumber daya (*resources allocation*) secara lebih efisien¹²¹.

Lebih lanjut, dengan media yang sudah dirancang oleh paham kapitalis yaitu terbentuknya banyak pasar bebas di dunia, dengan demikian diharapkan akan menciptakan perdagangan internasional antar negara, dan dengan sendirinya akan meningkatkan pendapatan nasional dan berimplikasi akan meningkatkan *income per capita* masing-masing negara atau dengan kata lain akan terbentuk tambahan pendapatan, yang mungkin untuk di saving. Dengan demikian diharapkan tambahan pendapatan dapat ditabung, dan tabungan ini dapat dipakai untuk memacu pembangunan lewat *domestic expenditure* untuk menaikkan produksi atau untuk mengimpor *capital equipment*¹²².

¹²⁰ Merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Menurutnya, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Teori ini berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Lihat: Mudrajat Koncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, masalah dan Kebijakan*, 90.

¹²¹ Dalam teori keunggulan komparatif, suatu bangsa dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi. Lihat: Mudrajat Koncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori dan Kebijakan*, 91.

¹²² Gagasan tersebut sejalan dengan pemikiran *Jhon Maynard Keynes*, yang menyatakan maksimalisasi kapasitas ekonomi akan menciptakan apa yang disebut dengan full employment, sehingga diharapkan perekonomian akan tumbuh dan berkembang. Lihat: Sadono Sukirno, *Ekonomi Makro Lanjutan*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2004) 124.

Kedua, investasi asing. Salah satu instrument penting yang digagas teori liberalisme adalah investasi asing baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Teori ini juga memandang bahwa investasi asing memiliki pengaruh yang signifikan dan mempunyai efek terhadap pembangunan. Menurut Keynes, salah satu faktor yang membentuk output dalam sebuah negara adalah investasi (investment), dalam persamaan output (Y), investasi khususnya investasi asing akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi asing juga akan membantu pembangunan yang tidak bisa dibiayai oleh modal dalam negeri. Selain itu investasi asing akan membantu transfer teknologi, knowledge dan pengalaman. Selanjutnya, investasi asing juga mendorong masuknya modal lewat investasi internasional serta memacu terjadinya kompetisi. Investasi asing dilihat sebagai hal yang dapat membawa keterampilan manajerial dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas¹²³.

Ketiga, adalah bantuan asing (utang). Utang luar negeri¹²⁴ merupakan salah satu cara dan jalan keluar yang ditawarkan oleh pandangan liberalisme untuk mengatasi keterbatasan dana yang digunakan untuk pembangunan. Utang diyakini akan mampu menyelesaikan masalah kekurangan sumberdaya dinegara berkembang, sehingga diharapkan mereka mampu untuk mengejar ketertinggalannya dalam pembangunan¹²⁵. Utang yang ditawarkan negara maju yang

¹²³ Pada awal teori ekonomi pembangunan muncul, salah satu rekomendasi yang diberikan bagi negara-negara berkembang yang baru merdeka adalah membuka selebar-lebarnya pintu investasi asing bagi negara-negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Lihat: Mudrajat Koncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, 92.

¹²⁴ Dalam banyak pandangan ahli ekonomi yang menulis semenjak berakhirnya perang dunia ke II, di mana negara-negara dunia ketiga sudah mulai banyak yang merdeka. Utang luar negeri menjadi salah satu alternatif yang sangat efektif untuk segera memulai pembangunan di sebuah negara pasca merdeka. Hal ini kemudian menjadi boomerang bahkan malapetaka ketika utang tersebut tidak bisa dikendalikan atau dikontrol mengakibatkan perekonomian negara tersebut menjadi tersandera oleh kepentingan banyak negara donor. Contoh kasus Indonesia sewaktu masih bersama IGGI, CGI dan IMF. Lihat: Ignatius Wibowo dan Wahono, *Neoliberalismeismeismeisme*, 10.

¹²⁵ Utang juga menjadi salah satu kata kunci bagi negara-negara sedang berkembang untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara yang sudah lebih dulu berkembang. Lihat: Mudrajat Koncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, masalah dan Kebijakan*, 90.

bersifat bilateral maupun kelompok negara maju (multilateral) tidak hanya dalam bentuk modal pembangunan tetapi juga bisa dalam bentuk, bantuan teknis, bantuan SDM maupun bantuan pendidikan. Teori liberalisme berkeyakinan bahwa dengan semakin membuka diri ke dunia luar, sebuah negara akan semakin makmur dan terbebas dari konflik dan pertikaian. Dengan meminjam istilah Friedman, orang yang masih terikat pada “pohon zaitun” (*olive tree*), yaitu desa, tanah kelahiran, negara, suku, dan sebagainya, sementara disisi lain orang sudah menggunakan *Lexus* yang sangat canggih. Mempertahankan pohon zaitun tidak ada gunanya di zaman globalisasi sekarang¹²⁶.

J. Kegagalan Teori Ekonomi Pembangunan Negara Dunia Ketiga

Dalam khasanah ilmu ekonomi pembangunan, yang menjadi sangat populer dan berkembang setelah Perang Dunia kedua. Gagasan dalam teori Harrod-Domar¹²⁷ berfokus pada satu pernyataan penting bahwa kunci pertumbuhan ekonomi ada pada investasi. Dengan demikian, ekspektasi terhadap kenaikan pendapatan masyarakat dan kapasitas produktif selalu berkait dengan pertanyaan mengenai seberapa besar laju kenaikan investasi. Meski tidak lepas dari kritik, Harrod-Domar dianggap membongkar tradisi Keynesian yang mengabaikan variabel-variabel jangka panjang, kendati masih bekerja dengan kerangka dasar berpikir yang diletakkan Keynes, khususnya mengenai asumsi full employment, lebih penting dari itu adalah bahwa model Harrod-Domar telah memberi inspirasi kepada ilmuan-ilmuan lain untuk membentuk perkembangan teori pertumbuhan modern yang semuanya menempatkan faktor modal dan investasi pada posisi vital dalam peningkatan pendapatan, kapasitas produksi dan employment¹²⁸.

¹²⁶ Sebuah ironi yang disampaikan oleh Friedman, dimana globalisasi ekonomi tidak lagi memperhatikan sekat dan batas antar negara. Lihat Thomas L. Friedma, *The Lexus and The Olive Tree: Understanding Globalization*. 80.

¹²⁷ Roy F. Harrod dan Evsey Domar, yang kemudian dikenal dengan nama Harrod-Domar, dua ekonom yang membangun teori masing-masing dan kemudian mempengaruhi pemikiran ekonomi tentang pembangunan di seluruh dunia. Lihat:Evsey Domar, *Essays in the Theory of Economic Growth* (New York: Oxford University Press, 1957)

¹²⁸ Inilah awal mula munculnya faktor modal dan investasi asing menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Lihat: William Easterly, *The Elusive Quest for Growth* (Cambridge: MIT Press, 2002), 183

Model Harrod-Domar, begitu juga teori-teori yang merupakan hasil elaborasi model setelahnya, dibangun berdasar pengalaman negara maju. Harrod sendiri, menyadari benar hal itu sehingga merasa perlu untuk membuat modifikasi agar modelnya bisa operasional di negara terbelakang. Problem tabungan yang rendah di negara terbelakang bisa diselesaikan dengan ekspansi kredit bank dan penanaman modal otomatis dari keuntungan inflasioner di pasar modal¹²⁹.

Rekomendasi Harrod ini menyimpang dari asumsi awal model Harrod-Domar yang tidak memasukkan variabel eksogen dan campur tangan pemerintah. Sebab, di negara terbelakang, kebutuhan investasi biasanya memang lebih tinggi dari pada kemampuan masyarakat membentuk tabungan. Karenanya, campur tangan pemerintah menjadi mutlak diperlukan bila alternatif yang dipilih adalah ekspansi kredit perbankan dengan tingkat suku bunga bersubsidi. Sampai di sini, logika dorongan besar (big push) Paul Rosenstein-Rodan tampaknya menjadi komplementer dengan jalan yang dibuka Harrod.

Garis besar teori dorongan besar ini adalah kendala pembangunan di negara terbelakang bisa diatasi dengan sebuah program besar yang mampu menjamin kebutuhan minimum penanaman modal. Namun, seperti ditekankan oleh Nurkse, negara dunia ketiga selalu menghadapi kendala pembentukan modal yang berpangkal pada rendahnya kemampuan membentuk tabungan dan keterbatasan pasar yang menyebabkan insentif investasi demikian rendah.¹³⁰ Hukum dasar yang digunakan Nurkse adalah apa yang dikenal sebagai hukum say, *supply creates its own demand*¹³¹. Dengan merekomendasikan satu model pembangunan berimbang yang digerakkan oleh penanaman modal pada semua sektor sehingga terjadi perluasan pasar secara serentak dan menyeluruh. Logikanya, satu sektor yang memproduksi output tertentu dan bersifat komplementer

¹²⁹ Model Harold-Domar memberikan jalan keluar bagi negara-negara berkembang yang memiliki tingkat tabungan yang rendah. Lihat: Michael P. Todaro, *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga*, (Jakarta:Erlangga, 1990), 58.

¹³⁰ Dalam teorinya Nurkse mengungkapkan bahwa persoalan utama negara berkembang adalah lemahnya kemampuan untuk menciptakan investasi. Michael P. Todaro, *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga*, 60.

¹³¹ Hukum Say menggambarkan bagaimana mekanisme pasar telah menciptakan keseimbangannya sendiri. Lihat: Michael P. Todaro, *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga*, 63.

dengan output sektor lain akan bekerja saling mendorong dan menciptakan daya beli¹³².

Dengan demikian, teori pertumbuhan berimbang (*balanced growth*) yang dipromosikan oleh Rosenstein- Rodan, Nurkse maupun Arthur Lewis menggariskan agar sektor modern tidak boleh terlalu jauh meninggalkan sektor tradisional. Jika semua kondisi yang diidealkan Nurkse terjadi, maka apa yang ia sebut sebagai *vicious circle of poverty* tidak akan menjadi masalah lagi dalam proses capital formation.

Terhadap gagasan itu, Hirschman menilai banyak hal yang tidak masuk akal dan menganggapnya gagal sebagai sebuah teori pembangunan. Satu yang terpenting dari kritik tersebut adalah model perekonomian dualistik yang menjadi pijakan teori dorongan besar dipaksakan untuk sebuah proses pencangkakan sektor modern yang sama sekali baru dan lengkap (self-contained) di atas sektor tradisional yang lengkap namun macet¹³³. Bagi Hirschman, dorongan besar yang dimaksud para eksponennya tidak akan menciptakan pembangunan (development) yang berarti perkembangan (progress)¹³⁴.

Bertolak dari kritik terhadap model pertumbuhan berimbang, Hirschman yang kemudian didukung juga oleh Rostow, mengajukan argumen pertumbuhan tidak berimbang. Bagi Hirschman, pembangunan pada dasarnya adalah rangkaian ketidakseimbangan (disequilibrium). Secara sederhana, doktrin perkembangan tidak berimbang ini menolak keharusan investasi secara besar-besaran untuk memompa setiap sektor ekonomi yang memiliki pola hubungan komplementer. Dengan membuat skala prioritas investasi yang tepat, perekonomian akan berputar terus dan proyek-proyek baru yang ia sebut sebagai induced investment akan berjalan memanfaatkan eksternalitas ekonomi maupun social overhead capital dari proyek sebelumnya. Dua tahun setelah

¹³² Dalam pembangunan ekonomi dinegara dunia ketiga, penanaman modal adalah syarat mutlak pembangunan ekonomi sebuah negara. Lihat: Michael P. Todaro, *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga*, 65.

¹³³ Terdapat perbedaan yang sangat mendasar mengenai konsep pembangunan dinegara berkembang, dimana masih didominasi oleh sektor-sektor tradisional. Lihat: Thee Kian Wie, *Perekonomian di Negara Berkembang*, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1982). 72.

¹³⁴ Dampaknya yang paling besar adalah, tidak akan tercipta perkembangan pemnangunan yang berarti. Lihat: Thee Kian Wie, *Perekonomian di Negara Berkembang*, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1982), 74.

Hirschman menerbitkan *The Strategy of Economic Development* tahun 1958, Walt Whitman Rostow menerbitkan *The Stages of Economic Growth* yang bisa dikatakan sebagai pendukung doktrin pertumbuhan tidak berimbang¹³⁵.

Seperti Hirschman, Rostow membuat sebuah idealisasi pembangunan yang bersifat self-propelling dan bertumpu pada dua sektor; tradisional dan modern. Dan sebagai seorang ahli sejarah ekonomi, konstruksi teoritik yang dibangunnya menunjukkan bagaimana Rostow berpikir sangat linear dan percaya bahwa semua negara akan berkembang dalam sebuah rentetan fase yang sama. Bagian paling penting teori Rostow yang membutuhkan penjelasan di hampir seluruh bagian bukunya –ditambah sejumlah paper karyanya sendiri-- adalah bahwa ia melihat perkembangan ekonomi berlangsung dalam lima tahap; tahap masyarakat tradisional, tahap prakondisi menuju lepas landas, tahap lepas landas, tahap dorongan menuju kematangan dan terakhir adalah tahap konsumsi massa tinggi¹³⁶.

Rostow mengklaim bahwa teorinya tentang lima tahap perkembangan masyarakat tersebut lebih dari sebuah teori ekonomi tetapi juga sebuah teori mengenai sejarah masyarakat modern secara keseluruhan. Klaim tersebut berangkat dari argument Rostow sendiri mengenai ciri masyarakat pada masing-masing tahap yang meliputi beberapa indikator ekonomi dan sosial serta budaya. Dan yang terpenting adalah bahwa dia mengklaim diri telah menyusun sebuah kerangka besar pengganti marxisme seperti tercermin dari judul bukunya; *a noncommunist manifesto*, sebagai tonggak baru pengganti manifesto komunis yang ditulis Marx dan Engels¹³⁷.

Pada bagian akhir *The Stages of Economic Growth*, Rostow mengakui sejumlah kesamaan antara analisis tahapan pertumbuhannya dengan argumentasi Marx mengenai tahapan menuju masyarakat

¹³⁵Papers and Proceedings of the Hundred Thirteenth Annual Meeting of the American Economic Association. Barro, "Human capital and growth." *The American Economic Review* (1991): 12–17.

¹³⁶ Terdapat tahapan-tahapan pembangunan yang diusulkan oleh para ahli dalam banyak teorinya. Lihat: Barro, "Human capital and growth." *The American Economic Review* (1991): 12–17.

¹³⁷ Buku yang ditulis oleh Marx dan Engels tersebut merupakan redefinisi terhadap manifesto komunis, dalam perjalanannya mereka lebih tepat disebut sosialis baru. Lihat: Barro, "Human capital and growth." *The American Economic Review* (1991): 12–17.

komunis. Beberapa yang terpenting adalah; Pertama, Marx dan Rostow mengakui bahwa perubahan ekonomi membawa dampak pada struktur sosial dan politik; mengubah budaya dan perilaku. Kedua, sama-sama mengakui realitas adanya kepentingan kelompok dan kelas dalam proses sosial politik yang berkaitan dengan keuntungan ekonomi. Ketiga, keduanya melihat adanya motif-motif ekonomi di balik formasi konflik politik. Keempat, meski memiliki struktur pemikiran yang berbeda, Marx maupun Rostow mempercayai adanya satu tujuan akhir masyarakat yang benar-benar sejahtera (*true affluence*)¹³⁸.

Mesti diakui bahwa teori pembangunan yang dipakai di Dunia Ketiga-- sebagaimana terminologi Dunia Ketiga sendiri-- bukan produk asli wilayah geopolitik itu melainkan lahir dari Barat. Sehingga, teori-teori pembangunan di Dunia Ketiga dapat dikatakan membawa watak dan asumsi asumsi yang berlaku di Barat kemudian merasuki alam pemikiran intelektual Dunia Ketiga. Itu tidak mengherankan karena infiltrasi ide-ide pembangunan Barat ke Dunia Ketiga terjadi secara terus-menerus¹³⁹.

Sesungguhnya memang tidak banyak penjelasan yang mendalam untuk meyakinkan bahwa masuknya ide-ide pembangunan Barat ke Dunia Ketiga sama sekali tak membawa masalah¹⁴⁰. Celaknya, di beberapa bagian Dunia Ketiga teori-teori tersebut justru digunakan untuk diturunkan menjadi formula-formula kebijakan pembangunan tanpa menimbang variabel-variabel spesifik yang ada di masing-masing negara Dunia Ketiga. Karenanya, yang terjadi sesungguhnya bukanlah penyesuaian ide-ide pembangunan Barat

¹³⁸ Tahapan pertumbuhan yang dibangun oleh keduanya tetap bertujuan membangun masyarakat yang sejahtera. Lihat: Barro, "Human capital and growth." *The American Economic Review* (1991): 12–17.

¹³⁹ Goldthorpe menyebutkan bahwa infiltrasi ide-ide tersebut dilakukan secara sistematis meskipun gagasan-gagasan pembangunan yang dibawa ke Dunia Ketiga kehilangan relevansinya ketika dipakai untuk menjelaskan situasi yang bersifat local specific. Hal yang sama diperlihatkan juga oleh Hettne. Hanya saja, ia sedikit lebih maju dibanding Goldthorpe dengan paparannya mengenai dialektika ide ide pembangunan eropasentris yang kemudian menjadi lebih bumi di atas medium Dunia Ketiga. Hettne dalam terjemahan *Ironi Negara Berkembang* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), 34.

¹⁴⁰ Infiltrasi ide-ide pembangunan tersebut tak lebih dari strategi untuk menempatkan Dunia Ketiga di dalam orbit Barat. Lihat: William Easterly, *The Elusive Quest for Growth* (Cambridge: MIT Press, 2002 Cambridge, Massachusetts, London, Enga), 44.

dengan konteks sosial politik Dunia Ketiga melainkan pemaksaan masuknya wilayah-wilayah terbelakang ke dalam bingkai dan parameter-parameter Barat.

Satu doktrin yang disadari atau tidak dari paradigma pemikiran pembangunan Barat adalah bahwa masyarakat manapun bergerak dalam jalur dan pola-pola perubahan yang sama. Dan perubahan-perubahan itu tidaklah memerlukan banyak penyesuaian dan pada dasarnya perubahan itu tidak pernah menyakitkan. Bisa dikatakan pemikiran pembangunan Barat sesungguhnya melakukan penyederhanaan berlebihan dengan mengasumsikan semua masyarakat adalah sama.

Masyarakat dan manusia dalam paradigma pembangunan Barat tidaklah dianggap sebagai pribadi dan komunitas yang memiliki keunikannya masing-masing. Maka, tidak mengejutkan jika Rostow, misalnya, menganggap semua masyarakat akan beranjak dari struktur tradisional menuju masyarakat yang lebih modern, tanpa ada yang tertinggal¹⁴¹. Di sini terlihat betapa teori Rostow yang sangat dipengaruhi kosmologi Barat kesulitan membingkai fakta-fakta pembangunan ekonomi Dunia Ketiga. Ia berpijak pada kenyataan bahwa masing-masing negara memiliki konteks yang berbeda-beda. Karenanya, menganggap teori tahapan pembangunan Barat yang mengajukan kapitalisme sebagai pengganti feodalisme berlaku di Dunia Ketiga adalah sangat sulit untuk diterima.

Gerak maju perekonomian sebuah negara yang terbelakang bisa dimulai dengan suntikan investasi ekstra besar secara serentak di semua sektor. Ide dorongan besar tersebut nyatanya hanya mendapat pembenaran dari kasus rekonstruksi negara-negara Eropa pasca Perang Dunia kedua melalui Marshall Plan atas prakarsa Amerika Serikat pada masa pemerintahan Harry Truman¹⁴². Namun, untuk situasi Dunia

¹⁴¹ Bias Eropa pada model-model pembangunan telah merusak pemahaman mengenai Dunia Ketiga, baik di lingkungan intelektual Dunia Ketiga maupun Barat. Wiarda juga menyebut –khususnya untuk teori linear seperti Rostow—bahwa waktu, urutan dan fase-fase pembangunan yang ada di Barat mungkin tidak bisa direplikasi – bahkan di Barat sekalipun. William Easterly, *The Elusive Quest for Growth*, 44.

¹⁴² Ketika itu, AS mengalirkan bantuan tak kurang dari US \$13 ribu yang setara dengan 4-5 persen GDP AS kala itu, atau ekuivalen dengan US \$ 80 ribu pada tiga puluh tahun kemudian, yang membuahkan ‘keajaiban’ ekonomi Eropa pada dekade 50 dan 60-an. Bukan cuma negara-negara penerima bantuan AS – setengahnya adalah hibah—yang bisa mendapat manfaat tetapi juga negara lain yang bukan recipient. Lihat: William Easterly, *The Elusive Quest for Growth*, 48.

Ketiga, skim yang merupakan replikasi Marshall Plan nyatanya tak membuahkan hasil yang semuanya memuaskan. kondisi ini memberi permakluman yang lebih dari cukup bagi kegagalan – dan perdebatan intelektual tentang—teoriteori pertumbuhan dan ekonomi pembangunan post kolonial dalam menjawab problem kemiskinan, kelaparan, ketimpangan dan produktivitas Dunia Ketiga.

K. Lemahnya Pembangunan Sumberdaya Manusia

Pembangunan ekonomi merupakan ilmu khusus tentang negara berkembang yang umumnya masih miskin dan terbelakang, memiliki aneka orientasi ideologi, latar belakang budaya, serta masalahmasalah ekonomi yang kompleks, yang menuntut pemikiran dan pendekatan baru. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat umumnya. Secara spesifik pembangunan ekonomi merupakan proses yang dapat menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang¹⁴³.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa salah satu indikator pembangunan ekonomi adalah pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita penduduk dari waktu ke waktu. Sebagaimana dikatakan Todaro¹⁴⁴ (1998), bahwa secara tradisional pengertian development merupakan kapasitas dari sebuah perekonomian nasional untuk menciptakan dan mempertahankan income per kapita atau GNP (Gross National Product). Indeks ini pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu negara untuk memperbesar output-nya dalam laju yang lebih cepat dibanding dengan tingkat pertumbuhan penduduknya. Berdasarkan tolok ukur tersebut, maka dapat dilihat seberapa besar barang dan jasa riil yang tersedia bagi rata-rata penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi. Selain itu, pembangunan ekonomi sering diukur berdasarkan tingkat kemajuan struktur produksi dan penyerapan sumber daya (*employment*) yang diupayakan secara terencana.

¹⁴³ Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dari sisi materi dan pendapatan. Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : STIE YKPN BPFE, 1997). 66.

¹⁴⁴ Terdapat konsistensi dan keberlanjutan dari pertambahan pendapatan nasional dan individu. Lihat: Michael P Todaro, *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga* (Jakarta : Erlangga, 1990). 89-92.

Pada era sebelum tahun 1970-an, pembangunan di negara-negara berkembang semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi *an sich*. Tingkat kemajuan pembangunan pada suatu negara biasanya hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan GNP, baik secara agregat maupun per kapita, sesuai dengan teori “efek penetesan ke bawah” (*trickle down effect*)¹⁴⁵. Teori *trickle down effect* ini memproyeksikan kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat yang dengan sendirinya akan menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata. Dengan demikian tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang paling diprioritaskan sehingga masalah-masalah lain dalam membangun masyarakat sering menjadi terabaikan. Akibat penerapan paradigma pertumbuhan ekonomi melalui konsep *trickle down effect* ini, utamanya di negara berkembang pada era tahun 1950-an sampai 1960-an telah menyebabkan kesejahteraan masyarakat kurang terwujud.

Kenyataannya, bahwa paradigma pembangunan seperti itu justru menyebabkan terjadinya kemiskinan, pengangguran, serta terciptanya jurang distribusi pendapatan. Negara-negara berkembang kemudian menyadari kesalahan paradigm tersebut dengan mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, serta penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Pembangunan ekonomi tidak bisa secara universal diterapkan pada semua negara berkembang, karena negara berkembang memiliki keanekaragaman/heterogenitas permasalahan, sehingga ia harus bersifat elektis melakukan kombinasi terhadap berbagai konsep dan teori dari analisis ilmu ekonomi tradisional dengan model-model baru maupun pendekatan yang multidisipliner dan tajam dari berbagai kajian-kajian sejarah dan

¹⁴⁵ Pendekatan tersebut digunakan di hampir banyak negara berkembang untuk menjalankan konsep pembangunannya. Lihat: Michael P. Todaro, *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga*, 68.

pengalaman pembangunan di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin¹⁴⁶.

Tujuan pembangunan ekonomi dengan demikian adalah untuk memahami perekonomian negara-negara berkembang guna memudahkan upaya perbaikan standar atau mutu kehidupan masyarakat yang berjumlah sekitar tiga perempat dari penghuni bumi. Patut dicatat, bahwa untuk mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara, variabel-variabel non-ekonomi (seperti sistem hukum, pendidikan, kesehatan, agama, pemerintahan, dan sebagainya) tidak bisa diabaikan begitu saja. Penerapan ilmu ekonomi yang terlalu spesialis dengan mengabaikan aspek-aspek non-ekonomi dapat mengakibatkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dihasilkan dari teori-teori ekonomi menjadi tidak realistis dan sekaligus tidak relevan¹⁴⁷.

Pembangunan ekonomi dengan demikian tidak saja membicarakan perkembangan ekonomi, namun juga menganalisis hubungan ekonomi dengan faktor non-ekonomi menuju peningkatan pendapatan dan produktivitas masyarakat¹⁴⁸. Dengan begitu, agaknya bidang ekonomi dalam proses pembangunan ini dianggap sebagai “pembuka jalan” bagi upaya peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Alasan negara berkembang selama ini yang berfokus pada pembangunan ekonomi *an sich*, karena disebabkan salah satu bentuk keterbelakangan pada negara berkembang adalah bidang ekonomi, sehingga perlu didorong perubahan dan pembaruan dalam bidang tersebut. Namun demikian, pembangunan ekonomi bukanlah satu-satunya cara untuk membangun masyarakat, sinergitas pembangunan ekonomi dengan melibatkan aspek-aspek lain perlu dilakukan agar pembangunan yang stabil dan kontinu dapat terwujud.

¹⁴⁶ Dalam Symposium on the Economics of Exhaustible Resources. Joseph E. Stiglitz, Growth with exhaustible natural resources: Efficient and optimal growth paths. *Review of Economic*, 24-25

¹⁴⁷ Banyak kegagalan dalam mengimplementasikan konsep pembangunan ekonomi, sehingga banyak negara berkembang yang mengalami kegagalan. Michael P. Todaro, *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga*, 72

¹⁴⁸ Pembangunan tidak hanya sekedar mempertimbangkan faktor ekonomi tetapi juga faktor non ekonomi. Lihat: Michael P. Todaro, *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga*, 74.

Dengan demikian, pembangunan tidak semata-mata diukur melalui kenaikan volume atau nilai produksi barang dan jasa yang secara otomatis akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun untuk mewujudkan kesejahteraan itu, harus ditempuh melalui proses pembangunan yang multidimensional. Terjadinya pergeseran paradigma yang hanya tertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi (*growth economic*) menuju pertumbuhan melalui pemerataan (*growth via equity*) merupakan langkah bijak untuk memihak kepentingan masyarakat yang miskin dan lemah agar masyarakat yang miskin dan lemah tersebut memperoleh peluang untuk berusaha secara produktif, yang pada gilirannya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di negara-negara sedang berkembang (Mubyarto, 2000).

L. Eksploitasi Sumber Daya Alam yang Tidak Seimbang

Pembangunan ekonomi suatu Negara seringkali hanya diukur berdasarkan tingkat dan pertumbuhan GNI (*Gross National Income*) secara keseluruhan maupun perkapita. Semakin tingginya GNI (*Gross National Income*) suatu negara, maka semakin baik pula pembangunan ekonomi negara tersebut. Hal ini mendorong setiap negara, khususnya negara berkembang untuk menaikkan tingkat GNI (*Gross National Income*) dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam yang mereka miliki dan meningkatkan industrialisasi¹⁴⁹.

Pengejaran pertumbuhan ekonomi yang dilakukan, umumnya menghendaki hasil keuntungan yang diperoleh dalam jumlah yang besar dan waktu yang cepat. Seperti, penebangan liar hutan secara massal, penangkapan ikan menggunakan bom atau zat kimia berbahaya, penambangan liar, maupun tindakan eksplotatif lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan secara keseluruhan maupun perkapita (GNI), selain itu berkembangnya sektor industrialisasi juga dapat menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan seperti limbah pabrik, pencemaran udara, hingga efek pemanasan global.

Ekonomi tidak akan pernah ada tanpa sumberdaya alam dan lingkungan. Setiap aktivitas ekonomi pastilah bersentuhan dengan salah satu atau bahkan keduanya sekaligus. Sayangnya, dalam

¹⁴⁹ Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara selalu diukur dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kenaikan income warga negaranya. Faktor tersebut yang kemudian menjadikan pembangunan yang tidak lagi memperhatikan keseimbangan sumber daya alam. Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, 97.

perkembangannya kajian ekonomi pernah mengabaikan sumberdaya alam, terlebih-lebih setelah pesimisme Malthus dan the Club of Rome tidak kunjung terbukti dan penduduk dunia semakin meledak. Ekonomi neoklasikal “merasa” telah mampu mengatasi kelangkaan sumberdaya alam dengan kemajuan teknologi yang terus menerus¹⁵⁰. Tetapi suka atau tidak, sistem ekonomi tidak akan pernah mampu keluar dari ekosistem¹⁵¹. Ada kaitan yang erat antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan kaitan tersebut sering menimbulkan kebingungan.

Oleh karena itu, bukanlah hal yang mengejutkan bila karya tulis awal dalam ilmu ekonomi pembangunan para penulis memberi perhatian yang sangat inten pada cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam meningkatkan produk nasional bruto (GNP) atau produk domestik bruto (GDP) dan total penyerapan tenaga kerja. Perbedaan antara keduanya dapat diringkaskan menjadi bahwa pembangunan ekonomi “tidak harus bermakna” mengejar pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dapat saja merupakan keharusan tetapi tidak cukup. Informasi GNP atau GDP hanya menangkap barang dan jasa yang ada pasarnya, sedangkan banyak barang dan jasa yang sangat menentukan kesejahteraan manusia tidak terdaftar di pasar.

Pembangunan berkepentingan dengan pemerataan dan perubahan struktur yang tidak mungkin teratasi hanya dengan memanipulasi pertumbuhan. Ketika pesimisme Malthus dan the Club of Rome tidak terbukti, penganut neoklasikal mendapatkan landasan yang kuat untuk semakin hanyut dengan pahamnya. Dalam ekonomi klasik dengan bintangnya Adam Smith dan Ricardo, akumulasi kapital merupakan faktor penentu yang mempengaruhi laju kemajuan ekonomi.

Pandangan ini masih tetap menjadi tema utama ekonomi neoklasikal dalam menganalisis sumber pertumbuhan ekonomi. Harrod dan Domar yang menyatakan bahwa investasi dengan cepat mendorong income agregat dan pada saat yang sama memperbesar

¹⁵⁰ Lihat: Joseph E. Stiglitz, “Growth with exhaustible natural resources: Efficient and optimal growth paths,” *Review of Economic Studies* 41(1974):123–138.

¹⁵¹ Aturan yang mengatur dinamika ekosistem, di mana di dalamnya aktivitas manusia berlangsung, pada akhirnya merupakan fungsi dari hukum biologi, bukan fungsi dari sistem ekonomi yang diciptakan manusia. Carl N. McDaniel, John M. Gowdy, *Paradise for sale: a parable of nature* (California: UCLA Press, 1995), 68.

output potensial periode selanjutnya. Solow melihat kemungkinan meningkatnya standard hidup material melalui kemajuan teknologi. Fungsi produksi mencakup tenaga kerja (N), kapital (K), dan perubahan teknologi (A) dengan bentuk $F(N,K, A)$. Sumberdaya alam atau lingkungan tidak ada dalam fungsi produksi neoklasikal. Terbitnya buku "limits to growth" dari Club of Rome di awal tahun 1970an telah menggeser perdebatan atas masa depan pertumbuhan ekonomi. Para penulis limits to growth menyatakan adanya batas biofisik bagi pertumbuhan yang akan membawa pertumbuhan ekonomi kepada titik akhir.

Sayangnya, perlakuan terhadap preferensi, teknologi produksi, dan ekonomi terlihat tidak konvensional dan tidak masuk akal bagi banyak ekonom. Terhadap limits to growth tersebut muncullah gerakan lingkungan. Ahli pertumbuhan mulai memasukkan sumberdaya alam dan polusi ke dalam model pertumbuhan ekonomi selama era 1970an¹⁵². Fungsi produksi yang digunakan Stiglitz adalah $F(N,K,R)$ di mana R adalah laju pemakaian sumberdaya alam. Namun upaya Stiglitz tersebut tidak menjadikan sumberdaya alam dan lingkungan dengan serta merta memasuki arus utama kajian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.¹⁵³

Setelah membandingkan income per kapita dan intensitas kapital antara Amerika Serikat dan India, Lucas Jr. menyimpulkan bahwa intensitas kapital saja tidak cukup memadai untuk menjelaskan perbedaan income per kapita yang begitu jauh¹⁵⁴. Kualitas sumber daya manusia diduga sebagai penyebab perbedaan yang begitu jauh. Namun, setelah melakukan koreksi terhadap sumberdaya manusia, perbedaan memang semakin kecil tetapi tetap tidak hilang. Model dengan akumulasi kapital fisik dan kapital manusia yang digunakan oleh Mankiw et al. (1992) dapat menjelaskan data dengan baik¹⁵⁵. Barro

¹⁵² Sebagai contoh, Stiglitz mengusulkan fungsi produksi agregat dengan tenaga kerja, barang modal, dan sumberdaya alam sebagai barang substitusi dalam produksi. Joseph E. Stiglitz, "Incentives and risk sharing in sharecropping", *Review of Economic Studies* 41(1974): 219-255.

¹⁵³ Lihat: Joseph E. Stiglitz, "Incentives and risk sharing in sharecropping", *Review of Economic Studies* 41(1974): 219-255.

¹⁵⁴ Robert Lucas Jr, "Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries". *American Economic Review* 80 (1990): 92-96

¹⁵⁵ Mankiw, *Principles of Economics* (New York; South-Western College, 2000), 109

(2001) juga menguatkan peran dari sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi.

M. Pola Hubungan Ekonomi dan Sosial yang Tidak Adil

Model Neoklasikal mendasarkan analisa pada peralatan fungsi produksi, sama halnya dengan analisis pertumbuhan ekonomi nasional. Kelompok Neo-Klasik berpendapat bahwa unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional adalah modal, tenaga kerja, kemajuan teknologi. Namun demikian ada kekhususnya teori pertumbuhan regional Neoklasikal yaitu membahas secara mendalam pengaruh dari perpindahan penduduk/migrasi dan lalu lintas modal terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kesimpulan dari model Neoklasikal adalah terdapat hubungan antara pertumbuhan dari suatu negara dengan perbedaan kemakmuran daerah (*regional disparity*) pada negara yang bersangkutan.

Kelompok Neoklasikal mengatakan bahwa pada saat proses pembangunan baru dimulai (negara yang sedang berkembang), tingkat perbedaan kemakmuran antara wilayah cenderung menjadi tinggi (*divergence*). Ketika proses pembangunan telah berjalan dalam waktu lama (negara yang telah berkembang) maka perbedaan tingkat kemakmuran antara wilayah cenderung menurun (*convergen*). Alasan dikemukakan adalah bahwa lalu lintas orang dan lalu lintas modal di negara yang sedang masih belum lancar sehingga proses penyesuaian ke arah tingkat keseimbangan pertumbuhan belum dapat terjadi.

Belum lancarnya fasilitas perhubungan dan komunikasi serta masih kuatnya tradisi yang menghalangi mobilitas penduduk, biasanya merupakan faktor utama yang menyebabkan belum lancarnya arus perpindahan orang dan modal antar daerah. Sedangkan di negara-negara maju, proses penyesuaian tersebut terjadi dengan lancar karena telah tersedianya fasilitas perhubungan dan komunikasi¹⁵⁶. Myrdal menyatakan bahwa perbedaan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi antar wilayah selamanya akan menimbulkan adanya *bachwas effect* yang mendominasi *spread effect* dan pertumbuhan ekonomi regional merupakan proses yang tidak ekulibrium (*disequilibrium*).¹⁵⁷

¹⁵⁶ Teori ini pada mulanya dikemukakan oleh Myrdal yang mengkritik teori Neoklasikal mengenai pertumbuhan yang stabil. Gunnar Myrdal. *Economic Theory and Under-Developed Regions*. (London: Gerald Duckworth & Co, 1956). 44

¹⁵⁷ Gunnar Myrdal. *Economic Theory and Under-Developed Regions*. (London: Gerald Duckworth & Co, 1956). 46

Perbedaan utama dari teori Neoklasik dan teori dari Myrdal adalah, yang pertama menggunakan *constant return to scale* dan kedua menggunakan *increasing return to scale*. Perbedaan tingkat pertumbuhan antara wilayah mungkin akan menjadi sangat besar jika *increasing return to scale* berlangsung terus. Menurut Kaldor, bahwa prinsip-prinsip dari penyebab kumulatif adalah penyederhanaan dari *increasing return to scale* di perusahaan¹⁵⁸. Kondisi daerah-daerah di sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari teori ini.

Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut (maju versus terbelakang). Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah lain. Hal ini disebut Myrdal sebagai *backwash effects*. Berdasarkan kondisi ini maka penganut teori *Cummulative Causation* berpendapat bahwa peningkatan pemerataan pembangunan antar daerah tidak dapat hanya diserahkan pada kekuatan pasar, sehingga perlu dilakukan melalui campur tangan yang efektif dari pemerintah.

N. Kemiskinan, Pengangguran dan Distribusi Pendapatan

Di tengah gemuruh pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan, dunia justru semakin dipenuhi berbagai masalah struktural yang semakin luas dan dalam. Dunia dipenuhi oleh paradoks. Pendapatan dunia semakin tinggi, namun kemiskinan tidak pernah berakhir. Pertumbuhan ekonomi terus terjadi, namun pengangguran semakin meluas. Pembangunan terus berjalan, namun kesenjangan semakin dalam. Ilmu kedokteran berkembang pesat, namun kasus kematian akibat penyakit tidak pernah berkurang.

Teknologi pangan telah mencapai tingkat yang mengagumkan, namun kelaparan terjadi dimana-mana. Pada 2001, terdapat 1,1 milyar orang miskin ekstrem (hidup dibawah garis kemiskinan \$ 1 sehari) di dunia, turun sekitar 400 juta orang dari kondisi dua dekade sebelumnya. Namun pada saat yang sama, terdapat 2,7 milyar orang yang hidup di bawah garis kemiskinan \$ 2 sehari, atau bertambah sekitar 300 juta orang dari kondisi dua dekade sebelumnya (tabel 1)¹⁵⁹.

¹⁵⁸ Nicholas Kaldor, *Causes of Growth and Stagnation in the World Economy* (Cambridge: University Press, 1995), 54

¹⁵⁹ Chen dan Ravallion, *Trade, globalization and poverty* (New York: Taylor and Francis, 2007), 54.

Sub-sahara Afrika menjadi wilayah dengan angka kemiskinan ekstrem tertinggi dan kedalaman kemiskinan terbesar.¹⁶⁰

Tabel 3.1
Trend Kemiskinan Global, 1981-2001

Tahun	\$ 1 a day poverty line		\$ 2 a day poverty line	
	Jumlah (juta orang)	Persentase (%)	Jumlah (juta orang)	Persentase (%)
1981	1,481.8	27.62	2,450.0	51.41
1984	1,276.8	24.74	2,480.1	50.11
1987	1,171.2	22.48	2,477.5	47.82
1990	1,218.5	21.64	2,653.8	47.59
1993	1,207.5	21.08	2,763.6	48.93
1996	1,097.2	19.45	2,674.1	46.86
1999	1,095.7	19.28	2,738.8	46.59
2001	1,089.0	18.60	2,735.4	44.98

Sumber: Chen dan Ravallion, World Bank

Ironis-nya, di saat kemiskinan begitu luas dan dalam, sebagian kecil warga dunia hidup dalam kemewahan luar biasa. Pada 2000, 10 persen kelompok terkaya menguasai 71 persen kekayaan dunia (tabel 2)¹⁶¹. Kekayaan global terkonsentrasi di Amerika Utara, Eropa dan negara-negara kaya Asia. Amerika Utara dengan 6 persen penduduk dunia, menguasai 27% kekayaan dunia. Sedangkan Afrika yang merupakan tempat bermukim 10,2 persen penduduk dunia, hanya memperoleh 2,7 persen kekayaan dunia (tabel 3).

Tabel 3.2
Distribusi Kekayaan Personal Global, 2000 (\$ PPP)

Proporsi	Proporsi Kekayaan Dunia (%)	Kekayaan Minimum (\$ PPP)
1% terkaya	31.6	523,264
5% terkaya	57.0	170,467
10% terkaya	71.1	88,035

Sumber: UNU-WIDER (2006)

¹⁶⁰ World Bank, "Statistic Poverty", *Report on on Poverty*. (diakses 10 Januari 2011), <http://www.worldbank.com>

¹⁶¹ United Nations. "United Nations Document Index." *United Nations Report*. New York: UN Publication, 2007. 20

Meningkatnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan global terus menjadi perdebatan yang panas, dimana ketimpangan menunjukkan skala dan kedalaman yang semakin mengkhawatirkan. 500 individu terkaya dunia memiliki pendapatan lebih besar dari 416 juta penduduk termiskin dunia. Lebih ekstrem lagi, 2,5 milyar orang atau sekitar 40% penduduk dunia, hidup dibawah garis kemiskinan \$2 sehari dengan hanya mendapat 5% pendapatan global. Sedangkan 10% penduduk terkaya dunia yang hidup di negara-negara kaya, menguasai 54% pendapatan global. Lebih ironis lagi, untuk mengangkat 1 milyar manusia dari batas kemiskinan absolut \$1 sehari, hanya dibutuhkan \$ 300 milyar – sekitar 1,6% dari total pendapatan 10% penduduk terkaya dunia.¹⁶²

Tabel 3.3
Distribusi Kekayaan Global Menurut Wilayah, 2000 (\$ PPP)

Negara	Populasi Dewasa (000 orang)	Proporsi Populasi (%)	Kekayaan per Orang Dewasa (\$ PPP)	Proporsi Kekayaan (%)
Amerika Utara	225,719	6.1	193,147	27.0
Amerika Latin & Karibia	302,915	8.2	34,956	6.6
Eropa	550,579	14.9	81,890	27.9
Asia: China	842,063	22.8	16,749	8.7
Asia: India	570,595	15.4	11,655	4.1
Asia: Negara Kaya	166,532	4.5	138,750	14.3
Asia: Lainnya	642,421	17.4	18,266	7.3
Afrika	376,292	10.2	11,730	2.7
Oceania	20,405	0.6	99,634	1.3
Dunia	3,697,519	100.0	43,628	100.0

Sumber: UNDP

Sementara itu, kecenderungan tahun-tahun terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang signifikan gagal menurunkan pengangguran dan kemiskinan diantara orang yang bekerja. Pada 2006, 195 juta orang menganggur di seluruh dunia, meningkat sebesar 34,4 juta orang dibandingkan kondisi satu dekade sebelumnya. Pada saat yang sama, sekitar 1,4 milyar pekerja hidup

¹⁶² UNDP. "Human Development Report". *United Nations Development Program*. New York: UNDP Publication, 2005. 4.

dengan pendapatan kurang dari US\$ 2 sehari dimana 500 juta diantaranya hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem dengan pendapatan dibawah US\$ 1 sehari (tabel 4).¹⁶³ Berbagai kegagalan struktural dari perekonomian global ini telah menciptakan bencana ekonomi (*economic disaster*) yang luar biasa di tengah-tengah keajaiban ekonomi (*economic miracle*) dunia. Kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran telah melahirkan berbagai tragedi kemanusiaan yang luas dan dalam.

Tabel 3.4
Pengangguran dan Pekerja Miskin (*Working Poor*) Global

Indikator	1996	2001	2006
Jumlah Pengangguran (juta orang)	161.4	185.5	195.2
<i>US\$ 1 a day working poor</i> Jumlah (juta orang) % thp total orang yang bekerja	594.6 (24.0)	578.6 (21.7)	507.0 (17.6)
<i>US\$ 2 a day working poor</i> Jumlah (juta orang) % thp total orang yang bekerja	1,354.7 (54.8)	1,394.1 (52.2)	1,367.8 (47.4)

Sumber: ILO

Setiap jam 1.200 anak di seluruh dunia meninggal karena kemiskinan, setara dengan tiga tsunami, salah satu bencana terbesar dalam sejarah yang menewaskan 300.000 orang di kawasan samudera Hindia pada 2004. Setiap tahun 10,7 juta anak lahir tanpa punya harapan untuk merayakan ulang tahun-nya yang ke-5. Pandemi HIV/AIDS telah

¹⁶³ ILO. “*Global Employment Trends Brief.*” ILO Report. Geneva: ILO Publications, 2007. 1.

merenggut nyawa 3 juta orang dan 5 juta orang lainnya terinfeksi setiap tahunnya, meninggalkan jutaan anak sebagai yatim piatu.¹⁶⁴

Setiap hari, jutaan manusia di seluruh dunia mengalami kelaparan. Lebih dari 850 juta orang terjebak dalam lingkaran malnutrisi dengan segala dampaknya.¹⁶⁵ Saat yang sama, sekitar 1,1 milyar orang di negara-negara miskin tidak memiliki akses yang memadai terhadap air bersih dan 2,6 milyar tidak memiliki fasilitas sanitasi dasar—dimana kombinasi kedua hal ini telah menyebabkan 1,8 juta anak meninggal dunia setiap tahunnya.¹⁶⁶

O. Krisis Ekonomi dan Keuangan Internasional

Krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat (AS) kini terus mengguncang perekonomian global. Trauma akan krisis ekonomi AS di tahun 1929 yang sering disebut *great depression*¹⁶⁷ kembali menghantui. Krisis finansial AS yang dengan cepat bertransformasi menjadi krisis global, telah menjadi krisis terburuk sejak Great Depression 1929. Setelah kejatuhan pasar saham pada Oktober 1929, AS membutuhkan waktu lebih dari tiga tahun untuk memulihkan perekonomian yang turun sepertiga outputnya dengan 25% tenaga kerja menjadi pengangguran. Kini, kejadian Great Depression, seakan akan terulang kembali, dimana banyak saham-saham yang menjadi

¹⁶⁴ UNDP. “Human Development Report”. *United Nations Development Program*. New York: UNDP Publication, 2005. 4.

¹⁶⁵ UNDP. “Human Development Report”. *United Nations Development Program*. New York: UNDP Publication, 2005. 4.

¹⁶⁶ UNDP. “Human Development Report”. *United Nations Development Program*. New York: UNDP Publication, 2005. 4.

¹⁶⁷ Beberapa analisis mengenai *great depression* 1929; Keynes (1936) menekankan pada faktor permintaan agregat, Fisher (1935, 1937) menyatakan bahwa “esensi depresi” adalah jatuhnya uang bank dari \$22 milyar pada 1929 menjadi \$14 milyar pada 1933 dan “esensi pemulihan” antara 1933-1937 adalah ekspansi uang bank menjadi \$23 milyar. Penjelasan ambruknya perbankan dan jatuhnya uang beredar sebagai penyebab terpenting *great depression* dikuatkan Friedman dan Schwartz (1963). Hampir 70 tahun kemudian, Stiglitz dan Greenwald (2003) mempertegas hal ini bahwa yang mempengaruhi aktivitas ekonomi adalah *terms of credit* dan *quantity of credit*, bukan *quantity of money*. Lihat: Joseph Stiglitz dan Bruce Greenwald, *Towards A New Paradigm in Monetary Economics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 38.

maskot Wall Street berguguran. Apalagi perusahaan sekelas *Lehman Brothers*, *AIG* dan *Washington Mutual* menyatakan kebangkrutan¹⁶⁸.

Dampak dari krisis ekonomi dan finansial di Amerika telah merambah ke negara-negara di Eropa dan Asia termasuk Indonesia. Perusahaan-perusahaan raksasa multi nasional banyak jatuh ambruk (*collapse*), bank-bank internasional dan pemerintahan di berbagai negara di dunia mengucurkan dana dalam jumlah besar ke pasar uang untuk meredakan guncangan krisis. Intervensi yang tidak kalah dramatis juga dilakukan berbagai negara yang terkena dampak terbesar krisis subprime mortgage ini. *Bradford & Bingle* dinasionalisasi oleh pemerintah Inggris, Fortis diambil alih pemerintah Belgia, Belanda dan Luksemburg, bail-out Hypo Real Estate Group Jerman, dan pengambilalihan Glitnir Bank oleh pemerintah Islandia. Hal ini belum termasuk sejumlah besar intervensi di pasar uang dan injeksi ratusan milyar dollar likuiditas oleh bank sentral Eropa, Jepang, Inggris, Australia dan Swiss dan beberapa negara Eropa dan Asia lainnya¹⁶⁹.

Krisis ini menunjukkan rapuhnya sistem ekonomi kapitalis yang dianut negara-negara besar dan mayoritas negara-negara di dunia. Sistem ekonomi ini telah berevolusi menjadi perekonomian yang didominasi sektor moneter dimana *fiat money*, *fractional reserve requirement*, dan *interest* menjadi pilar utamanya. Ketiganya menciptakan transaksi derivatif di sektor finansial, yakni transaksi berbasis *portofolio*¹⁷⁰. Faktor inilah yang menciptakan *bubble economy*, penyebab utama krisis keuangan global saat ini. Kondisi tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari keinginan sebuah negara untuk dapat cepat tumbuh dan berkembang, tanpa memperhatikan keseimbangan ekonomi yang seharusnya terbentuk. Pasar uang (finansial market) yang dibiarkan berkembang tanpa kontrol, telah

¹⁶⁸ Praktek dan perilaku apapun dilakukan untuk tetap menjadikan perusahaan mereka baik. Puncaknya adalah ketika perusahaan sekelas Lehman Brothers, AIG dan Washington Mutual menyatakan kebangkrutan. The Washington Post. *Timeline: Crisis on Wall Street*. (Diakses 10 Januari 2011), <http://www.washingtonpost.com>

¹⁶⁹ Bloomberg. Europe Crisis Timeline: Maastricht to Papandreou. (Diakses 6 Januari 2011), <http://www.bloomberg.com>

¹⁷⁰ Stiglitz dan Greenwald mempertegas hal ini bahwa yang mempengaruhi aktivitas ekonomi adalah terms of credit dan quantity of credit, bukan quantity of money. Joseph Stiglitz dan Bruce Greenwald, *Towards A New Paradigm in Monetary Economics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 38.

membuat perekonomian ditopang oleh kegiatan dan aktivitas ekonomi yang bersifat spekulatif, yang hanya menguntungkan kaum pemilik modal semata¹⁷¹.

Krisis keuangan yang kemudia dilanjutkan dengan krisis ekonomi telah membelenggu dunia internasional dalam seratus tahun terakhir. Rentetan krisis yang terjadi dalam kurun waktu tersebut, telah membuat perekonomian internasional sangat rentan dengan krisis. Bahkan sepanjang abad 20 telah terjadi lebih 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara. Fakta ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap 5 tahun terjadi krisis keuangan hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat manusia¹⁷². Seperti yang terlihat pada tabel 5.

Tabel 5.
Sejarah Panjang Krisis Ekonomi dan Keuangan Internasional

Tahun	Krisis Ekonomi dan Keuangan Internasional
1907	Krisis perbankan Internasional dimulai di New York, telah terjadi peningkatan yang sangat drastis jumlah bank di Amerika sampai dengan 19 kali lipat. Kondisi ini telah memicu krisis keuangan di Amerika Serikat.
1920	Terjadi depresi ekonomi di Jepang, akibat dari biaya perang yang dibutuhkan Jepang pada saat itu, sehingga memicu krisis ekonom. Biaya perang yang sangat tinggi telah menyebabkan terjadinya depresi ekonomi
1922-1923	Jerman mengalami krisis dengan hyper inflasi yang sangat tinggi. Dampaknya adalah terjadi penurunan nilai mata uang yang sangat drastis, mengakibatkan para karyawan menerima gaji dua kali dalam satu hari
1927	Jepang kembali mengalami krisis keuangan yang cukup parah. Ditandai dengan tutupnya 37 Bank yang sedang beroperasi. Krisis ini sendiri dipicu dari krisis yang terjadi

¹⁷¹ Joseph Stiglitz dan Bruce Greenwald, *Towards A New Paradigm in Monetary Economics*, 40.

¹⁷² Lihat: Roy Davies dan Glyn Davies, *The History of Money From Ancient time of Present Day* (London: University of Wales Press, 1996), 102.

	pada bank-bank di Taiwan.
1929-1930	Krisis terburuk di Amerika Serikat yang dikenal dengan istilah <i>The Great Crash</i> di pasar modal New York disertai dengan <i>Great Depression</i> (Kegagalan Perbankan). Pengaruh yang ditimbulkan adalah NNP AS terpankask lebih dari setengahnya.
1931	Austria mengalami krisis perbankan yang cukup parah kemudian berdampak kepada kejatuhan perbankan di German, dan kemudian mengakibatkan berfluktuasinya mata uang internasional.
1944-1966	Perancis mengalami dampak hyper inflasi akibat dari kebijakan yang mulai meliberalkan perekonomiannya.
1944-1946	Hungaria mengalami hyper inflasi dan krisis moneter yang cukup parah. Bisa dikatakan ini merupakan krisis terburuk Eropa. <i>Note issues</i> Hungaria meningkat dari 12.000.000.000 (11 digits) hingga 27 digits.
1945-1948	Akibat dari dana yang dikeluarkan untuk membiayai perang dunia kedua, Jerman mengalami <i>hyper inflasi</i> yang cukup parah, sehingga juga berdampak terhadap beberapa negara Eropa lainnya.
1945-1955	Krisis pertama di Afrika mulai terjadi. Penyebab utamanya adalah tidak terkendalinya pertumbuhan perbankan yang mulai berkembang pada saat itu, dengan tidak memiliki regulasi yang memadai.
1944-1966	Tidak terkendalinya perekonomian di beberapa negara Eropa telah mengakibatkan banyak krisis yang terjadi. Salah satunya Perancis mengalami hyperinflasi sejak tahun 1944
1950-1972	Periode aman dari krisis. Hal ini disebabkan karena <i>Bretton Woods Agreements</i> , yang mengeluarkan regulasi di sektor moneter relatif lebih ketat (<i>Fixed Exchange Rate Regime</i>). Hal ini terjadi karena penerapan rezim nilai tukar yang stabil oleh beberapa negara besar, telah membuat sektor keuangan dunia relatif lebih stabil.
1971	Kesepakatan <i>Bretton Woods's</i> runtuh. Pada hakikatnya perjanjian ini runtuh akibat sistem dengan mekanisme bunga (interest) tidak dapat untuk tetap mempertahankan rezim nilai

	tukar yang <i>fixed exchange rate</i> .
1971-1973	Terjadi kesepakatan <i>Smithsonian</i> (di mana saat itu nilai 1 Ons emas = 38 USD). Pada fase ini merupakan usaha untuk mengembalikan stabilitas moneter, dengan kembali menggunakan standar emas. Namun kesepakatan ini hanya bertahan 2-3 tahun saja.
1973	Amerika menggunakan “uang buruk (<i>foreign exchange</i>) menggantikan uang bagus (dollar yang di-back-up dengan emas)-(<i>Gresham Law</i>)”. Pada saat itulah mulai mengglobalnya aktifitas spekulasi sebagai dinamika baru di pasar moneter konvensional akibat penerapan <i>floating exchange rate system</i> . Periode Spekulasi ini berlangsung di pasar modal, uang, obligasi dan derivative
1973-1974	Inggris mengalami krisis perbankan kedua dalam lima puluh tahun terakhir. Kondisi tersebut dipicu oleh <i>Bank of England</i> meningkatkan kompetisi pada <i>supply of credit</i> , sehingga banyak usaha yang bangkrut.
1974	Krisis pada <i>euro dollar market</i> , hal tersebut diakibatkan oleh <i>West German Bankhaus ID Herstatt</i> gagal mengantisipasi krisis keuangan internasional.
1978-1980	<i>Deep recession</i> di negara-negara industri akibat boikot minyak oleh OPEC, yang kemudian kemudian membuat melambung tingkat suku bunga negara-negara industri.
1980	Periode ini dikenal dengan sebutan krisis dunia ketiga. Banyaknya utang dari negara dunia ketiga disebabkan oleh <i>oil booming</i> pada tahun 1974, namun ketika negara maju menaikkan tingkat suku bunga untuk menekan inflasi, utang negara dunia ketiga meningkat drastis melebihi kemampuan membayarnya.
1980	Pada tahun 1980 itulah terjadi krisis utang di Polandia, akibat dari terpengaruh dampak negative krisis utang dunia ketiga. Banyak bank di Eropa Barat yang menarik dananya dari bank di Eropa Timur. Akibatnya sebagian negara Eropa timur mengalami krisis.
1982	Terjadi krisis utang di Mexico yang disebabkan oleh <i>capital outflow</i> yang <i>massive</i> ke US, kemudian di- <i>treatments</i> dengan utang dari USA, IMF, BIS. Krisis ini juga merembet ke Argentina, Brazil dan Venezuela.

1987	<i>The Great Crash (Stock Exchange)</i> di pasar modal USA & UK telah Mengakibatkan otoritas moneter dunia meningkatkan <i>money supply</i> . Selanjutnya pada tahun 1994 terjadi krisis keuangan di Mexico; kembali akibat kebijakan finansial yang tidak tepat.
1997-2002*	Krisis keuangan melanda Asia Tenggara. Krisis yang dimulai di Thailand, Malaysia kemudian Indonesia, akibat kebijakan utang dan krisis mata uang yang tidak transparan. Krisis ini berlanjut ke Korea.
1998-1999*	Krisis yang terjadi di Asia Tenggara kemudian berlanjut ke Rusia dan beberapa negara Amerika Latin (Argentina, Brazil)
2008-2009*	Krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat (AS), terus mengguncang perekonomian global, Krisis finansial AS yang dengan cepat bertransformasi menjadi krisis global, telah menjadi krisis terburuk sejak <i>Great Depression</i> 1929. Efek domino dari krisis ini telah merambah ke negara-negara Eropa dan Asia termasuk Indonesia.

Sumber: Roy Davies dan Glyn Davies, *The History of Money From Ancient time of Present Day, 1996*. * Tambahan data dari penulis, di ambil dari berbagai sumber.

Rangkaian krisis yang melanda dunia tidak pernah berhenti, bahkan menunjukkan fakta yang sangat mengkhawatirkan, perekonomian dunia berada pada titik terendahnya. Dari data dibawah ini terlihat Eropa berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, krisis utang yang merembet kepada krisis mata uang dan keuangan. Anatomi dan Kronologi krisis yang terjadi di eropa saat ini, bisa menjadi pelajaran sangat berharga¹⁷³.

Tabel 6.
Kronologis Krisis Eropa

Waktu	Negara	Kondisi
1 Januari 2001	Yunani	Yunani resmi masuk ke dalam euro zone
15 November 2004	Yunani	Yunani mengakui bahwa mereka memalsukan persyaratan untuk dapat masuk ke dalam euro zone, dimana defisit

¹⁷³ Bloomberg, "Europe Crisis Timeline: Maastricht to Papandreou". (Diakses 6 Januari 2011), <http://www.bloomberg.com>.

		anggaran Yunani tidak pernah berada di bawah 3 persen semenjak 1999 seperti yang disyaratkan untuk menjadi anggota euro zone.
15 September 2008	Amerika Serikat	Lehman Brothers mengalami kebangkrutan, memicu kepanikan pasar global
14 Januari 2009	Yunani	S&P memangkas rating kredit Yunani dari awalnya A- menjadi A.
19 Januari 2009	Spanyol	S&P memangkas rating kredit Spanyol dari AA+ menjadi AAA
20 Oktober 2009	Yunani	Menteri Keuangan Yunani, Papaconstantinou, menyatakan GDP defisit Yunani akan mencapai 12.5 persen, meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding prediksi sebelumnya
16 Desember 2009	Yunani	S&P kembali menurunkan peringkat surat utang Yunani dari A- menjadi BBB+
11 Februari 2010	Yunani	Para pemimpin European Union mengadakan pertemuan darurat mengenai keadaan Yunani yang makin terpuruk, dan setuju untuk mengambil langkah untuk melindungi kestabilan keuangan euro area
8 Maret 2010	Portugal	Pemerintah Portugal mengumumkan pemotongan anggaran, penjualan aset, dan pembekuan upah publik
24 Maret 2010	Portugal	Fitch memotong rating kredit Portugal menjadi AA-
27 April 2010	Yunani	Keadaan keuangan Yunani semakin terpuruk. S&P menjadi perusahaan pemeringkat pertama yang menurunkan rating kredit Yunani menjadi “junk”, dan menurunkan peringkat Portugal menjadi A-
2 Mei 2010	Yunani	Euro zone setuju untuk memberikan paket bantuan sebesar 10 milyar euro kepada Yunani, dengan janji pengetatan anggaran

5 Mei 2010	Yunani	Demonstrasi terjadi di Athena, Yunani, terkait rencana pengetatan anggaran pemerintah berujung kekerasan dan tiga orang tewas setelah terjebak di sebuah bank yang dibakar oleh demonstran
12-13 Mei 2010	Spanyol	Spanyol mengumumkan pemotongan upah publik dan pembekuan dana pensiun, sementara Portugal menurunkan upah pejabat pemerintahan dan menaikkan pajak. Spanyol juga memotong target defisit menjadi 6 persen untuk tahun 2011 dan memangkas outlook pertumbuhan ekonomi
28 Mei 2010	Spanyol	Fitch memotong rasio kredit Spanyol dari AAA menjadi AA+
28 November 2010	Irlandia	Irlandia mendapat bantuan (bailout) sebesar 85 miliar euro
23 Desember 2010	Portugal	Fitch memangkas peringkat kredit Portugal menjadi A+
23 Maret 2011	Portugal	Perdana Menteri Portugal, Jose Socrates, mengundurkan diri setelah partai oposisi menolak rencana pengetatan anggaran
13 Mei 2011	Irlandia Portugal Yunani	EU mengumumkan prediksi hutang dan defisit terbaru dan memperkirakan bahwa Irlandia, Portugal, dan Yunani akan memiliki hutang lebih besar dibanding total GDP mereka di tahun 2011
13 Juni 2011	Yunani	S&P memangkas rating kredit Yunani menjadi CCC, rating terendah dari semua negara yang ada
5 dan 3 Juli 2011	Portugal Yunani	Moody's memotong rating kredit Portugal dan Irlandia menjadi "junk"
19 September 2011	Itali	S&P memotong rating kredit Italia untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, dari A menjadi A+
2 November 2011	Yunani	Para pemimpin Eropa mengentikan bantuan untuk Yunani dan menyatakan Yunani harus segera memutuskan apakah akan bertahan di euro area atau keluar

10 November 2011	Yunani	George Papandreou mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Yunani, digantikan oleh Lucas Papademos
13 November 2011	Itali	Silvio Berlusconi mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Italia menyusul krisis hutang di negara tersebut

Sumber: *Bloomberg News*.

Krisis panjang yang telah dialami oleh bangsa – bangsa di dunia seharusnya telah memberikan kesadaran penuh kepada pengambil kebijakan untuk lebih peka dalam melihat persoalan ekonomi yang ada. Penggunaan pendekatan ekonomi yang hanya bersumber dari pemahaman neoklasikal harus mulai dirubah¹⁷⁴.

P. Kegagalan Ekonomi Kapitalis

Dalam menganalisa penyebab utama timbulnya krisis moneter tersebut, banyak para pakar ekonomi berkesimpulan bahwa kerapuhan fundamental ekonomi (*fundamental economic fragility*) adalah merupakan penyebab utama munculnya krisis ekonomi¹⁷⁵. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa defisit neraca pembayaran (*deficit balance of payment*), beban hutang luar negeri (*foreign debt-burden*) yang

¹⁷⁴ Pandangan tersebut diperkuat oleh Chapra , menurutnya, peristiwa depresi hebat telah memperlihatkan secara jelas kelemahan logika Hukum Say dan konsep *laissez faire*. Ini dibuktikan oleh ekonomi pasar yang hampir tidak mampu secara konstan menggapai tingkat full employment dan kemakmuran. Ironisnya, di balik kemajuan ilmu ekonomi yang begitu pesat, penuh inovasi, dilengkapi dengan metodologi yang semakin tajam, model-model matematis dan ekonometri yang semakin luas untuk melakukan evaluasi dan prediksi, ternyata ilmu ekonomi tetap memiliki keterbatasan untuk menggambarkan, menganalisis maupun memproyeksikan kecenderungan tingkah laku ekonomi dalam perspektif waktu jangka pendek. Lihat: Umer Chapra, *The Future of Economics; An Islamic Perspective*, 60.

¹⁷⁵ Hal ini seperti disebutkan oleh Michael Camdessus (1997), Direktur International Monetary Fund (IMF) dalam kata-kata sambutannya pada Growth-Oriented Adjustment Programmes (kurang lebih) sebagai berikut: “Ekonomi yang mengalami inflasi yang tidak terkawal, defisit neraca pembayaran yang besar, pembatasan perdagangan yang berkelanjutan, kadar pertukaran mata uang yang tidak seimbang, tingkat bunga yang tidak realistis, beban hutang luar negeri yang membengkak dan pengaliran modal yang berlaku berulang kali, telah menyebabkan kesulitan ekonomi, yang akhirnya akan memerangkapkan ekonomi negara ke dalam krisis ekonomi”. Agustianto, *Akar Krisis Keuangan Global dan Momentum Ekonomi Syariah Sebagai Solusi*, (diakses, 12 November 2011), <http://ib.eramuslim.com>.

membengkak—terutama sekali hutang jangka pendek, investasi yang tidak efisien (*inefficient investment*), dan banyak indikator ekonomi lainnya telah berperan aktif dalam mengundang munculnya krisis ekonomi.

Menurut Chapra, penyebab utama krisis adalah kepincangan sektor moneter (keuangan) dan sektor riil. Sektor keuangan berkembang cepat melepaskan dan meninggalkan jauh sektor riil. Di mana dalam sistem ekonomi kapitalisme neo liberalisme, tidak mengaitkan sama sekali antara sektor keuangan dengan sektor riil. Tercerabutnya sektor moneter dari sektor riil terlihat dengan nyata dalam bisnis transaksi maya (*virtual transaction*) melalui transaksi derivatif yang penuh spekulasi. Transaksi maya mencapai lebih dari 95 persen dari seluruh transaksi dunia. Sementara transaksi di sektor riil berupa perdagangan barang dan jasa hanya sekitar 5 (lima) persen saja¹⁷⁶.

Sebagaimana disebut di atas, perkembangan dan pertumbuhan finansial di dunia saat ini, sangat tak seimbang dengan pertumbuhan sektor riil. Realitas ketidakseimbangan arus moneter dan arus barang/jasa tersebut, mencemaskan dan mengancam ekonomi berbagai negara. Pakar manajemen dunia, Peter Drucker, menyebut gejala ketidakseimbangan antara arus moneter dan arus barang/jasa sebagai adanya *decoupling*, yakni fenomena keterputusan antara maraknya arus uang (moneter) dengan arus barang dan jasa.

Fenomena ketidak seimbangan itu dipicu oleh maraknya bisnis spekulasi (terutama di dunia pasar modal, pasar valas dan properti), sehingga potret ekonomi dunia seperti balon (*bubble economy*). Dalam sistem ekonomi Islam, jumlah uang yang beredar bukanlah variabel yang dapat ditentukan begitu saja oleh pemerintah sebagai variabel eksogen. Jumlah uang yang beredar ditentukan sebagai variabel endogen, yaitu ditentukan oleh banyaknya permintaan uang di sektor

¹⁷⁶ Menurut analisis lain, perbandingan tersebut semakin tajam, tidak lagi 95% : 5%, melainkan 99% : 1%. Di tahun 2007 saja, disebutkan bahwa volume transaksi yang terjadi di pasar uang (*currency speculation and derivative market*) dunia berjumlah US\$ 1,5 trillion hanya dalam sehari, sedangkan volume transaksi pada perdagangan dunia di sektor riil hanya US\$ 6 trillion setiap tahunnya (Rasio 500 : 6), Jadi sekitar 1 (satu)%. Celakanya lagi, hanya 45 persen dari transaksi di pasar, yang spot, selebihnya adalah forward, futures, dan options. Agustianto, *Akar Krisis Keuangan Global dan Momentum Ekonomi Syariah Sebagai Solusi*, (diakses, 12 November 2011), <http://ib.eramuslim.com>.

riel, atau dengan kata lain, dalam perekonomian, jumlah uang yang beredar sama banyaknya dengan nilai barang dan jasa¹⁷⁷.

Jadi, sektor finansial mengikuti pertumbuhan sektor riel. Inilah perbedaan konsep ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalisme, jelas memisahkan antara sektor finansial dan sektor riel. Akibat pemisahan itu, ekonomi dunia rawan krisis, khususnya negara-negara berkembang. Sebab, pelaku ekonomi tidak lagi menggunakan uang untuk kepentingan sektor riel, tetapi untuk kepentingan spekulasi semata. Spekulasi inilah yang dapat menggoncang sendi-sendi ekonomi negara, khususnya negara yang kondisi politiknya tidak stabil. Akibat spekulasi itu, jumlah uang yang beredar sangat tidak seimbang dengan jumlah barang di sektor riel.

Spekulasi mata uang yang mengganggu ekonomi dunia, umumnya dilakukan di pasar-pasar uang. Pasar uang di dunia ini saat ini, dikuasai oleh enam pusat keuangan (London, New York, Chicago, Tokyo, Hongkong dan Singapura). Nilai mata uang negara lain, bisa saja tiba-tiba menguat atau sebaliknya. Di pasar uang tersebut, peran spekulasi sangat signifikan untuk menggoncang ekonomi suatu negara. Inggris, sebagai negara yang kuat ekonominya, ternyata pernah sempoyongan akibat ulah spekulasi di pasar uang. Robin Hahnel dalam artikelnya *Capitalist Globalism In Crisis: Understanding the Global Economic Crisis*, mengatakan bahwa globalisasi – khususnya dalam financial market, hanya membuat pemegang asset semakin memperbesar jumlah kekayaannya tanpa melakukan apa-apa.

Mereka hanya memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam pasar uang dengan kegiatan spekulasi untuk menumpuk kekayaan mereka tanpa kegiatan produksi yang riel. Dapat dikatakan uang tertarik pada segelintir pelaku ekonomi meninggalkan lubang yang menganga pada sebagian besar spot ekonomi¹⁷⁸. Hahnel juga menyoroti bagaimana sistem kredit atau sistem hutang sudah

¹⁷⁷ Agustianto, *Akar Krisis Keuangan Global dan Momentum Ekonomi Syariah Sebagai Solusi*, (diakses, 12 November 2011), <http://ib.erasmuslim.com>.

¹⁷⁸ “They do not work, they do not produce, they trade money for stocks, stocks for bonds, dollars for yen, etc. They speculate that some way to hold their wealth will be safer and more remunerative than some other way. Broadly speaking, the global credit system has been changed over the past two decades in ways that pleased the speculators. Robin Hahnel, *Panic rules!: everything you need to know about the global economy* (Canada: Global Image, 1999), 42

memerangkap perekonomian dunia sedemikian dalam. Apalagi mekanisme bunga (*interest rate*) juga menggurita bersama sistem hutang ini. Yang kemudian membuat sistem perekonomian harus menderita ketidak seimbangan kronis.

Sistem hutang ini menurut Hahnel hanya melayani kepentingan spekulator, kepentingan segelintir pelaku ekonomi. Namun segelintir pelaku ekonomi tersebut menguasai sebagian besar asset yang ada di dunia. Jika kita kaji pemikiran Hahner ini lebih mendalam akan kita lihat dengan sangat jelas bahwa perekonomian akan berakhir dengan kehancuran akibat sistem yang dianutnya, yakni kapitalisme ribawi¹⁷⁹.

Dikalangan para spekulan, mereka meraup keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Makin besar selisihnya, makin menarik bagi para spekulan untuk bermain. Dengan demikian, nilai suatu mata uang dapat berfluktuasi secara liar. Solusinya adalah mengatur sektor finansial agar menjauh dari segala transaksi yang mengandung spekulasi, termasuk transaksi-transaksi maya di pasar uang.

Gejala *decoupling*, sebagaimana digambarkan di atas, disebabkan, karena fungsi uang bukan lagi sekedar menjadi alat tukar dan penyimpanan kekayaan, tetapi telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan dan sangat menguntungkan bagi mereka yang memperoleh gain. Meskipun bisa pula mengalami kerugian milyaran dollar AS. Fakta mencatat, perekonomian saat ini digelembungkan oleh transaksi maya yang dilakukan oleh segelintir orang di beberapa kota dunia, seperti London (27 persen), Tokyo-Hong Kong-Singapura (25 persen), dan Chicago-New York (17 persen). Kekuatan pasar uang ini sangat besar dibandingkan kekuatan perekonomian dunia secara keseluruhan. Perekonomian global praktis ditentukan oleh perilaku lima negara tersebut.

Dari paparan di atas, terlihat dengan nyata, bahwa sistem ekonomi kapitalisme yang menganut paham *laize faire* dan berbasis bunga kembali terguat. Faham kapitalisme neoliberalisme tidak bisa

¹⁷⁹ Penasihat keuangan Barat, bernama Dan Taylor, mempunyai keyakinan bahwa sistem keuangan dan perbankan Islam mempunyai keunggulan sistem yang lebih baik dibanding dengan sistem keuangan Barat yang berasaskan riba. Krisis keuangan yang sedang dihadapi oleh negara-negara Barat seperti USA dan UK memberikan kekuatan secara langsung dan tidak langsung kepada sistem finansial Islam yang berdasarkan Syariah. Dan Taylor. *Islamic Financial Institution*, (diakses 15 November 2011), <http://islamicbanking-malaysia.com>

dipertahankan. Demikian juga statement Fukuyama yang menyatakan kemenangan kapitalisme liberalisme sebagai representasi akhir zaman, menjadi kehilangan keabsahannya. Karena sistem ekonomi kapitalisme telah gagal menciptakan tata ekonomi dunia yang berkeadilan dan stabil. Sebenarnya, sejak awal tahun 1940-an, para ahli ekonomi Barat, telah menyadari indikasi kegagalan tersebut¹⁸⁰.

Pandangan miring kepada kapitalisme tersebut semakin keras pada era 1990-an di mana berbagai ahli ekonomi Barat generasi dekade ini dan para ahli ekonomi Islam pada generasi yang sama menyatakan secara tegas bahwa teori ekonomi telah mati, di antaranya yang paling menonjol adalah Paul Ormerod¹⁸¹. Indikasi yang dapat disebutkan di sini adalah pada akhir abad 19 dunia mengalami krisis dengan jumlah tingkat pengangguran yang tidak hanya terjadi di belahan dunia negara-negara berkembang, akan tetapi juga melanda negara-negara maju.

Selanjutnya Ormerod menandakan bahwa ahli ekonomi terjebak pada ideologi kapitalisme yang mekanistik yang ternyata tidak memiliki kekuatan dalam membantu dan mengatasi resesi ekonomi yang melanda dunia. Mekanisme pasar yang merupakan bentuk dari sistem yang diterapkan kapitalisme cenderung pada pemusatan kekayaan pada kelompok orang tertentu. Karena itu, kini telah mencul gelombang kesadaran untuk menemukan dan menggunakan sistem ekonomi “baru” yang membawa implikasi keadilan, pemerataan, kemakmuran secara komprehensif serta pencapaian tujuan-tujuan efisiensi.

Konsep ekonomi baru tersebut dipandang sangat mendesak diwujudkan. Konstruksi ekonomi tersebut dilakukan dengan analisis

¹⁸⁰ Adalah Joseph Schumpeter dengan bukunya *Capitalism, Socialism and Democracy* menyebutkan bahwa teori ekonomi modern telah memasuki masa-masa krisis. Pandangan yang sama dikemukakan juga oleh ekonom generasi 1950-an dan 60-an, seperti Daniel Bell dan Irving Kristol dalam buku *The Crisis in Economic Theory*. Demikian pula Gunnar Myrdal dalam buku *Institutional Economics, Journal of Economic Issues*, juga Hla Mynt, dalam buku *Economic Theory and the Underdeveloped Countries*. Mahbulul Haq, *The Poverty Curtain : Choices for the Third World*, (Columbia University Press, 1976), 204

¹⁸¹ Dia menulis buku (1994) berjudul *The Death of Economics*. Dalam buku ini ia menyatakan bahwa dunia saat ini dilanda suatu kecemasan yang maha dahsyat dengan kurang dapat beroperasinya sistem ekonomi yang memiliki ketahanan untuk menghadapi setiap gejolak ekonomi maupun moneter. Lihat: Paul Ormerod, *The Death of Economics*, (Virginia: John Wiley & Sons, 1997), 184

objektif terhadap keseluruhan format ekonomi kontemporer dengan pandangan yang jernih dan pendekatan yang segar dan komprehensif.

Dibawah dominasi sistem kapitalisme, kerusakan ekonomi terjadi di mana-mana. Dalam beberapa dekade terakhir ini, terbukti perekonomian dunia terus mengalami suatu fase yang sangat tidak stabil dan masa depan yang sama sekali tidak menentu. Setelah mengalami masa sulit karena tingginya tingkat inflasi, ekonomi dunia kembali mengalami resesi yang mendalam, tingkat pengangguran yang parah, ditambah tingginya tingkat suku bunga riil serta fluktuasi nilai tukar yang tidak sehat.

Dampaknya tentu saja kehancuran sendi-sendi perekonomian negara-negara maju maupun berkembang, proyek-proyek raksasa terpaksa mengalami penjadwalan ulang, ratusan pengusaha gulung tikar, jutaan tenaga kerja terancam PHK, harga-harga barang dan jasa termasuk barang-barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan tak terkendali.

Krisis tersebut semakin memprihatinkan karena adanya kemiskinan ekstrim di banyak negara, berbagai bentuk ketidakadilan sosio-ekonomi, besarnya defisit neraca pembayaran, dan ketidakmampuan beberapa negara berkembang untuk membayar kembali hutang mereka¹⁸². Bahkan cukup banyak klaim yang menyebutkan bahwa kapitalisme telah gagal sebagai suatu sistem dan model ekonomi.

Kehadiran konsep ekonomi baru tersebut, bukanlah gagasan awam, tetapi mendapat dukungan dari ekonom terkemuka di dunia yang mendapat hadiah Nobel 1999, yaitu Joseph E. Stiglitz. Dia dan Bruce Greenwald menulis buku *Toward a New Paradigm in Monetary Economics*. Mereka menawarkan paradigma baru dalam ekonomi moneter. Dalam buku tersebut mereka mengkritik teori ekonomi kapitalis dengan mengemukakan pendekatan moneter baru.¹⁸³

¹⁸² Henry Kissinger mengatakan, kebanyakan ekonom sepakat dengan pandangan yang mengatakan bahwa “Tidak satupun diantara teori atau konsep ekonomi sebelum ini yang tampak mampu menjelaskan krisis ekonomi dunia tersebut” (News Week, “Saving the World Economy”). Melihat fenomena-fenomena yang tragis tersebut, maka tidak mengherankan apabila sejumlah pakar ekonomi terkemuka, mengkritik dan mencemaskan kemampuan ekonomi kapitalisme dalam mewujudkan kemakmuran ekonomi di muka bumi ini. Henry Kissinger, *Saving the World Economy*, (diakses 18 November 2011), <http://newsweek.com>.

¹⁸³ Stiglitz secara khusus mengkritik keberadaan kebijakan moneter yang banyak digunakan oleh negara maju, yang justru menggiring negara –negara maju

BAB IV

KETIMPANGAN STRUKTURAL: PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN

Umer Chapra dalam karyanya *The Future of Economics: an Islamic Perspective* menyatakan bahwa sistem pasar bebas telah merealisasikan kemakmuran dalam perekonomian Barat seperti yang bisa kita saksikan saat ini. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara umum telah terwujud dan telah terjadi ekspansi kekayaan yang begitu luas. Akan tetapi, sejarah dan pengalaman tidak menunjukkan kebenaran adanya simetri antara kepentingan sosial dan individu.¹⁸⁴ Akan selalu timbul permasalahan ekonomi dan sosial, akibat dari adanya jarak yang lebar antara pemilik kekayaan (modal) dengan masyarakat umum.

‘Abd al-Jabbar H{amad ‘Abid al-Sabhani> mengungkapkan dalam bukunya *Price System and Resource Allocation in Islam: Comparative Study, an Islamic Approach for Economic Theory* bahwa sistem pasar bebas telah gagal merealisasikan pemerataan. Kemakmuran yang terjadi tidak berhasil menghapuskan kemiskinan atau pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap orang.¹⁸⁵

Ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan justru semakin meningkat sebagaimana diungkapkan oleh Ziya’ al-Din Ahmad

tersebut kedalam krisis keuangan dan ekonomi yang berkepanjangan. Lihat: Joseph Stiglitz dan Bruce Greenwald, *Towards A New Paradigm in Monetary Economics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 40.

¹⁸⁴ Dalam perekonomian modern yang selalu dikuasai oleh pemilik modal, benturan antara kepentingan sosial dan pribadi akan menciptakan ketimpangan struktural yang mendalam. Lihat: Umer Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 61-63.

¹⁸⁵ ‘Abd al-Jabbar H{amad ‘Abid al-Sabhani>, *Price System and Resource Allocation in Islam: Comparative Study, an Islamic Approach for Economic Theory* (Riyad: Daar al-Buhuth li al-Dirasah al-Islamiyyah wal-H{ayatiyyah, 2005), 228.

dalam karyanya *Islam, Poverty and Income Distribution*.¹⁸⁶ Di samping itu, tingkat ketidakstabilan ekonomi dan pengangguran yang tinggi telah menambah kesulitan lebih lanjut bagi si miskin. Ini menunjukkan bahwa efisiensi berkeadilan dan pemerataan masih tetap samar, meskipun telah terjadi pembangunan yang cepat dan pertumbuhan yang luar biasa dalam kekayaan. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak menjamin terbentuknya distribusi dan pemerataan di masyarakat, pereonomian tidak menuju keadilan sosial, tetapi justru sebaliknya menimbulkan masalah baru.

E. Ekonomi Pasar Bebas Menuju Ketimpangan Struktural

Joseph E. Stiglitz dalam bukunya *Globalization and Its Discontents* mengungkapkan bahwa adanya bahaya dari globalisasi, yang tidak lain adalah penggunaan teori ekonomi neoklasik dan diperkuat paham neoliberalisme. Menurutnya, resep-resep yang dipakai oleh IMF dan Bank Dunia semuanya pro pasar yang tercermin pada tujuan terciptanya perdagangan bebas dan globalisasi, hanya menguntungkan sekelompok kecil negara maju dan banyak merugikan negara berkembang¹⁸⁷. (lihat tabel 4.1)

Lester C. Thurow dalam bukunya yang berjudul *Creating Wealth: The New Rules for Individual, Companies and Countries in a Knowledge Based Economy* menyatakan bahwa dalam ekonomi pasar bebas seseorang yang mempunyai kekuatan dengan leluasa bisa menekan mereka yang tidak mempunyai kekuatan di pasar.¹⁸⁸ Pasar bebas merupakan suatu mekanisme di mana kelompok-kelompok masyarakat yang tidak cukup memiliki daya beli akan tersisih dan

¹⁸⁶ Islam sangat fokus dalam membahas isu-isu mengenai kemiskinan, distribusi pendapatan, bahkan memiliki instrument tersendiri dalam bentuk zakat. Lihat: Ziya' al-Din Ahmad, *Islam, Poverty, and Income Distribution* (Lahore: The Islamic Foundation, t.t), 71.

¹⁸⁷ Prediksi dan gambaran lebih komprehensif tentang bahaya dari globalisasi dengan gmbilang telah diungkapkan oleh stiglizt, khususnya nasib negara berkembang yang selalu berada dalam cengkraman negara maju. Lihat: Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*. (New York: W Norton, 2002), 110

¹⁸⁸ Lester C. Thurow, *Creating Wealth: The New Rules for Individual, Companies and Countries in a Knowledge Based Economy* (London: Nicholas Brealy, 2000), 238.

terlempar dari pasar dan berada di luar arena transaksi ekonomi.¹⁸⁹ Dominasi kaum pemilik modal dalam pasar bebas sangat nyata, Multi National Corporation (MNC) yang dimiliki oleh negara-negara maju, telah masuk dan mendominasi pasar-pasar domestik dinegara berkembang.

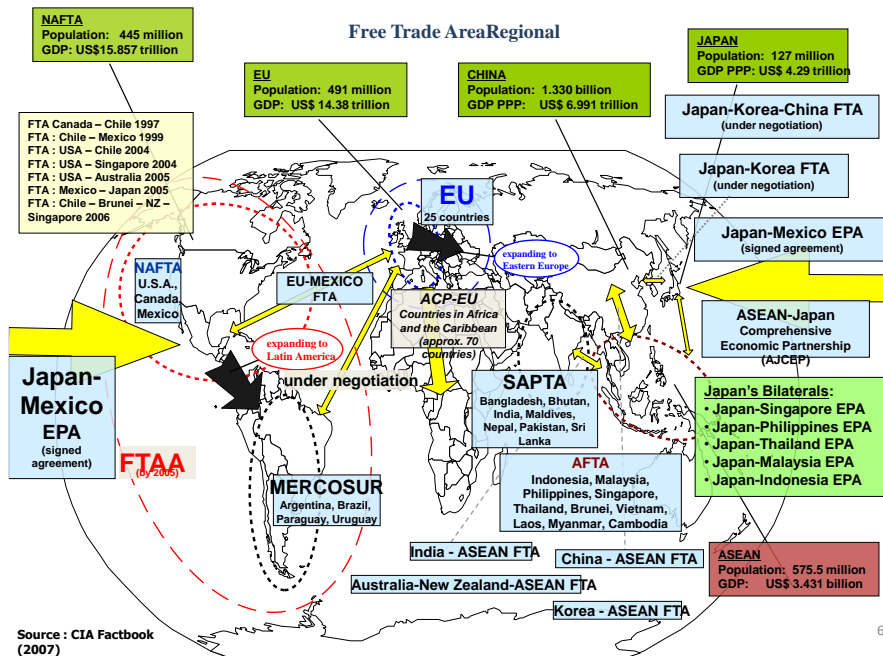
Dalam penelitian yang berbeda, John Kenneth Galbraith dalam karyannya yang berjudul *The Culture of Contentment* menemukan bahwa internasionalisasi modal dan produksi serta perdagangan yang bebas sebagai wujud globalisasi, akan menimbulkan pemberdayaan ekonomi dan politik (empowerment) bagi aktor ekonomi kelas atas dengan mengorbankan golongan kelas bawah (the underclass).¹⁹⁰ Hal ini diperkuat oleh George Soros dalam studinya yang berjudul *The Crisis of Global Capitalism* bahwa kekuatan pasar bebas, apabila diberiwewenang penuh dalam ekonomi dan keuangan akan menimbulkan kekacauan karena mengesampingkan etika dan moral.¹⁹¹

Gambar 4.1 **Kawasan Pasar bebas Dunia**

¹⁸⁹ Sistem modal, produksi, dan perdagangan dalam konteks hubungan ekonomi internasional yang bebas, akan menimbulkan terjalannya hubungan antar pelaku ekonomi yang akan mengakibatkan pemberdayaan ekonomi dan politik bagi kalangan ekonomi mapan dengan mengorbankan kalangan ekonomi kelas bawah (underclass). Lihat John Kenneth Galbraith, *The Culture of Contentment* (Boston: Houghton Mifflin, 1992), 125.

¹⁹⁰ John Kenneth Galbraith, *The Culture of Contentment* (Boston: Houghton Mifflin, 1992), 150.

¹⁹¹ George Soros, *The Crisis of Global Capitalism* (New York: Public Affairs, 1998), 22.



Dani Rodrik dalam *Trade Liberalization in Developing Countries: Do Imperfect Competition and Scale Economies Matter?* mengungkapkan bahwa pasar bebas menciptakan liberalisasi perekonomian dan perdagangan bebas. Liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas hanya akan menguntungkan negara-negara maju saja, karena mereka mempunyai daya tawar dan daya saing yang lebih dibandingkan dengan negara-negara berkembang, yang pada akhirnya akan menyebabkan mundurnya atau terpuruknya ekonomi negara-negara berkembang. Liberalisasi dan perdagangan bebas akan menciptakan ketergantungan ekonomi sebuah negara terhadap negara asing. Selanjutnya ketergantungan akan melahirkan imperialisasi ekonomi.¹⁹²

Joseph Eugene Stiglitz dalam *Globalization and Its Discontent* mengatakan bahwa pasar bebas tidak bersifat self-correcting dan tidak mampu melayani kepentingan masyarakat. Menurut Stiglitz konsep pasar bebas bagi negara-negara (berkembang) yang tidak siap dengan

¹⁹² Dani Rodrik, "Trade Liberalization in Developing Countries: Do Imperfect Competition and Scale Economies Matter ?," *The American Economic Review* 97 (2007): 283.

potensinya, akan menjadi bumerang bagi negara tersebut.¹⁹³ Negara-negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah karena kebijakan yang salah akan tetap miskin. Sehingga lambat laun negara-negara tersebut akan menjadi miskin.

Dalam perkembangannya, sangat jelas terlihat seluruh sektor perdagangan di negara-negara berkembang dikuasai oleh para kaum pemilik modal yang sebagian besar berafiliasi kenegara maju. Kondisi tersebut bisa dibuktikan, dimana hampir semua pasar modern yang menguasai sektor ritel besar dikuasai oleh segelintir kaum pemilik modal, yang berasal dari negara-negara maju¹⁹⁴.

Tabel 4.1
Omset Peritel Modern
2009 (Rp Triliun)

No	Hypermarket	Negara Asal	Omset (Rp Milyar)	Market Share (%)
1	Carefour	Perancis	11.250	48.7
2	Hypermart	Malaysia	5.100	22.08
3	Giant	Malaysia	4.100	17.75
4	Makro (Lotte Mart)	Belanda/Korea	2.200	9.52
5	Indogrosir	Indonesia	450	1.95
Total			23.100	100

Sumber: Media Data, 2009.

Gambaran yang disampaikan oleh Stiglitz tentang penggunaan teori neoklasik dan paham neoliberalisme dalam isu globalisasi tidak bisa dipungkiri. Inti dari ajaran ekonomi neoklasik merupakan sintesis antara teori ekonomi pasar persaingan bebas klasik, yaitu homo-economicus dan *invisible hand*, ajaran *marginal utility* serta keseimbangan umum¹⁹⁵. Tekanan ajaran ekonomi neoklasik adalah

¹⁹³ Stiglitz sangat mengkhawatirkan keberadaan negara-negara berkembang yang dieksploitasi sumberdaya alamnya, kemudian negara tersebut yang menanggung segala risiko yang ditimbulkannya. Lihat: Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents* (New York: W.W Norton & Company, 2002), 166.

¹⁹⁴ Di Indonesia setelah dibuka liberalisasi penanaman modal asing di hampir semua sektor, sektor ritel menjadi sangat terbuka untuk investasi asing, sehingga dalam waktu sepuluh tahun terakhir, rite lasing telah menguasai pasar domestik. Lihat: Marina L. Pandin, "Poteret bisnis Ritel Indonesia: Pasar Modern," *Economic Review*, 215 (2009): 8-9.

¹⁹⁵ Lihat: Mubyarto, "Meninjau Kembali Ekonomika Neoklasik," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 17 (2002): 119-129.

bahwa mekanisme pasar persaingan bebas, dengan asumsi-asumsi tertentu, selalu menuju keseimbangan dan efisiensi optimal yang baik bagi semua orang. Artinya jika pasar dibiarkan bebas, tidak diganggu oleh aturan-aturan pemerintah yang bertujuan baik sekali pun, masyarakat secara keseluruhan akan mencapai kesejahteraan bersama yang optimal atau yang dikenal dengan istilah *pareto optimal*¹⁹⁶.

Tidak bisa dipungkiri cara pandang tentang pasar yang didasari kepada pemahaman neoklasikal dan paham neoliberalisme telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi dunia hari ini. Isu globalisasi yang dikemas sedemikian rupa, telah menjadikan dunia tidak lagi memiliki sekat dan batasan dalam melakukan aktifitas perekonomian¹⁹⁷.

Tabel 4.2
Perkembangan Pangsa Omset Pasar Modern Berdasarkan Jenisnya
2004-2008 (Rp Triliun)

Ritel	2005	2006	2007	2008	2009
Minimarket	18.2	22.0	25	26	32.1
Supermarket	42.5	37.5	32.4	30.3	26.6
Hypermarket	39.3	40.5	42.6	43.7	41.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber: Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, 2009

Arus modal dan barang dari negara maju dalam hal ini negara kaya ke negara yang sedang berkembang tidak bisa terbandung. Akibatnya penguasaan aktivitas ekonomi hanya dilakukan oleh segelintir pelaku ekonomi semata yang memiliki akses modal dan barang. Perekonomian dinegara berkembang menjadi sangat bebas dan liberal. Dari asumsi itu telah terjadi suatu *self-fulfilling prophesy* yang menciptakan mindset ekonomi dan membentuk para pelaku ekonomi benar-benar menjadi homo-economicus, meninggalkan moralitasnya

¹⁹⁶ Lihat: Paul Samuelson, *Economics An Introductory Analysis* (New York : McGraw-Hill Education 14Rev Ed edition, 1992), 95

¹⁹⁷ Muhammad Yunus, *Bank Kaum Miskin*. Terjemahan Irfan Nasution (Jakarta: Marjin Kiri, 2007), 45.

sebagai homo-ethicus. Ilmu ekonomi akhirnya berada dalam suatu kondisi yang berantakan¹⁹⁸. (lihat tabel 4.2)

Telah terjadi pergeseran dan perubahan struktur ekonomi dan pasar di negara – negara berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah sebuah negara tidak lagi dominan dalam mengatur dan menjalankan kebijakan ekonomi sesuai dengan konstitusi negaranya. Semuanya diatur dalam bingkai pasar bebas¹⁹⁹. Pasar bebas telah melahirkan konsep swastanisasi yang telah mengambil alih peran pemerintah dalam mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak ke tangan swasta dan asing. Lebih jauh, pasar bebas lebih mementingkan keuntungan ekonomi dan mengabaikan manfaat ekonomi, sehingga menggeser rakyat dari tanah dan usaha usaha ekonominya. Sehingga mengakibatkan masyarakat tidak lagi menjadi tuan rumah dinegerinya sendiri tetapi telah menjadi pekerja yang berharap upah dari pihak asing²⁰⁰.

Tabel 4.3
Pasar Tradisional di Jabodetabek

kios Tutup 90 Persen (%)	Kios Tutup 57 Persen (%)
Pasar Sina Jakarta Utara	Pasar Ciputat Tangerang
Pasar Kramat Jaya Jakarta Utara	Pasar Jumat Tangerang
Pasar Cilincing Jakarta Utara	Pasar Kreo Tangerang
Pasar Muncang Jakarta Utara	Pasar Cislak Depok
Pasar Plumpang Tengah Jakarta Utara	Pasar Rawa Kalong Bekasi
Pasar Blora Jakarta Pusat	
Pasar Cipinang besar Jakarta Timur	
Pasar Kelapa Gading Jakarta Timur	
Pasar Sawah Besar Jakarta Barat	
Pasar Karet Pedurenan Jakarta Selatan	
Pasar Cidodo Jakarta Selatan	

Sumber: Daniel Suryadarma et al, *Media Data*, 2010.

¹⁹⁸ Lihat: Lester C. Thurow, *The Dengerous Currents: The State of Economics* (New York: Random House, 1983), 236-237.

¹⁹⁹ Fundamentalisme pasar, sebagai inherensi asumsi dasar *self-interest*, telah menjadi jebakan bagi negara dunia ketiga untuk mau masuk dalam perangkap yang menjerumuskan. Lihat: Robert Heilbroner dan Lester C. Thurow, *Economics Explained* (New York: Simon Schuster, edisi baru, 1994), 255-256.

²⁰⁰ Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas kekeluargaan* (Jakarta: UNJ Press, 2005), 30-31.

Dalam perjalanannya konsep pasar bebas yang dipraktekkan di negara-negara berkembang telah memperlihatkan terjadinya ketimpangan struktural, yang kemudian mendorong terbentuknya polarisasi dan kesenjangan sosial ekonomi. Kondisi tersebut telah membentuk polarisasi pelaku ekonomi yang bersifat eksploitatif dan diskriminatif. Akibatnya para pelaku ekonomi lokal akan semakin terdesak dan akhirnya kehilangan kedaulatan ekonominya di tanahnya sendiri (lihat tabel 4.3).

Bahkan John Kenneth Galbraith dalam bukunya *The Culture of Contentment*, mengungkapkan bahwa terjadinya internasionalisasi modal, produksi dan perdagangan yang bebas sebagai wujud utama dari globalisasi, akan menimbulkan pemberdayaan ekonomi dan politik bagi kalangan aktor ekonomi yang mampu golongan kelas bawah yang hidup dalam ekonomi rakyat²⁰¹.

Paham neoklasikal berdasar mekanisme persaingan pasar-bebas yang selama ini mendominasi pengambilan keputusan terbukti tidak mampu mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural yang ada di pasar. Oleh karena itu perlu pemikiran strukturalisme yang berorientasi pada strukturisasi dan restrukturisasi ekonomi disertai intervensi mengatur dan mengontrol mekanisme pasar. Kelemahan mekanisme pasar-bebas dalam perwujudan demokrasi ekonomi adalah mungkin sekedar mampu menghasilkan nilai-tambah ekonomi tetapi tidak menjamin dapat menyumbangkan nilai tambah sosio-kultural dan timpangnya struktur kekuasaan ekonomi²⁰². Tidak hanya sekedar menghasilkan ketimpangan struktural tetapi juga terjadinya ketimpangan sosial-ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 4.4
Regulasi Pemerintah Pusat

Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008	
Peraturan Presiden no 112 tahun 2007 dan Peraturan Menteri	•Lokasi Ritel Modern selain Minimarket harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten (RTRWK) dan Kota / Kabupaten yang belum memiliki RTRWK dilarang

²⁰¹ Lihat: John Kenneth Galbraith, *The Culture of Contentment* (Boston: Houghton Mifflin, 1992). 86-87

²⁰² Lihat: Beberapa artikel dalam Sri-Edi Sri-Edi Swasono, *Dari Daulat Tuanku ke Daulat Rakyat* (Jakarta: UI-Press, 1992); lihat pula Sri-Edi Sri-Edi Swasono, *Dari Lengser ke Lengser: Reformasi Menjadi Deformasi* (Jakarta: UI-Press, 2001), 24-25.

Perdagangan no. 53 tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	<p>memberikan izin pembangunan ritel modern.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pendirian Ritel Modern wajib memperhatikan jarak dengan Pasar Tradisioanl yang telah ada. •Trading Termyang diterapkan oleh Ritel Modern kepada Pemasok harus mengikuti syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Peritel modern tidak bisa meminta Regular Discountjika pemasok memberlakukan harga netto yang dipublikasikan ke semua toko modern. • Fixed Rebate(potongan harga dari Pemasok ke Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan), hanya dapat diberikan secara periodik 3 bulan, maksimum 1%. • Conditional Rebate(potongan harga yang diberikan oleh pemasok terkait target penjualan) dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Jika penjualan mencapai 100% dari target, mendapat potongan harga maksimal 1% ○ Jika penjualan mencapai 101% -115%, maka kelebihanannya mendapat discount maks 5% ○ Jika penjualan > 115% target, maka kelebihanannya mendapat discount maks 10%.
---	--

Oleh sebab itu perlu ada evaluasi dan perbaikan terhadap cara pandang ekonomi yang bersumber kepada neoklasikal, yang hanya mengandalkan kepada kebebasan ekonomi dan terlalu percaya kepada superioritas mekanisme pasar pada kenyataanya justru menimbulkan bahaya eksploitasi baik negara kuat terhadap negara lemah, institusi yang kuat terhadap institusi yang lemah orang kuat terhadap orang-orang yang lemah, termasuk juga didalamnya pasar yang didominasi oleh pemodal besar akan melemahkan pasar yang berbasis kepada pedagang tradisional. Diperlukan pemikiran dan pemahaman yang lebih strukturalis dalam menyelesaikan ketimpangan struktur ini²⁰³. Salah satunya kembali kepada regulasi yang sudah disusun oleh pemerintah pusat dan daerah (lihat tabel 4.4 dan 4.5).

Tabel 4.5
Regulasi Pemerintah Daerah

Perda DKI No. 2 Tahun 2002	
Perda DKI Jakarta no. 2 tahun 2002 mengenai Jarak antara Pasar Modern	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak antara Peritel Modern seluas 100-200m2 dengan Pasar Tradisional minimal 0,5 km • Jarak antara Peritel Modern seluas 200-1000m2

²⁰³ Lihat: Mahbub ul Haq, *Employment and Income Distribution in the 1970's: A New Perspective*, (Development Digest, 1971), 7

dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya	<p>dengan Pasar Tradisional minimal 1 km</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jarak antara Peritel Modern seluas 1000-2000m2 dengan Pasar Tradisional minimal 1,5 km • Jarak antara Peritel Modern seluas 2000-4000m2 dengan Pasar Tradisional minimal 2 km
---	---

Mengenai hubungan antara pasar modern dan pasar tradisional telah menjadi isu besar dalam beberapa tahun terakhir ini. Jumlah pasar tradisional selalu mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir²⁰⁴. Salah satu pemicu terjadinya penurunan tersebut adalah bermunculannya pasar modern dalam bentuk ritel besar, baik yang berskala mini market, super market dan hyper market. Penelitian ini akan membuktikan betapa masyarakat mengalami kerugian baik secara materi maupun masa depan yang akan mereka hadapi. Tidak terkontrolnya pertumbuhan ritel modern dalam bentuk pasar modern telah berdampak cukup signifikan terhadap pedagang pedagang pasar tradisional yang berada disekitar ritel modern tersebut.

F. Ketimpangan Hubungan Struktural Antara Pelaku Pasar

Tidak bisa dipungkiri, semenjak terbukanya jasa perdagangan ritel bagi penanaman modal asing (PMA) yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 dan sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres), dimana perdagangan eceran skala besar seperti, supermarket, Hypermarket dan pusat pertokoan dan belanja lainnya menjadi terbuka bagi PMA²⁰⁵. Semenjak itu telah terjadi perubahan struktur pelaku pasar dalam perekonomian nasional, yang kemudian melahirkan dikotomi antara pasar modern atau ritel modern dengan pasar tradisional atau ritel tradisional. (lihat tabel 4.5)

Tabel 4.5
Karakteristik Pasar

²⁰⁴ Lihat: Collett, Paul and Tyler Wallace, *Background Report: Impact of Supermarkets on Traditional Markets and Small Retailers in the Urban Centers*, (Jakarta: SMERU Research Institute, 2006), 14-15.

²⁰⁵ Melalui Keppres No 96/2000 dan diperbarui dengan Keppres No 118/2000 tanggal 16 Agustus 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal. Position Paper, KPPU, *Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern* (Jakarta: KPPU), 3-4.

Uraian	Tradisional	Minimarket	Supermarket	Hypermarket
Barang	Kebutuhan RT sehari-hari	Kebutuhan RT sehari-hari	Kebutuhan RT sehari-hari	Kebutuhan RT sehari-hari
Jumlah item	< 5.000	< 5.000	5.000-25.000	> 25.000
Jenis produk	Makanan kemasan, basah, pakaian, perhiasan, kebutuhan RT.	Makanan kemasan, barang higienis pokok	Makanan kemasan, barang higienis pokok	Makanan kemasan, basah, barang higienis pokok, elektronik, pakaian.
Model penjualan	Penjualan dilakukan secara eceran, langsung pada konsumen akhir atau warung RT.	Penjualan dilakukan secara eceran, langsung pada konsumen akhir dengan cara swalayan.	Dilakukan secara eceran, langsung pada konsumen akhir dengan cara swalayan	Dilakukan secara eceran, langsung pada konsumen akhir dengan cara swalayan
Luas lantai usaha	Kurang dari 400 m ²	Maksimal 400 m ²	4000 – 5000 m ²	Diatas 5000 m ²
Luas parkir	Minim/Tidak ada	Minim	Luas	Sangat Luas
Modal	Kurang dari 100 Jt	100-500 Jt	500-10 M	Diatas 10 M

Sumber: Peraturan Presiden no. 112 th 2007, *Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia dan data diolah*

Liberalisasi sektor perdagangan ritel tersebut telah mengancam keberadaan pasar tradisional yang berjumlah sekitar 13.450 unit diseluruh Indonesia, dimana para pedagang pasar mencapai 17.1 juta orang²⁰⁶. Dimana dalam perkembangannya, pertumbuhan ritel modern tersebut bertolak belakang dengan pertumbuhan pasar tradisional. Lebih memprihatinkan adalah ritel modern yang punya omset Rp 70,5 trilyun hanya akan membaginya kepada sekitar 28 pemain utama, sebaliknya ritel tradisional dengan omset Rp 156,9 trilyun harus dibagi kepada sebanyak 17,1 juta pedagang, dimana 70% diantaranya masuk kategori informal²⁰⁷.

²⁰⁶ Lihat: Position Paper, KPPU, *Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern* (Jakarta: KPPU), 6-7.

²⁰⁷ Istianto Ari Wibowo, *Negara dan Serbuan Waralaba Asing* Yogyakarta: Pusat Studi Kerakyatan UGM, 201), 12.

Tabel 4.6
Perbedaan Kondisi Usaha Pasar Modern dengan Pasar Tradisional

Kondisi Usaha	Ritel Modern	Pasar Tradisional
Kepemilikan	Ritel modern dimiliki oleh para pengusaha yang memiliki modal besar. Kepemilikan ritel modern biasanya dalam bentuk saham yang dikuasai oleh individu, group atau jaringan usaha tertentu.	Bangunan atau fisik pasar tradisional dimiliki oleh pemerintah daerah seperti PD. Pasar Jaya. Para pelaku atau pedagang yang terdapat didalamnya biasanya mewarisi usaha yang bersifat turun temurun.
Lokasi Usaha	Lokasi usaha terletak di pusat kota, tidak jarang berdekatan dengan pasar tradisional. Letak lokasinya yang strategis, telah membuat ritel modern tumbuh dan berkembang sangat pesat. Akibatnya berdampak terhadap pasar tradisional	Lokasi pasar tradisional biasanya terletak dikawasan padat penduduk, tidak jarang terletak di pinggiran kota. Lokasi yang membaaur dengan penduduk tidak menjadi jaminan pasar tradisional diminati masyarakat. Serbuan mini market telah mematikan pedagang di pasar tradisional.
Permodalan	Ritel modern ditopang oleh sistim permodalan yang sangat kuat dan mapan, terutama dari perbankan.	Pedagang di pasar tradisional hanya mengandalkan modal – modal pribadi para pedagang, tidak jarang memanfaatkan jasa rentenir untuk menambah modal.
Pemasok	Sistim dan jaringan pemasok yang sudah mapan, ditopang dengan supplier besar. Bahkan sebagian besar memiliki jalur distribusi mulai dari petani dan produsen.	Sistim pemasok dan jaringan bagi pasar tradisional masih sangat ketinggalan, bahkan tidak memiliki jalur distribusi yang jelas, dari supplier ke pedagang.
Produk	Semua macam barang, bahkan sekarang sudah mulai mengembangkan produk-produk basah (sayur, daging, buah dll) yang selama ini menjadi andalan pasar tradisional.	Semua produk yang terdapat dalam pasar tradisional juga terdapat di ritel modern, akibatnya para konsumen mulai meninggalkan pasar tradisional.
Konsumen	Semua kalangan, terutama kalangan menengah dan atas	Semua kalangan, terutama kalangan menengah bawah.

Sumber: Media data, data diolah, 2011

Liberalisasi di bidang perdagangan khususnya ritel tersebut telah melahirkan ketimpangan antara para pelaku pasar. Lebih parahnya lagi para pedagang pasar tradisional dipaksa saling berhadapan dengan para peritel modern yang memiliki permodalan yang sangat besar. Akibatnya hampir disetiap pasar tradisional terdapat sejumlah pedagang yang menutup tokonya tidak sanggup bersaing dalam setiap tahunnya.

Pesatnya pembangunan Pasar Modern telah berdampak terhadap keberadaan Pasar Tradisional. Di satu sisi, Pasar Modern

dikelola secara profesional dengan fasilitas yang serba lengkap. Di sisi lain, Pasar Tradisional masih berkebutuhan dengan permasalahan klasik seputar pengelolaan yang kurang profesional dan ketidaknyamanan berbelanja. Pasar Modern dan Tradisional bersaing dalam pasar yang sama, yaitu pasar ritel atau perdagangan secara ritel, dimana usaha atau bisnis yang menambahkan nilai kepada produk dan jasa yang dijual kepada konsumen untuk kebutuhan sendiri atau keluarga. Hampir semua produk yang dijual di Pasar Tradisional seluruhnya dapat ditemui di Pasar Modern.²⁰⁸

G. Kondisi Pasar (Ritel) Secara Umum

Dalam beberapa waktu terakhir perkembangan industri ritel dalam bentuk pasar modern di Indonesia semakin tidak terbendung. Tidak ada kota di Indonesia yang tidak memiliki pasar modern. Kehadiran para pelaku usaha pasar modern telah memberikan pengaruh terhadap perubahan struktur ekonomi dan struktur pasar di Indonesia. Dalam jangka waktu yang singkat beberapa pelaku usaha pasar modern dengan kemampuan modal yang luar biasa melakukan aktivitasnya di Indonesia. Mereka mewujudkannya dalam bentuk minimarket, supermarket bahkan *hypermarket* yang kini bertebaran di setiap kota besar Indonesia²⁰⁹.

Kehadiran pasar modern di Indonesia sekitar awal tahun 1980an, pada awalnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi keberadaan pasar tradisional. Bahkan keberadaan pasar modern yang memiliki pangsa pasar yang potensial bagi kalangan menengah atas, dan telah menjadi alternatif dari pasar tradisional yang terkesan kumuh, kualitas barang yang rendah serta berada di lokasi yang tidak nyaman bagi sebagian kalangan. Konsumen Indonesia sendiri saat ini sudah sangat familiar dengan beberapa pelaku usaha di sektor tersebut dan beberapa di antaranya telah menjadi konsumen tetap pelaku usaha

²⁰⁸ Michael Levy dan Barton Weitz, *Retailing Management* (New York: Published by Mc Geaw-Hill/Companies), 120-121

²⁰⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penelitian yang mengungkapkan fenomena perkembangan pasar modern yang sangat cepat. Lihat, Position Paper, *KPPU, Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern* (Jakarta: KPPU), 3-4.

tersebut, misalnya Carrefour, Giant, hypermart, Indomaret, Alfamart, K Circle, Yomart dan sebagainya²¹⁰.

Tabel 4.7
Sebaran Gerai Pasar modern 2008

Propinsi	Minimarket (Unit)	Supermarket (Unit)	Hypermarket (Unit)	Total (Unit)
DKI Jakarta	3,968	317	40	4,325
Jawa Barat	1300	194	29	1,523
Banten	1004	28	14	1,046
Yogyakarta	406	45	4	455
Jawa Tengah	979	172	4	1,155
Jawa Timur	1.118	184	16	201
Pulau Jawa	7,658	940	107	8,705

Sumber: *Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, data diolah, 2011.*

Tetapi, meskipun kontribusi pasar modern terhadap pertumbuhan industri ritel Indonesia secara keseluruhan sangat besar, pertumbuhan pasar modern ternyata mendatangkan persoalan tersendiri berupa tersingkirnya pedagang pasar tradisional di Indonesia yang menjadi tempat menggantungkan hidup masyarakat dalam jumlah yang tidak sedikit. Kemampuan bersaing mereka yang sangat rendah karena kemampuan capital yang sangat terbatas, dengan manajemen yang sederhana serta perlindungan dan upaya pemberdayaan yang sangat minim, telah menjadikan mereka menjadi korban dari proses liberalisasi ekonomi di sektor ritel.

²¹⁰ Lihat, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, (diakses, 2 Januari 2012), <http://www.aprindo.com>

Permasalahan dalam industri ritel ini dari waktu ke waktu terus mengemuka. Berdasarkan analisis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), permasalahan dalam industri ritel yang terjadi saat ini, terbagi menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah terkait dengan terus tersingkirnya pelaku usaha ritel kecil Indonesia dari pasar. Kedua adalah munculnya tekanan terhadap para pemasok kecil oleh pelaku usaha pasar modern yang memiliki kemampuan kapital sangat besar²¹¹.

Pertumbuhan di sektor ritel memang masih terus tercatat tinggi, meskipun pertumbuhan tinggi tersebut hanya dialami oleh pasar modern²¹², yang sangat mungkin merupakan kebalikan dari pasar tradisional, yang justru dalam beberapa kesempatan menyatakan sebagai bagian yang paling dirugikan akibat dari perkembangan yang terjadi saat ini di sektor ritel. Pelaku usaha kecil yang tidak memiliki kemampuan finansial dan manajemen terus terpuruk. Pelan tapi pasti, mereka mati ketika berhadapan dengan pelaku usaha ritel besar. Indikasi tersebut sudah terlihat di beberapa pasar tradisional di Jakarta, dimana banyak kios pedagang ritel kecil atau kelontongan yang sudah tutup, karena tidak sanggup untuk bersaing dengan ritel modern, yang memiliki kekuatan modal yang besar. (Lihat tabel 4.8)²¹³.

²¹¹ Persoalan tersebut telah menjadi kasus di KPPU, yang menunjukkan betapa seriusnya persoalan tersebut. Kasus yang berkaitan dengan isu tersingkirnya pelaku usaha pasar tradisional oleh pelaku usaha pasar modern, digambarkan oleh kasus Indomaret (Putusan KPPU No. No.03/KPPU-L/I/2000). Sementara terkait dengan permasalahan hubungan pemasok-pasar modern, kasus yang telah ditangani oleh KPPU adalah kasus Carrefour, yang antara lain menggugat Carrefour atas penerapan *trading term* dalam bentuk program *minus margin* (Putusan No. No. 02/KPPU – L/2005). Lihat, Position Paper, *KPPU, Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern* (Jakarta: KPPU, 2009), 2.

²¹² Berdasarkan sebaran geografisnya, gerai-gerai Pasar Modern tersebut terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pada 2008, dari sekitar 11.866 gerai Pasar Modern, sekitar 83% diantaranya berlokasi di Pulau Jawa. Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur senantiasa menjadi daerah dengan jumlah gerai Pasar Modern terbanyak. Lihat: Marina L Pandin, *Potret Bisnis Ritel Indonesia*, Economic Review, No. 215, Maret 2009 (Jakarta: , 2009), 9.

²¹³ Dalam sebuah penelitian diungkapkan, pada tahun 2007 terdapat penyusutan jumlah pedagang dipasar tradisional. (1) 90% Kios Tutup: Pasar Sinar Jakarta Utara, Pasar Kramat Jaya Jakarta Utara, Pasar Cilincing Jakarta Utara, Pasar Muncang Jakarta Utara, Pasar Plumpang Tengah Jakarta Utara, Pasar Blora Jakarta Pusat, Pasar Cipinang besar Jakarta Timur, Pasar Kelapa Gading Jakarta Timur, Pasar Sawah Besar Jakarta Barat, Pasar Karet Pedurenan Jakarta Selatan, Pasar Cidodol Jakarta Selatan. (2) 57% Kios Tutup: Pasar Ciputat Tangerang, Pasar Jumat

Tabel 4.8
Pasar Tradisional di Jabodetabek

90 Persen (%) kios Tutup	57 Persen (%) Kios Tutup
Pasar Sina Jakarta Utara	Pasar Ciputat Tangerang
Pasar Kramat Jaya Jakarta Utara	Pasar Jumat Tangerang
Pasar Cilincing Jakarta Utara	Pasar Kreo Tangerang
Pasar Muncang Jakarta Utara	Pasar Cisalak Depok
Pasar Plumpang Tengah Jakarta Utara	Pasar Rawa Kalong Bekasi
Pasar Blora Jakarta Pusat	
Pasar Cipinang besar Jakarta Timur	
Pasar Kelapa Gading Jakarta Timur	
Pasar Sawah Besar Jakarta Barat	
Pasar Karet Pedurenan Jakarta Selatan	
Pasar Cidodo Jakarta Selatan	

Sumber: *Daniel Suryadarma et all, Media Data*

Kondisi ini telah membawa dampak yang negatif yakni tersingkirnya pelaku usaha di pasar tradisional yang umumnya merupakan pelaku usaha ritel kecil yang tersebar baik dalam pasar tradisional maupun di luar pasar. Padahal jumlah usaha ini termasuk yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan mengingat bahwa hampir 45% dari usaha yang ditekuni pelaku usaha ritel di Indonesia, merupakan usaha dalam bidang eceran ini. Tentu tidak mudah bagi pasar tradisional untuk bisa bertahan menghadapi ritel besar dengan kemampuan permodalan yang juga besar. Bagi ritel besar, tentu kondisi ini sangat menguntungkan, mengingat pangsa pasar yang masih besar, tapi sebaliknya bagi ritel kecil dan tradisional, ini sebuah tragedi, dimana mereka tidak mendapat pembelaan yang sudah dijamin dalam konstitusi negara²¹⁴. Peritel kecil yang disokong oleh pasar tradisional semakin terpinggirkan dalam perekonomian masyarakat.

Tangerang, Pasar Kreo Tangerang, Pasar Cisalak Depok, Pasar Rawa Kalong Bekasi. Lihat: Marina L Pandin, *Potret Bisnis Ritel Indonesia*, Economic Review, No. 215, Maret 2009 (Jakarta: , 2009), 10.

²¹⁴ Dalam konstitusi negara, Pasal 33 UUD 1945 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 UUD 1945 sama sekali tidak anti usaha besar. Tetapi bagaimana usaha yang dilakukan tetap mempertahankan nilai dasar kebersamaan (mutualism) dan asas kekeluargaan (brotherhood/ukhuwah). Sehingga praktek ekonomi, yang besar menindas yang kecil, yang kuat memakan yang lemah, tidak akan terjadi di Indonesia. Sehingga perekonomian menjadi sehat dan seimbang. Sehingga kesejahteraan sosial dan ekonomi akan bisa diwujudkan. Lihat. Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan* (Jakarta: UNJ Press, 2005), 102, 147.

Tetapi pada kenyataannya, terjadi kontradiktif yang seolah – olah dibiarkan terjadi. Pemerintah sepertinnya belum banyak melakukan perlindungan dan penyelamatan terhadap pasar tradisional. Regulasi dan peraturan yang telah dibuat dan disusun belum bisa secara efektif melindungi pengusaha ritel kecil di pasar – pasar tradisional. Arus globalisasi yang terus dihembuskan oleh negara-negara maju, telah menjadikan perekonomian terbuka dan menjadi sangat liberal. Tidak terkecuali disektor industri ritel, para pengusaha industri ritel besar yang berasal dari negara-nagara maju, berbondong – bondong untuk masuk pasar Indonesia, yang masih sangat potensial. Pertumbuhan dan perkembangan industri ritel besar ditanah air terjadi sangat fantastis, bahkan melebihi perkembangan dinegara asalnya. Disisi lain, setiap tahunnya ritel kecil yang terdapat dipasar-pasar tradisional mengalami kondisi yang sangat mengkhawatirkan, bahkan mulai terancam keberadaannya.

Tidaklah mengherankan ketika liberalisasi ritel terjadi, maka serbuan peritel bermodal besar untuk menjaring pasar dengan ceruk yang cenderung mengarah kepada tuntutan perkembangan ritel di atas, menjadi tidak tertahankan. Pelaku usaha kecil yang tidak memiliki kemampuan finansial dan manajemen terus terpuruk. Pelan tapi pasti, mereka mati ketika berhadapan dengan pelaku usaha ritel besar.

Pada tahun 2007 Pemerintah mengeluarkan Perpres No. 112 Tahun 2007 yang mengatur pasar tradisional dan pasar modern khususnya yang terkait dengan *zoning* yang membatasi pembangunan pasar modern dan mereduksi dampaknya terhadap pasar tradisional, serta dibahas pula mengenai jam buka, perizinan sampai dengan masalah *trading term* yang sangat meresahkan pemasok pasar modern. Permasalahan yang terjadi adalah sejauh mana aturan tersebut efektif diterapkan dan berdampak bagi pelaku usaha ritel. Tidak hanya itu, kemudian di akhir tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan aturan pendukung dari Perpres 112/2007 yaitu Permendag No. 53 Tahun 2008. Dalam aturan ini lebih rinci lagi diatur mengenai masalah *zoning* serta *trading term*.

Namun kemudian akan menjadi tidak ada artinya jika aturan-aturan tersebut diatas jika tidak diikuti dengan aturan-aturan pelaksana di daerah. Sebagaimana tercantum dalam Perpres 112/2007 bahwa Pemerintah Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan industri ritel di daerahnya dimana Pemda memiliki wewenang terkait dengan masalah perizinan, zonasi dan jam buka toko. Selain itu, beberapa waktu terakhir juga muncul isu mengenai

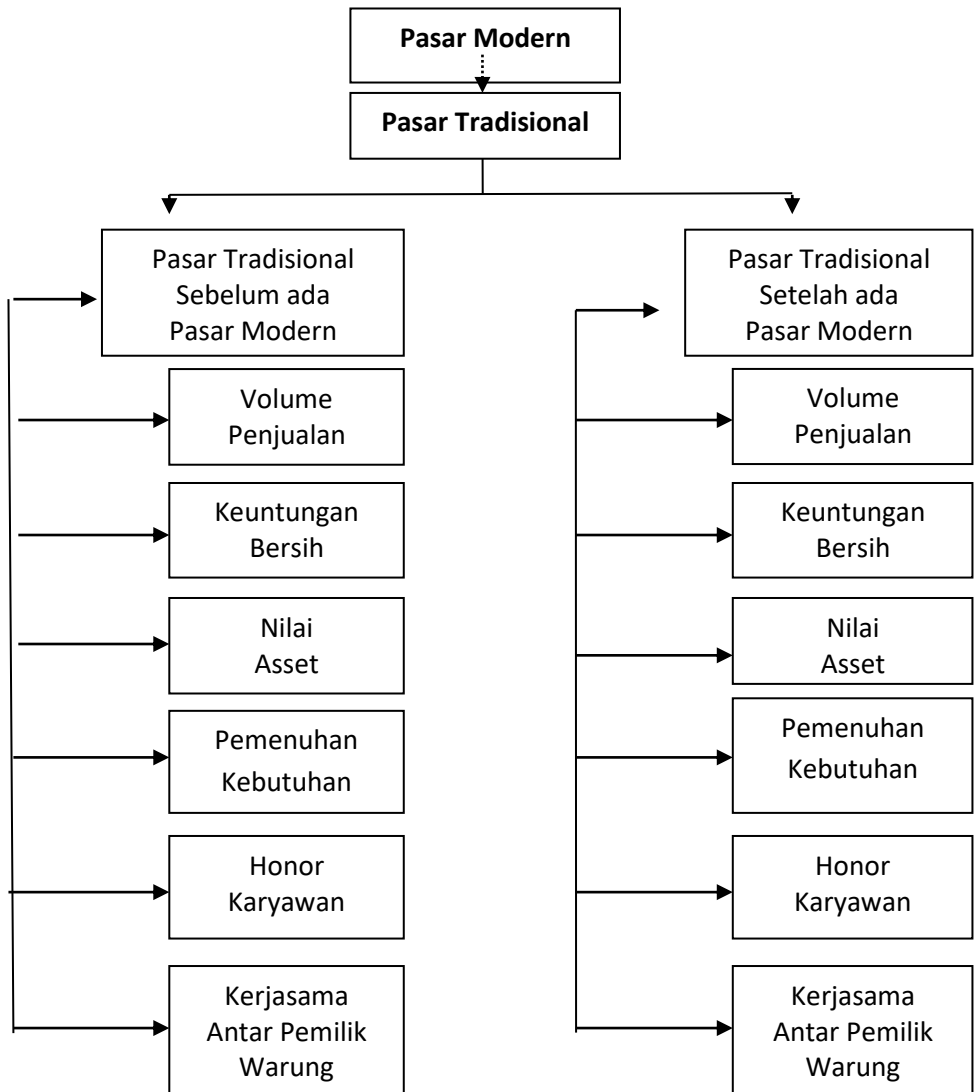
rencana pemerintah untuk merumuskan Undang-Undang Perdagangan sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan perdagangan di Indonesia termasuk industri ritel didalamnya.

Keberadaan Perda yang mengatur tentang industri ritel di masing-masing daerah mutlak diperlukan, karena akan menjadi payung hukum yang efektif untuk mengatur dan mengelola industri ritel, dan tidak merugikan keberadaan ritel tradisional. Jakarta selaku kota besar, yang memiliki pertumbuhan industri ritel yang sangat tinggi telah memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur keberadaan usaha ritel di Jakarta. Perda DKI Jakarta no. 2 tahun 2002. Yang paling krusial adalah Perda tersebut telah mengatur mengenai Jarak antara Pasar Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya.

H. Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam terhadap para pedagang, dengan telah mempersiapkan kerangka pertanyaan yang akan diajukan kepada pedagang. Terdapat sejumlah indikator yang digunakan sebagai bahan interview yang kemudian dilakukan tabulasi dan perhitungan untuk mengetahui adanya perubahan yang dialami pedagang. Antara lain menyangkut kinerja; penjualan, keuntungan bersih, asset, upah pekerja dan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga pedagang termasuk keinginan untuk memperkuat kerjasama antar pedagang dalam bentuk koperasi (lihat Tabel 1. kerangka penelitian).

Bagan 4.1
Skema Kerangka Penelitian



4.3. Karakteristik Pedagang

Penelitian yang dilakukan dalam bentuk wawancara mengambil lokasi di tiga wilayah yang memiliki pasar tradisional dan pasar modern baik dalam bentuk; minimarket, supermarket, hingga hypermarket. Kedua lokasi tersebut adalah Pasar Tradisional Ciracas, Jakarta Timur, Pasar Tradisional Pasar Rebo, Jakarta Timur dan Pasar Johar Baru. Adapun pasar modern yang terdapat di wilayah kedua pasar tersebut yang beradius 2 kilometer adalah; Carefour Tamini Square, Makro Pasar Rebo, Ramayana Cijantung, Gelael Raya Bogor, dan belasan Alfa Mart, Alfa Midi, Indomaret.

Tabel 4.9
Karakteristik Pedagang

No	Karakteristik Sosial	Satuan	Range	Rata-Rata
1	Jenis Kelamin	Lk / Pr	-	Lk
2	Umur	Tahun	25-50	40
3	Pendidikan Terakhir	Sarjana / Non Sarjana	-	SMA
4	Lama Berdagang	Tahun	2-20	15
5	Status Warung	Sewa / Sendiri	-	Sewa
6	Jenis Barang Dagangan	Kelontong	-	Kelontong
7	Penghasilan Lain	Rupiah	-	-
8	Pekerjaan Sebelumnya	Pedagang / Non pedagang	-	Pedagang
9	Status Perkawinan	Menikah / Tidak menikah	-	Menikah
10	Jumlah Anak	Anak	2-5	3

Sebagian besar pedagang yang berjualan dilokasi pasar tersebut telah berjualan antara 2-15 tahun, bahkan ada yang melanjutkan usaha orang tua dan keluarga. Status kepemilikan tokonya adalah sewa kepada Pemda DKI Jakarta, selaku pemilik lokasi dan bangunan pasar. Adapun jenis barang dagangan mereka adalah sebagian besar barang-barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari perlengkapan dapur, mandi hingga perabotan rumah tangga lainnya.

Sebagian besar pedagang sudah memiliki keluarga, dengan rata-rata memiliki tiga orang anak yang masih sekolah, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Keberadaan mereka bernaung di bawah Koperasi Pedagang Pasar.

A. Komoditas yang Dijual

Dalam tabel dibawah ini terlihat jenis komoditas yang dijual di pasar tradisional dan proporsi pedagang yang menjual setiap komoditas. Masing-masing pedagang menjual rata-rata dua jenis komoditas. Proporsi terbesar menjual sayur segar yang diikuti oleh bahan makanan dan minuman. Tingginya tingkat kompetisi di pasar mengakibatkan penetapan harga yang yang kompetitif dan kualitas barang yang lebih baik. Sebaliknya, harga beras dan daging, komoditas dengan jumlah pedagang yang lebih sedikit, cenderung berubah-ubah dan lebih sering meningkat.

Tab 4.10
Komoditas yang Dijual dan
Proporsi Pedagang

Komoditas	Persentase (%)	Komoditas	Persentase (%)
Sayuran segar	24,6	Telur/Susu	5,6
Daging	8,2	Kebutuhan rumah tangga lainnya	8,6
Bahan makanan dan minuman	15,5	Minyak goreng	2,4
Bumbu	7,7	Ikan	5,6
Buah-buahan segar	8,6	Kacang-kacangan	1,8
Ayam	6,5	Umbi-umbian	0,9
Beras	4,4		

B. Pelanggan Pasar Tradisional

Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa toko kecil merupakan pangsa pembeli terbesar, baik dalam hal jumlah konsumen dan nilai barang yang dibeli. Berkenaan dengan jumlah pelanggan, 43,2% pedagang mengatakan bahwa pelanggan utama mereka adalah toko kecil. Jika digabung dengan pelanggan yang menjalankan usaha restoran dan pedagang keliling, ini berarti bahwa kebanyakan barang dijual secara borongan. Barang yang dijual untuk konsumsi rumah tangga hanya merupakan sepertiga dari total nilai barang yang dijual di pasar tradisional.

Tabel 4.11
Pelanggan Pasar Tradisional

Jumlah		Nilai	
Pelanggan	%	Pelanggan	%
Warung Kecil	43,2	Warung Kecil	43,9
Rumah tangga	39,6	Rumah tangga	33,7
Rumah makan	9,8	Rumah makan	12,1
Pedagang keliling	8,8	Pedagang keliling	10,3
Lainnya	0,6	Lainnya	0,5

C. Tingkat Persaingan

Tabel dibawah ini memperlihatkan pihak yang dianggap oleh responden sebagai pesaing terberat dan strategi utama yang digunakan untuk menarik pelanggan. Kebanyakan para pedagang merasa bahwa pesaing terberat mereka adalah sesama pedagang, sementara supermarket mendukung posisi kedua, lalu diikuti oleh para PKL. Akan tetapi, terdapat sejumlah besar responden yang berpandangan bahwa mereka tidak memiliki pesaing. Mengingat para PKL kebanyakan hanya menjual di dekat pasar, artinya lebih dari separuh responden mengidentifikasi pedagang lainnya yang di dalam atau dekat pasar sebagai pesaing utamanya.

Tabel 4.12
Tingkat Persaingan

Persaingan	%
Supermarket	45,29
Pedagang lain di dalam pasar	26,25
Tidak tahu	10,46
PKL	15,28
Pedagang keliling	1,56
Minimarket	1,44
Warung/toko kecil	0,40

D. Pemasok Barang

Dalam Tabel dibawah memuat gambaran mengenai pemasok utama para pedagang dan metode pembayaran yang paling banyak dipakai kepada para pemasok. Lebih dari 40% pedagang menggunakan pemasok profesional, lainnya 34% kebanyakan memanfaatkan pasar grosir tradisional, dan hanya 5.6% melakukan kontak langsung dengan

produsen. Akan tetapi, kebanyakan pedagang tidak hanya mengandalkan satu pemasok. Sekitar 8% mendapatkan barang dari pasar tradisional lain. Pembayaran tunai adalah metode yang paling utama digunakan. Hal ini tidak mengherankan karena kebanyakan dari mereka adalah pedagang berskala kecil, dan karena itu tidak memiliki kekuatan untuk meyakinkan para pemasok untuk menyediakan jasa kredit. Lagi-lagi, hal ini berbeda dengan praktik pengadaan barang yang lazim di supermarket.

Tabel 4.13
Pemasok Barang bagi Pedagang di Pasar Tradisional

Pemasok yang Paling Banyak Digunakan	%	Metode Pembayaran Utama	%
Pemasok profesional	40,6	Tunai	88,5
Pasar grosir tradisional	34,1	Konsinyasi	8,3
Penjual grosir	9,3	Kredit	3,2
Pasar tradisional lain	9,1		
Langsung dari produsen	5,6		
Produksi sendiri	2,0		

E. Sumber Modal Usaha

Hampir 90% pedagang menggunakan sumber modalnya sendiri, sekitar 2% mendapat modal dari sumber-sumber informal dan sisanya didapat dari kredit bank, termasuk di antaranya bank umum, tukang riba/rentenir, dan koperasi. Mayoritas mereka yang mendapatkan sumber modal dari bank adalah klien bank umum, baik bank swasta maupun bank pemerintah.

Tabel 4.14
Sumber Modal Usaha

Sumber Modal	%	Sumber Modal	%
Modal sendiri	87,8	Tukang riba/rentenir	1,2
Bank pemerintah	3,7	Koperasi	0,9
Bank swasta	3,0	Pinjaman dari teman	0,6
Pinjaman dari kerabat	1,7	Bank pasar	0,4
		Lainnya	1,2

F. Penyebab kelesuan Usaha

Tabel memperlihatkan bahwa penyebab penurunan tersebut sebagaimana terungkap dalam kuesioner oleh para pedagang. Menurunnya jumlah konsumen menjadi faktor utama kelesuan, konsisten dengan hasilhasil kualitatif. Ini diikuti oleh meningkatnya persaingan dengan pedagang lain dalam pasar, meningkatnya persaingan dengan supermarket, dan meningkatnya harga barangbarang. Meskipun para pedagang menggunakan beberapa strategi, melalui wawancara mendalam ditemukan bahwa sejumlah kecil pedagang menerapkan strategi pemasaran baru yang mencakupi penambahan variasi pada barang dagangan, memberikan pelayanan yang prima, mempertahankan mutu barang, mengantarkan barang langsung ke rumah konsumen, memberikan potongan harga, dan bahkan mencocokkan dengan harga-harga supermarket.

Tabel 4.15
Penyebab Kelesuan Usaha di Pasar Tradisional

Penyebab	%
Kurangnya jumlah pembeli	66,8
Meningkatnya persaingan dengan supermarket	46,6
Meningkatnya persaingan dengan pedagang lain	40,9
Harga lebih tinggi	38,6
Meningkatnya persaingan dengan PKL	25,9
Harga dari pemasok lebih tinggi	23,5
Meningkatnya persaingan dengan minimarket	22,9
Kondisi pasar yang kian memburuk	14,8
Semakin sulit mendapatkan persediaan barang	3,9
Meningkatnya harga persewaan kios	3,0
Akses kredit yang bertambah sulit	2,4

4.4 Volume Penjualan Pedagang Pasar Tradisional

Volume penjualan pedagang barang harian (kelontong) pada pasar tradisional secara umum mengalami penurunan setelah berdirinnya pasar modern baik dalam bentuk, Super market, Hypermarket maupun minimarket, disekitar pasar tradisional modern. Berdirinnya pepasar modern tersebut telah berpengaruh terhadap volume penjualan barang-barang harian (kelontong).

Sebelum berdirinnya pepasar modern tersebut, para pedagang di pasar tradisional mampu meraih rata-rata penjumlahan sekitar Rp. 27.783.333 per bulan. Dimana, volume penjualan tertinggi sekitar Rp.

32.750.000, dan volume penjualan terendah sekitar Rp. 23.000.000 dalam setiap bulannya.

Para pedagang mulai merasakan perubahan dalam beberapa tahun terakhir, ketika mulai menjamurnya pepasar modern dengan modal besar disekitar wilayah pasar tradisonal. Keberadaan pepasar modern tersebut telah menggerus rata – rata voleme penjualan para pedagang cukup signifikan. Para pedagang mengalami penurunan volume penjualan rata – rata sekitar 18.6% per bulannya. Dimana volume penjualan tertinggi berkisar Rp. 28.000.000, dan terendahnya sekitar Rp. 19.000.000. Dengan demikian, para pedagang dipasar tradisonal hanya mampu menghasilkan rata-rata volume penjualan sekitar Rp. 22.000.000 per bulannya.

Tabel 4.16
Uji Statistik
Volume Penjualan Pedagang Pasar Tradisional

Uji Z	Q1Sesudah – Q1 Sebelum
Z	-.333
Asymp.Sig. (2-Tailed)	.739

Dari hasil uji statistik yang dilakukan untuk membuktikan terjadinya penurunan volume penjualan atau Omzet penjualan setelah menjamurnya pepasar modern disekitar pasar tradisonal, memperlihatkan bahwa H_0 ditolak karena berdasarkan tabel statistik untuk nilai $Z_{Q1} = -0,333 < -1,64$ yang mengandung arti bahwa ada perubahan volume penjualan (omzet) para pedagang setelah berdirinya supermarket.

4.5. Keuntungan Bersih Pedagang Pasar Tradisional

Menyusutnya volume penjualan yang dialami pedagang pasar tradisonal, juga berimbas kepada menurunnya laba atau keuntungan bersih yang diperoleh oleh pedagang dikedua pasar tradisonal tersebut. Wawancara mendalam yang dilakukan dikedua tempat tersebut mengungkapkan, penurunan keuntungan yang diperoleh oleh para pedagang.

Rata-rata para pedagang mengeluhkan lokasi pepasar modern dengan modal besar tersebut berada dilokasi pasar tradisonal, apalagi dalam beberapa tahun terakhir pasar modern dengan model mini market mulai menjamur. Radius keberadaan mereka tidak lebih dari

sekitar 500 meter dari lokasi pasar. Akibatnya, khusus untuk barang – barang kebutuhan harian, para pelanggan mulai beralih kepada tempat-tempat pepasar modern tersebut. Sehingga menyebabkan menurunnya volume penjualan, yang berujung kepada merosotnya keuntungan para pedagang.

Para pedagang mengalami rata-rata penurunan keuntungan bersih sekitar 18%. Dimana, sebelum berdirinya Pasar dengan modal besar, mereka mampu memperoleh keuntungan bersih rata-rata sekitar Rp. 6.945.833 Juta per bulan. Setelah menjamurnya pasar modern tersebut, keuntungan bersih yang mampu mereka peroleh merosot hingga rata-rata Rp. 5.650.000 juta per bulan.

Keuntungan yang diperoleh pedagang mengalami penyusutan sekitar 17.14% per bulan. Para pedagang dilokasi pasar tradisonal tersebut mengeluhkan, tidak adanya perhatian dan kebijakan yang memihak kepada mereka. Mereka mempertanyakan keberadaan kebijakan yang mengatur keberadaan pasar modern yang sudah sangat mengkhawatirkan. Mereka berharap pemerintah cepat tanggap untuk megatur kembali keberadaan pasar modern tersebut serta memperbaiki sarana dan prasarana pasar tradisonal mereka, sehingga diharapkan bisa mengembalikan eksistensi pedagang di pasar tradisional tersebut.

Tabel 4.17
Uji Statistik
Keuntungan Bersih Pedagang Pasar Tradisional

Uji Z	Q1Sesudah – Q1 Sebelum
Z	-8.146
Asymp.Sig. (2-Tailed)	0.000

Dari hasil uji statistik yang dilakukan untuk membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan keuntungan bersih yang diterima pedagang setelah banyaknya berdiri pasar modern disekitar wilayah pedagang tradisional, membuktikan bahwa H_0 ditolak karena berdasarkan tabel statistik untuk nilai $Z_{Q2} = -0,8146 < -1,64$ yang mengandung arti bahwa ada perubahan keuntungan bersih yang diperoleh para pedagang setelah berdirinya supermarket.

4.6. Alokasi Anggaran Kebutuhan Hidup

Pengaruh yang ditimbulkan dari penyusutan penjualan akibat dari persaingan yang tidak seimbang dengan pepasar modern, juga

berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari para keluarga pedagang di kedua pasar tradisional tersebut. Dari wawancara yang kami lakukan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup yaitu; biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Secara umum dari keuntungan bersih yang mereka peroleh, para pedagang relative masih mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Dari hasil wawancara tersebut juga terungkap bahwa, keinginan mereka untuk dapat menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka merasa gamang, dengan kemampuan keuangan yang mereka miliki. Ada beberapa pedagang yang mengurungkan niatnya untuk memasukkan anak mereka ke sekolah unggulan tetapi terpaksa diurungkan, karena biaya yang relative besar, sehingga mereka memilih sekolah yang dari sisi biaya masih bisa mereka penuhi. Walaupun dari segi kualitas masuk dalam kategori menengah. Begitu pula dalam hal perawatan kesehatan, sebagian besar pedagang memilih untuk berobat ke rumah sakit pemerintah atau Puskesmas kecamatan, ketimbang ke dokter umum atau rumah sakit swasta. Secara umum terungkap mereka masih mampu untuk memenuhi ketiga kebutuhan hidup tersebut.

Dari data yang diperoleh dari hasil interview dengan para pedagang di kedua pasar tradisional tersebut, diketahui ternyata terdapat pengurangan alokasi biaya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pedagang sehari-hari, sebesar kurang lebih 13%. Pengurangan anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan hidup ini tentu imbas dari menurunnya penjualan dan laba bersih dari toko mereka. Dan tidak bisa dipungkiri, bahwa salah satu penyebab utamanya adalah keberadaan pasar tradisional yang tidak terkontrol di wilayah mereka.

Tabel 4.18
Uji Statistik
Pemenuhan Kebutuhan Hidup Pedagang Pasar Tradisional

Uji Z	Q1 Sesudah – Q1 Sebelum
Z	-.000
Asymp.Sig. (2-Tailed)	1.000
Biaya Pendidikan	-7.242
Biaya Kesehatan	.000

Dari hasil uji statistik yang dilakukan untuk membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dimiliki pedagang setelah banyaknya berdiri pasar modern disekitar wilayah pedagang tradisional, memperlihatkan bahwa H_0 diterima karena berdasarkan Q_3 dimana $-1.64 \leq Z(0,000) \leq 1.64$ yang mengandung arti bahwa keuntungan bersih yang diperoleh para pedagang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah berdirinya supermarket.

4.7 Alokasi Anggaran Untuk Tabungan Dari Keuntungan Bersih Pedagang Pasar Tradisional

Tabungan adalah hal yang sangat diimpikan oleh setiap pedagang, apalagi bagi pedagang kecil yang hanya mampu untuk menutup biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para pedagang, terungkap bahwa pada mulanya mereka mampu untuk mengalokasikan anggaran untuk ditabung secara rutin setiap bulannya. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, tidak semua pedagang yang masih mampu melakukan hal tersebut, dikarenakan tidak adanya alokasi anggaran yang mereka miliki untuk ditabung. Bagi pedagang yang masih memiliki kemampuan untuk menabung, jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dari waktu – waktu sebelumnya.

Dari data yang kami peroleh dari pedagang terungkap bahwa kemampuan mereka mengalokasikan sejumlah anggaran untuk menabung berkisar antara Rp 500.000 - Rp 1 Juta rupiah atau rata-rata sekitar Rp 750.000 perbulan. Kemudian angka tersebut mulai mengalami fluktuasi dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah hasil dari perdagangan yang mereka lakukan tidak bisa lagi menghasilkan secara maksimal.

Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ada pedagang yang sudah tidak mampu lagi mengalokasikan untuk tabungan. Artinya semua keuntungan bersih yang mereka peroleh dari toko mereka, habis digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup mereka. Kondisi tersebut, sebagaimana pengakuan mereka adalah imbas dari semakin menyusutnya penjualan yang mampu mereka lakukan, yang kemudian berdampak kepada keuntungan bersih. Secara sederhana ketika total penjualan (*revenue*) menyusut, sementara total biaya (*cost*) terus meningkat, bisa dipastikan keuntungan (*profit*) yang mereka raih juga

mengalami penyusutan, sehingga berdampak terhadap alokasi anggaran yang lain.

Tabel 4.19
Uji Statistik
Alokasi Untuk Tabungan Pedagang Pasar Tradisional

Uji Z	Q1 Sesudah – Q1 Sebelum
Z	-9.849
Asymp.Sig. (2-Tailed)	.000

Dari hasil uji statistik yang dilakukan untuk membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan pedagang untuk menabung setelah banyaknya berdiri pasar modern disekitar wilayah pedagang tradisional, membuktikan bahwa H_0 ditolak karena berdasarkan tabel test statistik untuk Q6 Z (-9.849) < -1,64 karena mengandung arti bahwa keuntungan bersih yang diperoleh para pedagang tidak bisa disisihkan untuk ditabung setelah berdirinya Pasar Modern.

Jumlah Karyawan yang Dimiliki Pedagang Barang Harian (Kelontong)

Dampak yang juga sangat dirasakan oleh para pedagang yang terdapat di dua daerah tersebut, selain terjadinya pengurangan laba, penjualan serta asset yang dimiliki adalah terjadinya pengurangan jumlah karyawan yang membantu di toko mereka. Pengurangan jumlah kerywan yang mereka lakukan tidak lepas dari jumlah penjualan serta laba yang mereka peroleh yang semakin menyusut, sehingga tidak mampu untuk membayar gaji karyawan.

Selain memutuskan hubungan kerja, hal lain yang dilakukan untuk tetap bisa mempertahankan jumlah karyawan adalah dengan mengatur jadwal kerja karyawan, sehingga para pemilik toko tidak harus membayar penuh gaji karyawan, tetapi berdasarkan jam kerja pegawai. Cara ini cukup efektif dan membantu para pedagang, dalam membayar alokasi gaji karyawan. Dengan demikian mereka bisa terhindar dari pemutusan hubungan kerja, yang menyebabkan terjadinya pengangguran, yang kemudian hari tentu berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi mereka.

Pengurangan dan penyesuaian jam kerja yadilakukan oleh sebagian besar pedagang juga terdapat di pasar tradisional yang diteliti.

Sebagian besar pedagang mengungkapkan faktor keuangan yang membuat mereka tidak sanggup lagi membayar upah / gaji mereka. Tetapi para pedagang yang masih membutuhkan jasa mereka mengatur jam kerja mereka dalam bentuk shift.

Terdapat rata-rata pengurangan jumlah karyawan sebesar 36% dari sejumlah pedagang yang diteliti. Yang menarik dari mereka adalah, ada beberapa pedagang yang memiliki karyawan pindah pekerjaan atau dengan sukarela mengundurkan diri, alasan yang mereka kemukakan adalah ingin mencari pekerjaan lain terutama di tempat pasar tradisional yang tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Rata-rata pengurangan jumlah karyawan hingga mencapai angka 37.5%. angka yang relatif besar.

Tabel 4.20
Uji Statistik
Jumlah Karyawan Pada Pedagang Pasar Tradisional

Uji Z	Q1 Sesudah – Q1 Sebelum
Z	-3.087
Asymp.Sig. (2-Tailed)	.002

Dari hasil uji statistik yang dilakukan untuk membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jumlah karyawan yang bekerja di pasar tradisional setelah banyaknya berdiri pasar modern disekitar wilayah pedagang tradisional, memperlihatkan bahwa H_0 ditolak karena berdasarkan tabel test statistics untuk nilai $Z (-3,087) < -1,64$ karena mengandung arti bahwa ada perubahan jumlah karyawan yang dimiliki para pedagang setelah berdirinya supermarket.

4.11 Keberadaan Koperasi Bagi Pedagang Barang Harian (Kelontong)

Hasil wawancara mendalam yang kami lakukan terhadap para pedagang juga mengungkapkan bahwa, ada keghundahan para pedagang menghadapi serbuan pepasar modern yang tumbuh sangat cepat. Mereka mengakui butuh sebuah wadah yang kuat untuk memperjuangkan dan membantu keberlanjutan usaha mereka. Di kedua pasar tersebut, sudah terdapat koperasi pedagang pasar, yang menghimpun semua pedagang di kedua pasar tersebut. Tetapi keberadaan Koperasi tersebut, secara implisit disampaikan belum terlalu maksimal membantu pedagang. Diperlukan restrukturisasi dan

perbaikan terhadap pengelolaan koperasi tersebut, sehingga nantinya benar-benar bisa bermanfaat bagi pedagang.

Keberadaan koperasi tentu akan sangat membantu bagi para pedagang, apalagi pengelolaan koperasi dilakukan langsung ditengah – tengah pedagang, sehingga bisa mengetahui dan mendalami realita pedagang.

Dari tabel yang merupakan tabulasi dari pendapat para pedagang terhadap koperasi, terungkap bahwa cara pandang mereka terhadap koperasi mengalami perubahan semenjak menjamurnya keberadaan pepasar modern di tengah lingkungan pasar. Mereka semakin merasakan keberadaan koperasi untuk membantu bahkan menyelamatkan usaha mereka. Banyak harapan yang terungkap dari para pedagang akan peran dan fungsi koperasi. Rata-rata para pedagang mengungkapkan keinginan mereka agar dilakukan revitalisasi akan peran dan fungsi koperasi. Sebagian besar para pedagang sangat setuju, peran dan fungsi koperasi agak lebih ditingkatkan, selain itu semangat kerjasama dan saling menolong diantara pedagang mulai tumbuh.

Tabel 4.21
Uji Statistik
Keberadaan Koperasi Bagi Pedagang Pasar Tradisional

Uji Z	Q1Sesudah – Q1 Sebelum
Z	-10.954
Asymp.Sig. (2-Tailed)	.000

Dari hasil uji statistik yang dilakukan untuk membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap cara pandang pedagang terhadap koperasi setelah banyaknya berdiri pasar modern disekitar wilayah pedagang tradisional, memperlihatkan bahwa H_0 ditolak karena berdasarkan tabel statistik untuk nilai $Z (-10,954) < -$

1,64 karena mengandung arti bahwa diperlukan kerjasama antara sesama pemilik warung dalam bentuk koperasi setelah berdirinya pasar modern.

BAB V

TRANSFORMASI EKONOMI MENUJU KEADILAN SOSIAL DAN EKONOMI

Banyaknya kritik yang dilakukan kepada aliran ekonomi Neoklasikal oleh berbagai kalangan ilmuwan, merupakan cermin kegagalan dalam pemikiran, pendidikan, penelitian, dan pengambilan kebijakan yang bertumpu kepada aliran ekonomi Neoklasik. Aliran ekonomi Neoklasik yang mengandalkan kepada kebebasan ekonomi dan terlalu mengandalkan kepada superioritas mekanisme pasar, pada kenyataannya justru menimbulkan masalah dalam perekonomian, terjadinya eksploitasi baik oleh negara kuat terhadap negara lemah,

perusahaan atau institusi yang kuat terhadap usaha atau institusi yang lemah²¹⁵. Dalam hal ini bisa dipastikan bahwa aspek moralitas dalam bentuk nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan dianggap tidak begitu penting. Akibatnya adalah munculnya persoalan kemiskinan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, kerusakan lingkungan, berkembangnya budaya materialistik. Kondisi tersebut tidak bisa dipisahkan dari keberadaan aliran ekonomi Neoklasik yang mempengaruhi paham dan cara pandang dalam perekonomian²¹⁶.

Paham Neoklasikan telah menciptakan identitasnya sendiri, munculnya individu-individu yang sangat fanatik terhadap paham tersebut, telah memunculkan ketergantungan yang sangat rentan terhadap mekanisme pasar²¹⁷. Mekanisme pasar telah mengkerdikan peran pemerintah, dengan memberikan peran yang minimal dalam perekonomian. Perekonomian dibawah sistim yang didasari oleh paham neoklasikal semakin menjauh dari harmoni antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.

Semakin disadari bahwa sistem ekonomi yang sekarang ada gagal mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan dalam tatanan sosial-ekonomi dalam masyarakat. Namun, alih-alih menyelesaikan konflik antara tujuan normatif dan strategi sekuler serta memperbaiki asumsi dan struktur logika yang mengiringi-nya, ekonom justru semakin tenggelam dalam kecanggihan matematika. Hal ini tidak saja membuat ilmu ekonomi semakin abstrak dan sulit, namun juga semakin tidak relevan dengan pembuatan kebijakan.

²¹⁵ Dalam bukunya Jhon Perkins banyak mengungkap bagaimana negara-negara maju dengan agen-agen yang mereka miliki mempengaruhi bahkan menekan negar-negara dunia ketiga yang baru merdeka, tetapi memiliki sumberdaya alam yang melimpah, untuk mendapatkan proyek-proyek pembangunan yang besar. Lihat: John Perkins, *Confession of Economics hitman* (Berrett-Koehler Publishers, 2004), 110.

²¹⁶ Chapra dalam bukunya banyak mengungkapkan permasalahan – permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh paham materialistik yang dimuylai dari paham neoklasikal dan liebralisme ekonomi. Lihat: Umer Chapra, *Toward of Islamic Economics* (Jeddah: IRTI-IDB, 2006), 120

²¹⁷Sri Edi Sri-Edi Swasono telah membagi individu atau para pakar menegnai cara pandang mereka terhadap pajam neoklasikal, ada yang fanatic, lebih hati-hati dan menentang. Sri-Edi Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire* (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010) , 109-110.

Ilmu ekonomi harus dikembalikan kepada akarnya, yaitu ilmu yang bersumber kepada nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan, dimana terdapat keseimbangan antara tujuan positif dan normatif yang ingin dicapai²¹⁸. Proses pencapaian kesejahteraan manusia tetap mengacu kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia tidak semata berlaku secara individual tetapi juga bersifat sosial, dalam Islam kemudian dikenal dengan istilah *falāh*. Perekonomian akan kembali kepada fungsi semulanya yaitu memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat²¹⁹.

A. Mengagas Transformasi Ekonomi dan Sosial

1. Mempercepat Tahapan Transformasi Ekonomi dan Sosial

Transformasi ekonomi adalah suatu upaya restrukturisasi terhadap paham dan pemikiran ekonomi tertentu, dalam rangka mengembalikan atau membentuk sistem ekonomi baru²²⁰. Upaya untuk menggagas kembali transformasi ekonomi, haruslah dimulai dengan merubah paradigma yang selama ini berkembang dan asumsi dasar yang selama terbangun dalam paham dan cara pandang yang lama, diantaranya yaitu meninggalkan asas perorangan dan menggantinya

²¹⁸ Siddiqi dalam bukunya mengungkapkan perlunya sebuah paham baru dalam ekonomi yang sudah sangat dipengaruhi oleh paham neoklasikal, dimana terdapat keterpaduan antara tujuan positif dan tujuan normatif. Muhammad Najetullah Shiddiqi, *Philosophy of Islamic Economic* (Jeddah: IRTI – IDB), 69-70.

²¹⁹ Mannan mengungkapkan bahwa, cara pandang manusia dalam ekonomi, haruslah mampu mendapatkan kesejahteraan baik didunia maupun diakhirat. Lihat: Muhammad Abdul Mannan, *Introduction of Islamic Economics* (Dakka: University of Bangladesh, 1986), 17-18

²²⁰ Banyak tulisan Sri-Edi Swasono yang mengungkapkan gagasan mengenai transformasi ekonomi dan Sosial, sebagai bentuk untuk merubah cara pandang ekonomi yang sudah sangat usang. Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Menolak Neoliberalisme dan Membangun Ekonomi Nasional* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010), 15-16

dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, atau dengan kata lain merubah sistem ekonomi yang subordinatif menjadi sistem ekonomi nasional yang demokratis berdasarkan demokrasi ekonomi.

Proses berjalannya transformasi ekonomi tidak bisa dipisahkan dari transformasi sosial. Transformasi sosial akan membentuk pola-pola baru dalam hubungan ekonomi dan sosial di masyarakat, dalam hal ini akan membentuk hubungan ekonomi yang partisipatori-emansipatori, terbentuk pola kemitraan yang saling menjaga dan memiliki satu dengan yang lain²²¹. Jika pola tersebut dipertahankan, maka akan timbul sebuah budaya baru dalam mengelola perekonomian dalam masyarakat.

Perlu disusun tahapan-tahapan yang akan digunakan dalam melakukan proses transformasi ekonomi dan sosial. Pertama, tahapan yang bersifat fundamental yaitu membangun kembali paradigma baru dan asumsi dasar dalam pemahaman dan pengajaran ilmu ekonomi²²². Langkah pertama ini sangat penting, karena dasar dari pengembangan ilmu ekonomi ada pada paradigma dan asumsi dasar. Proses internalisasi paham ekonomi kepada masyarakat terutama level pelajar dan mahasiswa dimulai dari bangku sekolah dan universitas. Kedua, tahapan yang bersifat aplikasi. Proses restrukturisasi kebijakan ekonomi berada pada tahapan ini. Tahapan ini tidak hanya sekedar merumuskan kebijakan ekonomi baru tetapi juga melakukan restrukturisasi terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi sebelumnya, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur demokrasi ekonomi, yang sudah dituangkan dalam konstitusi negara²²³.

²²¹ Sri-Edi Swasono, mengungkapkan salah satu tujuan transformasi adalah memperbaiki kondisi struktural ekonomi yang sangat timpang. Lihat: Sri Edi Swasono, *Menolak Neoliberalisme dan Membangun Ekonomi Nasional* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010), 16.

²²² Chapra mengusulkan, proses reformasi terhadap Ilmu ekonomi harus dimulai dengan melakukan reformasi terhadap paradigma dan asumsi dasar yang membentuk ilmu ekonomi selama ini. Lihat: Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (London: Islamic Foundation, 2001), 24-25

²²³ Sri-Edi Swasono dalam artikelnya mengungkapkan bahwa, pemikiran pemikiran strategis, cermat dan mendalam mengenai ketimpangan-ketimpangan struktural harus tetap dikembangkan. Hanya dengan demikian maka kebijakan restrukturisasi untuk mengatasi ketimpangan struktural dapat didesain. Lihat: Sri Edi Swasono, *Kemandirian Ekonomi: Menghapus Sistem Ekonomi Subordinasi Membangun Ekonomi Rakyat*. *Disampaikan Kongres Kebudayaan V, Bukittinggi*, (20– 22 Oktober 2003): 4-5

Proses transformasi ekonomi tidak hanya sekedar mengganti paham dan cara pandang terhadap ekonomi yang baru semata, tetapi juga merubah cara berfikir dan berperilaku setiap individu yang menjalankannya. Oleh sebab itu perubahan paradigma dan asumsi dasar menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam memulai proses transformasi. Setelah persoalan mendasar tersebut selesai barulah kemudian mempersiapkan perangkat perangkat yang akan menjadi instrument dalam proses transformasi ekonomi tersebut.

Tahapan selanjutnya adalah melaksanakan atau kembali kepada demokrasi ekonomi secara konsisten sesuai dengan kepribadian dan karakter masyarakat. Demokrasi ekonomi telah disusun oleh para pendiri bangsa dengan memperhatikan aspek-aspek internal kebangsaan, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek eksternal yang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan yang lebih sulit. Demokrasi ekonomi diharapkan akan menjadi dasar dalam setiap pengambilan kebijakan yang dipergunakan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.²²⁴

Besarnya pengaruh dan cara pandang paham ekonomi neoklasikal dalam perekonomian nasional, telah menyebabkan nilai-nilai dasar yang menjadi ciri dan karakter perekonomian nasional sudah mulai terkikis. Proses transformasi yang dilakukan bertujuan untuk mengembalikan ciri dan karakter perekonomian nasional kedalam nilai dasarnya, yaitu melaksanakan usaha bersama dalam membangun perekonomian, sehingga setiap potensi yang dimiliki warga negara akan mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan. Selain itu mengembalikan semangat kebersamaan dan asas kekeluargaan dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sehingga diharapkan nantinya perekonomian nasional akan memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi persaingan global²²⁵.

²²⁴ Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan Ke Ekonomi dan Pembangunan* (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1960), 126.

²²⁵ Mohammad Hatta mengantisipasi sejak sebelum Indonesia merdeka, bahwa pada akhirnya, untuk situasi Indonesia, pertumbuhan ekspor tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan kemakmuran rakyat, apalagi kalau sektor ekspor secara substansial dikuasai oleh pihak asing. Mohammad Hatta, *Krisis Ekonomi dan Kapitalisme*, (Batavia: Penerbit Sutan Lembaq Tuah, 1934), hlm.89.

Proses transformasi ekonomi akan selalu diikuti dengan terjadinya transformasi sosial dalam perekonomian²²⁶. Nilai-nilai dasar yang sudah terbentuk dalam transformasi ekonomi, kemudian ditransformasikan kedalam bentuk hubungan antar individu pelaku ekonomi yang lebih seimbang, berkeadilan dan harmonis. Hubungan antar pelaku ekonomi yang selama ini mengarah kepada pola – pola kolonialisme seperti hubungan antara kaum pemilik modal dengan para pekerja, hubungan antara majikan dan pembantunya. Pola hubungan sosial yang terbentuk adalah lebih bersifat kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan tanpa ada yang merasa dirugikan atau dieksploitasi. Atau dengan kata lain akan membentuk hubungan ekonomi partisipatori-emansipatori.

Terbentuknya pola hubungan sosial yang lebih manusiawi tersebut harus diikuti dengan bentuk bentuk kerjasama dan kemitraan yang bisa dikembangkan dalam kerjasam ekonomi dan perdagangan. Dalam beberapa literature, Sri Edi Sri-Edi Swasono mengusulkan pola hubungan yang menggunakan pendekatan triple-co²²⁷. Pertama co-ownership, artinya kepemilikan bersama, pelanggan adalah pemilik, pemilik adalah pelanggan²²⁸. Dengan konsep ini diharapkan timbul partisipasi aktif seluruh masyarakat, semangat saling memiliki dan menjaga satu dengan yang lain. Masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan ekonomi yang telah dicapai. Sebuah

²²⁶ Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Kemandirian Ekonomi: Menghapus Sestim Ekonomi Subordinasi Membangun Ekonomi Rakyat*: 3-4

²²⁷ Sri-Edi Swasono mengungkapkan hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh dikuasai orang perorang, perlu ada sebuah pola baru dalam menguasai asset perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak, Sri-Edi Swasono mengusulkan istilah Triple-co. Lihat Sri-Edi Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila, 2005), 153. Penjelasan mengenai triple-co juga disampaikan oleh Sri-Edi Swasono, prinsip triple-co yaitu suatu corporate governance berdasarkan co-ownership, co-determination dan co-responsibility dengan common bonds, clientele dan stake holders di dalam badan-badan usaha. Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: PraKarsa, 2010), 92.

²²⁸ Hubungan yang terbangun dalam konsep co-ownership adalah munculnya rasa saling memiliki dan menjaga antar satu dengan yang lain. Dengan demikian semangat kebersamaan akan selalu menjadi dasar aktifitas ekonomi pada masing-masing individu. Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, 93

bangsa akan tegak berdiri secara terhormat, tanpa harus merasa rendah diri dihadapan bangsa lain.

Konsep co-ownership ini akan mengembalikan konsep usaha bersama atau kemitraan kedalam pasar. Konsep ini akan memberi kesempatan kepada seluruh pelaku pasar untuk terlibat dalam sebuah usaha bersama. Sebagai contoh, masyarakat bisa ikut terlibat memiliki usaha-usaha yang dikembangkan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah, melalui sekema-skema kepemilikan yang sah dan diakui oleh undang-undang. Diharapkan nantinya kesenjangan kekayaan dan pendapatan akan bisa minimalisir keberadaanya. Sehingga konsep kesejahteraan bagi seluruh masyarakat akan bisa diimplementasikan.

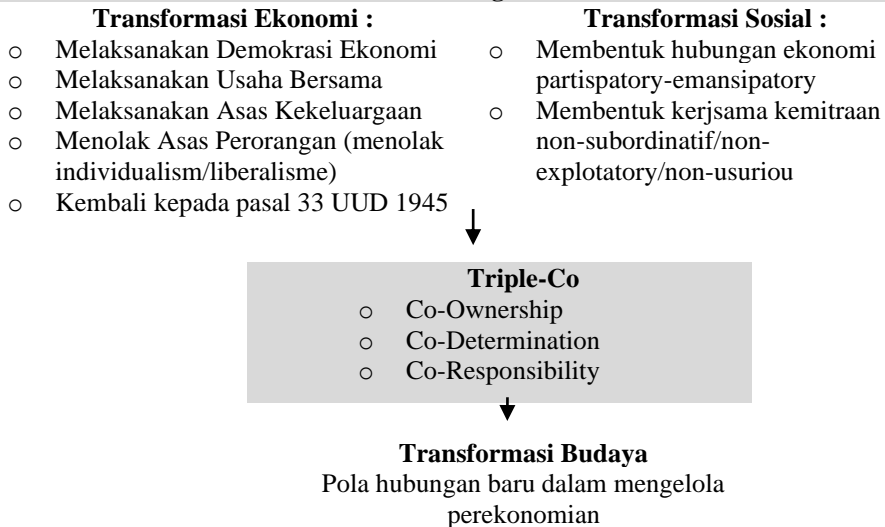
Munculnya semangat co-ownership dengan sendirinya akan terbentuk semangat dan mekanisme co-determination (keputusan bersama) dan co-responsibility (tanggung jawab bersama)²²⁹. Selaku pemilik usaha, masyarakat apakah itu dalam bentuk perseorangan, usaha mikro, kecil maupun menengah akan bisa berperan dalam menentukan masa depan sebuah usaha yang dijalankan secara bersama. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya sekedar pada tataran merasa ikut memiliki, tetapi juga harus terlibat aktif dalam memberikan masukan.

Dengan adanya keinginan untuk maju dan berkembang secara bersama-sama akan menimbulkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab untuk menjaga kesinambungannya. Selaku pemilik usaha, semua stake holder usaha tersebut akan berusaha untuk memajukan usahannya, dan juga ikut bertanggung jawab terhadap segala resiko yang ditimbulkan dari usaha tersebut, sehingga pembagian resiko benar-benar bisa dijalankan sebagaimana mestinya, jadi tidak lagi hanya dibebankan kepada satu pihak saja. Nantinya masyarakat tidak hanya bicara pada tingkatan stake-holders saja, tetapi secara bertahap bicara pada tingkatan share-holders di bidang-bidang yang memungkinkan.²³⁰

²²⁹ Selain konsep co-ownership, co-determination dan co-responsibility, juga menjadi konsep yang bisa terus dikembangkan, sehingga nantinya keberadaan usaha-usaha kecil dan menengah akan bisa maju dan berkembang secara bersama-sama. Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, 93

²³⁰ Masyarakat akan bisa ikut terlibat secara aktif dalam mengelola semua unit usaha yang dimilikinya, sehingga nantinya struktur ekonomi masyarakat akan

Bagan 5.1
Demokrasi Ekonomi²³¹
Perekonomian Disusun Sebagai Usaha Bersama Berdasar Atas Asas
Keluargaan



Dengan demikian, dari aktifitas mikro yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam dunia usaha dan perekoniomian, akan terbentuklah makna makro dari perekonomian masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat bisa menjadi pelanggan dan pemilik. Dualisme ekonomi antara perekonomian rakyat yang di bawah dengan perekonomian modern yang di atas, yang saat ini duduk bersandingan secara terpisah, dapat tersambung dengan baik. Dengan konsepsi triple-co maka ekonomi masyarakat akan lebih solid terintegrasi dalam proses dan struktur ekonomi.

Demokrasi ekonomi Indonesia akan lebih terwujud karena triple-co menghadirkan mekanisme dan substansi ekonomi yang tidak

semakin kuat. Lihat: Sri Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas kekeluargaan*, 264

²³¹ Bagan ini disusun dan telah disesuaikan dalam konteks pembahasan mengenai transformasi ekonomi dan transformasi sosial serta transformasi budaya. Sumber rujukan utama berasal dari beberapa buku Sri-Edi Swasono. Lihat: Sri Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas kekeluargaan* (Jakarta: UNJ Press, 2005), 263.

hanya partisipatori, tetapi sekaligus emansipatori. Sehingga makna dari demokrasi ekonomi yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan benar-benar bisa dijalankan dengan baik dan dirasakan masfaatnya sepenuhnya oleh masyarakat, untuk kemajuan bangsa. (lihat bagan 5.1)

2. Membangun Kembali Paradigma dan Asumsi Dasar Ilmu Ekonomi

Banyak ekonom yang menyadari dan menekankan akan pentingnya sebuah paradigma baru dan asumsi dasar dalam ilmu ekonomi yang lebih menitikberatkan pada keseimbangan material dan non material, mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan kedalam tatanan yang lebih elegan, dan memadukan kepentingan-kepentingan individu dengan kepentingan sosial yang lebih luas. Gunnar Myrdal dalam bukunya *Asian Drama*, mengusulkan untuk menyusun kembali ilmu ekonomi yang berkait dan berbasiskan kepada nilai-nilai kemanusiaan, baik perorangan, masyarakat maupun bangsa²³². Sehingga ilmu ekonomi tidak hanya sekedar mengejar tujuan-tujuan individu belaka, tetapi juga memiliki tujuan sosial yang kuat.

Begitu pula dengan EF Schumacher dalam bukunya *Small is Beautiful, Economics as if People mattered*²³³. Mengungkapkan perlunya mengembalikan nilai nilai kemanusiaan dalam ilmu ekonomi. Dengan kata lain, sudah banyak ilmuan dan pakar yang menyadari akan kekeliruan masa lampau terhadap pengembangan ilmu ekonomi yang menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan-tujuan normatifnya. Sehingga menjadikan ilmu ekonomi hanya sebagai alat pembenaran, yang digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan tertentu dalam paham neoliberalisme yang bermuara kepada keapitalisme dan liberalisme²³⁴.

²³² Harus dilakukan koreksi yang mendasar terhadap ilmu ekonomi yang sedang berkembang. Lihat: Gunar Myrdal, *Asian drama; an inquiry into the poverty of nations* (California: Twentieth Century Fund, 1968), 34-35.

²³³ Mengembalikan ilmu ekonomi kedalam nilai-nilai mendasar tentang kemanusiaan. Lihat: EF Schumacher, *Small is Beautiful, Economics as if People mattered* (London: Hartley and Marks Publishers , 2000), 67-68

²³⁴ Lihat: EF Schumacher, *Small is Beautiful, Economics as if People mattered* (London: Hartley and Marks Publishers , 2000), 67-68

Para ekonom tersebut menyadari sepenuhnya bahwa meniadakan hubungan kajian ekonomi dan nilai-nilai moral, etika dan humanistik adalah suatu kekeliruan besar dan tidak bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan manusia dan alam semesta. Kesadaran ini muncul setelah menyaksikan hasil dari model pembangunan sosio-ekonomi yang berasaskan kepada model neoklasikal yang mengusung kapitalisme, liberalisme dan globalisasi sebagai tatanan dalam pembangunan ekonomi, dimana keduanya mengutamakan kehidupan materialistik hedonis, sehingga menyebabkan lunturnya semangat kepedulian sosial yang sudah tertanam selama ini. Indikator-indikator keberhasilan pembangunan ekonomi hanya dilihat dari keberhasilan pembangunan fisik semata, dan menutup mata terhadap kesenjangan pendapatan, kemiskinan dan pengangguran, serta masalah sosial lainnya.

Disinilah kemudian kebangkitan ekonomi Islam segera mendapat perhatian yang luas dan menjadi sistem alternatif yang paling diharapkan memberi pencerahan baru bagi ilmu ekonomi. Bahkan harapan terhadap ekonomi Islam ini tidak sekadar untuk mencari suatu sistem alternatif, tetapi juga sebagai suatu *countervailing power* terhadap sistem ekonomi eksploitatif (*exploittatory economic system*) menuju suatu kondisi dimana kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat²³⁵.

Dengan kata lain, ekonomi Islam menjadi harapan dan sekaligus solusi atas ketidakadilan sosial-ekonomi yang kini dialami sebagian besar penduduk dunia. Ekonomi Islam yang berbasiskan kepada nilai-nilai dan etika Islam, memiliki potensi untuk merubah ilmu ekonomi, mengembalikan ilmu ekonomi kembali kepada nilai-nilai dasar kemanusiaan, paradigma moral dan basis etika yang kuat dengan tidak mengesampingkan kesempatan dan hak individu dalam mengelola hartanya, menjadi modal dasar untuk melakukan perubahan dan memulai melakukan transformasi ekonomi dan sosial yang tertata dengan baik.

Ekonomi Islam menurut Umer Chapra adalah *branch of knowledge* yang membantu manusia untuk mencapai kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi dari kelangkaan sumber daya

²³⁵ Sri Edi Sri-Edi Swasono. *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisme dan Pasar Bebas*. (Yogyakarta: Pustep-UGM, 2005), 126-127.

yang mengikuti *maqashid syariah*²³⁶. Ekonomi Islam sejatinya dapat menjadi kekuatan baru dalam mewarnai kehidupan manusia. Kombinasi dimensi spiritual yang meneduhkan serta rasionalitas yang meyakinkan sangat berpotensi untuk memperbaiki kondisi kehidupan manusia. Dengan itu, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia tidak semata berlaku secara individual tetapi juga yang bersifat sosial.

Ekonomi Islam berbasis pada paradigma dimana keadilan ekonomi-sosial menjadi tujuan utama²³⁷. Paradigma keadilan ini berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi untuk kepentingan seluruh umat manusia. Semua sumber daya ekonomi pada hakikatnya adalah titipan dari Sang Pencipta yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan manusia tidak dipandang sebagai sesuatu yang sepenuhnya bergantung pada maksimisasi kekayaan dan konsumsi, namun dibutuhkan kepuasan yang seimbang antara kebutuhan material dan spiritual dari manusia.

Dalam paradigma ini dihipotesiskan bahwa perilaku individu yang berorientasi moral pada lingkungan politik dan sosial-ekonomi yang sesuai, akan membantu realisasi keadilan ekonomi-sosial dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Ilmu ekonomi Islam memandang bahwa kesejahteraan mensyaratkan pemenuhan seluruh kebutuhan dasar setiap manusia tanpa diskriminasi, baik kebutuhan material maupun kebutuhan non-material. Dalam perspektif baik mikro maupun makro, pandangan ekonomi Islam telah menempatkan kembali ilmu ekonomi sebagai ilmu yang berbasis kepada etika kemanusiaan dan religius, menempatkan kebutuhan material dan non material secara harmoni dan seimbang (lihat tabel 5.1). Ekonomi konvensional tidak membahas kebutuhan non material karena tidak terukur dan melibatkan value judgment. Karena itu maka ekonomi konvensional berfokus pada maksimisasi kekayaan dan kepuasan keinginan.

Tabel 5.1
Aspek Mikro dan Aspek Makro dalam Falah

²³⁶ Lihat: Umer Chapra, *The Future of Economic; An Islamic Perspective, Landscape Baru Perekonomian Masa Depan* (Jakarta, SEBI, 2001), 397.

²³⁷ Umer Chapra, *The Future of Economic; An Islamic Perspective, Landscape Baru Perekonomian Masa Depan* (Jakarta, SEBI, 2001), 397.

Unsur Falah	Aspek Mikro	Aspek Makro
Kelangsungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kelangsungan hidup biologis: kesehatan, kebebasan keturunan dan sebagainya. ○ Kelangsungan hidup ekonomi: kepemilikan faktor produksi ○ Kelangsungan hidup sosial: persaudaraan dan harmoni hubungan sosial ○ Kelangsungan hidup politik: kebebasan dalam partisipasi politik 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Keseimbangan ekologi lingkungan ○ Pengelolaan sumber daya alam ○ Penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk ○ Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antar kelompok ○ Jati diri dan kemandirian
Kebebasan Berkeinginan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Terbebas kemiskinan ○ Kemandirian hidup 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk ○ Penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang
Kekuatan dan Harga diri	<ul style="list-style-type: none"> ○ Harga diri ○ Kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari utang ○ Kekuatan militer

Sumber: Akram Khan (1994)

Ilmu ekonomi Islam berupaya melakukan penyeimbangan antara pemenuhan kebutuhan material dan non-material dengan cara berfokus pada optimisasi dibandingkan maksimisasi, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dibandingkan memuaskan keinginan, seperti yang tergambar dalam tabel diatas. Cara penyeimbangan kesejahteraan material dan non-material yang paling efektif adalah dengan memasukkan dimensi moral dalam setiap analisis ekonomi. Ilmu ekonomi Islam mem-filter klaim terhadap sumber daya tidak hanya dengan filter mekanisme pasar namun juga dengan filter moral. Hal ini akan banyak membantu menyeimbangkan supply dan demand, menjaga keberlanjutan (sustainability) perekonomian, serta membantu pencapaian tujuan kemanusiaan.

Penekanan pada filter moral dalam alokasi dan distribusi sumber daya pada ekonomi Islam tidak menafikan pentingnya peranan harga dan pasar. Filter moral adalah komplemen mekanisme pasar

sehingga alokasi dan distribusi sumber daya dilakukan melalui dua lapis filter. Filter pertama (moral) akan mengeliminir masalah unlimited wants pada sumber daya yang ada pada kesadaran di dalam diri setiap individu dengan merubah skala preferensi mereka agar konsisten dengan tujuan-tujuan normatif. Setiap unlimited wants individu harus melalui filter ini sebelum masuk ke filter kedua (mekanisme pasar). Filter moral ini dibutuhkan karena harmoni tidak selalu eksis antara self-interest dan social interest, sebagaimana yang selalu diasumsikan oleh ekonomi konvensional²³⁸.

Integrasi etika dan ekonomi menawarkan perspektif yang lebih unggul tentang motivasi dan perilaku manusia dibandingkan apa yang diberikan oleh ilmu ekonomi konvensional yang value-neutral positivism²³⁹. Strategi pembangunan yang lebih tepat tentang bagaimana mengubah pengaruh-pengaruh material menjadi kebahagiaan manusia. Nilai-nilai moral mempercepat perkembangan ekonomi, membantu membedakan institusi ekonomi yang baik dari yang buruk, dan menekankan restrukturisasi institusi ekonomi untuk menghasilkan solusi ekonomi-sosial yang efisien dan berkeadilan.

Mengeluarkan agama sebagai sumber norma perilaku ekonomi, tidak membantu, bahkan memperburuk kondisi masyarakat. Norma etika dan perilaku konvensional yang tidak mengikat tidak mampu menjadi substitusi etika yang bersumber dari keyakinan religius yang mengikat. Etika agama yang mengikat dan terinternalisasi dalam kesadaran beragama individu, secara efektif menjadi sanksi bagi tindakan-tindakan tidak beretika seperti free-riding, moral hazard, principal-agency problems, fraud, dan lain-lain, yang secara signifikan telah menurunkan kinerja institusi ekonomi-sosial berbasis pasar.

Internalisasi nilai moral-agama secara keseluruhan berdampak pada rekonsiliasi antara private interest dan collective welfare, pada biaya yang jauh lebih rendah dari sistem sekuler. Nilai moral Islam

²³⁸ Chapra *The Future of Economic; An Islamic Perspective, Landscape Baru Perekonomian Masa Depan* (Jakarta, SEBI, 2001), 397.

²³⁹ Para ekonom telah lama menyadari bahwa jarak yang lebar antara ekonomi dan etika adalah salah satu kelemahan terbesar ekonomi konvensional. Perilaku aktual manusia dipengaruhi oleh pertimbangan etis, dan mempengaruhi perilaku manusia memang adalah aspek utama dari etika. Ilmu Ekonomi dapat menjadi jauh lebih produktif jika memberi perhatian yang lebih besar dan eksplisit pada pertimbangan etis yang mempengaruhi perilaku dan keputusan manusia. Lihat, antara lain, Amartya Sen. *On Ethics and Economics*, (Oxford: Blackwell Publishing, 1987), 56-57

menghubungkan antara individu dengan masyarakat, dengan menyeimbangkan antara kebebasan individual dan tanggungjawab sosial. Islam mendorong pencapaian tujuan sosial-nya dengan menekan permintaan yang berlebihan terhadap sumberdaya yang terbatas. Menjalankan perilaku ekonomi secara bermoral mendorong pasokan altruisme, namun di saat yang sama Islam mengizinkan tujuan self-interested sehingga permintaan altruisme tetap terjaga.

Moralitas memiliki dampak signifikan pada perilaku sosial dan ekonomi individu, dan moralitas religius jauh lebih efektif dibandingkan moralitas konvensional. Nilai moral religius akan menjadi panduan jika dinyatakan secara eksplisit dan empatik. Nilai moral religius tidak akan menjadi panduan jika di-interpretasikan secara tidak tepat dan tidak merespon kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik yang pro-aktif harus menyertai moralitas individual untuk mencapai hasil kolektif yang optimal²⁴⁰.

Untuk menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan material dan non material, dibutuhkan pengorbanan (sacrifice) yang lebih besar dari pelaku ekonomi diatas self-interest. Ekonomi konvensional tidak memiliki kekuatan motivasi penggerak aktivitas ekonomi selain self-interest, pareto optimum tidak memberi ruang untuk pengorbanan, yang dibutuhkan untuk melayani social interest dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua. Ilmu ekonomi Islam mengakui pentingnya dua hal ini, baik memenuhi self-interest maupun keputusan untuk berkorban untuk social-interest. Masuknya dimensi moral tidak menghalangi self-interest, namun memberi ruang yang luas untuk pengorbanan dalam rangka mempromosikan social-interest dan kesejahteraan umat manusia²⁴¹.

²⁴⁰ Asumsi perilaku standar dalam ekonomi konvensional dapat diperbaiki oleh pertimbangan etis yang jelas, baik etika yang bersumber dari evaluasi intrinsik maupun dari evaluasi instrumental, baik secara individual maupun kelompok. Perilaku sosial dapat dan seringkali berseberangan dengan strategi dominan individu namun rasionalitas kelompok seringkali mempengaruhi perilaku aktual individu tanpa merusak rasionalitas-nya. Lihat: Amartya Sen, *On Ethics and Economics*, 25-26

²⁴¹ Penggunaan asumsi *self-interest* secara sempit telah banyak menghambat analisis hubungan yang sangat signifikan. Ekonomi konvensional mengidentifikasi rasionalitas perilaku manusia dari konsistensi pilihan internal dengan maksimisasi *self-interest*. Namun tidak terdapat bukti untuk klaim bahwa maksimisasi *self-interest* merupakan pendekatan terbaik terhadap perilaku aktual manusia ataupun bahwa maksimisasi *self-interest* akan membawa pada kondisi optimum ekonomi. Sebaliknya, dalam perekonomian pasar bebas, seperti Jepang, perpindahan sistematis

Self-interest dan sacrifice keduanya dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Institusi terpenting dalam kehidupan umat manusia, (pasar, keluarga, masyarakat dan pemerintah), tidak dapat dijalankan hanya *dengan self-interest*, *sacrifice* adalah keniscayaan untuk menjalankan institusi-institusi ini. Injeksi nilai moral atau panduan perilaku adalah tidak terhindarkan untuk merealisasikan visi kehidupan. Ilmu ekonomi Islam mendorong pelaku ekonomi untuk mematuhi panduan perilaku - dimana hal ini membutuhkan sacrifice dari self-interest – melalui kombinasi berbagai instrument seperti kebajikan hati, kekuatan pasar, tekanan sosial, intervensi pemerintah dan akuntabilitas terhadap Tuhan.

Lebih jauh lagi, dalam ekonomi Islam, panduan moral pada alokasi dan distribusi sumber daya tidak sepenuhnya diserahkan pada kesadaran masing-masing individu pelaku ekonomi, namun juga didorong oleh pemerintah. Pemerintah dibebankan tugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa alokasi dan distribusi sumber daya melalui mekanisme pasar terjadi secara efisien dengan mematuhi semua ketentuan moral sehingga akan mencapai tujuan-tujuan normatif²⁴².

Selain membangun paradigma yang kuat dengan nilai –nilai moral dan etika, yang perlu juga diperbaiki dalam mempersiapkan transformasi ekonomi adalah memberikan gambaran dan pemahaman tentang asumsi yang lebih realistis. Asumsi memainkan peranan penting dalam perumusan proposisi. Alangkah lebih baik dimulai dengan memberikan gambaran tentang asumsi asumsi yang lebih realistis sehingga akan prediksi dan catatan tentang sebuah fenomena ekonomi yang akan disampaikan bisa lebih diterima dan dicerna dengan baik.

dari perilaku maksimisasi *self-interest* menuju perilaku berbasis aturan – kewajiban, loyalitas dan kehendak baik- adalah sangat penting untuk pencapaian efisiensi ekonomi individu dan kelompok. Lihat: Amartya Sen, *On Ethics and Economics*, 30-31

²⁴² Pengawasan pasar dalam Islam dilakukan berdasarkan contoh langsung dari Nabi Muhammad SAW. Pada perkembangannya, fungsi pengawasan pasar yang menyeluruh di-institusionalkan secara permanen melalui institusi Hisbah. Umer Chapra, *The Future of Economic; An Islamic Perspective, Landscape Baru Perekonomian Masa Depan* (Jakarta, SEBI, 2001), 39-40

Dalam ilmu ekonomi hal mendasar dalam memformulasikan suatu teori adalah penyederhanaan asumsi. Para ekonom dalam merumuskan teorinya selalu mendasarkan pada suatu asumsi, sehingga suatu asumsi dapat beralasan dalam menjelaskan suatu fenomena namun pada saat yang lain tidak mampu menjelaskan hal yang sama. Oleh sebab itu penyederhanaan asumsi diperlukan dalam membentuk suatu teori dasar atas fenomena yang diamati. Berdasar atas pertimbangan tersebut di atas, asumsi dalam ilmu ekonomi haruslah didasarkan pada aksiomatik etika dan norma yang dirangkum dalam, kebebasan, keseimbangan, dan pertanggungjawaban dari setiap individu.

Dengan selalu mengacu kepada norma dan etika yang selalu melingkupinya akan tergambarkan sebuah asumsi yang lebih realistis, sederhana dengan menggunakan pendekatan pendekatan yang selalu member pemahaman bahwa ilmu ekonomi adalah sebuah ilmu yang selalu menjaga keharmonisan dan keseimbangan antar komponen yang terlibat didalamnya.

a. Rasionalitas Dalam Ekonomi

Rasionalitas dalam ekonomi haruslah dipandang sebagai sebuah cara pandang yang rasional dalam menggunakan sumberdaya yang dimiliki oleh setiap individu untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat. Sehingga nantinya akan terbentuk keseimbangan antara tujuan material dan spiritual dan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.

Dalam menjalankan aktifitas ekonomi, seorang individu akan bisa secara proporsional memandang kondisi ekonomi masing masing individu sesuai dengan tingkat kemampuan dan pencapaian ekonominya. Masing –masing pihak saling menghormati satu sama lain, bahkan ada semangat untuk saling membantu dalam setiap kesulitan diantara individu masyarakat. Sehingga akan terbentuk sebuah konsensus dimasyarakat bahwa kemiskinan dan kelebihan harta dalam kehidupan masyarakat tidak lantas menjadikan kehidupan masyarakat terpecah dan terpola berdasarkan tingkat kesejahteraan. Tetapi yang harus menjadi musuh bersama masyarakat adalah; keangkuhan, kesombongan, ketamakan, kemalasan.

Rasionalitas juga diarahkan kepada terbentuknya keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual dalam maskehidupan masyarakat. Cara pandang tersebut akan membentuk sebuah sikap dan

cara pandang yang benar terhadap harta. Harta kekayaan yang diperoleh seorang individu apabila diperoleh dengan cara yang benar, tanpa merugikan siapapun, dan dipergunakan atau diinvestasikan secara produktif untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau orang lain dengan cara-cara yang adil²⁴³. Orientasi moral akan membantu menghilangkan rasa saling pemusuhan dan iri hati, memperkuat solidaritas kelompok, dan mendorong perbuatan kebajikan.

Rasionalitas ekonomi yang berbasis kepada nilai-nilai moral dan etika akan membawa ilmu ekonomi kembali kepada konsep kekeluargaan dan kebersamaan yang kuat dalam menjalankan aktifitas ekonomi. Setiap langkah dan kebijakan yang diambil mulai dari, individu, perusahaan hingga negara sekalipun, akan selalu mengacu kepada dampak yang ditimbulkan bagi kebaikan dan kebahagiaan individu dan masyarakat. Sehingga individu yang terbentuk tidak lagi bersifat seperti *Rational Economic Man* dalam pandangan paham Neoklasikal, yang selalu mengutamakan pertimbangan nalar manusia dalam menentukan dan mengambil keputusan, tetapi memiliki cara pandang yang seimbang antara rasionalitas dan moralitas.

b. Tujuan Positif dan Normatif

Umer Chapra dalam bukunya, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* menjelaskan pada dasarnya, pemisahan ekonomi positif dan normatif bertentangan dengan karakteristik dasar ilmu sosial dan fakta empiris perekonomian dunia²⁴⁴. Ilmu sosial selalu diawali dan didasarkan pada nilai-nilai tertentu, baik pada aspek ontologis, epistemologis maupun aksiologis. Dengan demikian, tidak ada ilmu ekonomi yang bebas nilai (*value free*). Pendikotomian positif dan normatif pada dasarnya ditolak dalam ekonomi Islam, sebab pandangan Islam meyakini perilaku-perilaku sosial manusia tidak terjadi dengan sendirinya. Manusia memiliki kecenderungan, kehendak dan perilaku yang sangat dipengaruhi oleh nilai (*value*) atau etika yang diyakininya, serta pandangannya terhadap kehidupan ini.

²⁴³ Para ulama dan pemikir Islam telah membagi tentang tingkatan kebutuhan dalam beberapa tingkat. Kebutuhan primer (*darurriyat*), kebutuhan sekunder (*hajjiyat*), kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*). Dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer tingkatan kebutuhan tersebut dikategorikan sebagai kebutuhan (*needs*). Lihat: Umer chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Jakarta: Shariah Economics and Business Institute, 2001), 65.

²⁴⁴ Lihat: Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, 65-67

Pemahaman tentang aspek tujuan positif dan normatif haruslah dimulai dengan merubah cara pandang tentang adanya dikotomi antara tujuan positif dan normatif. Positivisme tidak lagi dipandang sebagai bebas dari pengaruh norma dan nilai – nilai yang dianut dan dipahami dalam masyarakat. Sehingga setiap langkah dalam mencapai tujuan positif akan selalu disertai dengan tujuan positif.

Seluruh sumber daya yang terdapat dimuka bumi ini, baik yang terdapat dalam diri manusia maupun yang terdapat dialam raya adalah milik Tuhan, sedangkan manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola dengan sebaik baiknya amanah dari Tuhan tersebut. Konsep Islam dalam memandang hubungan tersebut adalah, setiap individu akan dimintakan pertanggungjawaban atas semua perilaku dan perbuatan yang telah dilakukan oleh individu, pertanggung jawabannya dilakukan oleh masing – masing individu. Dengan demikian, tidak ada celah dan ruang yang terdapat dalam setiap aktivitas manusia untuk bebas dari nilai dan norma.

Oleh sebab itu kegagalan paham Neoklasikal ekonomi dalam membangun tujuan positif dan normatifnya, harus menjadi salah satu perhatian dalam merancang transformasi ekonomi, karena selama ini positivisme telah menjadi sebuah bagian yang integral dalam paradigma ilmu ekonomi. Positivisme juga telah menjadi sebuah keyakinan yang menyatakan bahwa setiap pertanyaan ekonom yang timbul harus mempunyai jawaban yang secara empiris dinyatakan benar atau salah.

Dengan demikian perlu sebuah cara pandang baru dalam melihat tujuan positif dan normatif dalam ilmu ekonomi. Ekonomi Islam sudah telah memberikan cara pandang baru yang berbeda sama sekali dari cara pandang ilmu ekonomi yang dipengaruhi oleh paham neoklasikal selama ini. ekonomi Islam pada dasarnya mengedepankan pendekatan integratif antara normatif dan positif. Islam menempatkan nilai yang tercermin dalam posisi yang tinggi. Jadi, etika harus menjadi kerangka awal dalam ilmu ekonomi. Penjelasan, pemahaman dan penilaian atas perilaku dan masalah-masalah ekonomi hingga upaya pencapaian tujuan ekonomi harus dilakukan dengan kerangka ilmu sosial yang integral, tanpa mendikotomikan etika dan realita secara absolut. Integrasi etika dan realita dalam pandangan Islam tentu saja bukan seperti pemahaman Max Weber tentang Wertfrei, sebab dalam

pandangan Islam etikal yang harus menguasai ilmu ekonomi bukan sebaliknya²⁴⁵.

Harmonisasi pencapaian tujuan positif dan normatif menjadi salah satu khasanah baru dalam teori ilmu ekonomi. Dengan mempertemukan konsep ketuhanan lewat nilai-nilai Islam dan rasionalitas, sehingga dalam penerapannya tujuan positif dan normatif tidak akan saling menghilangkan, tapi justru akan memperkuat satu dengan yang lain.

c. Cara Pandang Terhadap Dunia

Cara pandang (*Worldview*)²⁴⁶ dan visi kehidupan dalam membangun dasar ilmu ekonomi adalah hal yang sangat penting, karena dari sana akan didefinisikan makna dan tujuan kehidupan, kepemilikan dan tujuan pemanfaatan sumber daya yang terbatas, serta hak dan tanggung jawab individu, keluarga, kelompok dan organisasi.

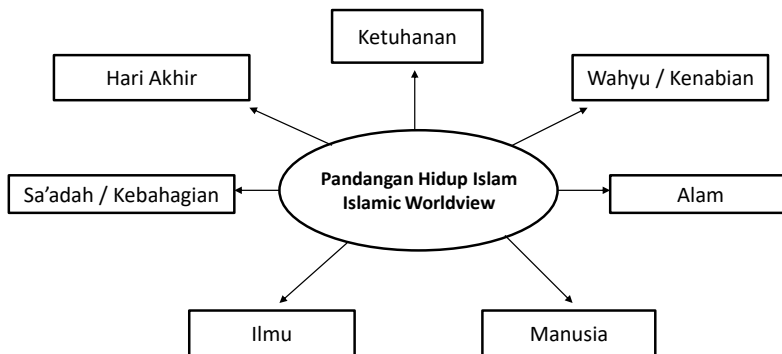
Cara Pandang dan visi memberikan panduan nilai yang benar dan motivasi yang kuat untuk berbuat sesuai dengan nilai-nilai tersebut (lihat gambar 5.1). Nilai-nilai ini memiliki implikasi signifikan bagi ilmu ekonomi. Cara pandang yang dianut masyarakat lah yang akan menentukan bagaimana sistem ekonomi beroperasi. Cara pandang adalah konsep umum tentang dunia, yang memiliki konsekuensi praktis dari komponen teoritisnya, berupa sistem nilai²⁴⁷.

²⁴⁵ Aidit Ghazali dan Syed Omar Syed Ali, *Reading in The Concept and Methodology of Islamic Economics* (Malaysia: Pelanduk, 1989), 168-169

²⁴⁶ Umer Chapra, *The Fututre of Economics: an Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 61-63.

²⁴⁷ Lihat: Umer Chapra, *The Fututre of Economics: an Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 121-122

Gambar 5.1
Pandangan Hidup Islam (Islamic Worldview)



Sistem nilai dapat dipengaruhi oleh ajaran agama namun elemen umumnya adalah teori memandu praktek. Dengan demikian, cara pandang adalah kontekstual, dimana reinterpretasi dan bahkan modifikasi kadang dibutuhkan. Dinamika sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan turut mempengaruhi cara pandang masyarakat. Sehingga, cara pandang adalah evolutif, selalu mengalami perubahan dan rekonstruksi di sekitar elemennya yang tidak dapat dirubah.

Cara pandang membahas sifat dasar dari eksistensi dunia dan bagaimana dunia tercipta, arti dan tujuan hidup umat manusia, kepemilikan absolut dan tujuan sumber daya terbatas yang dapat digunakan manusia, dan hubungan manusia satu sama lain dan dengan lingkungannya. Jika alam tercipta dengan sendirinya, maka manusia tidak bertanggungjawab kepada siapapun dan hidup bebas.

Sehingga menjadikan *Self-interest dan survival of the fittest* menjadi norma yang logis. Namun jika alam tercipta oleh Yang Maha Pencipta yaitu Allah SWT, maka manusia bertanggungjawab kepadanya dan menjalani hidup sesuai misi penciptaannya. Disinilah letak perbedaan antara cara pandang (*Islamic worldview*) dan cara pandang yang sekarang menjadi penguasa ekonomi dunia yaitu (*secular worldview*), terletak pada hubungan antara doktrin dan realitas,

interaksi akal dan wahyu, gagasan keadilan distributif dan strategi pencapaian-nya, metode investigasi dan penelitian ilmiah, dan lain-lain.²⁴⁸

Cara Pandang Islam berbasis pada pandangan hidup bahwa Tuhan menciptakan manusia hanya untuk beribadah pada-Nya, mencakup seluruh tujuan dan aktivitas manusia sebagai bagian dari bentuk ibadah (penghambaan diri)²⁴⁹. Dengan demikian, *spiritual-interest* adalah tujuan utama dalam Islam, kepatuhan terhadap perintah Tuhan dalam kehidupan dunia sebagai bentuk penghambaan tertinggi.

Mengejar *self-interest* diakui dalam Islam sebagai bagian dari naluri manusia dan mencakup aspek spiritual maupun material. Islam tidak menolak pencarian keuntungan pribadi sepanjang ajaran agama tidak dilanggar, keseluruhan aktivitas manusia harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam ekonomi Islam, *self interest* tidak selalu bermakna *selfishness*. *Self interest* dapat dibangun dengan kerjasama dan semangat persaudaraan dalam ekonomi Islam.

Dalam Islam, terdapat kesatuan yang kuat antara aspek jasad dan spiritualitas manusia, keduanya adalah berhubungan dan tidak terpisahkan, sebagaimana halnya kehidupan dunia dan akhirat. Cara pandang Islam diturunkan dari Qur'an dan Sunnah, fleksibel namun tidak tergantikan di beberapa bidang, tidak dapat dipengaruhi oleh pikiran manusia. Tuhan menciptakan alam untuk kebaikan seluruh manusia, manusia sebagai khalifah bertanggungjawab atas penggunaan sumber daya tanpa merusak ciptaan-Nya. Manfaat ekonomi dan sosial dari sebuah aktivitas harus lebih besar dari biaya ekonomi dan sosial. Namun barang dan jasa yang diharamkan tidak dapat diproduksi atau dikonsumsi meskipun manfaat-nya melebihi biaya-nya.²⁵⁰

Meski menghormati akal dan pikiran rasional, namun Islam tidak terkungkung dengan pemikiran manusia atau investigasi ilmiah. Tuhan telah memberikan kepada manusia panduan hidup yang sempurna tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di

²⁴⁸ Lihat: Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Foundationing of Islamic System* (Indiana: MSA of USA and Canada, 1978), 34-35

²⁴⁹ Muhammad Akram Khan. *Economic Teaching of Profet Muhammad* (Islamabad: IIIIE & IPs, 1989), 29-30

²⁵⁰ Lihat: Muhammad 'Abd al-Manna>n, *The Behaviour of Firm and Its Objectives in an Islamic Framework*. dalam Syeed Taher, *Readings in Microeconomics: an Islamic Perspective* (Malaysia: Longman, 1992), 54-55.

akhirat.²⁵¹ Hal ini berbasis kepada kepercayaan bahwa Tuhan Maha Mengetahui seluruh urusan, baik hal-hal yang terlihat dan terlebih hal-hal yang tidak terlihat.

Cara pandang Islam telah menyatukan antara hal-hal yang dapat dilihat dan diobservasi dengan hal-hal yang gaib dan tidak dapat diobservasi, mempercayai hal-hal yang nyata maupun yang tidak terlihat. Sesuatu yang dapat diobservasi tidak selalu benar, dan sebaliknya, sesuatu yang tidak dapat diobservasi tidak selalu salah. Dengan demikian, aturan metodologi yang mendasar dalam ekonomi Islam adalah, tidak semua realitas ekonomi selalu harus dapat dijelaskan atau diprediksi secara ilmiah.²⁵²

Cara pandang Islam ini secara ekstrim berbeda dan bertentangan dengan *secular worldview*. Perspektif dunia yang sekuler berbasis pada *scientific worldview* yang memandang alam semesta sebagai mesin yang bekerja secara otomatis mengikuti hukum alam (deterministik) bahkan ketika Tuhan tetap dipertahankan sebagai Sang Pencipta. *Secular worldview* membatasi visi hidup manusia hanya pada sebatas eksistensi-nya di dunia tanpa berfikir atau mempercayai tentang adanya kehidupan setelah mati yang tidak dapat dilihat dan diobservasi.²⁵³

Cara pandang Neoklasikal menggantungkan diri sepenuhnya pada akal pikiran manusia sebagai alat untuk penjelasan dan penyelidikan fenomena ilmiah. Dalam pandangan hidup sekuler, tujuan utama aktivitas adalah mengejar self-interest dengan rasionalitas sempurna sebagai kondisi dan kriteria yang tidak dapat diganggu gugat. Dibawah asumsi ini, *more is better than less* menjadi sebuah keniscayaan. Self-interest menjadi identik dengan selfishness dimana keuntungan personal mendominasi dan jauh mengalahkan manfaat sosial.²⁵⁴

²⁵¹ Lihat: Afza>l al-Rah}ma>n, *Economic Doctrines of Islam*, Edisi Indonesia. *Doktrin Ekonomi Islam*. Terj. Suroyo Nastangin, (Yogyakarta, 1996), 38-39.

²⁵² Lihat: Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analitical Study of the Foundationing of Islamic System* (Indiana: MSA of USA and Canada, 1978), 46.

²⁵³ Lihat: Umer Chapra, *The Fututre of Economics: an Islamic Perspective*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 34-35.

²⁵⁴ Lihat: Sri Edi Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan: Mutualism and Brotherhood*, (Jakarta: UNJ-Press, 2000), 24-25.

Aspek jasad dan spiritual manusia adalah hal yang berbeda, tidak ada kesatuan dan tidak memiliki hubungan dan keterkaitan. Dalam perspektif Neoklasikal, worldview dapat berubah setiap saat, secara tak terbatas, bergantung pada diskresi dan perubahan sikap manusia. Pendukung sekulerisme mengikuti hukum-hukum alam dimana mereka percaya bahwa kebebasan manusia untuk mengejar kepentingan ekonominya seoptimal mungkin dimana mereka dapat memaksimalkan laba atau utility mereka. Cara pandang neoklasikal juga menekankan bahwa setiap aktivitas atau realitas ekonomi harus dapat dijelaskan secara ilmiah dan menegaskan hal-hal yang diluar rasionalitas manusia sebagai “*ceteris paribus*”.²⁵⁵

Pelaku ekonomi cenderung memaksimalkan keuntungan diatas kerugian pihak lain atau merusak ciptaan Tuhan, mengganti kualitas dengan kuantitas, mengeksploitasi alam dan lingkungan hidup, mengganti kebenaran dengan kekuatan, membuang hidup yang ideal dan menggantinya dengan hidup yang pragmatis, mengganti keindahan, kebenaran dan kedermawanan nilai yang paling abadi dan dihargai dalam budaya manusia dan menggantinya dengan prinsip-prinsip populer kapitalisme realisme, kekuatan dan konsumsi

d. Manusia Sebagai Dasar dan Tujuan Pembangunan Ekonomi

Keberadaan manusia sebagai makhluk individu dan sosial tentu tidak bisa dilepaskan dari cara pandang yang dimiliki individu tersebut. Apa yang sudah dibahas diatas mengenai cara pandang (*worldview*) seorang individu dalam memandang kehidupan tidak bisa dilepaskan dari keyakinan dan kepercayaan yang dimilikinya. Sehingga setiap perilaku dan keputusan yang diambil seorang individu dalam mencari kepuasan hidup akan sangat dipengaruhi oleh cara pandang hidupnya. Oleh sebab itu tidak bisa dipungkiri bahwa peran sentral individu juga akan menentukan bagaimana sebuah sistim perekonomian tersebut terbentuk dan bekerja.²⁵⁶

²⁵⁵ Lihat: Umer Chapra, *The Fututre of Economics: an Islamic Perspective*, 23-24.

²⁵⁶ Lihat: Umer Chapra, *The Fututre of Economics: an Islamic Perspective.*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 55-56.

Ekonomi Islam telah memberikan dasar dasar dalam proses pembentukan pribadi dan karakter yang kuat dalam perekonomian, sehingga diharapkan individu tersebut akan mampu memainkan peran penting dalam mengelola perekonomian yang sesuai dengan nilai nilai kemanusiaan. Islam telah memberikan panduan dalam bentuk tujuan dari Syari'ah yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (dien), jiwa manusia (nafs), akal (aqal), Keturunan (nasl) dan kekayaan (maal). Apapun yang menjamin perlindungan kelima hal tersebut, akan menjamin kepentingan publik yang terdapat didalamnya.²⁵⁷ Dengan demikian manusia atau seorang individu itu sendiri menjadi tujuan maupun cara.

Keimanan menjadi hal yang paling penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian seorang individu. Selain itu faktor keimanan juga akan mempengaruhi perilaku, gaya hidup, selera dan preferensi manusia, sumber daya dan lingkungan. Keyakinan ini akan mencoba meningkatkan keseimbangan antara dorongan material dan spiritual, meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial, dan mencegah kondisi degradasi moral. Keimanan akan memberikan saringan moral yang akan memberikan arti dan tujuan pada penggunaan sumber daya yang efektif.

Saringan moral bertujuan untuk menjaga kepentingan diri tetap berada di dalam batas-batas kepentingan sosial dengan merubah preferensi individual sesuai dengan prioritas sosial dan menghilangkan atau meminimalisir penggunaan sumber daya untuk tujuan yang mengagalkan pencapaian tujuan sosial. Saringan moral juga akan membantu meningkatkan keserasian antara kepentingan diri dan kepentingan sosial.

Kebaradaan saringan moral tersebut tidak berarti menolak peranan penting yang dilakukan oleh harga dan pasar dalam mekanisme pasar. Saringan moral hanya melengkapi dan menjadikan alokasi dan distribusi sumber sumber daya tergantung pada dua lapisan saringan. Saringan moral menangani permasalahan tuntutan tidak terbatas terhadap sumber sumber daya pada sumber utamanya, yaitu kesadaran pada diri individu dengan merubah orang lain dan skala preferensi mereka sesuai dengan tujuan normatifnya.

Saringan kedua yaitu saringan harga yang digunakan untuk menciptakan sebuah keseimbangan pasar yang konsisten dengan tujuan

²⁵⁷ Lihat: Umer Chapra, *The Fututre of Economics: an Islamic Perspective*, 56-57.

tujuan normatifnya. Peran tersebut akan lebih terasa ketika sektor perbankan dan keuangan Islam juga disesuaikan dengan tujuan-tujuan normatif yang terdapat dalam sebuah perekonomian. Dengan demikian setiap individu yang aktif dan terlibat didalam pasar akan selalu mengetahui kepentingan individu dan sosial yang melekat pada dirinya.

Dengan demikian peran keimanan akan selalu membentuk pribadi dan karakter seorang individu yang mengetahui peran dan tugasnya baik didunia maupun di akhirat. Walaupun untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, seorang individu akan dipenuhi dengan hanya kepentingan keduniaan semata. Disisi lain kepentingan di akhirat tidak akan dapat dipenuhi kecuali dengan memenuhi kewajiban-kewajiban sosialnya.

Sudut pandang inilah yang kemudian menjadikan seorang individu akan selalau menyadari tugas dan kewajiban sosialnya, memiliki pandangan tentang dunia dan akhirat yang akan selalu menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Sehingga akan menimbulkan keserasian antara kepentingan diri dan kepentingan sosial, bahkan jika keduanya bertentangan sekalipun.

Keimanan juga ditujukan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif untuk memperkuat solidaritas keluarga dan sosial, dan meningkatkan perhatian dan kerjasama timbal balik diantara individu. Tanpa lingkungan tersebut mekanisme saringan dan sistem motivasi bisa menjadi tidak berjalan atau tumpul.

Dalam menjalankan konsep tersebut, tidak ada jaminan bahwa faktor keyakinan dan keimanan seorang individu dan masyarakat akan menghilangkan ketidakadilan dalam sistem pasar. Sangat tidak realistis jika diasumsikan semua individu akan sadar secara moral pada masyarakat. Bahkan pada lingkungan yang sudah memiliki kesadaran moral sekalipun, sangat mungkin bagi individu untuk tidak sadar menggunakan prioritas sosial atas penggunaan sumber-sumber daya. Pada kondisi inilah, setelah dua filter yang disampaikan diatas, negara harus memainkan peran komplementernya, dengan cara-cara yang tidak mengekang kebebasan dan inisiatif sektor swasta. Negara harus konsisten dalam menegakkan peraturan yang sudah disepakati bersama, dengan tidak membedakan, setiap individu dan kelompok masyarakat dalam menegakkan peraturan, dalam rangka melindungi semua warga negara.

Semakin besar motivasi masyarakat dalam merealisasikan nilai-nilai moral dan agama, maka akan semakin efektif lembaga-lembaga

sosial ekonomi dan keuangan dalam menciptakan suatu lingkungan yang baik bagi suatu keseimbangan yang adil antara sumber-sumber daya dan tuntutan. Sehingga semua elemen dalam masyarakat akan mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bersama, dengan tidak membedakan dan mempertentangkan perbedaan status sosial dalam masyarakat. Perekonomian akan menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk maju dan berkembang secara bersama-sama.

e. Definisi dan Ruang Lingkup

Setelah menjelaskan aspek aspek yang terkait dengan paradigma dasar dan asumsi yang dibangun. Maka terdapat nilai – nilai dan semangat baru dalam mendefinisikan ilmu ekonomi tersebut. Ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya alam yang sesuai dengan tujuan keyakinan seorang individu (maqashid), tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial dan jalinan moral dalam masyarakat.

Fokus dari ilmu ekonomi adalah mewujudkan kesejahteraan manusia, semua sektor yang terkait dengan kehidupan manusia harus berinteraksi secara signifikan dengan ekonomi untuk membantu mewujudkan kesejahteraan tersebut. Dengan demikian terdapat hal-hal pokok yang terkait dengan ruang lingkup yang dihadapi dalam ilmu ekonomi. Pertama, terus mempelajari perilaku manusia yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kultur, budaya dan tempat tinggalnya, dengan tidak membatasi diri hanya pada aspek tertentu saja melalui sebuah asumsi yang kadangkala tidak realistis dan tidak bisa dipertanggung jawabkan. Kedua, terus mempelajari jenis perilaku yang diperlukan bagi pencapaian tujuan. Nilai-nilai moral diasumsikan berorientasi kepada pencapaian tujuan –tujuan kemanusiaan. Ilmu ekonomi mungkin perlu menganalisa dampaknya terhadap selera, preferensi dan perilaku individu. Ketiga, ilmu ekonomi harus mampu menjelaskan kenapa pranata ekonomi yang berbeda berperilaku sebagaimana mereka lakukan, dan bukan dengan cara yang seharusnya mereka lakukan. Dengan harapan akan selalu terdapat perbaikan terhadap perilaku manusianya. Keempat, ilmu ekonomi harus membuat sebuah strategi yang praktis untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi dan politik, yaitu suatu strategi yang dapat mengarahkan

perilaku semua pelaku ekonomi di pasar yang mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya sedekat mungkin dengan apa yang dibutuhkan bagi pencapaian tujuan.

Perlu usaha yang sungguh – sungguh untuk bisa menjalankan langkah langkah tersebut. Ilmu ekonomi juga harus berperan dalam menghasilkan perubahan individu dan masyarakat dengan asumsi dan pendekatan yang dibangun. Untuk itu perlu sarana-sarana yang efektif untuk menjalankan langkah – langkah itu semua, melalui lembaga-lembaga pendidikan, motivasi yang tepat, transformasi sosial dan ekonomi dan lembaga-lembaga ekonomi dan politik yang berpengaruh.

Tugas besar tersebut harus bisa dikoloborasikan dengan banyak pendekatan yang sudah tersedia. Banyak pemikiran dan pandangan ekonomi yang ingin melakukan reformasi dan transformasi dari sistim dan pandangan yang selama ini mempengaruhi dunia yaitu neoklasikan dengan liberalisasi kepada pandangan dan pemikiran ekonomi yang lebih berkeadilan, sehingga proses transformasi ekonomi dan sosial bisa dilakukan. Banyak kesamaan cara pandang dan pemikiran yang mulai berkembang, mulai dari ekonomi Islam (*Islamic economics*), ekonomi normatif (*normative economics*), ekonomi kemanusiaan (*humanistic economics*), ekonomi sosial (*social economics*), ekonomi kelembagaan (*institutional Economics*) hingga ekonomi struktural (*structural economics*).

f. Model Pembangunan Dalam Perspektif Islam

Ilmu ekonomi Islam telah berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisiplin yang menjadi bahan kajian para ahli tafsir Al-Qur'an, ahli hukum, ahli sejarah, ahli ilmu sosial, ahli politik serta ahli filsafat moral. Bahkan Abbas Mirakhor dalam tulisannya pada Jurnal *The American Journal Of Islamic Social Science* yang berjudul *The Muslim Scholars and The History of Economics: A Need for Consideration* mengidentifikasi sejumlah cendekiawan seperti: Abu Yusuf (w.182/798), al-Mas'udi (w.346/957), al-Mawardi (w.450/1058), Ibnu Hazm (w.456/1064), al-Sarakhsi (w.483/1090), al-Tusi (w.485/1093), Ibnu Rusyd (w.595/1198), Ibnu Taimiyah (w.728/1328), Ibnu al-Ukhuwah (w.729/1329), Ibnu al-Qoiyim (w.751/1351), asy-Syatibi (w.790/1388), Ibnu Khaldun (w.808/1406), al-Maqrizi (w.845/1442), al-Dawwani (w.906/1511), Shah Waliullah (w.1176/1762), semuanya telah memberikan kontribusi pemikiran

yang sangat luas melalui sebuah proses evolusi yang terjadi selama berabad-abad²⁵⁸.

Proses yang dilalui dalam sejarah Islam terlihat lebih lambat, jika dibandingkan dengan apa yang terjadi dalam sejarah pengembangan ilmu pengetahuan dalam abad modern. Hal ini terjadi karena dalam bagian penting sejarah Islam, khususnya penyebaran ilmu pengetahuan, dan kepercayaan terhadap penyampaian secara langsung dari mulut ke mulut atau dalam bentuk manuskrip yang berlangsung lama sekali. Beberapa manuskrip telah hilang seiring perjalanan waktu.²⁵⁹

Tidak semua ahli dan cendekiawan yang disebut diatas tersebut merupakan ahli dibidang ekonomi. Pada saat itu klasifikasi disiplin ilmu pengetahuan belum dilakukan. Mereka ahli dalam berbagai bidang ilmu dan mungkin faktor ini yang menyebabkan mereka melakukan pendekatan interdisipliner antara ilmu ekonomi dan bidang ilmu yang mereka tekuni sebelumnya. Oleh sebab itu, ketika membahas persoalan ekonomi khususnya tentang kesejahteraan umat manusia akan selalu dikaitkan dengan interaksi panjang antara sejumlah faktor ekonomi dan non ekonomi, seperti faktor moral, sosial, demografi dan politik. Semua faktor tersebut berpadu menjadi satu sehingga tidak ada satu faktor pun yang dapat memberikan kontribusi optimal tanpa dukungan faktor lain.

Keadilan telah menempati bagian penting dalam kerangka pembangunan sebuah negara. Tanpa keadilan, sebuah masyarakat hanya akan membangun sebuah perwujudan kerangka rapuh yang berjalan menuju kehancuran atau kemunduran masyarakat. Tidak diragukan lagi, dalam pandangan ekonomi Islam memusatkan perhatian kepada keadilan adalah konsekuensi logis dari peranan keadilan itu sendiri yang sangat penting dalam pandangan Islam.

Dari sekian banyak cendekiawan yang tampil dalam sejarah pemikiran ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi, Ibnu Khaldun dalam karyannya *Muqadimmah* telah meletakkan dasar-dasar pembangunan yang sangat kuat dalam sejarah ilmu ekonomi Islam. Sebagai ahli sosial, Ibnu Khaldun sangat

²⁵⁸ Lihat: Abbas Mirakhor dalam tulisannya pada Jurnal *The American Journal Of Islamic Social Science* yang berjudul *The Muslim Schoolars and The History of Economics: A Need for Consideration*.

²⁵⁹ Lihat: Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester UK: Islamic Foundatiuon, 2001), 149

menyadari bahwa mengembalikan kejayaan itu tidak dapat dilaksanakan tanpa mengambil hikmah pelajaran dari sejarah yang telah terjadi. Hikmah tersebut dapat digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan sebuah peradaban dapat berkembang dari permulaan yang sederhana dan mengalami kemunduran setelahnya.

Muqadimmah adalah hasil karya Ibnu Khaldun yang sangat ilmiah dan lengkap. Buku tersebut berusaha menyajikan prinsip-prinsip yang menyebabkan kejayaan atau keruntuhan sebuah dinasti, negara (dawlah) atau peradaban ('umran). Ibnu Khaldun sangat memahami bahwa kejayaan dan keruntuhan dinasti atau peradaban sebagai faktor yang terkait erat dengan kesejahteraan atau kesengsaraan rakyat. Lebih lanjut beliau memaparkan, kejayaan dan keruntuhan sebuah negara tidak hanya tergantung kepada variable-variabel ekonomi, tetapi juga tergantung kepada faktor-faktor lain yang menentukan kualitas perorangan, masyarakat, pemerintahan dan negara. Lebih jauh Ibnu Khaldun mencoba untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembangunan sebuah negara, dengan menganalisa secara rinci peranan yang berkaitan antara faktor-faktor agama, psikologi, politik, ekonomi, sosial, demografi dan sejarah dalam kejayaan dan keruntuhan suatu pemerintahan dalam sebuah bangsa atau peradaban²⁶⁰.

Landasan dan filosofi pemikiran Ibnu Khaldun terhadap pembangunan sebuah negara atau peradaban tersebut, disempurnakan oleh Umer Chapra lebih sistematis. Penulis memberikan masukan dan tambahan yang disesuaikan dengan konteks kekinian secara kontemporer.²⁶¹ Model atau rumusan tersebut kemudian

²⁶⁰ Ibnu Khaldun memformulasikan pemikirannya dalam bentuk nasehat kepada Sulthan. Kekuatan penguasa (al-mulk) tidak dapat diwujudkan kecuali dengan implementasi Syariah. Syariah tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh penguasa (al-mulk). Penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali dari masyarakat (ar-rijal). Masyarakat tidak dapat ditopang kecuali oleh kekayaan (al-maal). Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan (al-imarah). Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan (al-'adl). Keadilan merupakan standar (al-mizan) yang akan dievaluasi Allah pada umat-Nya dan Penguasa dibebankan dengan adanya tanggung-jawab untuk mewujudkan keadilan. Lihat: Umer Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 98-99.

²⁶¹ Lihat: Umer Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 182-183.

diformulasikan dalam bentuk variable-variabel sosial, ekonomi dan politik yang lebih terukur. Unsur-unsurnya antara lain: Implementasi Syariah (S), Penguasa negara/pemerintahan (G), Masyarakat/Sumber daya manusia (N), Kekayaan/Sumberdaya alam (W), Pembangunan (g) dan keadilan (j). variable-variabel tersebut bekerja secara dinamis, saling tergantung satu dengan yang lain, saling mempengaruhi.

$$G = f(S, N, W, g, j)$$

Persamaan ini menggambarkan bagaimana faktor-faktor politik, agama, sosial, dan ekonomi saling mempengaruhi selama kurun waktu tertentu sehingga faktor-faktor tersebut dapat menuntun suatu peradaban menuju pembangunan dan kemunduran atau kejayaan dan keruntuhan. Dalam jangka panjang persamaan ini tidak memiliki klausa *ceteris paribus*, karena dalam variabel tersebut tidak terdapat variabel yang konstan. Satu variabel bisa saja berfungsi sebagai mekanisme pemicu, tetapi variabel lain bisa bereaksi ataupun tidak, dalam arah yang sama. Dengan demikian, jika terdapat satu variabel yang gagal, dipastikan tidak akan mempengaruhi atau menyebar kepada variabel lainnya, karena variabel yang gagal tersebut bisa diperbaiki, dengan demikian jika terjadi kegagalan dalam pembangunan dimasyarakat, akan segera dapat teridentifikasi dengan cepat, sehingga segera bisa dibenahi dan diperbaiki, tetapi sebaliknya jika tidak segera diperbaiki, maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk diidentifikasi penyebab dan akibatnya.

Dua variabel penting dalam model dinamis ini adalah pembangunan (g) dan keadilan (j)²⁶². Pembangunan dianggap penting karena adanya kecenderungan dalam masyarakat yang memiliki tingkat kehidupan yang berubah-ubah, bisa meningkat dan dalam waktu tertentu bisa mengalami kemunduran. Pembangunan yang dimaksud adalah semua sistim pranata sosial dan manusia dalam masyarakat, jadi tidak hanya semata-mata pertumbuhan ekonomi. Pembangunan tersebut juga mengacu pada pembangunan manusia seutuhnya sehingga masing-masing variabel dalam model tersebut memperkaya satu dengan yang lain, semua variabel tersebut memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan atau kebahagiaan kepada seluruh masyarakat. Keseluruhan variabel tidak hanya

²⁶² : Umer Chapra, *The Fututre of Economics: an Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 180-181.

menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat tetapi juga kemajuan sebuah peradaban atau bangsa.²⁶³

Keadilan merupakan salah satu pilar yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam pandangan yang luas, mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia. Keadilan dalam perspektif yang luas tersebut akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat yang peduli terhadap persaudaraan dan persamaan sosial. Keadilan akan selalu terkelola dengan baik dengan adanya jaminan keselamatan jiwa, hak milik dan penghormatan bagi semua orang, pemenuhan kewajiban sosial, ekonomi dan politik, hak untuk bebas menentukan tindakan apa yang diinginkan oleh seseorang dan pencegahan terhadap kejahatan dan ketidakadilan dalam bentuk apapun.

Dalam mengelola perekonomian uang bukan bentuk sebenarnya dari kesejahteraan tetapi hanya alat dimana kesejahteraan akan diraih. Berkaitan tentang fungsi uang, menurutnya uang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai ukuran pertukaran (*standart of excange*) dan sebagai penyimpan nilai (*store of value*). Bagi beliau, dua logam yaitu emas dan perak, adalah ukuran nilai semua akumulasi modal. Karena logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang dimana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Oleh karena itu beliau mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter.

Chapra juga menyampaikan teori Ibnu Khaldun mengenai teori pertumbuhan berbasis akumulasi modal melalui usaha pekerja. Juga mengemukakan tentang relasi positif pengaruh struktur ekonomi terhadap pembangunan dan tentang pentingnya modal intelektual (*intellectual capital*) di dalam proses pertumbuhan. Beliau juga menguraikan tahapan pembangunan ekonomi, dari nomaden ke pertanian, ke perekonomian yang lebih maju dimana kota kecil tumbuh menjadi kota besar.²⁶⁴

Dalam analisis yang dikembangkan Chapra, pembangunan menurut Ibnu Khaldun dipengaruhi oleh peranan negara dan keberhasilan pembangunan tersebut ditentukan oleh wujudnya

²⁶³ : Umer Chapra, *The Fututre of Economics: an Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 181

²⁶⁴ Lihat: Umer Chapra, *The Fututre of Economics: an Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 180-181

keadilan.²⁶⁵ Artinya jika pembangunan itu tidak adil, maka pembangunan itu pada hakikatnya gagal dan ini menjurus pada kemunduran masyarakat dan negara. Beliau juga menekankan bahwa, pembangunan yang dijalankan harus sesuai dengan syari'ah. Pembangunan yang tidak berdasarkan syari'ah, adalah pembangunan yang materealialistis-kapitalistik dan salah. Menurutnya pembangunan juga harus ditopang oleh kemauan umat yang dilengkapi dengan tiga kapital utama, yaitu; *human capital*, *intelligent capital* dan *organization capital*.

Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa barang akan menjadi lebih berharga dengan diperdagangkan lintas negara karena kepuasan masyarakat, laba pedagang, dan kesejahteraan negara semuanya akan meningkat (*gains from trade*). Beliau juga menekankan peranan pembagian kerja internasional yang lebih didasarkan pada keterampilan penduduk dari masing-masing negara. Menurutnya pembagian kerja internasional tidak didasarkan pada sumber-sumber kekayaan alamnya.

Teori Ibnu Khaldun mengandung embrio dari teori perdagangan internasional, disertai suatu analisa tentang syarat pertukaran antara negara kaya dengan negara-negara miskin dan tentang kecenderungan alamiah untuk impor dan ekspor. Selain itu beliau juga memaparkan proses perkembangan kumulatif yang disebabkan oleh infrastruktur intelektual suatu negara. Dimana semakin berkembang suatu negara, semakin banyak modal dan organisasi infrastruktur intelektualnya. Karena orang-orang yang terampil ditarik oleh infrastruktur ini dan datang untuk hidup dalam negeri ini. Hal inilah yang kemudian menjelaskan suatu proses kumulatif yang menjadikan negeri-negeri kaya semakin kaya dan negeri miskin bertambah miskin.²⁶⁶

Menurut Ibnu Khaldun kesejahteraan atau kekayaan sebuah bangsa dipengaruhi oleh adanya pembangunan yang adil. Perwujudannya juga dipengaruhi oleh peranan negara dan masyarakat, serta tingkat pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai syari'ah dalam sebuah bangsa. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang dinegara tersebut.

²⁶⁵ Lihat: Umer Chapra, *The Fututre of Economics: an Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 181.

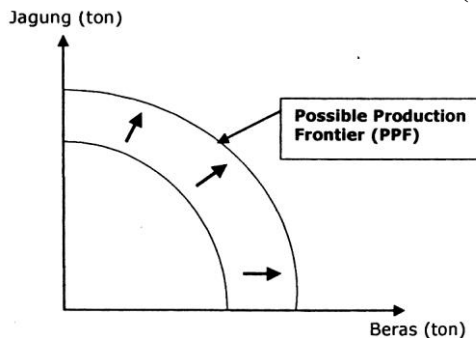
²⁶⁶ : Umer Chapra, *The Fututre of Economics: an Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 178-179.

Menurutnya, kekayaan negara ditentukan oleh dua hal: (1) Tingkat produksi domestik; dan (2) Neraca pembayaran yang positif dari negara tersebut.²⁶⁷

Pertama, tingkat produksi domestik. Dapat saja suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bila hal ini tidak merefleksikan pesatnya pertumbuhan sektor produksi (baik barang maupun jasa), maka uang yang melimpah itu tidak ada nilainya. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan perkerja, dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya.

Misalnya, orang memiliki pilihan untuk memproduksi dua jenis barang, yaitu beras dan jagung dengan sumber daya yang dimilikinya. Sumbu X menggambarkan kemampuan memproduksi beras sedangkan sumbu Y untuk jagung. Kurva possible production frontier (PPF) menggambarkan tingkat produksi maksimal yang mungkin dicapai dengan sumber daya yang dimiliki. Semakin besar PPF berarti seakin tinggi tingkat produksinya, sehingga semakin tinggi tingkat kekayaan negara tersebut.

Gambar 4.
Kurva Possible Production Frontier (PPF)



Kedua, neraca pembayaran yang positif. Ibnu Khaldun juga mengemukakan bahwa neraca pembayaran yang positif akan meningkatkan kekayaan negara tersebut. Hal ini disebabkan neraca pembayaran yang positif menggambarkan dua hal:

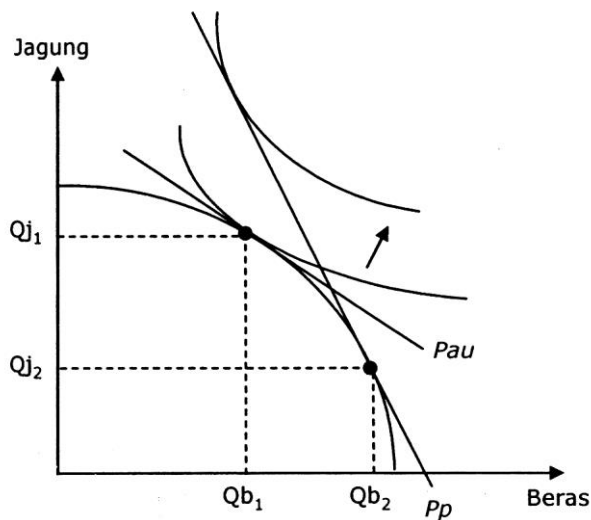
²⁶⁷ : Umer Chapra, *The Fututre of Economics: an Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 179.

- a. Tingkat produksi negara tersebut untuk suatu jenis komoditi lebih tinggi daripada tingkat permintaan domestik negara tersebut, atau supply lebih besar dibanding demand, sehingga memungkinkan negara tersebut melakukan ekspor.
- b. Tingkat efisiensi produksi negara tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi maka komoditi suatu negara mampu masuk ke negara lain dengan harga yang lebih kompetitif.

Dalam level makro bahasan tersebut adalah kemampuan produksi suatu negara sedangkan dalam level mikro bahasannya adalah kemampuan produksi suatu produsen. Secara grafis, pendapat Ibnu Khaldun ini dapat digambarkan dengan tingkat utilitas yang berada diluar PPF. Ini berarti negara yang melakukan perdagangan internasional akan menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan tidak melakukan perdagangan. Dalam ilmu ekonomi, konsep ini dikenal sebagai gains from trade. Tanpa adanya perdagangan, maka tingkat kesejahteraan tertinggi dicapai kurva utilitas bersinggungan dengan PPF, yaitu pada titik autarky (titik memenuhi kebutuhan sendiri). Sedangkan dengan adanya perdagangan akan mendorong kurva utilitas ke tingkat yang lebih tinggi yang tidak mungkin dicapai oleh PPF.

Pada titik autarky, relative price antara beras dan jagung digambarkan oleh garis harga (price line) P_0 . Ketika produsen tersebut mempunyai tingkat efisiensi yang relatif lebih tinggi dalam memproduksi beras lebih tinggi dari produsen lain, maka ia akan mengalokasikan lebih banyak sumberdaya untuk memproduksi beras, sehingga jumlah beras yang diproduksi naik menjadi Q_2 , dan jumlah jagung yang diproduksinya turun menjadi Q_1 . Kelebihan beras tersebut diperdagangkan dengan harga yang berlaku yaitu P . Dengan price line yang baru tersebut, produsen dapat menaikkan utilitasnya.

Gambar 5.
Kurva Neraca Pembayaran yang Positif



g. Potensi Zakat Dalam Pembangunan

Merujuk berbagai literatur tentang sejarah pengelolaan dana sosial keagamaan berdasarkan ajaran Islam, dapat diketahui bahwa model pengelolaan zakat bersifat dinamis mengikuti perkembangan dan tuntutan peradaban dengan berlandaskan syar'i. Model pengelolaan zakat yang dipraktikkan di negara-negara berpenduduk muslim hingga kini setidaknya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu (a) negara tidak menginstitutionalkan zakat. (b) negara memfasilitasi pengelolaan dan pendistribusian zakat. (c) negara memungut zakat sebagai pajak.²⁶⁸

Pertama, negara tidak menginstitutionalkan zakat, pada kelompok pertama ini, negara tidak mengatur tentang pengelolaan zakat termasuk juga mekanisme pendistribusian. Pada negara-negara yang tidak menginstitutionalisasikan zakat secara formal, pengelolaan secara independen, dan terdesentralisasi. Menurut Powell, dari 40 negara

²⁶⁸ Azyumardi Azra, "Negara dan Pengelolaan Zakat". *Republika*, 30 April 2010

berpenduduk mayoritas beragama Islam, sebanyak 24 negara tidak mengatur mengenai pengelolaan zakat di dalam sistem hukum mereka (legal system).²⁶⁹

Beberapa contoh negara tersebut adalah Oman, Qatar, dan Turki. Oman dan Qatar tidak menginstitusionalisasi zakat dan hanya memiliki sebuah lembaga zakat (zakat fund) yang memungut dan mengelola zakat Turki sebagaimana diketahui memang dalam sejarahnya memisahkan antara urusan agama dengan negara menganut sistem sekuler.²⁷⁰ Terdapat kenyataan yang menarik dari Turki, yaitu berdasarkan hasil studi yang dilakukan pada tahun 2004, masyarakat Turki yang membayar zakat mencapai 69% dan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan masyarakat Pakistan yang melembagakan zakat yang hanya sebesar 60%.

Kedua, negara memfasilitasi pengelolaan dan pendistribusian zakat (Voluntary System) Pada model kedua ini terdapat variasi tingkatan keterlibatan dan pengawasan dari pemerintah dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Pada negara Mesir, pengelolaan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh lembaga keuangan yang bernama Bank Sosial Nasser (Nasser Social Bank/ NSB), yang memiliki departemen zakat. NSB bekerja sama dengan para komite lokal dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. NSB melaporkan seluruh kegiatannya kepada Kementerian Jaminan dan Urusan Sosial. Negara-negara seperti Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Libanon, Bangladesh, dan Oman memiliki sebuah lembaga zakat (Zakat Fund) yang bersifat independen namun berada di bawah

²⁶⁹ Powell menganalisa sistem pengelolaan zakat dari sudut legal system pada negara-negara muslim yang dibagi menjadi tiga kategori: 1) negara yang tidak menginstitusikan zakat; 2) negara yang membuat peraturan untuk membentuk sistem voluntir dalam mengelola dan mendistribusikan zakat; dan 3) negara yang memberlakukan zakat sebagai pajak. Russel Powell, "Zakat: Drawing Insight for Legal Theory and Economic Policy From Islamic Jurisprudence". *Tax review*, 2009 (University of Pittsburgh)

²⁷⁰ Negara-negara tersebut adalah Afghanistan, Algeria, Azerbaijan, Burkina Faso, Chad, Guinea, Iraq, Kazakhstan, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Nigeria, Oman, Qatar, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Syria, Tajkistan, Gambia, Tunisia, Turki, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Khusus untuk Afghanistan dan Iraq tidak menginstitusikan zakat, diduga karena kedua negara tersebut diinvasi AS pada tahun 2001 sehingga sempat terjadi kevakuman pemerintahan. Lihat: Russel Powell, "Zakat: Drawing Insight for Legal Theory and Economic Policy From Islamic Jurisprudence,16.

otoritas Kementerian yang berwenang menangani Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF)²⁷¹.

Pada negara-negara tersebut, pembayaran zakat dapat mengurangi kewajiban pembayaran zakat profesi (deductible from income tax). Apabila dilihat dari sudut pandang hukum (legal system), Malaysia dan Indonesia dapat dimasukkan ke dalam kategori model kedua. Namun berbeda dengan negara-negara Islam lainnya, Malaysia dan Indonesia memiliki beberapa karakteristik khusus terkait manajemen pengelolaan zakat. Malaysia sejak tahun 1991 telah melaksanakan pengelolaan zakat dengan sistem korporasi, jadi pusat pungutan zakat (PPZ) bersifat seperti badan usaha yang bersifat independen namun tetap di bawah koordinasi Majelis Agama Islam yang bertanggungjawab langsung ke Perdana Menteri. Sedangkan di Indonesia, salah satu karakteristik tersebut adalah bahwa masih dilibatkannya peran masyarakat di dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, seperti pengelolaan berbasis korporasi, termasuk diantaranya penyaluran langsung kepada individu-individu. Adanya Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah, juga memberi ruang kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengelola dan memberdayakan zakat dari masyarakat. Jadi, adanya peran pemerintah tidak serta merta mematikan peran masyarakat dalam rangka pengelolaan zakat.

Ketiga, negara mewajibkan zakat (Mandatory System) Pengelolaan zakat pada negara yang mewajibkan zakat, menempatkan zakat sebagai pajak warga negara dalam rangka pembangunan.²⁷² Standarisasi dari model ini berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, walaupun semua negara sepakat bahwa dasar pijakan sebagai legitimasi adalah didasarkan dari fiqh. Berdasarkan sirah (sejarah) Islam, pemungutan zakat sebagai sesuatu hal yang memaksa dimulai pada zaman Abu Bakar bin As-Shiddiq, kemudian dilanjutkan dan dipertegas pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab.

Pada zaman Umar, luas wilayah kekhalifahan Islam sudah mencapai Yaman, dan semua hasil pengumpulan zakat yang tersisa

²⁷¹ . Lihat: Russel Powell, "Zakat: Drawing Insight for Legal Theory and Economic Policy From Islamic Jurisprudence, 16.

²⁷² . Lihat: Russel Powell, "Zakat: Drawing Insight for Legal Theory and Economic Policy From Islamic Jurisprudence, 19.

setelah didistribusikan akan dikumpulkan kembali ke Baitul Maal. Pada zaman Umar juga diperkenalkan sistem jizyah (pajak) bagi non muslim sebagai pengganti zakat. Negara-negara muslim yang mempraktikkan model ketiga ini adalah Kerajaan Saudi Arabia, Pakistan, Libya, Sudan, dan Yaman. Pada negara-negara tersebut, persoalan manajemen zakat diatur di dalam konstitusi negara. Kerajaan Saudi Arabia mengatur pengelolaan zakat didalam konstitusi. Para pembayar zakat harus mengisi sejenis formulir yang menunjukkan barang-barang kena zakat seperti harta benda, properti, uang, dan hasil laba dari perniagaan, dan nantinya petugas zakat akan mengumumkan berapa besaran yang harus dibayarkan. Kerajaan Saudi merupakan contoh negara yang memiliki pengaturan yang sistematis seperti halnya pada negara-negara maju dalam hal memungut pajak pendapatan dari para warga negaranya.

Keempat, Malaysia sebelum tahun 1991, Majelis Agama Islam (MAI) merupakan penanggung jawab dalam hal pengelolaan zakat pada 13 negara bagian dan wilayah federal (Kuala Lumpur dan Labuan). Namun terjadi perubahan semenjak tahun 1991, yaitu dengan dibentuk lembaga zakat yang beroperasi dengan mengadopsi cara korporasi, yang dikenal dengan nama Pusat Pengumpul Zakat (PPZ) wilayah Federal yang pertama kali di bentuk di Kuala Lumpur. Pendekatan baru tersebut membawa dampak positif terhadap kenaikan jumlah zakat yang terkumpul setiap tahunnya. Pembentukan PPZ di wilayah Federal, kemudian diikuti oleh negara-negara bagian lain seperti Penang, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, dan Malaka. Keenam negara-negara bagian lain seperti Kedah, Perlis, Kelantan, Trengganu, Perak, dan Johor masih menggunakan cara-cara konvensional. Misalnya, Negara Bagian Kedah pengelolaan zakat dilakukan oleh Departemen Zakat dibawah supervisi langsung dari Sultan.

Negara Malaysia telah melakukan terobosan dengan membuat pusat-pusat pengumpulan zakat di setiap negara bagian dan pengelolaannya dilakukan secara korporat dan profesional. Negara Federal melalui MAI yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri hanya bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pengelolaan zakat yang telah dilakukan oleh pusat-pusat pengumpul zakat pada setiap negara bagian.

Pengelolaan zakat di Indonesia, berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dibentuk Badan Amil Zakat (BAZ)

oleh negara dalam hal ini pemerintah pada tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Dilain pihak, terdapat pula Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat, yang juga memiliki fungsi mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Saat ini, sedang dibuat revisi terhadap undang-undang tentang pengelolaan zakat tersebut, namun LAZ nantinya hanya sebagai unit pengumpul zakat yang terintegrasi secara institusional dengan BAZ milik pemerintah.

Dengan melihat kondisi tersebut, model yang ideal untuk Indonesia adalah bahwa negara memfasilitasi pengelolaan zakat namun tidak mewajibkan zakat kepada setiap warga negara, serta tidak dikelola dan didistribusikan oleh negara. Hal tersebut dikarenakan, secara historis Indonesia berbeda dengan negara-negara berpenduduk muslim lainnya. Negara-negara muslim di negara jazirah Arab tidak mengenal lembaga-lembaga keagamaan yang secara independen mengelola dana zakat. Dana-dana dari kegiatan filantropis terutama yang berbasis keagamaan menjadi salah satu faktor yang menyubur kembangkan berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Masjid-masjid, organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama (NU), serta lembaga pendidikan berbasis Islam di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang tanpa bantuan pemerintah salah satunya dibiayai melalui kontribusi zakat. Demikian pula panti asuhan anak yatim dan organisasi relawan sosial, mereka dapat survive dengan hasil pembayaran zakat. Perlu menjadi catatan juga bahwa LAZ yang telah tumbuh dan berkembang di Indonesia, beroperasi secara profesional. LAZ seperti Dompot Dhuafa, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Rumah Zakat telah melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam rangka meningkatkan fundraising kepada para muzakki (pemberi zakat), diantaranya dengan meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dilakukan secara transparan.

Perlu diupayakan agar terjadi sinergi antara negara dengan masyarakat. Selain itu, persoalan membayar zakat merupakan hal yang bersifat wajib dan untuk itu harus ada unsur pemaksaan, seharusnya saat ini yang lebih difokuskan adalah pada upaya edukasi kepada masyarakat akan urgensi zakat, serta kontribusinya terhadap perbaikan kesejahteraan umat. Apabila saat ini sudah ada upaya edukasi tersebut, barangkali harus lebih dibuat suatu sistem agar upaya tersebut lebih bersifat terpadu, terkoordinasi, dan merata di seluruh wilayah

nusantara, dan bukan parsial hanya menampilkan organisasi-organisasi tertentu saja.

Dari beberapa lembaga yang telah melakukan survey mengenai potensi zakat, terdapat beberapa potensi pendapatan zakat yang dihimpun oleh negara. Hasil survei PIRAC (2004), potensi Zakat di Indonesia sebesar 6,132 triliun rupiah. Survei ini dilakukan PIRAC sebagai up date data tahun 2000. survei tahun 2000 mencakup Zakat fitrah dan Zakat maal (harta). Sedangkan survei tahun 2004 ini hanya dilakukan survei untuk Zakat maal saja, tanpa menggabungkan dengan Zakat fitrah. Hasil survei menunjukkan bahwa dari total responden (1.936 orang), yang merasa dirinya sebagai muzakki sebesar 49,8 persen, tetapi ada sebesar 7,5 persennya tidak membayarkan Zakatnya. Rata-rata Zakat sebesar Rp. 416.400/ muzakki/tahun. Potensi Zakat yang dapat dihimpun untuk tahun 2004 mencapai 49,8 persen (jumlah muzakki) x 92,5% (yang membayar Zakat) x 32.000.000 (keluarga sejahtera) x Rp. 416.400/muzakki/tahun = Rp. 6,132 triliun. Namun kalau dilihat dari pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner, besaran ini hanya sebagai kesediaan masyarakat untuk berZakat, bukan berdasarkan kepada perhitungan yang sebenarnya dari besaran Zakat yang wajib dikeluarkan oleh para muzakki.

Perhitungan potensi Zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Republika sebesar Rp. 5,1 triliun dengan perhitungan $2,5\% \times 30.000.000 \text{ KK} \times 85 \text{ gram emas} \times \text{Rp. } 80.000$. perhitungan ini merupakan potensi minimal Zakat yang dapat diperoleh dari muzakki, karena setiap keluarga muzakki disamaratakan hartanya hanya sebesar $85 \times \text{Rp. } 80.000$ atau Rp. 6.800.000/tahun.

Dari hasil penelitian Indrajatiningrum (2004), dimana data yang digunakan adalah data penghasilan pekerja yang telah ada. Demikian pula untuk menentukan jumlah penghasilan tenaga kerja yang memiliki penghasilan kurang dari nishab (Rp. 1.460.000) dan yang lebih besar dari nishab digunakan melalui pendekatan yang sama. Potensi Zakat penghasilan/profesi ini untuk menjadi sumber pembangunan sangat potensial. Sebagai perbandingan tahun 2004 total pembiayaan untuk pembangunan pada sub sektor kesejahteraan sosial sebesar Rp. 1,7 triliun, dan sub sektor kesehatan sebesar Rp. 5,3 triliun. Dengan potensi Zakat yang relatif besar yang dapat digali dari masyarakat diharapkan akan memberikan kontribusi dalam pembangunan khususnya pembangunan yang dapat dilakukan dalam koridor 8 asnaf yang berhak atas dana Zakat (lihat Indrajatiningrum, hal. 11, 2004). Jika dibandingkan antara realisasi Zakat yang terhimpun pada berbagai

lembaga penghimpun Zakat dengan potensi Zakat profesi, ternyata realisasinya hanya sebesar 1,6 persen dari potensi.

Selanjutnya, dari penelitian lain yang juga mengulas tentang potensi Zakat profesi yang dilakukan oleh Fatah (2005) dengan studi kasus pada lembaga Amil Zakat Baituzzakah Pertamina (BAZMA) mengungkap realitas yang hampir sama, yakni terjadinya kesenjangan yang cukup signifikan antara potensi dan realisasi pengumpulan Zakat. Dari hasil penelitian Fatah (hal. 65, 2005) diungkap bahwa data karyawan Pertamina pada tahun 2005 berjumlah sekitar 3000 orang. Akan tetapi, mereka yang membayar Zakat profesi di BAZMA hanya sekitar 21%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi Zakat di lingkungan Pertamina sekitar 7 milyar, akan tetapi dana yang terkumpul hanya sekitar 1,5 miliar tiap tahunnya.

Dari kenyataan di atas nampak bahwa Pertamina merupakan perusahaan yang berpeluang besar untuk memberikan sumbangsih dalam memberdayakan ekonomi umat lewat program Zakatnya, dan akan lebih sempurna sumbangsinya apabila potensi yang ada dapat terealisasi. Karyawan muslim Pertamina saat ini yang menyalurkan Zakat profesinya di lembaga-lembaga lain dan bahkan, ada pula yang belum/tidak mengeluarkan Zakat profesi terlepas dari pemahaman ataupun keingkaran umat atas hal tersebut. Dari hasil penelitian selama ini menunjukkan bahwa responden yang membayar Zakat profesi di BAZMA Pertamina sebesar 40 persen, dan mereka yang membayar di LAZ lain sekitar 24 persen, sedangkan mereka yang tidak membayar Zakat profesi sama sekali 36 persen.

Jika ditinjau dari besaran dana Zakat yang terkumpul dalam setiap bulannya, tampak bahwa dana Zakat yang terkumpul di BAZMA tiap bulannya pun sangat fluktuatif. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya karyawan pertamina yang mengalami mutasi ke daerah dan ada pula yang dipensiunkan, sehingga mereka memutuskan untuk tidak lagi mengeluarkan Zakat profesi di BAZMA. Akan tetapi ada kemungkinan pula jika naik turunnya dana yang terhimpun disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Namun harus diakui terdapat peningkatan cukup signifikan dari perolehan filantropi Islam. Berdasarkan hasil penelitian, tercatat perolehan sebesar Rp. 1, 2 triliun pada tahun 2009, meningkat jauh jika dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya mencapai Rp. 400 miliar. Di sisi lain, angka perolehan 2009 juga menunjukkan belum maksimalnya pengumpulan dana zakat, mengingat gap yang masih besar dengan potensi zakat yang sebesar 19, 3 triliun.

Islam melarang umatnya menimbun harta dan atau membiarkannya tidak produktif. Harta harus senantiasa berputar agar memberikan kemaslahatan lebih bagi pemiliknya sendiri, bagi orang lain maupun lingkungannya. Dengan demikian harta tersebut tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya saja, seperti diperintahkan dalam surat Hasyr ayat 7.

Zakat yang diwajibkan dalam Islam sebenarnya memiliki fungsi salah satunya adalah sebagai instrumen untuk mendorong bahkan bisa digunakan untuk memaksa seseorang untuk menjadikan hartanya agar senantiasa produktif. Apabila seseorang memiliki harta (aset) yang produktif tetapi tidak diproduktifkan atau dibiarkan menganggur maka aset tersebut wajib dizakati, tetapi apabila aset tersebut produktif maka yang dizakati adalah hasil yang diperoleh dari produktivitas aset tersebut. Dengan demikian apabila suatu aset itu tidak produktif maka nilainya semakin lama semakin menyusut, karena secara terus menerus tergerus oleh zakatnya sehingga suatu saat aset tersebut akan habis dimakan oleh zakatnya.

Zakat pada harta yang produktif tetapi tidak diproduktifkan akan mendorong bagi pemiliknya untuk memproduktifkannya apabila tidak ingin hartanya habis dimakan zakatnya. Di sisi lain zakat tersebut akan membuat perekonomian berputar. Dengan berputarnya aset dalam perekonomian maka akan meningkatkan; output (perkembangan dan pertumbuhan ekonomi), penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain zakat dapat digunakan untuk mengendalikan dan mendorong perekonomian.

Zakat memiliki arti tumbuh, maka harta yang dikeluarkan zakatnya secara mikro akan tumbuh dan secara makro ekonomi akan dapat menumbuhkan ekonomi. Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi yang memiliki dampak pada dimensi akhirat dan dimensi dunia, tetapi dua dimensi tersebut tidak akan memiliki dampak yang berarti dalam perekonomian apabila pelaksanaannya tidak disatukan dengan aktivitas ekonomi. Misalnya zakat terhadap laba perusahaan tidak akan berdampak pada produksi jika pengeluaran zakat tidak disatukan dengan perencanaan kapasitas produksi atau omset perusahaan. Zakat memang dibayarkan apabila laba yang diperoleh mencapai nisab. Apabila labanya tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakat dan apa yang telah dibayarkan adalah sebagai infaq dan atau shadaqah.

Model perencanaan kapasitas produksi dalam ekonomi Islam harus mengakomodasi perencanaan Ziswaaq yang akan dikeluarkan berdampak memperbesar supply di pasar. Model perencanaan

kapasitas produksi yang demikian akan menjadi pembeda dengan ekonomi konvensional, karena Islam mengajarkan dalam setiap aktivitas kehidupan harus selalu menyeimbangkan antara keuntungan (kebahagian) akhirat tanpa mengabaikan keuntungan duniawi, seperti diperintahkan dalam surat Al Qashash ayat 77.

Implementasi surat Al Qashash ayat 77 dalam perencanaan produksi adalah dimulai dengan merencanakan berapa besar zakat yang akan dibayarkan dalam periode perencanaan itu. Setelah zakat yang akan dibayarkan telah ditentukan maka dapat diketahui berapa laba bersih yang seharusnya diperoleh kemudian dapat hitung berapa nilai dan volume penjualannya. Berdasarkan perencanaan nilai dan volume penjualan tersebut dapat direncanakan berapa kapasitas produksi yang harus diproduksi dalam periode perencanaan tersebut. Apabila model perencanaan kapasitas produksi memasukan unsur zakat maka kapasitas produksi akan menjadi lebih besar dari perencanaan yang tidak memasukan unsur rencana besarnya zakat yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Dengan demikian zakat akan dapat menumbuhkan ekonomi karena kapasitas outputnya meningkat. Penambahan kapasitas produksi sebesar zakat tersebut akan dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat (8 asnaf) maka penambahan kapasitas tersebut akan menurunkan biaya tetap perunit produk sehingga total biaya perunit juga akan menurun dan selanjutnya harga jual akan lebih rendah dibandingkan dengan produk yang tidak mengakomodasi zakat didalamnya. Penurunan total biaya perunit tersebut tentunya dengan asumsi kapasitas produksinya masih dalam kapasitas produksi normal. Apabila kapasitas produksi di atas normal maka total biayanya akan meningkat tetapi akan tetap lebih rendah daripada produksi yang tidak mengakomodasi unsur zakat.

h. Sistem Keuangan yang Berbasis Kepada Etika Moral

Serangkaian krisis yang dialami sistem keuangan internasional sepanjang dua dekade terakhir, telah memunculkan kesadaran baru akan kebutuhan reformasi arsitektur sistem keuangan internasional. Gagalnya sistem keuangan kapitalis dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dunia, telah memberikan angin segar bagi pengembangan sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam diharapkan mampu memberikan paradigma baru dalam pengelolaan sistem keuangan, sekaligus mendorong untuk terpenuhinya regulasi dan

supervisi yang prudensial pada industri keuangan. Kondisi inilah yang kemudian mendorong industri keuangan Islam dalam jumlah yang massiv bermunculan diseluruh penjuru dunia sepanjang 30 tahun terakhir, terutama dalam sektor perbankan.

Semua pakar yang mengembangkan dan terlibat dalam industri keuangan Islam, dilandasi oleh keyakinan bahwa bunga (interest) yang bersifat pre-determined telah mengeksploitasi perekonomian, mengakibatkan terjadinya misalokasi resources dan penumpukan kekayaan serta kekuasaan pada segelintir orang. Hal ini pada gilirannya berakibat pada ketidakadilan, inefficiency, dan ketidakstabilan perekonomian . Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya krisis yang terjadi sepanjang abad 20, dimana telah terjadi lebih dari 20 krisis (kesemuanya merupakan krisis sektor keuangan). Bunga bank yang mengedepankan mekanisme kredit (hutang) sebagai mekanisme pelaksanaannya telah membelenggu dunia terutama negara-negara berkembang dengan hutang (debt trap).

Sejumlah negara Muslim, dengan berbagai latar belakang sedang menjalankan langkah-langkah reformasi atas sistem perbankan dan keuangan mereka agar sesuai dengan ajaran Islam. Tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Muslim saat ini adalah bagaimana mendesain dan menjalankan secara berkelanjutan sistem perbankan dan keuangan yang sejalan dengan hakekat norma dan nilai moral dalam Islam, penghapusan riba, dan membantu mewujudkan tujuan sosial ekonomi yang lebih adil. Hal tersebut tidak mudah, mengingat lembaga kredit yang merupakan sistem perbankan dan keuangan kapitalis berbasis kepada bunga, telah relatif kokoh diterapkan oleh negara-negara Muslim selama dua abad terakhir. Kondisi tersebut berimplikasi buruk pada sistim ekonomi dan keuangan yang ada dinegara muslim tersebut.

Badai krisis dan pengalaman selama tiga puluh tahun terakhir dalam mengembangkan industri keuangan Islam, telah memberikan keyakinan tersendiri akan eksistensi dan keberlanjutan industri keuangan Islam dikemudian hari. Hal inilah diantaranya yang mendorong upaya untuk kembali membangun sistem keuangan dan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam.

Selain itu eksistensi perbankan dan keuangan syariah merupakan respon atas kerentanan sistem perekonomian, keuangan dan perbankan dunia dewasa ini. Sistem ekonomi saat ini membutuhkan arsitektur sistem perbankan dan keuangan yang kokoh dan tangguh.

Gerakan untuk mendirikan bank-bank dan lembaga keuangan syariah telah berkembang secara pesat dalam beberapa dekade terakhir.

Dalam konsepsi Islam semua jenis usaha dan aktifitas ekonomi dan keuangan harus sejalan dengan norma dan etika Islam. Dimana, bebas dari pengaruh ribawi (bunga). Hal inilah yang juga menjelaskan mengapa pada tahap awal bank Islam atau bank syariah juga dikenal sebagai bank bebas bunga. Meski demikian menggambarkan sistem perbankan Islam secara sederhana hanya “bebas bunga” tidak menghasilkan suatu gambaran yang benar atas sistem ini secara keseluruhan. Memang benar bahwa dalam perbankan Islam, melarang menerima dan membayar bunga menjadi inti (nucleus) dari sistem. Tetapi perbankan Islam idealnya juga didukung oleh prinsip-prinsip Islam seperti konsep; berbagi resiko, hak dan kewajiban individu, hak milik, akad (kontrak) dan kesucian.

Selain itu menginterpretasi sistem perbankan Islam hanya sebagai “bebas bunga” saja cenderung untuk memunculkan kebingungan. Padahal pondasi filosofis dari sistem keuangan Islam seharusnya secara utuh akan mempengaruhi seluruh interaksi faktor-faktor produksi dan perilaku ekonomi. Sistem perbankan Islam juga memberikan penekanan yang sama pada dimensi etis, moral, sosial, dan religius dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini juga dilandasi oleh ajaran Islam tentang berbagai konsep etika kerja, distribusi kekayaan, keadilan sosial dan ekonomi, dan peranan dari negara. Sistem perbankan Islam, seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup Islam, merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi Islam. Beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan Islam adalah :

- a. Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum (economic well-being with full employment and optimum rate of economic growth);
- b. Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (socio-economic justice and equitable distribution of income and wealth);
- c. Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil (stability in the value of money);

- d. Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil (mobilisation of savings);
- e. Pelayanan efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan (effective other services).

Mungkin ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa tujuan dan fungsi dari sistem keuangan dan perbankan Islam seperti yang diungkapkan di atas adalah sama dengan yang ada dalam kapitalisme. Walaupun nampak ada kesamaan, dalam kenyataannya terdapat perbedaan yang penting dalam hal penekanan, yang muncul dari perbedaan dua sistem tersebut dalam komitmennya terhadap nilai-nilai spiritual, keadilan sosial-ekonomi serta dalam persaudaraan sesama manusia.

Sistem perbankan Islam ditegakkan atas kemutlakan larangan dari pembayaran atau penerimaan setiap yang ditentukan (predetermined) atas pinjaman atau kredit. Dengan demikian konsep bunga (interest) atas hutang secara tegas dilarang. Sistem perbankan Islam lebih condong pada upaya untuk mendorong penerapan sharing resiko, mempromosikan kewirausahaan (entrepreneurship), melemahkan perilaku spekulatif, dan menekankan kesucian akad. Saluran permodalan yang mungkin bisa digunakan untuk masyarakat Islam dalam membuka usaha adalah; perusahaan perorangan (sole proprietorship), perusahaan patungan (partnership) (termasuk mudharabah dan syirkah) dan perusahaan perseroan (joint stock company). Koperasi juga dapat memainkan peranan penting dalam perekonomian Islam selama tidak menjalankan transaksi transaksi yang dilarang .

Untuk kasus Indonesia, pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami high growth. Berdasarkan laporan akhir tahun 2008, perkembangan perbankan syariah di Indonesia terjaga dengan dengan tingkat yang cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir mencapai 60% pertahun. Laju ekspansi volume usaha perbankan syariah menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 27,8% (yoy) ditahun 2006 menjadi 30,1% (per september 2007). Sementara itu total aset perbankan syariah di tahun 2007 hampir mencapai Rp 30 triliun atau sekitar 1,7 persen dari total aset perbankan nasional. Sementara jumlah industri perbankan syariah terdiri dari 3 Bank Umum Syariah

(BUS), 25 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 1053 layanan Syariah di 15 Bank .

Gambaran diatas menunjukkan bahwa potensi perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangatlah besar, namun potensi-potensi tersebut belum di-ekplorasi dan dikembangkan dengan baik dan maksimal. Apalagi dengan momentum krisis keuangan global yang melanda perbankan konvensional semakin dapat menjadi pemicu perkembangan perbankan syariah yang membanggakan.

Usaha optimalisasi pengembangan perbankan syariah harus terus dilakukan dengan beragam program. Diantaranya yaitu implementasi 6 pilar program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah Nasional 2008 yang dicanangkan Bank Indonesia, yaitu Pertama, penguatan kelembagaan perbankan syariah. Kedua, pengembangan produk & peningkatan layanan bank syariah. Ketiga, intensifikasi edukasi publik dan aliansi mitra strategis. Keempat, peningkatan peran pemerintah dan penguatan kerangka hukum bank syariah. Kelima, penguatan SDM bank Syariah. Keenam, Penguatan pengawasan Bank Syariah. Dengan berbagai asumsi dan upaya yang sungguh-sungguh untuk merealisasikannya dalam semangat program akselerasi, maka diharapkan di tahun 2008, pencapaian perbankan syariah sebesar 5% dari total perbankan nasional bisa dicapai.

Harapan ini, sejatinya bukan hanya semata namun setidaknya dapat menjadi motivator dan dinamisator seluruh stakeholder perbankan syariah agar senantiasa berikhtiar sekuat tenaga untuk mencapai hasil maksimal. Disamping langkah-langkah diatas, menurut hemat penulis terdapat beberapa hal penting lainnya yang patut mendapat perhatian khusus, untuk menjadikan perbankan syariah menjadi salah satu pilar ekonomi nasional, dan bisa memberikan solusi pembiayaan buat aktifitas ekonomi masyarakat, diantaranya adalah:

Pertama, strategi untuk mensosialisasi perbankan syariah. Strategi komunikasi harus lebih menonjolkan kekhasan bank syariah dari simbol-simbol yang bersifat segmented harus ditinggalkan karena masyarakat lebih menekankan kepada kekhasan bank syariah dari segi sistem dan core values nya. Selain itu, perbankan syariah di masa depan sudah harus mengemas komunikasi yang lebih menekankan pada aspek-aspek rasional dalam proses pengambilan keputusan pelanggan.

Sosialisasi juga harus dilakukan dengan menggunakan metode “jemput bola” ke kalangan masyarakat paling bawah (grassroot) yang memiliki potensi tinggi seperti sosialiasi ke kalangan pesantren-

pesantren, madrasah-madrasah dan pemuka masyarakat yang notabene mempunyai kekuatan menggerakkan kekuatan sipil masyarakat. Bahkan perbankan syariah juga sudah harus merubah mindset nya tidak hanya untuk masyarakat muslim saja tapi untuk seluruh masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Sehingga nantinya perkembangan jumlah rekening nasabah perbankan syariah bisa naik secara drastis dan signifikan. Sekedar informasi bahwa jumlah rekening perbankan syariah tahun 2007 hanya berjumlah 2,6 juta rekening. Ini sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah rekening perbankan nasional yang berjumlah 80 juta rekening

Kedua, revitalisasi sistem perbankan syariah yang belum Islami. Beberapa bank masih disinyalir berkutat pada sistem kapitalisme, walaupun baju yang mereka kenakan adalah baju Syariah. Ironis sekali memang, ketika seorang peneliti perbankan terheran-heran dengan ada mekanisme bank syariah yang masih mengacu kepada standar bunga (fluktuasi rupiah) dalam skema kreditnya. Selain itu, semua aspek operasional yang dijalankan benar-benar berlandaskan pada syariah. Hal ini penting dilakukan agar perbankan syariah benar-benar menjadi pilihan nasabah yang utama.

Ketiga, Inovasi Produk yang berbasis Kebutuhan Masyarakat. Selama ini, perbankan syariah seringkali menerbitkan produk-produk perbankan yang tidak dilandasi oleh kebutuhan real masyarakat (nasabah). Sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal dan sepi peminat. Seharusnya kalangan praktisi perbankan melakukan needs assessment terlebih dahulu mengenai produk-produk apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan nasabah. Jika ini dilakukan, bisa dipastikan bahwa produk yang digulirkan dapat diterima dengan antusias oleh masyarakat (nasabah).

Penulis yakin, jika seluruh program akselerasi dan pilihan prioritas program dijalankan dengan baik maka tidak mustahil julukan Indonesia sebagai “the Silent Giant from the East” dapat kita akui sebagai sebuah kekuatan yang nyata dan bukan sebatas utopia semata. Indonesia sangat berpeluang untuk menjadi succes story, pengembangan peran dan kontribusi lembaga keuangan syariah khususnya perbankan, terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu keyakinan dari seluruh stakeholder perbankan syariah untuk terus menjadikan bank syariah betul-betul menjadi bank terbaik pilihan masyarakat di tengah-tengah persaingan perbankan yang semakin kompetitif.

- a. Integrasi Industri Keuangan Syariah dalam sistem keuangan, atau bahkan transformasi sistem keuangan menjadi sistem keuangan syariah secara penuh, akan terus berlangsung pada tingkat kecepatan yang berbeda pada beberapa negara.
- b. Konsolidasi industri berdasarkan market-driven dan juga mandatory, khususnya melalui merger dan akuisisi, diharapkan terjadi pada bank-bank syariah yang berkapitalisasi kecil.
- c. Islamic capital markets diharapkan berkembang sejalan dengan perkembangan pasar keuangan secara umum dan saling mempengaruhi terhadap perkembangan sub-sektor keuangan syariah lainnya.
- d. Pemahaman dan kesadaran tentang keuangan syariah oleh masyarakat dan pemerintah diharapkan memperkuat permintaan dan penawaran jasa keuangan syariah.
- e. Keberlangsungan perkembangan industri keuangan syariah tergantung pada kepercayaan masyarakat, dimana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan shari'ah compliance serta pada kredibilitas lembaga dalam melaksanakan operasional keuangan syariah dunia.
- f. Industri Keuangan Syariah diposisikan bukan hanya untuk muslim saja; sangat memungkinkan untuk menarik nasabah dari kelompok keyakinan lain, sebagaimana fenomena di beberapa negara.
- g. Pengembangan produk untuk mobilisasi dana, manajemen likuiditas dan manajemen risiko cenderung memperoleh alur yang dinamis ketika institusi meningkatkan investasi untuk R&D sejalan meningkatnya volume industri dan sebagai respon terhadap cepatnya perubahan pengaturan dan lingkungan operasional akibat kompetisi usaha dan globalisasi jasa keuangan.
- h. Integrasi Industri Keuangan Syariah dalam sistem keuangan internasional secara umum dipengaruhi pula oleh kredibilitas dari kinerja lembaga IFSB, AAOIFI dan institusi standard setting lainnya. Selanjutnya, harmonisasi dari interpretasi Shari'ah dan interaksi yang sehat antara syariah dengan ketentuan hukum lainnya (seperti Common dan Civil Law) akan memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini.

B. Pola Transformasi Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Indonesia

Perekonomian Indonesia sesungguhnya telah memiliki fondasi yang sangat kuat. Para pendiri bangsa telah memikirkan dasar dan

fundamental ekonomi yang bisa menghadapi kondisi ekonomi jauh kedepan. Perekonomian nasional sudah dipersiapkan secara sungguh-sungguh untuk menghadapi globalisasi ekonomi, sistem ekonomi nasional juga tidak menolak interdependensi ekonomi internasional, sehingga kecil kemungkinan terjadinya dependensi ekonomi nasional terhadap ekonomi internasional, walaupun demikian pengaruh dan paham pemikiran ekonomi yang sudah menglobal tetap perlu diwaspadai dampak dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional. Perekonomian nasional diharapkan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian dunia yang sudah terintegrasi, dan mampu menjadi tuan rumah dinegerinya sendiri dengan memanfaatkan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki. Sehingga akan tercipta hubungan yang saling memperkuat satu dengan yang lain.

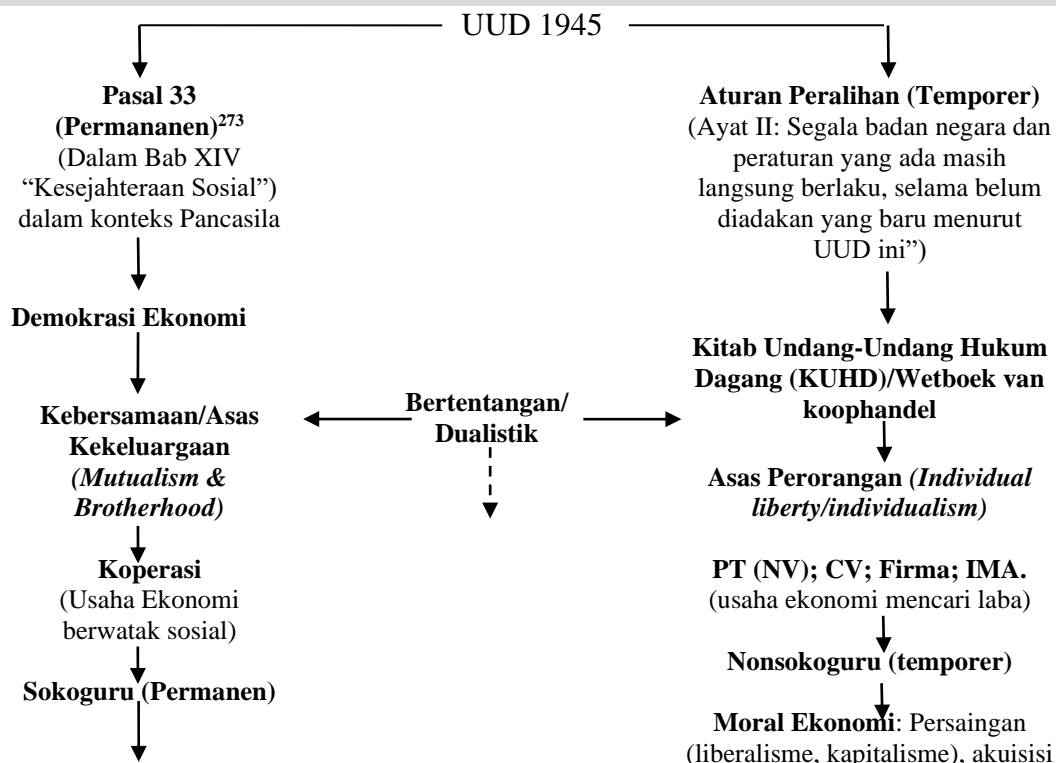
Bahkan semenjak awal kemerdekaan, Mohammad Hatta menegaskan ulang bahwa pembangunan perekonomian Indonesia yang kita hadapi adalah: Pertama, adalah soal ideologi. Bagaimana mengadakan susunan ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong. Kedua, adalah Soal praktik. Politik perekonomian apakah yang praktis dan perlu dijalankan dengan segera di masa datang ini. Ketiga, Soal koordinasi. Bagaimana mengatur pembangunan perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan bersambung dengan pembangunan di seluruh dunia.

Pandangan-pandangan tersebut, telah menunjukkan bahwa globalisasi telah sejak awal kemerdekaan diantisipasi oleh Mohammad Hatta, sejalan dengan tulisan-tulisannya sejak tahun 1934. Selain itu bagi Hatta, kemandirian bukan pengucilan diri, kemandirian bisa dalam wujud dinamikanya, yaitu interdependensi. Dalam interdependensi global dan ekonomi terbuka, perekonomian nasional tetap teguh mempertahankan prinsip independensi, yaitu bahwa dengan memberikan kesempatan pada bangsa asing menanam modalnya di Indonesia, namun kita sendirilah yang harus tetap menentukan syarat-syaratnya.

Dengan memiliki landasan dan dasar yang kuat tersebut, kita bisa menyusun sebuah pola yang sudah menjadi bagian dari perekonomian nasional. Pola akan membentuk sebuah transformasi ekonomi, kemudian diikuti dengan transformasi sosial budaya yang kemudian menghasilkan struktur dan sistem ekonomi Indonesia yang benar benar sesuai dan sejalan dengan landasan dan dasar perekonomian nasional yang sudah disusun oleh para pendiri bangsa. Pada bagan III dibawah ini terlihat bagaimana pola yang terbentuk

dalam proses transformasi ekonomi nasional, sangat berbeda dan bertolak belakang dengan apa yang sudah dijalankan selama ini

Bagan 5.2
Pola Transformasi Sosial – Ekonomi dan Sosial Budaya:
Struktur dan Sistem Ekonomi Indonesia



²⁷³ Ayat II Aturan Peralihan UUD 1945 menetapkan: “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Artinya Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan “asas kekeluargaan” berlaku bagi Indonesia sejak ditetapkan berlakunya UUD 1945, namun tetap masih berlaku pula peraturan perundangan kolonial, tak terkecuali KUHD (Wetboek van Koophandel) yang berasas perorangan (liberalisme). Pasal 33 UUD 1945 berlaku secara permanen, sedang KUHD sebagai akibat Aturan Peralihan UUD 1945 berlaku secara temporer (transisional). Mereka yang mau memahami kedudukan Pasal 33 UUD 1945 dan asas kekeluargaan hendaknya memahami kedudukan peraturan perundangan mengenai keekonomian dalam konteks Aturan Peralihan ini. Lihat: Sri Edi Swasono, *Kemandirian Ekonomi: Menghapus Ekonomi Subordinat, Membangun Ekonomi Rakyat*.

Moral Ekonomi:
 Kerjasama, nilai kegunaan, hajat hidup orang banyak/penting bagi negara (BUMN pendukung sistemik)

Motif Ekonomi:
 Manfaat/benefit sosial-ekonomi; societal welfare

↓

UU No. 12/1967 (UU Koperasi)
 Inpres No. 4/1948 (Inpres KUD/sapujagad)
 UU No. 25/1992 (UU Koperasi)

↓

UU No. 40/2004 (SJSN)

- Tugas Masa Transisi:
1. Membangun koperasi sebagai sokoguru
 2. Mendemokratisasikan/mem-pasal-33-kan KUHD (pemilikan saham perusahaan oleh koperasi; hubungan industrial pancasila)
 3. Merintis prinsip Triple-Co (Co-Ownership, Co-determination, Co-Responsibility)

↓

Menuju UU Pokok Perekonomian Nasional (UU tentang Demokrasi Ekonomi 10 butir titik-tolak: perekonomian disusun; usaha bersama; asas kekeluargaan; penting bagi negara; hajat hidup orang banyak; dikuasai oleh negara; bumi/air/kekayaan alam; sebesar-besar kemakmuran rakyat; kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang.

(free exit-free entry)

↓

Motif ekonomi: laba (profit); kepuasan ekonomi maksimal individual.

↓

UU No. 1/1967 (UU PMA)
 UU No. 14/1967 (UU Perbankan)
 UU No. 6/1968 (UU PMDN)
 UU No. 4/1971 (one share one vote)
 UU No. 1/1987 (UU Kadin)
 UU No. 7/1992 (UU Perbankan)
 UU No. 22/2001 (UU Migas)
 UU No. 25/2007
 UU No. 40/2007
 UU No. 30/2009

Tidak bisa dinafikan, keberadaan pasal 33 UUD 1945 telah menjadi dasar dari terbentuknya demokrasi ekonomi. Dalam penyusunan dasar-dasar perekonomian negara, para pendiri bangsa telah menjadikan pasal tersebut sebagai fondasi dasar yang kokoh, sehingga menjadi inspirasi dari konsep pembangunan ekonomi nasional. Dalam batang tubuh UUD 1945, Pasal 33 telah terintegrasikan menjadi satu kesatuan sebagai dasar negara. Karakteristik pasal 33 adalah pasal mengenai keekonomian yang berada pada bab XIV, dimana didalamnya menjelaskan mengenai kesejahteraan Sosial. Dimana, kesejahteraan dan keadilan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan bangsa.

Dengan menempatkan Pasal 33 UUD 1945 di bawah judul atau bab tentang kesejahteraan sosial, berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial, semua strategi dan kebijakan pembangunan haruslah diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat. Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan indikator dalam keberhasilan pembangunan, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi apalagi kemajuan pembangunan fisik semata, tetapi seluruh pranata-pranata sosial seperti, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya. Dalam pasal tersebut tergambar jiwa dan semangat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mulia dan memiliki peradaban yang luhur dan tinggi, dimana mengutamakan kepentingan bersama masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan individu orang-perorang. Selain itu pasal 33 juga merupakan pasal restrukturisasi ekonomi, pasal yang mengharuskan negara melakukan perubahan untuk mengatasi ketimpangan struktural ekonomi.

Dengan demikian, posisi yang menempatkannya sebagai payung yang menjadi inspirasi dan mengilhami terbentuknya demokrasi ekonomi. Pasal 33 UUD 1945 haruslah menjadi rujukan utama atau indikator dalam memulai menjalankan pola transformasi ekonomi. Isi yang terkandung dalam pasal 33 telah memberikan legitimasi yang sangat kuat bagaimana sesungguhnya perekonomian nasional dijalankan. Dalam ayat satu (1) pada pasal tersebut menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perkataan disusun bisa juga diartikan sebagai restrukturisasi sebagaimana yang diinginkan oleh para pendiri bangsa dalam cita-cita kemerdekaan.

Dengan demikian, perkataan disusun dalam konteks restrukturisasi ekonomi adalah melakukan perbaikan-perbaikan atau

perubahan-perubahan paham ekonomi kearah yang sesuai dengan dasar dan karakteristik bangsa. Restrukturisasi juga bisa diartikan sebagai perubahan mental menjadi yang lebih baik dan kokoh. Merubah paham ekonomi yang tidak sesuai dengan karakter dan dasar negara atau merubah mental bangsa terjajah oleh kolonial menjadi bangsa dengan kepercayaan diri dalam menyusun dan menciptakan perekonomian nasional yang kokoh dan tangguh, menghilangkan subordinasi ekonomi dan menggantinya dengan demokrasi ekonomi.

Dalam konsep demokrasi ekonomi yang telah dirumuskan diatas, telah melahirkan sebuah bentuk tatanan atau filosofi yang mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Paham kebersamaan dan asas kekeluargaan telah menjadi sebuah orde ekonomi dalam demokrasi ekonomi di Indonesia. Konsepsi ini sangat relevan dengan konsep ukhuwah yang menjadi salah satu dasar pemikiran ekonomi Islam. Tidak bisa dipungkiri nilai-nilai Islam telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia modern, nilai-nilai Islam juga telah menjadi inspirasi dalam menyusun dan mbingkai dasar-dasar negara, sehingga akan selalu sejalan dalam setiap perjalanan bangsa. Munculnya ekonomi Islam sebagai bagian dari ilmu ekonomi, harus menjadi bagian transformasi ekonomi dalam menyusun kembali paradigma dan asumsi dasar ilmu ekonomi. Dengan demikian nantinya Islam akan menjadi fondasi dan dasar yang kuat dalam penerapan demokrasi ekonomi.

Selain paham kebersamaan, yang juga menjadi ciri khas dari konsep ekonomi nasional adalah kekeluargaan, konsep ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah peradaban di tanah air. Konsep kekeluargaan dan persaudaraan yang menyatukan keanekaragaman suku bangsa. Sejalan dengan kebersamaan, konsep kekeluargaan juga menjadi bagian dari transformasi yang harus dilakukan, untuk mengembalikan arah perekonomian nasional ke jalan yang sebenarnya. Dalam pemahamannya pola yang terbentuk atas asas kekeluargaan ini bukanlah asas keluarga atau asas kekerabatan yang nepotistic, sering disalahartikan oleh sebagian kalangan, dan justru merusak struktur ekonomi. Kebersamaan dan kekeluargaan adalah asas ekonomi kolektif (*cooperativism*) yang disusun oleh para pendiri bangsa, karena ada kesesuaian dengan karakteristik dan nilai-nilai luhur bangsa. Asas kebersamaan dan kekeluargaan disusun sebagai lawan dari asas individualisme yang menjadi dasar sistem ekonomi kolonial yang dipelihara oleh *Wetboek van Koophandel* (KUHD).

Oleh sebab itu, dengan memperhatikan dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam dasar penyusunan konsep perekonomian nasional, tidak bisa dipungkiri bahwa “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan” adalah satu kesatuan, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, merupakan satu paket sistem ekonomi nasional, dalam rangka untuk untuk mentransformasi paham-paham ekonomi kolonial yang masih tersisa atau paham neoklasikal yang sudah merasuk kedalam kehidupan masyarakat menjadi paham dan konsep demokrasi ekonomi yang berkeadilan dalam bingkai ekonomi nasional, di mana partisipasi dalam kehidupan ekonomi harus pula disertai dengan emansipasi. Kebersamaan menjadi dasar bagi partisipasi dan asas kekeluargaan menjadi dasar bagi emansipasi. Tidak akan ada partisipasi tanpa adanya emansipasi.

Hal inilah yang kemudian diharapkan akan menjadi moral ekonomi bangsa, menjadi cerminan setiap kebijakan dan program ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat. Menjadikan setiap motif ekonomi memiliki nilai kemaslahatan bagi orang banyak, meningkatkan kesejahteraan seluruh elemen masyarakat. Motif ekonomi tersebut harusnya tercermin dalam setiap kebijakan yang diambil atau dijalankan oleh pemerintah mulai dalam bentuk undang-undang (UU), keputusan presiden (Kepres), hingga peraturan-peraturan yang terdapat di tingkat peraturan daerah (perda), dengan demikian akan terbentuk pola transformasi ekonomi yang sesuai dengan konsepsi dasar pembentukan demokrasi ekonomi nasional, yang mencita-citakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagan 5.3
Pasal 33 UUD 1945
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

Transformasi Ekonomi :

- Melaksanakan Demokrasi Ekonomi
- Melaksanakan Usaha Bersama (mutualism)
- Melaksanakan “Asas Kekeluargaan” (brotherhood)
- Menolak Asas Perorangan (menolak individualism/liberalisme)
- Mem-Pasal 33-kan KUHD kolonial

Transformasi Sosial :

- Membentuk hubungan ekonomi partisipatory-emansipatory
 - Membentuk kerjasama kemitraan non-subordinatif/non-exploatory/non-usurious
- “Triple-Co”**
(Co-ownership, Co-determination, Co-responsibility)

Transformasi Budaya



Pasal 27 (ayat 2) UUD 1945

“Tiap – tiap warganegara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”



Target Nasional Utama sesuai Konstitusi

Menciptakan lapangan pekerjaan; memberantas kemiskinan struktural/non struktural; empowerment menuju self-empowerment (mencerdaskan kehidupan bangsa); pertumbuhan ekonomi terkait langsung dengan penciptaan lapangan pekerjaan; mencegah impoverishment/disempowerment; mengkaji ulang trickle-down mechanism; melaksanakan prinsip growth through redistribution (menolak trade-off antara growth dan redistribution); bertitik tolak “let us take care of employment, employment will take care of growth”.



Sikap Budaya (Transformasi Budaya)

Pendidikan formal/informal: membentuk sikap mental bermartabat, maju dan positif; mendesain strategi pembaharuan budaya: entrepreneurial; hemat, tidak konsumtif; beretos kerja produktif; berorientasi teknologi; berorientasi efisiensi; menghargai waktu; melepas dependensi, disiplin, mandiri.

C. Strategi Penerapan Transformasi Ekonomi-Sosial

1. Kembali Kepada Demokrasi Ekonomi

Proses transformasi ekonomi dan sosial tidak bisa dilepaskan dari paham yang menjadi dasar terbentuknya ideologi dan cara pandang suatu bangsa terhadap dirinya dan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Darisanlah seharusnya bermula proses perbaikan dalam bentuk transformasi ekonomi dan sosial yang sudah sangat dipengaruhi oleh paham dan cara pandang yang sesungguhnya tidak sesuai dengan ideologi dan cara pandang sebuah bangsa. Sehingga mengakibatkan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi tidak sejalan dengan cita-cita perjuangan bangsa yang sudah sangat jelas tergambar dalam konstitusi sebuah negara.

Tidak terkecuali Indonesia, sebagai sebuah bangsa dan negara sejatinya Indonesia telah memiliki landasan dasar yang sangat fundamental dalam sejarah penyusunannya. Dasar dari penyusunan paham demokrasi ekonomi Indonesia tersebut adalah adanya paham kebersamaan dalam asas kekeluargaan (*mutualism and brotherhood*), tentu berbeda dari apa yang dikembangkan di Barat, dimana dasar pelaksanaan demokrasi ekonomi yang mereka anut adalah bersumber dari paham liberalisme dan individualism (*perfect individual liberty*). Hal ini menjadi modal dasar bagi perekonomian nasional, karena disusun dengan menggunakan pendekatan yang bersumber dari ciri khas yang terdapat dalam budaya dan keyakinan (Islam) yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia dalam bentuk *ukhuwah wathoniyah*. Kondisi tersebut menunjukkan betapa penyusunan konsep dasar demokrasi ekonomi Indonesia sudah sejalan dan sesuai dengan prinsip – prinsip keyakinan dan budaya bangsa Indonesai.

Kesejahteraan sosial yang dianut berdasarkan pada paham demokrasi ekonomi Indonesia, artinya dalam tataran ideologi tergambar bahwa, kemakmuran masyarakatlah yang paling utama, bukan atas dasar kepentingan individu atau kepentingan orang-seorang, kemakmuran bagi semua orang, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah arahan dan kepemimpinan serta penilikan anggota-anggota masyarakat. Dalam konteks demokrasi ekonomi, kesejahteraan sosial Indonesia haruslah berdasarkan kepada hak sosial rakyat, dimana tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemunusiaan.

Dengan demikian transformasi hendaknya dimulai dari sesuatu yang menjadi dasar dan fundamental sebuah negara yaitu dalam bentuk kembali kepada paham demokrasi yang dianut oleh sebuah negara dan tertuang dalam konstitusi negara. Demokrasi ekonomi bersumber dari nilai nilai luhur yang terdapat dalam paham keagamaan yang dianut

oleh masyarakat, budaya dan perilaku yang berkembang di masyarakat. Mengembalikan pemahaman demokrasi dalam konteks demokrasi ekonomi yang bersumber dari nilai nilai bangsa tersebut, haruslah dilakukan secara sistematis, terukur dan terarah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan bangsa.

Dari bagan dibawah ini akan sangat jelas terlihat perbedaan yang mendasar dari paham demokrasi yang dikenal di Barat dengan apa yang sudah disusun dan disepakati oleh para pemimpin Bangsa. Hal inilah yang harus menjadi titik tolak untuk kembali kepada jatidiri bangsa, karakter bangsa yang sesungguhnya

Bagan 5.4
Demokrasi
(Volkssouver einiteit/Kedaulatan Rakyat)

Paham Barat	Paham Indonesia
--------------------	------------------------

Dasar: paham liberalisme dan individualism (Perfect individual liberty)



Kepentingan individu adalah utama (kepentingan masyarakat tidak diabaikan- solidaritas altruism filantropis)



Negara terbentuk melalui kontrak sosial (vertrag) dari individu-individu bebas



Perwakilan: Semua dipilih
Decision Making: Voting



Dalam kehidupan ekonomi:
Daulat Pasar
Competitivsm
Berdasar paham liberalisme
neoliberalisme,
kapitalisme/neokapitalisme,
fundamentalisme pasar Smithian
(laissez-faire, invisible hand),
hobbesian homo-economicus.
Peran modal adalah sentral-substan sial,
one share-one vote
Hak milik: bersifat absolute (eigendom)
Demokratisasi : Privatisasi, liberalisasi



Adagium: Globalisasi kompetitif,
(fiksi) the end of nation states, the
borderless world, the end of history

Dasar: paham kebersamaan dalam asas kekeluargaan (mutualism dan brotherhood)



Kepentingan masyarakat yang utama, bukan kepentingan orang-seorang



Masyarakat ada sebagai given (manusia adalah makhluk sosial, homo-socius).
Masyarakat membentuk konsensus sosial antara anggota-anggotannya (gesamt-Akt).
Privacy is a societal license



Perwakilan: semua diwakili (Utusan Golongan/Utusan Daerah)
Decision making: musyawarah mufakat (Demokrasi Pancasila/consociational democracy)



Dalam kehidupan ekonomi:
Daulat rakyat
Cooperativism, concours, coepetition.
Berdasar paham demokrasi ekonomi,
(produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar –besar kemakmuran rakyat),
Homo-socius, homo-ethicus
Peran rakyat adalah sentral-substansial (bukan marginal-residual)
Hak milik: berfungsi sosial (meskipun hak warganegara orang seorang dihormati, tidak diabaikan secara semena mena).
Demokratisasi: perluasan distribusi asset, strukturalisme, triple-co (co-ownership, co-determination, co-responsibility)



Adagium: Globalisasi adil terkendali, utamakan kepentingan nasional tanpa abaikan tanggung jawab global, jalan lurus pancasila (ekonomi konstitusi)

Sumber: Sri Edi Sri-Edi Swasono

Bagan diatas telah memberikan rumusan penting dalam memulai melakukan transformasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang dipahami oleh bangsa Indonesai memiliki beberapa cirri dan karakter yang tidak terdapat dalam demokrasi ekonomi yang ada dan

berkembang di Barat. Pertama, demokrasi ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesai telah menempatkan kedaulatan rakyat sebagai tujuan utama, semua aktivitas dan kebijakan ekonomi yang diambil haruslah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Kedua, peran rakyat dalam perekonomian sangat sentral-substansial, artinya rakyat mendapatkan porsi utama dalam menjalankan sekaligus mendapatkan manfaat dalam perekonomian.

Berbeda dengan paham kapitalisme, yang mengusung modal sebagai sentral substansial. Ketiga, hak milik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang public, artinya lebih banyak difungsikan untyuk kebutuhan sosial. Walaupun demikian hak pribadi warga negara orang seorang harus tetap dihormati dan tidak diabaikan secara semena-mena. Dalam hal kepemilikan asset, dalam demokrasi ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga tetap bisa melakukan perluasan distribusi asset. Selain itu diberlakukannya konsep Triple-Co, Co-Ownership yaitu kepemilikan bersama, Co-determination yaitu maju dan berkembang secara bersama-sama, dan Co-responsibility yaitu tanggung jawab yang dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian Setiap usaha ekonomi harus dapat meningkatkan pemilikan bu-kan sekadar meningkat-kan pendapatan masyarakat secara merata.

2. Restrukturisasi Ekonomi.

Restrukturisasi ekonomi menjadi salah satu strategi yang bisa digunakan untuk mengawal proses transformasi ekonomi dan sosial yang sedang dilakukan. Restrukturisasi ini dilakukan untuk mengkoreksi kebijakan dan arah pembangunan ekonomi yang selama ini sangat dipengaruhi oleh paham neoklasikan dan liberalisme ekonomi, sehingga perekonomian nasional telah tercerabut dari akarnya. Restrukturisasi ini juga ingin memperbaiki ketimpangan – ketimpangan struktural yang diakibatkan oleh kekeliruan dalam menjalankan kebijakan ekonomi. Adapun restrukturisasi ekonomi yang harus dilakukan antara lain:

Pertama, restrukturisasi pemilikan dan penguasaan aset ekonomi. Restrukturisasi ini harus mampu mengembalikan hak kepemilikan dan penguasaan asset ekonomi kepada masyarakat. Pemilikan dan penguasaan asset ekonomi tidak boleh hanya dilakukan oleh segelintir orang saja, sehingga akan menimbulkan kesenjangan dalam perekonomian. Setiap kebijakan dan ekspansi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta haruslah mengarah kepada

peningkatan kepemilikan oleh masyarakat, bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan. Reformasi agraria yang dicanangkan oleh pemerintah harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dalam rangka mengembalikan kejayaan ekonomi masyarakat. Walaupun proses restrukturisasi ini akan memiliki pengaruh bagi sekelompok masyarakat yang telah merasa nyaman dengan kondisi yang ada, hendaknya tetap dilakukan dengan cara-cara yang elegan dengan tidak melakukan pemaksaan atau perampasan, yang akan berdampak terhadap keamanan dan ketentraman masyarakat.

Kedua, restrukturisasi alokatif. Restrukturisasi ini sangat terkait dengan kebijakan alokasi pendanaan pembangunan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Selain itu juga komitmen dan kesungguhan dunia perbankan dalam menyalurkan danannya untuk pembangunan. Dalam APBN proporsi belanja ke daerah masih sekitar tiga puluh persen jika dibandingkan dengan belanja yang digunakan oleh pusat. Dengan proporsi yang masih sangat timpang alokasi anggaran untuk daerah, diharapkan kedepan fokus dan porsi pembangunan akan lebih banyak dipusatkan di daerah, sehingga ketimpangan struktural yang diciptakan oleh kebijakan ekonomi masa lampau bisa diatasi.

Ketiga, restrukturisasi spasial (spatial). Tidak bisa dipungkiri pembangunan ekonomi yang telah dilakukan selama ini, telah menimbulkan jarak yang sangat lebar antar individu dan antar kawasan di Indonesia. Ketimpangan antara kawasan Barat dan Timur, perbedaan yang mencolok antara wilayah di pulau Jawa dan diluar pulau Jawa, kesemuanya telah memicu terciptanya ketimpangan ekonomi dan sosial yang bisa mengancam integrasi nasional (disintegrasi). Restrukturisasi ini menjadi sangat strategis dan diperlukan antara lain untuk mencapai pemerataan dan keseimbangan pembangunan serta pertumbuhan antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia, antara Jawa dan luar Jawa, antara perkotaan dan perdesaan, dan seterusnya. Konsep Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional (MP3EN) yang baru ini dicanangkan oleh pemerintah, walaupun dirasa terlambat tetapi diharapkan mampu segera mempercepat pembangunan diseluruh wilayah yang masih memiliki ketimpangan struktural yang cukup besar.

Keempat, restrukturisasi sektoral. Restrukturisasi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsep transformasi ekonomi dan sosial. Karena kebijakan sektoral yang keliru akan menyebabkan

ketimpangan struktural akan tercipta. Cara pandang paham neoklasikal yang menggunakan pendekatan mekanisme pasar dan persaingan bebas, telah menyebabkan sektor-sektor yang berbasis tradisional terpinggirkan. Oleh sebab itu, restrukturisasi sektoral menjadi hal yang sangat diperlukan terutama untuk mencapai keseimbangan dinamis antara sektor industri dan sektor pertanian, antara sektor formal-modern dan sektor informal-tradisional, antara sektor-sektor yang grassroots-based dan yang non grassroots-based, menuju kukuhnya perekonomian nasional. Salah satu strateginya adalah mengembalikan peran dan fungsi koperasi, dengan memperkuat kelembagaan koperasi, sehingga bisa menjembatani permasalahan struktur ekonomi di masyarakat.

Kelima, restrukturisasi perpajakan. Restrukturisasi perpajakan haruslah bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, karena pajak merupakan bentuk lain daripada insentif dan disinsentif bagi masyarakat. Hal yang harus dihindari dalam restrukturisasi perpajakan adalah, pajak menjadi beban bagi masyarakat sehingga menyebabkan terganggunya produktifitas masyarakat, khususnya masyarakat yang bergerak dibidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selain berperan sebagai sumber penerimaan negara, pajak adalah sarana redistribusi. Pada dasarnya pajak harus progresif untuk mempersempit kesenjangan. Khususnya terhadap kekayaan dan pemilikan barang mewah harus dikenakan pajak kekayaan secara progresif. Sebaliknya terhadap kelompok miskin yang memerlukan pemberdayaan diberikan subsidi atau proteksi. Pajak merupakan insentif untuk kegiatan produktif dan disinsentif terhadap konsumsi mewah. Dana yang terhimpun dalam perpajakan haruslah mampu dialokasikan sebesar besarnya bagi kepentingan publik, sehingga semua elemen masyarakat bisa mengakses dan menikmati fasilitas publik tersebut, tanpa terkecuali.

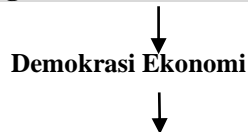
Keenam, restrukturisasi kebijakan ekonomi: Tidak bisa dipungkiri selama ini banyak kebijakan ekonomi yang justru menghasilkan ekonomi biaya tinggi, tidak efisien dan tidak mendukung penciptaan kemandirian ekonomi. Kebijakan – kebijakan tersebut tergambar dalam bentuk undang-undang, keputusan presiden hingga peraturan daerah. Oleh sebab itu diperlukan sebuah rumusan baru mengenai kebijakan ekonomi yang efektif, efisien, berdaya saing dan mendorong kemandirian ekonomi. Dengan demikian nantinya, restrukturisasi ini untuk memperkuat kemandirian ekonomi, mengurangi dependensi dan meningkatkan interdependensi resiprokal

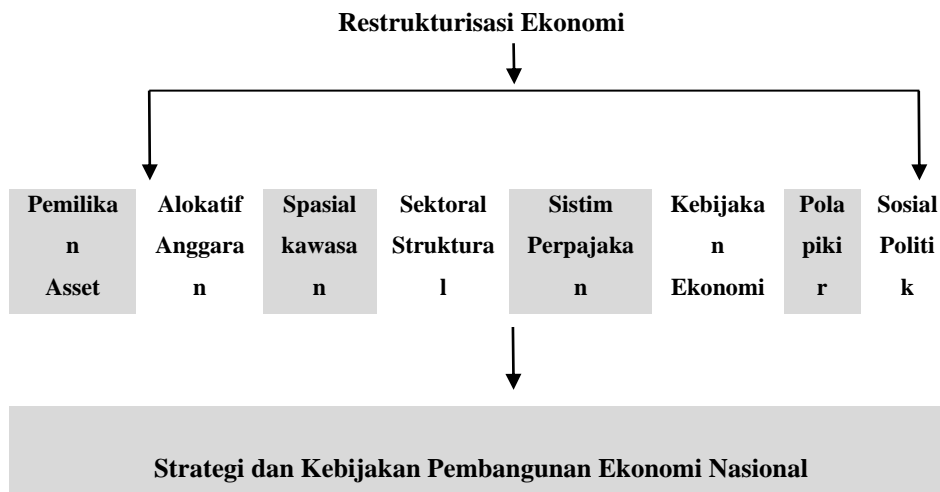
yang seimbang dan diperlukan untuk memperkuat fundamental ekonomi. Dengan restrukturisasi yang bersifat strategis ini perekonomian nasional diarahkan untuk berakar di dalam-negeri dan menjadi *people-centered dan resources-based*.

Ketujuh, restrukturisasi pola-pikir atau reorientasi budaya. Salah satu yang menyebabkan “terjerembab” nya pembangunan nasional ke arah liberalisme dan kapitalisme adalah adanya pengaruh pendidikan, pemikiran neoklasikal dan paham liberalisme serta budaya yang dibawa oleh segelintir pengambil kebijakan dalam menyusun perekonomian nasional, sehingga melupakan akar dan karakter demokrasi ekonomi yang ada. Setiap rencana pembangunan baik yang bersifat jangka pendek (RPJP), jangka menengah (RPJM) maupun jangka panjang (RPJP), harus berorientasi kepada pembangunan ekonomi bagi seluruh masyarakat, orientasi ke arah lebih banyak membuka akses akan hak-hak rakyat dan mengembangkan perekonomian rakyat melalui sistem ekonomi berdasar demokrasi ekonomi.

Kedelapan, restrukturisasi sosial-politik dan sosial-budaya. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari peran sentral kondisi sosial dan budaya sebuah bangsa, bahkan bisa saling memperkuat diantaranya. Oleh sebab itu, restrukturisasi ekonomi ini tidak akan sepenuhnya bermanfaat apabila tidak didukung oleh restrukturisasi di bidang sosial-politik dan sosial-budaya. Restrukturisasi sosial-politik menyangkut demokratisasi politik dan peran masyarakat madani. Restrukturisasi sosial-budaya menyangkut upaya mengubah mindset, melakukan unlearning terhadap pakem-pakem usang, khususnya restrukturisasi dan demokratisasi pendidikan rakyat.

Bagan 5.4
Strategi Transformasi Ekonomi





3. Strategi dan Kebijakan Pembangunan

Dalam pembahasan terdahulu telah cukup detail dikupas mengenai dasar-dasar penyusunan demokrasi ekonomi dan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya, yang sesuai dengan sifat dan karakteristik kepribadian bangsa. Selain itu, juga telah ditelaah keberadaan salah satu klausul penting dalam konstitusi negara, yaitu Pasal 33 UUD 1945 yang telah memberikan ruang dan kekuatan makna dalam melaksanakan tugas penting agar proses transformasi ekonomi dan transformasi sosial terus dilakukan.

Segala upaya untuk mengembalikan arah dan kebijakan perekonomian nasional agar sejalan dengan konsepsi dasar demokrasi ekonomi harus terus dilakukan, agar perekonomian nasional tidak menjauh atau terlepas dari identitas dan karakteristik yang dimilikinya. Dinamika perkembangan ekonomi Internasional telah mengarah kepada proses integrasi yang sangat dipengaruhi oleh paham dan kepentingan liberalisasi dan globalisasi ekonomi yang bersumber dari paham dan pemikiran neoklasikan ekonomi.

Tahapan berikutnya dalam proses transformasi ekonomi adalah menyusun dan membuat kebijakan-kebijakan ekonomi yang sesuai dan sejalan dengan gagasan dasar dan pola transformasi ekonomi yang telah disusun. Namun sebelum mengarah kepada penyusunan strategi kebijakan ekonomi dan pembangunan, ada sejumlah hambatan dasar yang mesti terlebih dahulu diselesaikan. Sri Edi Sri-Edi Swasono dalam tulisannya *Kemandirian Ekonomi: Menghapus Sistim Ekonomi Subordinasi Membangun Ekonomi Rakyat*, mengungkapkan bahwa

proses transformasi ini tidak akan bisa dilakukan apabila beberapa butir masalah yang akan menghambat proses penyusunan strategi kebijakan ekonomi dan pembangunan harus diselesaikan terlebih dahulu, antara lain: (1) Menghilangkan paham tentang asas perorangan dengan paradigma individualisme dan liberalisme yang mengutamakan kepentingan individu (*self-interest economics* yang berpedoman *free-competition* dan *market fundamentalism*); (2) Menghidupkan kembali paham tentang asas kebersamaan dan kekeluargaan berdasar paham kerakyatan dan demokrasi ekonomi, di mana kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-perorang dengan tidak mengabaikan hak orang-perorang; (3) Mengembalikan peran dan tugasnya sebagai *agent of development* dan *agent of reformation* dalam mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural, dengan melakukan proses transformasi ekonomi dan sosial (4) Mewaspadaai paham liberalisasi dan globalisasi dengan ide pasar-bebas dan *boderless world*-nya, karena diyakini hanya akan menguntungkan negara-negara maju semata.

Dalam menyusun strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional, haruslah berdasarkan kepada kebutuhan rakyat yang terdapat didaerah tersebut. Oleh sebab itu proses penyusunan dan perumusan strategi dan kebijakan pembangunan harus mampu menyerap aspirasi dan kebutuhan rakyat di daerah. Hal tersebut di sebabkan karena terdapat kaitan dengan kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. Dengan demikian diharapkan akan sesuai dengan peruntukannya.

Seperti dikemukakan di atas, kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamakan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi nasional kita berlaku demokrasi ekonomi, yang tidak menghendaki otokrasi ekonomi, sebagaimana pula demokrasi politik menolak otokrasi politik. Artinya kepentingan rakyat banyak tetap diutamakan dalam merancang dan menjalankan program-program pembangunan.

Konsep dan strategi pembangunan ekonomi yang lebih mengutamakan terhadap kepentingan rakyat sebenarnya sangat jelas, titik-tolaknya adalah mengabdikan rakyat, bukan mengabdikan ilmu semata-mata. Ilmu harus bisa ditawarkan dengan misi. Ilmu yang kita kuasai kita kembangkan dan kita abdikan kepada rakyat dan kepentingannya. Pemihakan (altruisme) saja kepada ekonomi rakyat tidaklah cukup, kita harus meyakini pula bahwa ekonomi rakyat memiliki kekuatan

sebagai strategi pembangunan. Dengan demikian rakyat akan berdaya, bisa ikut berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses pembangunan.

Ekonomi rakyat adalah riil dan konkrit. Selama ini aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh rakyat telah memberikan penghidupan bagi rakyat sendiri, konsumsi yang mereka lakukan telah menjadi kontribusi tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan pada saat kawasan regional dan internasional terkena krisis ekonomi, ekonomi rakyat tersebut tampil sebagai penyelamat perekonomian domestik, melalui pertanian rakyat, perkebunan rakyat, perikanan rakyat, tambak rakyat, pelayaran rakyat, kerajinan rakyat, industri rakyat, penggalian rakyat, pertambangan rakyat, pertukangan rakyat, pasar-pasar rakyat. Aktifitas ekonomi rakyat tersebut, telah menopang perekonomian nasional dari krisis, perekonomian rakyat tersebut sepenuhnya menggunakan bahan baku lokal, sehingga tidak memiliki ketergantungan terhadap bahan baru impor.

Begitu pula perekonomian rakyat yang berbasis komoditi seperti kopra rakyat, kopi rakyat, karet rakyat, cengkeh rakyat, tembakau rakyat, yang menjadi penyangga bagi industri prosesing di atasnya. Ini semua memberikan lapangan pekerjaan dan sumber kehidupan yang sangat luas kepada masyarakat. Membangun ekonomi rakyat adalah membangun usaha-usaha rakyat yang riil seperti tersebut di atas. Namun pemihakan saja kepada ekonomi rakyat tidaklah cukup. Kita harus meyakini pula bahwa ekonomi rakyat memiliki peran dan kekuatan sebagai *strategi pembangunan*.

Tahapan penting dalam proses transformasi ekonomi dan sosial adalah memiliki strategi dan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, berorientasi kepada demokrasi ekonomi yang mengutamakan kepada asas kebersamaan dan kekeluargaan. Makna sebagai strategi pembangunan itu, antara lain. Pertama, mendorong rakyat yang secara partisipatif-emansipatif berkesempatan aktif dalam kegiatan ekonomi. Hal tersebut akan lebih menjamin nilai-tambah ekonomi optimal yang mereka hasilkan dapat secara langsung diterima oleh rakyat. Pemerataan akan terjadi seiring dengan pertumbuhan. Kedua, memberdayakan rakyat merupakan tugas nasional untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga rakyat lebih secara konkret menjadi aset aktif pembangunan. Subsidi dan proteksi kepada rakyat untuk membangun diri dan kehidupan ekonominya merupakan investasi ekonomi nasional, merupakan *human investment* (bukan pemborosan atau *inefficiency*) dan mendorong tumbuhnya kelas menengah yang berbasis *grassroots*.

Ketiga, pembangunan ekonomi rakyat meningkatkan daya-beli rakyat yang kemudian akan menjadi energi rakyat untuk lebih mampu membangun dirinya sendiri (*self-empowering*), sehingga rakyat mampu meraih “nilai-tambah ekonomi” dan sekaligus “nilai-tambah sosial” (nilai-tambah kemartabatan). Keempat, pembangunan ekonomi rakyat sebagai pemberdayaan rakyat akan merupakan peningkatan *collective bargaining position* untuk lebih mampu mencegah eksploitasi dan subordinasi ekonomi terhadap rakyat. Kelima, dengan rakyat yang lebih aktif dan lebih produktif dalam kegiatan ekonomi maka nilai-tambah ekonomi akan sebanyak mungkin terjadi di dalam negeri dan untuk kepentingan ekonomi dalam-negeri.

Keenam, pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyesuaikan kemampuan rakyat yang ada dengan sumber-sumber alam dalam negeri yang tersedia (*factor-endowment* Indonesia) berdasar strategi *resources-based* dan *people-centered*. Ketujuh, pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyerap tenaga kerja. Kedelapan, pembangunan ekonomi rakyat akan bersifat lebih *quick-yielding* dalam suasana ekonomi yang sesak napas dan langka modal. Kesembilan, pembangunan perekonomian rakyat sebagai sokoguru perekonomian nasional akan meningkatkan kemandirian ekonomi dalam-negeri pada ekonomi luar-negeri, akan menekan sebanyak mungkin ketergantungan akan *import-components* dan meningkatkan *domestic-contents* industri dalam-negeri, yang selanjutnya akan lebih mampu menggerakkan pasaran dalam-negeri.

Kesepuluh, pemberdayaan perekonomian rakyat yang akan lebih mampu memperkuat pasaran dalam-negeri yang akan menjadi dasar bagi pengembangan pasaran luar-negeri (ekspor). Kesebelas, dalam globalisasi ini kita harus tetap waspada terhadap paham globalisme yang cenderung menyingkirkan paham nasionalisme. Kepentingan nasional Indonesia harus tetap kita utamakan sebagaimana negara-negara adidaya selalu mempertahankannya pula dengan berbagai dalih ekonomi dan politik. Pembangunan perekonomian rakyat akan menjadi akar bagi penguatan fundamental ekonomi nasional dan menjadi dasar utama bagi realisasi nasionalisme ekonomi. Keduabelas, pembangunan perekonomian rakyat dapat dilaksanakan (*implementable*) tanpa mempergunjingkan ekstremitas positif-negatifnya peran dan mekanisme pasar. Ketiga belas, pembangunan perekonomian rakyat merupakan misi politik dalam melaksanakan demokratisasi ekonomi sebagai sumber rasionalitas dan pemihakan kepada rakyat kecil.

Keempatbelas, satu dekade yang lalu ada ajakan untuk meninjau ulang strategi-strategi pembangunan (*Development Strategies Reconsidered*, Overseas Development Council, 1987) dan ajakan yang mutakhir (*The Frontiers of Development Economics*, Meier & Striglitz, 2001) menegaskan betapa perlu ada *shift of paradigms* dalam pemikiran ekonomi. Perekonomian rakyat memperoleh tempat dalam rekonsiderasi di situ. Lebih dari itu, bagi mereka yang masih mau melepaskan ortodoksi perlu membaca ide-ide lama dan baru mengenai *social market economy*. Kelimabelas, secara keseluruhannya, butir-butir tersebut di atas akan lebih menjamin terjadinya pembangunan Indonesia, bukan sekadar pembangunan *di* Indonesia. Keenambelas, pembangunan ekonomi kerakyatan bertumpu pada *platform* bahwa yang kita bangun adalah rakyat, bangsa dan negara.

Pembangunan ekonomi (GNP) adalah derivat dari *platform* ini, tidak terlepas dari pembangunan rakyat, bangsa dan negara. Ketujuhbelas, dalam kenyataan, ekonomi rakyat telah menghidupi sebagian terbesar dari rakyat Indonesia, di tengah-tengah pasang-surutnya sektor perekonomian formal-modern, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Kesemuanya mendukung percepatan upaya melaksanakan transformasi ekonomi dan transformasi sosial.

Gerakan Koperasi Internasional (ICA), ILO dan Setjen PBB justru sedang menegaskan ulang tentang pentingnya koperasi untuk memajukan *grassroots economy*, khususnya ekonomi rakyat. Bahkan Konvensi PBB 2001 (sebagai hasil Sidang Umum-nya) menetapkan pula koperasi sebagai wadah *grassroots economy* di seluruh dunia perlu didorong maju berkat tiga prestasi utamanya yang telah dibuktikan, yaitu dalam (1) memberantas kemiskinan; (2) menciptakan lapangan kerja secara substantif; dan (3) memperkuat integrasi sosial (yang artinya memperkuat solidaritas sosial).

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Manna>n, Muh}ammad. “The Behaviour of Firm and Its Objectives in an Islamic Framework.” dalam Syyed Taher, *Readings in Microeconomics: an Islamic Perspective*. Malaysia: Longman, 1992.
- Ackerman, Frank, et al. *The Political Economy of Inequality*. Washington DC: Island Press, 1998.
- Afza>l al-Rah}ma>n. *Economic Doctrines of Islam, Edisi Indonesia. Doktrin Ekonomi Islam*. Terj. Suroyo Nastangin. Yogyakarta, 1996.
- Ahmad, Ziya> al-Di>n. *Islam, Poverty, and Income Distribution. Lahore: The Islamic Foundation, t.t.*
- Arief, Sritua. *Pemikiran Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Riset Pembangunan, 1983
- Arief, Sritua. *Teori dan Kebijakan Pembangunan Pembangunan*. Jakarta: CIDES, 1998.
- Arief, Sritua. *Bung Hatta Bapak Ekonomi Rakyat*. Surakarta: UMS-Press, 2002.
- Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : STIE YKPN BPFE, 1997.
- Asian Development Outlook, 2010 Economic Outlook, 2010.
- Asian Development Bank. The annual Asian Development Outlook Provides
- A Comprehensive Economic Analysis of 45 Economies in Developing Asia and the Pacific. ADB, 2010.
- Ayyash, M. Saleh Ali. “Shari’ah Alternatives to non-Shari’ah Elements in Modern Commodity Futures Trading.” *The proceedings of the International Conference on Islamic Capital Markets* Vol. I, Jakarta (August 2007).
- Babbie, Earl. *The Practice of Social Research*. Boston: Wadsworth Publis}ing Company, 1998.
- Bank Indonesia. *Kerangka Kerja Kebijakan Moneter*. Jakarta: BI, 2005.

- Laporan Perekonomian Indonesia 2007. Jakarta: BI, 2007.
- Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2006. Jakarta: BI, 2006.
- Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2007. Jakarta: BI, 2007.
- Baran, Paul. *The Political Economy of Growth*. New York: Pelican Book, 1968.
- Baqir, Al-Hasani and Mirakhoi Abbas. *Essay on Iqtis}a>d: The Islamic Approach to Economic*. 1989.
- Barro, R. J. "Human capital and growth." *The American Economic Review*, 91(2001):12–17. Papers and Proceedings of the Hundred Thirteenth Annual Meeting of the American Economic Association.
- Barro, R. J. and McCleary, R.M. "Religion and economic growth across countries." *American Sociological Review*, 68(2003):760–781.
- Barry, Gordon. *Economic Analipsis Before Adam Smith: Hesiod to Lessius*. London: Macmillan, 1975.
- Bas}ar, Muh}ammad Lawal Ah}mad. "Price Control in an Islamic Economy." *Journal of King Abdul Aziz University: Islamic Economics* 9 (1997): 48-49.
- Beckmann, M. J. "The limits to growth in a neoclassical world." *American Economic Review*, 65(1975):695–99.
- Baswir, Revrison. *Dibawah Ancaman IMF*. Yogyakarta: Pelajar, 2003
- Blyth, Mark. *Great Transformations*. Oxford: Cambridge University Press, 1995.
- Budiman, Arief. *Teori Pembangunan dan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

- Cavanagh, John dan Jerry Mander (eds). *Alternatives to Economics Globalization: A Better World is Possible*. San Fransisco: Berret-Koehler, 2004.
- Capra, Fritjof. *The Tao of Physics by Fritjof Capra* (New York: Shambhala Pubns, 2000.
- Case, Karl E. and Ray C. Fair. *Principles of Economics*, terj Benjamin Molan. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Prenhallindo, 2002.
- Chapra, Umar. *The Fututre of Economics: an Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- , *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation and the International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Colander, David C.. *Microeconomics*. New York: McGraw-Hill, 2004. 161
- Damanhuri, Didin S.. *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*. Bogor: IPB Press, 2010.
- Cato, M. S. *Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice*. London: Earthscan, 2009.
- De Soto, Hernando. *The Mystery of Capital*. New York: Basic Book, 2000
- Domar, E. "Capital expansion, rate of growth and employment." *Econometrica*, 14(1946):137– 147.
- Etzioni, Amitai. *The Moral Dimension: Toward a New Economics*. New York: The Free Press, 1998.
- Etzioni, Amitai. *The Limits of Privacy*. New York: Basic book, 1999.
- England, R. W. "Natural capital and the theory of economic growth." *Ecological Economics*, 34(2000):425 – 431.
- Frank, Robert. *Microeconomics and Behavior*. New York: MC Graw Hill, 1994.
- Frank, Robert H. and Ben S. Bernanke. *Principles of Micro Economics*. New York: McGraw-Hill, 2004.

- Friedman, Thomas L. *The Lexus and The Olive Tree: Understanding Globalization*. New York: Anchor Books, 2001.
- Friedman, Thomas L. *The World is Flat: The Globalized World in The Twenty – First Century*. New York: Anchor Books, 2006.
- Galbraith, John Kenneth. *The Culture of Contentment*. Boston: Houghton Mifflin, 1992.
- George, Susan. *The Lugano Report: On Preserving Capitalism in the Twenty-first Century*. Amsterdam: Pluto Press, 1999.
- Giddens, Antony. *Jalan Ketiga/The Third Way*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- Greenfeld, Leah. *The Spirit of Capitalism: Nasionalism and Economics Growth*. Cambridge: Harvard University Press, 2001.
- Harvey, David. *A Brief History of Neoliberalismeism*. New York: Oxford University Press, 2005.
- Hasan, Abdullah Alwi. *Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law*. Edinburg: University of Edinburg, 1986.
- Al-Hasani, Baqir and Abbas Mirakhor, *Essays on Iqtisad: The Islamic Approach to Economic Problem*. USA: 1989.
- Hatta, Mohammad. *Indonesia Merdeka*. Yogyakarta: Pustep-UGM, 2005
- Hatta, Mohammad. *Teori Ekonomi, Politik Ekonomi dan Orde Ekonomi*. Jakarta: Tintamas, 1967.
- Hatta, Mohammad. *Membangun Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.
- Haq, Mahbub ul. *Employment and Income Distribution in the 1970's*. Islamabad: Hyderabad, 1971.
- Hendra, Esmara. 1995. "Regional Income Disparities". *Bulletin of Indonesia Economic Studies*. Vol.XI No. 1.
- Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilization and The Remarking of world Order*. New York: Oxford University Press, 1999
- Homer, Sidney and Richard Sylla. *A History of Interest Rates*. London: Rutgers University Press, 1998.

- Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kahf, Monzer. *The Islamic Economy: Analitical Study of the Foundationing of Islamic System*. Indiana: MSA of USA and Canada, 1978.
- Kansil dan Christine. *Kitab Undang-undang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Pradya Paramita, 2001.
- Karim, Adiwarmam. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Kartasasmita, Ginandjar. "Mewujudkan Demokrasi Ekonomi dengan Koperasi." disampaikan pada Diskusi Nasional ICMI (27 Desember 2007): 7.
- Kaulla, Rudolf. *Die Geschichtliche Der Modernen Werttheorien*. Tubingen: Lauppsche Buchhandlung, 1906.
- Khan, Muhammad Akram. *Economic Teaching of Profet Muhammad*. Islamabad: IIIIE & IPs, 1989.
- . "The Role of Government in the Economy" *The American Journal of Islamic Social Science* Vol. No. 2 (1997).
- Krugman, Paul. *The great Unraveling: Losing Our Way in The New Century*. New York: W.W. Norton & Company, 2003
- Kuncoro, Mudrajad. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997.
- Madjid, Abdul dan Sri Edi Sri-Edi Swasono (eds.), *Wawasan Ekonomi Pancasila*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Mankiw, N. G., Romer, D., and Weil, D. N. "A contribution to the empirics of economic growth." *Journal of Economics*, 107(1992): 407–438.

- Miller, Roger Leroy and Roger E. Meiners. *Intermediate Microeconomics Theory, Issues, Application*. terj. Haris Munandar. *Teori Ekonomi Mikro Intermediate*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994.
- Mirakhor, Abbas, "Equilibrium in a Non-Interest Open Economy." *Journal of King Abdul Aziz University* 5 (1993): 20.
- Mubyarto. "Moral Ekonomi Pancasila." *Prisma*, 1 (1981)
- Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Yayasan Agro-Ekonomika, 2001.
- Myrdal, Gunnar, *Economics Theory and Under-Developed Regions*. London: Gerald Duckworth, 1957.
- Myrdal, Gunnar. *Beyond The Welfare State*. New Haven: Yale University Press, 1960.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. terj. M. Sayf al-Anam dan Muhammad Ufuq al-Mubidin dari Islam, *Economics and Society*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Nasution, Anwar, *Financial Institution and Policies in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 1983. Nasution, Muslimin. *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi dengan Koperasi*. Jakarta: PIP Publishing, 2007.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Perkins, John, *Confession of an Economics Hit Man*. San Fransisco: Barrett-Koehler Publisher, 2004.
- Petras, James dan Henry Veltmeyer. *Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century*. New York : Zed Books, 2001.
- Polanyi, Karl. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press, 2001.
- Rahardja, Muhammad Dawam. *Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Filsafat dan Agama, 1999.
- Rahardjo, M. Dawam. *Demokrasi Ekonomi dalam Alam Liberalisasi Ekonomi*. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Manajemen (PPM) FE UII, 1997.

- Ramli, Rizal dkk. *Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara WacanaYogya, 1997.
- Rodrik, Dani. "Trade Liberalization in Developing Countries: Do Imperfect Competition and Scale Economies Matter?." *The American Economic Review* vol 97, 2007: 283
- Salim, Emil. *Sistim Ekonomi dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional, MIPI, 1965
- Samuelson, Paul A. and William D. Nordhaus. *Economics*. New York: McGraw- Hill, 2005.
- Schumpeter, Joseph. *History of economic Analysis*. New York: Oxford University Press, 1972.
- Smith, Adam. *An Inquiry into Nature and Causes of the Wealth of Nation*. With Introduction by Andrew S. Skinner. London: Penguin Books, 1997.
- Smith, Adam, *An Inquiry into the Nature Causes of The Wealth of Nation*. New York: Arlinton House, 1996.
- Smith, J.W.. *Economic Democracy: The Political Struggle of the Twenty-First*. New York: M.E. S}arpe, 2000.
- Sen, A. *On Ethics and Economics*. Oxford: Basil Blackwell, 1991.
- Solow, R. M. "A contribution to the theory of economic growth." *The Quarterly Journal of Economics*, 70 (1956):65–94.
- Soros, George. *The Crisis of Global Capitalism*. New York: Public Affairs, 1998.
- Spiegel, Henry William. *The growth of economic thought*. USA: Library of Congress Cataloging -in- Publication Data, 2002.
- Stiglitz, Joseph Eugene. *Globalization and ith discontenth*. New York: W.W Norton & Company, 2002.
- Stiglitz, J. E. "Growth with exhaustible natural resources: Efficient and optimal growth paths." *Review of Economic Studies*, 41 (1974):123–138.

- Sri-Edi Swasono, Sri Edi. “Tingkatkan Pengawasan Perdagangan.” Surat Kabar Harian Kompas, 28 Januari 2010.
- . Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila, 2005.
- . Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan: Mutualism and Brotherhood. Jakarta: UNJ-Press, 2005.
- . “ASEAN-China Free Trade Agreement: Learn to Fight-not Learn to Surrender.” Jurnal Ekonomi Rakyat 102 (07-04-2010). http://www.ekonomirakyat.org/_artikel.php?id=1.
- . Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010.
- . “Sistem Jaminan Sosial Nasional UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.” Testimoni Sri-Edi Sri-Edi Swasono sebagai Ahli terhadap UU No. 40 Tahun 2004 (SJSN) di Depan Mahkamah Konstitusi (16 Maret 2011): 5.
- . Kembali ke Pasal 33 UUD 1945: Menolak Neoliberalisme. Jakarta: Yayasan Hatta, 2010.
- . “Mendesain Masa Depan Indonesia: Mempertahankan Cita-cita Nasional Berdasar Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan.” Saresehan “Dialog antar Generasi: Apa dan Mau ke Mana” Universitas Indonesia, Depok (14 Maret 2011): 6.
- . “Kelengahan Kultural dalam Pemikiran Ekonomi: Neoliberalisme Adalah Penjajahan Baru.” Bahan Kuliah-Bagian IV Mata Kuliah Sistem Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2011): 10.
- . “Testimoni Sri-Edi Sri-Edi Swasono terhadap UU No. 38 Tahun 2008 tentang ASEAN Charter.” Testimoni Sri-Edi Sri-Edi Swasono sebagai Ahli dalam Judicial Review terhadap UU No. 38 Tahun 2008 di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi RI (22 Juli 2011): 19.
- . Kelengahan Kultural dalam Pemikiran Ekonomi: Pancasila , Humanisme , Pasal 33 UUD 1945, Kooperativisme Menolak

- Neoliberalisme. Seminar membedah wawasan baru, UNPAS, Badung, 19 Juli 2011.
- Todaro, Michael P. *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga, 1990.
- Thee Kian Wie. *Perekonomian di Negara Berkembang*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1982.
- Thurow, Lester C.. *Creating Wealth : The New Rules for Individual, Companies and Countries in a Know-ledge Based Economy*. London: Nicholas Brealy, 2000.
- Varian, R.. *Intermediate Microeconomics a Modern Approach*. New York: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2003.
- Wanandi, Sofyan. "Antara Ancaman,Tantangan dan Peluang." *Majalah Sharing*, Edisi Maret 2010.
- Widiyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Yusuf, S. M.. *Economic Justice in Islam*. Lahore, 1971. Zarqa>, Muhammad Anas. "Modern Non-Competitive Marketh between Fiqh and Economic Analysis." *Journal of King Abdul Aziz University* (2006): 28-30.
- Vadillo, 'Umar. *The Architecture of the Gold Dinar Economy: An Academic Perspective*. Proceedings of 2002 International Conference on Stable and Just Global Monetary System. 19-12 August 2002, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Vadillo, 'Umar. *The End of Economics an Islamic Critique of Economics*. Granada: Madinah Press, 1991.
- Vadillo, 'Umar. *The Return of Islamic Gold Dinar*. Cape Town: Madinah Press, 2002.
- Vogel, Frank E. and Samuel L. Hayes. *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*. London: Kluwer Law International, 1998.

Zarqa>, Muhammad Anas. “Modern Non-Competitive Marketh between Fiqh and Economic Analysis.” Journal of King Abdul Aziz University (2006): 28- 30.

GLOSSARY

ACFTA

ASEAN-China Free Trade Agreement (Perjanjian Perdagangan Bebas negaranegara ASEAN dengan China.

Alokasi

Suatu proses di mana sumber daya ekonomi dibagi menurut pelbagai penggunaannya yang secara langsung atau tidak langsung memenuhi keinginan manusia.

Barter

Perdagangan benda atau jasa secara langsung untuk memperoleh benda atau jasa lain, tanpa menggunakan uang atau unit sejenis maupun media pertukaran lainnya.

D{a{aru>r>riyyah

Tujuan mendasar terciptanya kesejahteraan di dunia dan akhirat, yaitu mencakup terpeliharanya lima elemen dasar kehidupan, yaitu jiwa, keyakinan, intelektual, keturunan, dan harta

Deflasi

Kebalikan dari inflasi, yaitu suatu penurunan tingkat harga umum dalam suatu kurun waktu. Deflasi biasanya diukur dengan presentase tahunan kenaikan atau penurunan indeks harga beberapa barang dan jasa yang besar dan refresentatif (barang konsumsi dan produksi) yang umum diperdagangkan dalam suatu perekonomian.

Defresi

Suatu siklus periode kemerosotan perekonomian nasional yang ditandai dengan menurunnya tingkat aktivitas bisnis temporer di hampir seluruh sektor ekonomi. Akibatnya terjadi penurunan Produk Domestik Bruto/PDB (Gross Domestic Product/GDP, semakin tingginya tingkat pengangguran, kenaikan jumlah perusahaan yang bangkrut, dan (dalam kasus yang sangat parah) penurunan tingkat harga umum (deflasi).

Deregulasi

Upaya pengurangan/peniadaan aturan administratif yang mengekang kebebasan gerak modal, barang, dan jasa.

Edgeworth

Model yang dibangun dari penggabungan dua panel konsumen yang berbagi dua produk

Ekonomi Pasar

Suatu perekonomian di mana segenap sumber daya terbatas dialokasikan melalui proses penawaran dan permintaan yang saling terkait dalam pasar, yang nyaris tidak dibatasi pemerintah dalam pendistribusian, penetapan harga atau campur tangan lainnya.

Empowerment

Sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum berbagai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat “people centered, participatory, empowering, and sustainable”

FTA

Free Trade Agreement (Perjanjian Perdagangan Bebas) Gharar

Melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya

Government failure

Kegagalan pemerintah dalam mengatur keseimbangan pasar

Gross Domestic Product (GDP)/Produk Domestik Bruto (PDB)

Suatu perkiraan total nilai uang dari seluruh barang atau jasa final yang diproduksi dalam setahun dengan menggunakan faktor-faktor produksi dalam batas-batas suatu negara.

Gross National Product (GNP)/Produk Nasional Bruto (PNB)

Suatu perkiraan total nilai uang dari seluruh barang atau jasa final yang diproduksi dalam setahun dengan menggunakan faktor produksi yang dimiliki warga suatu Negara tertentu. Yang dimaksud dengan barang dan jasa “final” adalah barang

dan jasa yang dijual atau tersedia bagi konsumen akhir. Kategori ini dimaksudkan untuk menghindari perhitungan ganda. Misalnya nilai baja yang dijual ke General Motor guna membuat mobil tidak dijumlahkan secara terpisah ke dalam PNB atau PDB, karena nilainya telah ditambahkan ke dalam harga penjualan mobil yang dijual pada konsumen.

Hukum Penawaran (Law of Supply)

Apabila hal-hal lain konstan, semakin tinggi harga barang atau jasa, semakin besar jumlah barang atau jasa yang ditawarkan untuk dijual dalam kurun waktu tertentu.

Hukum Permintaan (Law of Demand)

Apabila hal-hal lain konstan, semakin rendah harga barang atau jasa tertentu, semakin besar permintaan atas barang atau jasa tersebut, dan sebaliknya.

Hukum Produktivitas Berkurang (Law of Diminishing Returns)

Hukum ini merupakan generalisasi yang dibuat para ekonom berkenaan dengan sifat dasar teknologi yang memungkinkan terjadinya kombinasi faktor-faktor produksi yang sama dalam proporsi yang berbeda untuk menghasilkan produk yang sama. Atau dengan kata lain, jika dalam proses produksi terjadi peningkatan faktor produksi tertentu sementara jumlah factor produksi lainnya tetap, maka setelah beberapa saat akan mengakibatkan berkurang dan semakin berkurangnya pertambahan output produksi.

Hoarding

Menahan atau menimbun (hoarding) barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari

IMF

International Moneter Fund

Inflasi

Kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung dalam periode tertentu. Inflasi biasanya diukur dengan bobot indeks harga

barang dan jasa yang besar dan representatif (baik itu barang barang konsumtif maupun primer) yang umum diperdagangkan pada perekonomian yang bersangkutan. Istilah tersebut mengacu secara lebih khusus pada peningkatan uang beredar yang tersedia dalam perekonomian tertentu. Dan umumnya menimbulkan konsekwensi kenaikan tingkat harga secara umum.

Invisible hand

Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith untuk menggambarkan alam kekuatan yang membimbing pasar bebas melalui kompetisi untuk sumber daya yang langka..

Kapitalisme

Suatu tatanan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan alat-alat produksi secara pribadi, dan kebebasan menggunakannya secara pribadi, serta membeli dan menjual properti atau jasa dalam pasar dengan harga dan kondisi yang disepakati. Keseluruhan proses terjadi dengan keterlibatan yang sangat minim dari negara atau kelompok ketiga yang berwenang.

Kartel

Suatu organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok perusahaan, yang menghasilkan dan menjual produk yang sama dengan tujuan mendapatkan dan berbagi keuntungan monopoli. Tujuan tersebut dicapai dengan membatasi produk, kemudian menaikkan harga di atas level sehingga unggul dalam kompetisi dengan perusahaan lain.

Kegagalan Pasar (Market failure)

Suatu istilah yang digunakan dalam ilmu ekonomi untuk menjelaskan suatu kondisi dimana barang dan jasa yang disediakan oleh pasar tidak mampu dialokasikan secara efisien

Keseimbangan Pasar (Market equilibrium)

Suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Ketika harga mencapai keseimbangan, jumlah barang yang ingin dibeli konsumen sama dengan jumlah barang yang ingin diproduksi atau dijual produsen.

Kontrol Harga (Price Control)

Suatu bentuk intervensi pemerintah dalam sektor ekonomi melalui penggunaan wewenang lembaga pemerintah untuk meregulasi harga, yang jika tidak diatur, akan ditentukan oleh harga bebas.

Laissez faire

Istilah Prancis yang berarti “biarkan”. Doktrin liberal klasik (dan libertarian modern) menyebutkan bahwa tuntunan terbaik bagi urusan masyarakat, adalah keputusan individu yang bebas dan otonom serta nyaris tanpa campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dengan kata lain, suatu doktrin di mana pemerintah seharusnya senantiasa tidak mencampuri kehidupan masyarakat. Juga membiarkan individu melakukan sesuatu sebagaimana yang diinginkan, asalkan menghargai orang lain dan tidak melanggar hak kepemilikan.

Liberalisme

Cara pandang atau ideologi politik abad ke-19 yang dihubungkan dengan dukungan kuat terhadap kebebasan sipil dalam arti luas untuk berekspresi, toleransi beragama, keterlibatan luas masyarakat dalam proses politik, dan pencabutan hukum proteksionis yang menghambat berjalannya perekonomian pasar bebas kapitalis. Di abad ke-20, istilah ini digunakan untuk menggambarkan ideology dengan cara pandang serupa terhadap kebebasan sipil dan topic-topik kebebasan pribadi. Selain juga memberikan dukungan yang lebih besar terhadap peran pemerintah dalam mengatur dan mempengaruhi perekonomian swasta dan pemberian bantuan publik dengan kondisi ekonomi dan social rendah. Namun tidak sampai mendukung sosialisme.

Maysir

Permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut..

Monopoli Murni (Pure monopoly)

Bentuk organisasi pasar di mana terdapat perusahaan tunggal yang menjual komoditi yang tidak mempunyai substitusi sempurna.

Monopoli Alamiah (Natural Monopoly)

Suatu monopoli yang tidak muncul dari intervensi pemerintah di pasar untuk memproteksi perusahaan tertentu dari kompetisi, melainkan dari karakteristik proses produksi tertentu dalam industri dengan kondisi teknologi saat itu. Secara teoritis, monopoli alamiah muncul apabila terdapat skala ekonomi yang sangat besar terhadap permintaan produk industry yang ada. Akibatnya, semakin besar jumlah barang yang dihasilkan pabrik, semakin murah biaya per unit yang dibutuhkan yang dapat menyebabkan level produksi yang lebih dari cukup untuk memenuhi seluruh permintaan pada kawasan tertentu.

Optimal (Optimum)

Keadaan atau kondisi “terbaik” yang dapat terjadi berdasarkan target eksplisit yang dapat dievaluasi secara tepat.

Pajak (Tax)

Uang (atau terkadang barang atau jasa) yang wajib dibayar individu, lembaga, atau kelompok, kepada negara.

Pasar Monopoli

Situasi di mana suatu perusahaan atau individu menghasilkan dan menjual keseluruhan output beberapa barang atau jasa yang tersedia dalam pasar tertentu.

Pasar Monopolistik

Pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak.

Pasar Oligapoli

Pasar oligapoli adalah pasar yang terdiri dari sekelompok kecil perusahaan. Struktur dari pasar oligapoli biasanya terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai sebagian besar pasar –katakanlah 70 persen sampai 80 persen dari seluruh

produksi atau nilai penjualan- 20 persen sampai 30 persen dipegang oleh perusahaan-perusahaan kecil.

Pasar Persaingan Sempurna

Pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogen

Penawaran (Supply)

Kehendak dan kemampuan calon penjual untuk menawarkan pelbagai barang atau jasa dalam jumlah tertentu untuk dijual dalam harganya masing-masing selama periode tertentu.

Pengangguran (Unemployment)

Suatu situasi yang terjadi apabila bagian angkatan kerja ingin bekerja dengan imbalan gaji atau kompensasi yang berlaku saat itu, namun tidak mendapat pekerjaan.

Permintaan (Demand)

Kehendak dan kemampuan masyarakat dalam kawasan dan selama periode tertentu, untuk membeli sejumlah barang atau jasa dengan harga yang beragam.

Pertumbuhan Ekonomi

Bagian dari teori ekonomi yang mencoba menjelaskan (dan memperkirakan) tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara pada kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur sebagai prosentase tingkat pertumbuhan tahunan salah satu kumpulan perhitungan pendapatan nasional utama, seperti Produk Nasional Bruto atau Produk Domestik Bruto (hampir selalu disertai penyesuaian statistik sewajarnya guna mengantisipasi kekeliruan akibat inflasi).

Price taker

Pelaku pasar yang tidak dapat menentukan harga, sehingga dia tunduk terhadap harga yang berlaku di pasar.

Regulasi

Upaya penciptaan aturan administratif yang membatasi kebebasan gerak modal, barang, dan jasa.

Riba>

Secara etimologi berarti penambahan. Sedangkan secara terminologi shar'>i> adalah penambahan tanpa adanya 'iwad}. Secara teknis, maknanya mengacu kepada premi yang harus dibayar si peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok yang disyaratkan sejak awal. Penambahan dari pokok itu disyaratkan karena adanya penangguhan (nasi>'ah).

Safeguard

Tindakan pengamanan yang diambil oleh negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing

Self-correcting and self-regulating

Karakter pasar dalam pandangan penganut neoklasik dan neoliberalisme yang dapat mengatur keseimbangan dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari siapa pun termasuk pemerintah

Sosialisme (Socialism)

Sekelompok ideologi dengan sistem perekonomian yang menekankan bahwa seluruh sumber daya produktif adalah milik pemerintah.

Spesialisasi

Fenomena social perilaku manusia atau organisasi yang mengonsentrasikan kemampuan produktifnya dalam lingkup tugas yang terbatas.

Subsidi

Pembayaran khusus oleh pemerintah kepada satu atau beberapa perusahaan dalam industry tertentu dengan tujuan memungkinkan perusahaan tersebut untuk menjual satu atau beberapa produk mereka dengan harga yang lebih rendah dari

biaya produksinya atau setidaknya dengan harga di bawah harga pasar.

Sumber Daya (Resources)

Seluruh sarana material yang tersedia untuk mencapai tujuan atau target yang diinginkan manusia.

Interest rate swap

Usaha mengurangi tekanan pengaruh fluktuasi bunga akibat dari penggunaan struktur pendanaan yang berbeda

Tadlis

Penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bertransaksi

Tahsi

Tujuan hukum shara' yang menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman.

Talaqqi al-rukba

Perbuatan seseorang dimana dia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar.

Tarif (Tariff)

Suatu pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang diimpor dari luar negeri, yang tidak dikenakan terhadap barang-barang dalam negeri

Thaman al-mithl

Harga yang adil bagi semua pihak yang bertransaksi.

'Uka

Pasar khusus orang-orang Arab Jahiliyah yang terdapat di dalamnya aktivitas jual beli Shi'r. Pasar ini hanya dilakukan orang Arab Jahiliyah dari tanggal 15- 20 Dhu al-Qa'dah.

Unilateral voluntary export restraint

Permintaan suatu Negara terhadap negara lain untuk mengurangi ekspornya secara sukarela.

Utilitas (Utility)

Suatu konsep ekonomi yang mengacu pada tingkat kepuasan, kesenangan, atau keinginan yang terpenuhi dan dirasakan seseorang dengan mengonsumsi sejumlah barang atau jasa pada suatu waktu.

Wila'yat al-mazalim

Lembaga peradilan yang menangani kasus-kasus yang lebih tinggi resikonya seperti mengadili petinggi-petinggi negara

Wila'yat al-qadaya

Lembaga peradilan yang mempunyai peran dalam melakukan proses hukum atau mengadili masyarakat berdasarkan bukti-bukti, saksi, sumpah dan sebagainya.

A

Adam Smith · 7, 14, 22, 24, 26, 28, 43,

77, 200, 212

advokator · 8

Al-Qur'an · 1, 7, 156

Amerika Serikat · 3, 4, 10, 38, 49, 72, 78,

84, 86, 88, 89

Asia · 4, 40, 74, 81, 82, 84, 88, 199

B

Barat · 9, 41, 70, 71, 88, 94, 95, 96, 98,

104, 111, 112, 186, 187, 188, 189, 190

Bruce Greenwald · 2, 3, 84, 85, 97

C

Chapra · 1, 7, 10, 11, 20, 26, 37, 38, 40,
42, 43, 48, 49, 91, 92, 98, 130, 132,
139, 141, 144, 146, 148, 151, 152, 156,
158, 159, 160, 161, 201

D

derivatif · 5, 85, 92

E

Economics · 2, 3, 6, 7, 10, 11, 26, 27, 29,
30, 31, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 48,
49, 50, 53, 74, 78, 84, 85, 92, 95, 96,
97, 98, 102, 103, 130, 131, 132, 138,
142, 143, 145, 146, 147, 148, 151, 152,
156, 158, 159, 160, 161, 197, 200, 201,
202, 204, 205, 207

ekonomi · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85,
86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
110, 111, 113, 127, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 163, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 209, 210, 212,
213, 214, 215, 218

F

Francis Bator · 10, 19

G

George Soros · 10

global · 2, 5, 36, 39, 42, 46, 59, 76, 81, 82,
84, 85, 88, 89, 94, 95, 134, 175, 179,
188

globalisasi · 9

Gunar Myrdal · 6, 137

H

Hatta · 7, 8, 10, 18, 19, 25, 38, 47, 56,
133, 134, 179, 199, 202, 206

homoeconomicus · 8

humanitarian mechanism · 7

I

Indonesia · 7, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 21, 23,
27, 31, 34, 36, 38, 40, 43, 46, 47, 48,
50, 53, 56, 57, 58, 65, 84, 88, 101, 102,
103, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 130,
134, 135, 137, 150, 165, 167, 168, 175,
176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184,
186, 188, 190, 196, 197, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207

internasional · 3, 4, 16, 24, 49, 55, 62, 63,
64, 65, 84, 85, 86, 88, 99, 161, 163,
172, 178, 179, 195

Islam · 1, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 93, 94, 96, 98, 131, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 164,
165, 166, 168, 170, 171, 172, 173, 174,

175, 183, 186, 199, 201, 203, 204, 205,
207

J

Joan Robinson · 6, 45

John Kenneth Galbraith · 10

John Maynard Keynes · 9

Joseph Schumpeter · 2, 95

Joseph Stiglitz · 2, 3, 39, 45, 84, 85, 97

K

kapital · 2, 77, 78, 110, 111, 160

Karl Polanyi · 10

keadilan · 1, 2, 7, 11, 12, 16, 20, 22, 32,
37, 40, 42, 43, 46, 52, 96, 99, 139, 140,
149, 157, 158, 159, 160, 174, 175, 182,
184, 191

kebijakan · 1, 21, 24, 25, 38, 41, 42, 45,
46, 52, 55, 56, 58, 71, 86, 88, 91, 97,
101, 103, 123, 130, 131, 133, 146, 182,
184, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195

Khurshid Ahmad · 2

klasik · 6, 11, 33, 34, 77, 102, 109, 213

konvensional · 1, 5, 7, 25, 48, 49, 51, 52,
77, 87, 140, 141, 142, 143, 167, 176

L

laissez faire · 6, 91

M

mahzab · 6

matematika · 5, 44, 131

Mohamad Hatta · 7

Monzer Kahf · 7, 33, 149, 150

Mubyarto · 8, 9, 19, 27, 38, 75, 102, 204

N

nasionalisme · 6, 197

Neoklasik · 6, 7, 25, 39, 55, 102, 130

neoklasikal · 1, 2, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30,
32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 55, 56,
61, 62, 76, 77, 91, 102, 104, 106, 130,
131, 133, 138, 147, 151, 184, 191, 192

Neoliberalisme · 8, 9, 39, 55, 61, 62, 63,
132, 206, 207

O

otoritas · 2, 88, 165

P

paradigma · 6, 16, 20, 21, 22, 28, 37, 38,
39, 50, 51, 52, 53, 55, 71, 73, 74, 97,
132, 133, 137, 139, 140, 144, 147, 154,
172, 183, 194, 210

Paul Baran · 10

perekonomian nasional · 8, 9, 47, 73,
107, 133, 179, 182, 183, 184, 186, 189,
191, 192, 193, 195, 196, 209

positivisme · 6, 37, 147

R

realisme · 6, 152

Robert Kuttner · 5, 6, 10, 19, 39, 45

S

self-regulating · 10, 14, 216

sosial · 1, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 25, 28, 32, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47,

50, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 69, 70, 71,
73, 98, 99, 104, 105, 113, 127, 130,
131, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 140,
142, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
164, 168, 169, 173, 174, 175, 179, 180,
182, 184, 186, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 210

Sri-Edi Swasono · 5, 8, 9, 10, 12, 13, 19,
25, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 43,
45, 46, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 104, 105, 113, 130, 132, 133, 134,
135, 136, 139, 151, 180, 188, 194, 203,
206

Sritua Arief · 8, 9, 19

Stiglitz · 99, 101, 102

swasono · 224

T

Thurow · 99, 103

Timur · 9, 49, 88, 104, 111, 112, 117, 190

U

Umer Chapra · 10, 42, 92, 130, 132

universal · 7, 74

Z

Ziya>' al-Di>n Ah}mad · 98